



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

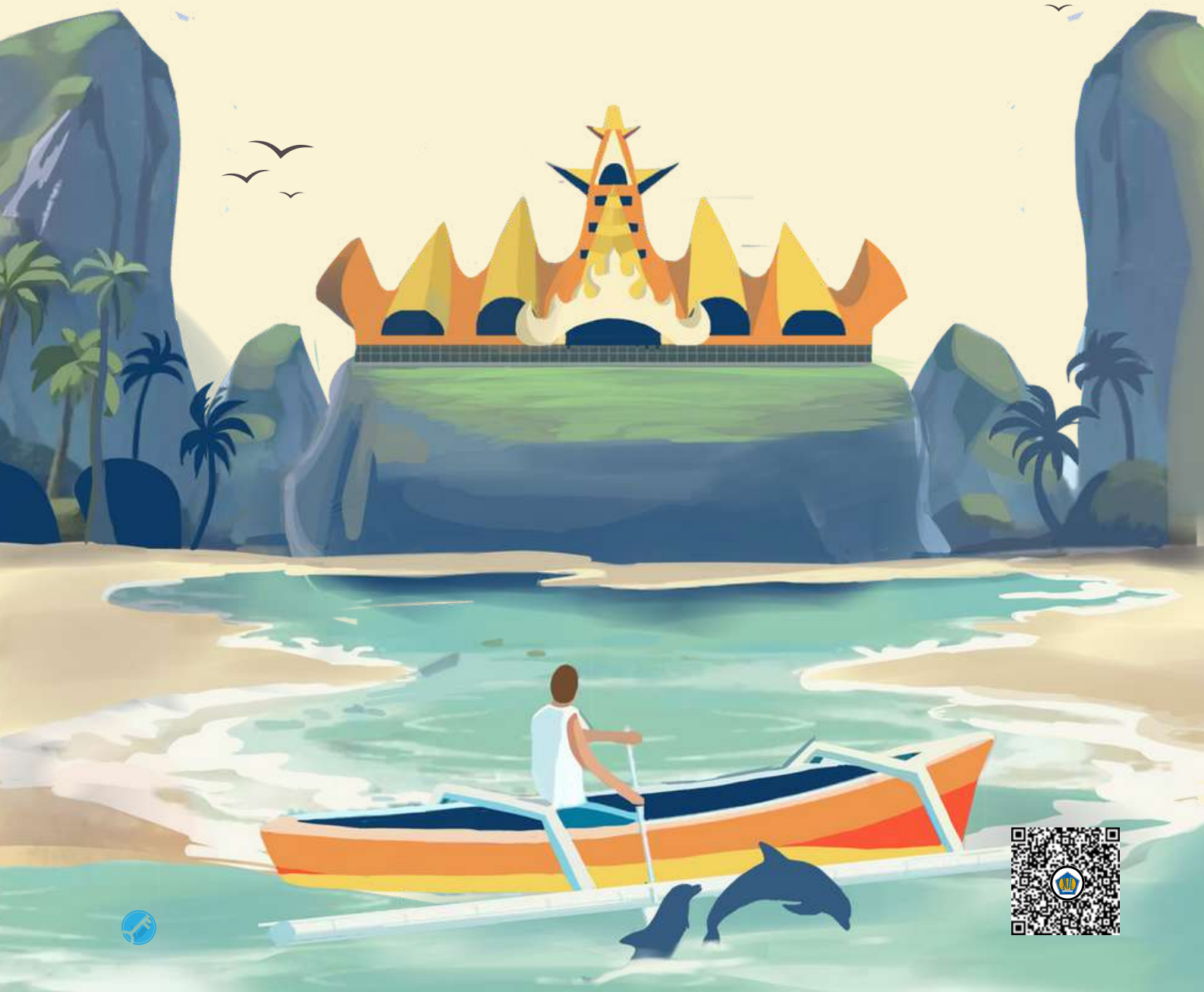


KAJIAN FISKAL REGIONAL

PROVINSI LAMPUNG

Tahun 2023

Kanwil DJPb Provinsi Lampung



TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Mohammad Dody Fachrudin

Ketua Tim

Farhan Fatnanto

Koordinator

Gwen Adhitya Amalkhan

Ponco Priyono

Ahmad Sapriannoor

Anggota

Silvi Yuniar

Aulia Resta Nuryantie

Romadhona Puspita Sari

Yossi Yulita

Edwin Hayadi

Lily Radhiya Ulfa

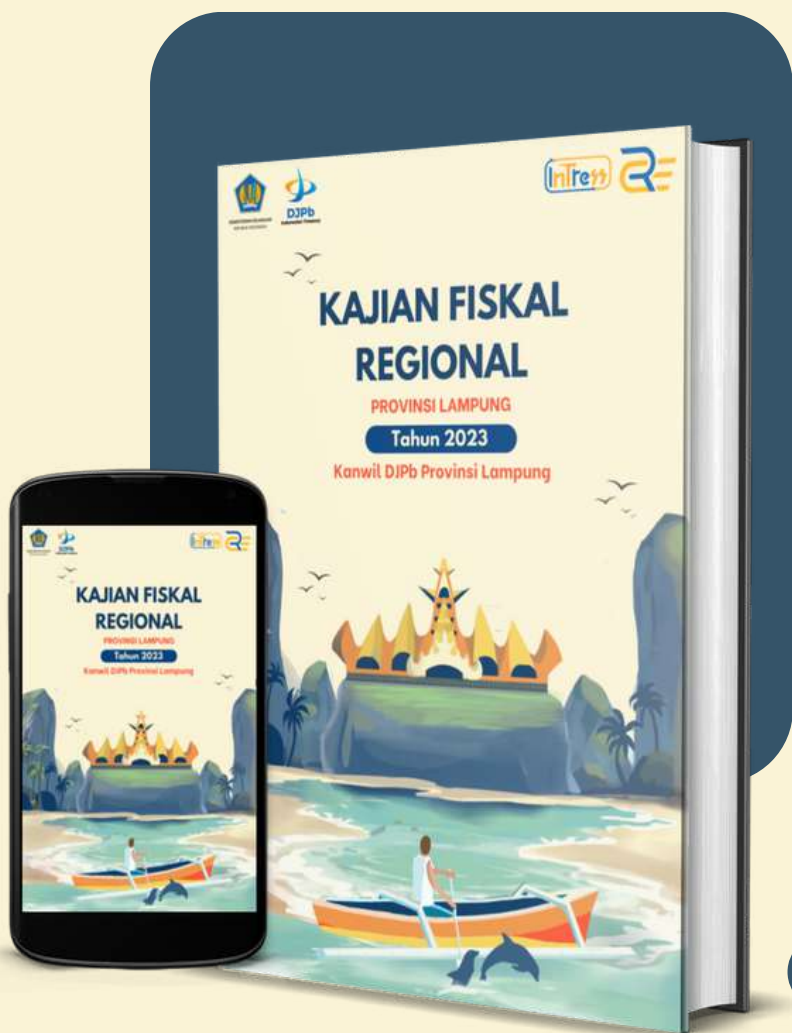
Juliani AS



*New DJPb
in Town*

HANBAL
Harmonis Amanah Digital Akuntabel Loyal

UNDUH KAJIAN FISKAL REGIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 SECARA ONLINE



SCAN ME!



Atau

Unduh Pada Tautan Berikut:

<https://bit.ly/KFRLampung>



KRITIK DAN SARAN:

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Lampung

Email: pa2.kanwildjpb.lampung@gmail.com

new DJPb
in Town

HANDAL
Harmoni Amanah Digital Akuntabel Loyal

Kata Pengantar



Tabik pun, Salam sejahtera dan bahagia bagi kita semua.

Dengan semangat meningkatkan pembangunan di Lampung, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung telah menyusun Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2023. KFR Tahunan 2023 merupakan komitmen kami dalam mendukung perkembangan kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini dilakukan melalui analisis perkembangan ekonomi, fiskal, serta pembangunan di regional Lampung. KFR merupakan hasil dari upaya kami untuk menggali isu-isu terkini dan mengantisipasi risiko terkait pelaksanaan kebijakan fiskal dalam menghadapi dinamika tantangan ekonomi dan pembangunan di regional Lampung, serta ketidakpastian global.

Kami ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berkontribusi, termasuk Gubernur Provinsi Lampung, Bupati/Walikota, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, *Regional Economist*, dan *Local Experts* yang memberikan kolaborasi data dan *insights* dalam penyusunan KFR. Tak lupa juga, apresiasi kami sampaikan untuk para kolaborator utama Kemenkeu Satu Regional Lampung yaitu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu Lampung, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu atas kontribusi dan perspektif berharga dalam menyusun KFR.



Kata Pengantar



Harapan kami, KFR dapat memberikan gambaran mendalam dalam perencanaan dan implementasi strategi kebijakan fiskal, menjadi sumber inspirasi, dan referensi bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami menyadari potensi pengembangan dalam setiap kajian dan dengan tulus mengundang masukan, kritik konstruktif, dan pandangan progresif untuk memperkaya kualitas kajian kami.

Terakhir, dengan kerendahan hati, kami berdoa agar setiap langkah kita untuk berkontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan regional Lampung ke depan selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga KFR Tahun Anggaran 2023 dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan regional Lampung ke depan.

Salam sejahtera untuk kita semua.



Bandar Lampung, 29 Februari 2024
Kepala Kanwil DJPb
Perbendaharaan Provinsi Lampung

Mohammad Dody Fachrudin

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
EXECUTIVE SUMMARY.....	xvii
BAB I SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH.....	1
1.1. PENDAHULUAN.....	1
1.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	1
1.3. KESELARASAN RPJMN DENGAN RPJMD.....	5
1.4. TANTANGAN SASARAN PEMBANGUNAN.....	6
1.4.1. Tantangan Ekonomi Daerah.....	6
1.4.1.1. Tantangan dalam Pengelolaan SDA.....	6
1.4.1.2. Tantangan dalam Penciptaan Iklim dan Potensi Investasi yang kondusif.....	7
1.4.1.3. Tantangan birokrasi dan pelayanan perizinan.....	7
1.4.1.4. Tantangan dukungan permodalan dan infrastruktur ekonomi.....	8
1.4.1.5. Tantangan implementasi teknologi dalam aktivitas perekonomian.....	9
1.4.2. Tantangan reformasi struktural.....	10
1.4.3. Tantangan Sosial Kependudukan.....	12
1.4.3.1. Struktur, Jumlah, dan Demografi Penduduk.....	12
1.4.3.2. Karakteristik masyarakat.....	12
1.4.3.3. Struktur Mata Pencaharian Masyarakat.....	13
1.4.4. Tantangan Lainnya.....	14
BAB II ANALISIS EKONOMI REGIONAL.....	15
2.1. ANALISIS INDIKATOR MAKRO EKONOMI.....	15
2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	15
2.1.2. Suku Bunga.....	22
2.1.3. Inflasi.....	22
2.1.3.1. Inflasi Bulanan.....	23
2.1.3.2. Inflasi Tahunan.....	26
2.1.3.3. Pengendalian Inflasi.....	29
2.1.4. Nilai Tukar.....	31



2.2. ANALISIS INDIKATOR KESEJAHTERAAN	32
2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	32
2.2.2. Tingkat Kemiskinan	36
2.2.3. Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini).....	40
2.2.4. Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran	42
2.2.5. Nilai Tukar Petani (NTP).....	45
2.2.6. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	48
2.3. Reviu Capaian Kinerja Makro Kesra Regional Lampung.....	50
BAB III ANALISIS FISKAL REGIONAL.....	51
3.1. PELAKSANAAN APBN	51
3.1.1. Pendapatan Negara.....	52
3.1.1.1. Penerimaan Perpajakan.....	52
3.1.1.2. Analisis <i>Tax Ratio</i>	56
3.1.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	56
3.1.2. Belanja Negara	57
3.1.2.1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP)	57
3.1.2.2. Berdasarkan Jenis Belanja	57
3.1.2.3. Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga	58
3.1.2.4. Berdasarkan Fungsi	59
3.1.2.5. Belanja Pemerintah Pusat Per kapita.....	60
3.1.2.6. Kontribusi BPP Terhadap PDRB.....	60
3.1.3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	61
3.1.3.1. Dana Transfer Umum (DTU)	62
3.1.3.2. Dana Transfer Khusus (DTK).....	63
3.1.3.3. Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.....	64
3.1.3.4. Dana Desa (DD)	64
3.1.4. Surplus/ Defisit APBN	65
3.1.5. Pengelolaan BLU Pusat.....	65
3.1.6. Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat Kinerja Penyaluran Kredit Program Pemerintah	68
3.1.6.1. Penerusan Pinjaman.....	69
3.1.6.2. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)	69
3.1.6.3. Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)	70
3.1.7. Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah	71
3.1.7.1. Capaian Output Strategis APBN.....	71



3.1.7.2. Reviu Pelaksanaan Anggaran	72
3.2. PELAKSANAAN APBD	74
3.2.1. Pendapatan Daerah.....	74
3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	75
3.2.1.2. Pendapatan Transfer.....	80
3.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	81
3.2.1.4. Analisis Tingkat Kemandirian Daerah	81
3.2.1.5. Upaya Daerah dalam Peningkatan PAD	82
3.2.2. Belanja Daerah.....	83
3.2.2.1. Berdasarkan Jenis Belanja	83
3.2.2.2. Berdasarkan Fungsi	86
3.2.2.3. Berdasarkan Urusan	87
3.2.2.4. Kontribusi Belanja Terhadap PDRB	87
3.2.2.5. Analisis Belanja per Kapita.....	88
3.2.3. Perkembangan Surplus/Defisit APBD	88
3.2.4. Pembiayaan Daerah	89
3.2.5. Perkembangan BLU Daerah.....	90
3.2.5.1. Profil BLU Daerah	90
3.2.5.2. Analisis Tingkat Kemandirian BLUD	91
3.2.5.3. Perkembangan Aset BLUD	91
3.2.6. Isu Strategis Pelaksanaan APBD	92
3.3. ANALISIS KONSOLIDASI APBN DAN APBD.....	93
3.3.1. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian.....	93
3.3.2. Pendapatan Konsolidasian	93
3.3.2.1. Proporsi dan Perbandingan	93
3.3.3. Belanja Konsolidasian.....	93
3.3.3.1. Proporsi dan Perbandingan	93
3.3.3.2. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja	94
3.3.3.3. Belanja Perkapita Konsolidasi	94
3.3.4. Surplus Defisit Anggaran Konsolidasian	94
BAB IV PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH: HARMONISASI BELANJA K/L DAN DAK FISIK DI REGIONAL LAMPUNG	95
4.1. PENDAHULUAN	95
4.2. GAMBARAN UMUM HARMONISASI BELANJA K/L DAK FISIK DI TINGKAT WILAYAH.....	96



4.2.1. Alokasi Anggaran K/L Secara Umum.....	97
4.2.2. Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik.....	98
4.2.3. Alokasi Anggaran K/L per Bidang.....	99
4.2.3.1. Bidang Jalan.....	99
4.2.3.2. Bidang Kesehatan dan KB.....	100
4.2.3.3. Bidang Pendidikan.....	101
4.2.3.4. Bidang Pertanian.....	102
4.2.3.5. Bidang Transportasi Pedesaan.....	103
4.3. KENDALA DAN TANTANGAN.....	104
4.4. UPAYA SINKRONISASI DI DAERAH OLEH SATKER DAN PEMDA.....	107
BAB V ANALISIS TEMATIK: SINERGI PUSAT-DAERAH DALAM UPAYA PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA YANG BERDAYA SAING.....	108
5.1. PENDAHULUAN.....	108
5.2. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN TENAGA KERJA DI REGIONAL LAMPUNG.....	108
5.2.1. Peran Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Pada Sektor Pendidikan & Pelatihan, Serta Peningkatan Kompetensi SDM Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas SDM Dan Produktivitas Tenaga Kerja.....	109
5.2.1.1. Dukungan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Meningkatkan Kualitas SDM, Ketenagakerjaan, dan Penurunan Pengangguran di Regional Lampung.....	109
5.2.1.2. Dukungan Transfer Ke Daerah (TKD) dalam Meningkatkan Kualitas SDM, Ketenagakerjaan, dan Penurunan Pengangguran di Regional Lampung.....	110
5.2.2. Dukungan Belanja APBD dalam Meningkatkan Kualitas SDM, Ketenagakerjaan, dan Penurunan Pengangguran di Regional Lampung.....	113
5.2.3. Perkembangan Kualitas SDM Regional Lampung.....	115
5.2.3.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Regional Lampung.....	115
5.2.3.2. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Regional Lampung.....	116
5.2.3.3. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Regional Lampung.....	118
5.3. UPAYA PENINGKATAN INVESTASI DI REGIONAL LAMPUNG.....	119
5.3.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Iklim Investasi Usaha di Regional Lampung.....	119
5.3.1.1. Kondisi Kemantapan Jalan di Regional Lampung.....	119
5.3.1.2. Perkembangan Indeks Kemahalan Konstruksi di Regional Lampung.....	121
5.3.1.3. Perkembangan Upah Minimum Regional (UMR) Lampung.....	122
5.3.2. Realisasi Investasi di Regional Lampung.....	123
5.3.2.1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Regional Lampung.....	123
5.3.2.2. Penanaman Modal Asing (PMA) di Regional Lampung.....	124



5.4. PENGARUH KUALITAS SDM DAN TINGKAT INVESTASI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI REGIONAL LAMPUNG.....	126
5.4.1. Analisis Statistik Inferensial	126
5.4.2. Diskusi dan Pembahasan.....	127
5.4.2.1. Keterkaitan Kualitas SDM dan Tingkat Pengangguran di regional Lampung	127
5.4.2.2. Keterkaitan Kualitas Tenaga Kerja dan Investasi di regional Lampung	128
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	130
6.1. KESIMPULAN	130
6.1.1. Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah	130
6.1.2. <i>Outlook</i> Makroekonomi Regional Lampung	131
6.1.3. Kinerja Fiskal Regional Lampung	133
6.1.3.1. Kinerja APBN	133
6.1.3.2. Kinerja APBD	136
6.1.3.3. Analisis Konsolidasi APBN dan APBD	139
6.1.4. Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik	140
6.1.5. Sinergi Pusat-Daerah Dalam Upaya Pengurangan Pengangguran Dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing	141
6.2. REKOMENDASI	143



Daftar Grafik

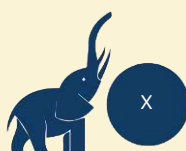
Grafik 2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Tahun 2020 – 2023 (<i>ctc</i>)	15
Grafik 2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung, Sumatera, dan Nasional Tahun 2020 – 2023 (<i>yoy</i>)	16
Grafik 2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung, Sumatera, dan Nasional Tahun 2020 – 2023 (<i>qtq</i>)	16
Grafik 2.4. Kontribusi PDRB Pengeluaran Provinsi di Regional Sumatera dan Nasional Tahun 2023	17
Grafik 2.5. Pertumbuhan Jumlah Proyek Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	18
Grafik 2.6. Ekspor Luar Negeri Menurut Golongan Barang	18
Grafik 2.7. Distribusi dan Pertumbuhan (<i>ctc</i>) PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2023	20
Grafik 2.8. Perkembangan Arus Penumpang Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2023	21
Grafik 2.9. Perkembangan Arus Barang Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2023	21
Grafik 2.10. Indeks El Nino- <i>Southern Oscillation</i> (ENSO)	21
Grafik 2.11. Perkembangan BI <i>7-Day Repo Rate</i> Tahun 2020 – 2023	22
Grafik 2.12. Pergerakan Laju Inflasi Bulanan Lampung dan Nasional Tahun 2020 – 2023	23
Grafik 2.13. Andil Inflasi dan Deflasi Bulan November 2023 (<i>mtm</i>) yang Merupakan Periode dengan Andil Inflasi (<i>mtm</i>) tertinggi di Tahun 2023	24
Grafik 2.14. Pergerakan Laju Inflasi/Deflasi Pada Komoditas Pangan Strategis di Lampung Tahun 2023 (<i>mtm</i>)	25
Grafik 2.15. Kenaikan Harga Aneka Cabai di triwulan IV 2023	26
Grafik 2.16. Pergerakan Laju Inflasi Lampung, Provinsi di Regional Sumatera dan Nasional (<i>yoy</i>)	26
Grafik 2.17. Pergerakan Laju Inflasi Tahunan Lampung dan Nasional Tahun 2020 – 2023	27
Grafik 2.18. Perkembangan Harga Beras di Lampung Tahun 2020 – 2023	28
Grafik 2.19. Pergerakan Laju Inflasi/Deflasi Pada Komoditas Pangan Strategis di Lampung Tahun 2023 (<i>yoy</i>)	28
Grafik 2.20. Perkembangan Harga Minyak di Lampung Tahun 2020 – 2023	29
Grafik 2.21. Tren Pergerakan rata-rata Kurs Tengah Rupiah terhadap US\$1 dan Neraca Perdagangan Lampung (juta USD) per bulan Tahun 2022 – 2023	31
Grafik 2.22. Tren Ekspor Impor (juta USD) Lampung Tahun 2022 – 2023	31
Grafik 2.23. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Lampung, Rata-rata Regional Sumatera, dan Nasional Tahun 2020–2023	32
Grafik 2.24. IPM Regional Sumatera Tahun 2020 s.d. 2023	33
Grafik 2.25. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Lampung Cluster Pemerintah Daerah Tahun 2020–2023	34
Grafik 2.26. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Per Kabupaten/Kota di Lampung Tahun 2020 – 2023	34
Grafik 2.27. Dimensi Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota Lampung Tahun 2020 – 2023	35
Grafik 2.28. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota Lampung Tahun 2020 – 2023	35
Grafik 2.29. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota Lampung Tahun 2020 – 2023	35



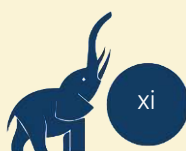
Grafik 2.30. Dimensi Pendapatan Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten/Kota Lampung Tahun 2020 – 2023	36
Grafik 2.31. Persentase Penduduk Miskin di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional 2020 – 2023 (persen)	37
Grafik 2.32. Tingkat Kemiskinan Regional Sumatera Tahun 2020 s.d. 2023 (persen)	37
Grafik 2.33. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Lampung Menurut Tempat Tinggal 2020 – 2023	37
Grafik 2.34. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2020 – 2023 (persen)	38
Grafik 2.35. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 2020 – 2023 (persen)	38
Grafik 2.36. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Maret 2020 – Maret 2023	39
Grafik 2.37. Perkembangan Gini Ratio Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional 2020 – 2023 (persen).....	40
Grafik 2.38. Gini Ratio Regional Sumatera Tahun 2020 s.d. 2023 (persen)	41
Grafik 2.39. Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Lampung Menurut Tempat Tinggal Tahun 2020–2023	41
Grafik 2.40. Distribusi Pengeluaran Penduduk Lampung Tahun 2020–2023	41
Grafik 2.41. Perkembangan TPAK di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional 2020 – 2023 (persen)	42
Grafik 2.42. Komposisi Tenaga Kerja di Provinsi Lampung berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Tahun 2020 – 2023 (Persen)	43
Grafik 2.43. Perkembangan Struktur Pekerja Formal dan Informal di Lampung Tahun 2020 – 2023	43
Grafik 2.44. Persentase Proporsi Pekerja Formal Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Agustus 2020 – Agustus 2023	44
Grafik 2.45. Perkembangan TPT di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional 2020 – 2023 (persen)	44
Grafik 2.46. TPT Regional Sumatera Tahun 2020 s.d. 2023 (persen)	45
Grafik 2.47. TPT Provinsi Lampung 2019 – 2023	45
Grafik 2.48. Perkembangan NTP Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia Tahun 2023 – 2023	46
Grafik 2.49. NTP Regional Sumatera Tahun 2020 s.d. 2023 (persen)	46
Grafik 2.50. Perkembangan NTN Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia Tahun 2023 – 2023	48
Grafik 2.51. NTN Regional Sumatera Tahun 2020 s.d. 2023 (persen)	49
Grafik 2.52. Perkembangan NTN Lampung Tahun 2020–2023	49
Grafik 3.1 Tren Kontribusi Komponen Penerimaan Perpajakan Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)	53
Grafik 3.2 Target, Realisasi, Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan di Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah, persen)	53
Grafik 3.3 Kontribusi Penerimaan Pajak Dalam Negeri per Kabupaten/Kota Tahun 2023	54
Grafik 3.4 Penerimaan Pajak Neto Kumulatif per Sektor di Lampung Tahun 2023 (persen)	55
Grafik 3.5 Pertumbuhan Kumulatif PNBPN Tahun 2023 (miliar rupiah)	56
Grafik 3.6 Tren PNBPN Provinsi Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)	56
Grafik 3.7 Tren Belanja Negara Tahun 2021 s.d. 2023 Provinsi Lampung (miliar rupiah)	57



Grafik 3.8. Proporsi Belanja Pemerintah Pusat 2023 (miliar rupiah)	57
Grafik 3.9 Growth Belanja Pemerintah Pusat per Jenis Belanja (miliar rupiah)	58
Grafik 3.10 Perbandingan Pagu dan Realisasi pada Lima Belas K/L Pagu Terbesar (miliar)	58
Grafik 3.11 Pertumbuhan Realisasi Belanja pada Lima Belas K/L Pagu Terbesar (persen).....	59
Grafik 3.12. Realisasi BPP Berdasarkan Fungsi (miliar rupiah).....	59
Grafik 3.13. Tren Pertumbuhan BPP Berdasarkan Fungsi (miliar rupiah)	60
Grafik 3.14. Perkembangan BPP Per Kapita s.d. Desember 2023 (rupiah, orang)	60
Grafik 3.15. Perkembangan Kontribusi BPP Terhadap PDRB 2021-2023 (miliar rupiah).....	60
Grafik 3.16. Pagu Realisasi dan Pertumbuhan Realisasi Penyaluran TKD s.d. Desember 2023 per Jenis (miliar rupiah, persen).....	61
Grafik 3.17. Tren Realisasi TKD berdasarkan DTU, DTK, Dana IF, dan Dana Desa Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)	61
Grafik 3.18. Pagu Realisasi dan Pertumbuhan Realisasi Penyaluran TKD s.d. Desember 2023 per Pemerintah Daerah (persen)	61
Grafik 3.19 Pagu Realisasi DTU s.d. Desember 2021-2023 (miliar rupiah)	62
Grafik 3.20 Tren Penyaluran DAU Lampung 2021-2023 (miliar rupiah).....	62
Grafik 3.21 Tren Penyaluran DBH Lampung 2021-2023 (miliar rupiah).....	62
Grafik 3.22 Pagu Realisasi DTK s.d. Desember 2021-2023 (miliar rupiah).....	63
Grafik 3.23 Tren Penyaluran DAK Fisik Lampung 2021-2023 (miliar rupiah)	63
Grafik 3.24 Tren Penyaluran DAK Non Fisik Lampung 2021-2023 (miliar rupiah).....	63
Grafik 3.25 Tren Penyaluran Dana Insentif Fiskal Lampung 2021-2023 (miliar rupiah)	64
Grafik 3.26 Tren Penyaluran Dana Insentif Fiskal Lampung 2021-2023 (miliar rupiah)	64
Grafik 3.27. <i>Clustering</i> Penyerapan Dana Desa s.d. 31 Desember 2023 (persen)	64
Grafik 3.28 Perkembangan Surplus/Defisit APBN Regional Lampung	65
Grafik 3.29 Tren Perkembangan Aset Tetap BLU per 31 Desember Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)	66
Grafik 3.30 Perkembangan Realisasi Belanja RM dan PNBP BLU di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2021-2023 (miliar Rp)	67
Grafik 3.31 Perkembangan Kontribusi PNBP BLU pada Satker BLU di Wilayah Lampung Tahun 2021-2023	67
Grafik 3.32 <i>Maturity Rating</i> BLU Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2021-2022.....	67
Grafik 3.33 Tren Penyaluran KUR di Provinsi Lampung Tahun 2021-2023.....	69
Grafik 3.34 Penyaluran KUR Provinsi Lampung Berdasarkan Skema Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)	70
Grafik 3.35 Penyaluran KUR Provinsi Lampung Berdasarkan Sektor (miliar rupiah)	70
Grafik 3.36 Lima Daerah Penyaluran KUR Terbesar di Lampung Tahun 2023	70
Grafik 3.37 Penyaluran UMi di Provinsi Lampung Tahun 2021-2023.....	71
Grafik 3.38. Lima Daerah Penyaluran UMi Terbesar di Lampung s.d. September 2023	71



Grafik 3.39. Perbandingan Pagu dan Realisasi Pendapatan daerah (miliar rupiah) dan Pertumbuhannya (yoy) 2021-2023.....	75
Grafik 3.40. Perbandingan Komposisi PAD Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)	75
Grafik 3.41. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah per Jenis di Lampung 2021-2023 (miliar rupiah).....	76
Grafik 3.42. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah per Pemda di Lampung 2021-2023 (miliar rupiah)	76
Grafik 3.43. Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah per Jenis di Lampung 2021-2023 (miliar rupiah).....	77
Grafik 3.44. Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah per Pemda di Lampung 2021-2023 (miliar rupiah).....	77
Grafik 3.45. Perkembangan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)	78
Grafik 3.46. Perkembangan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per Pemda di Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)	79
Grafik 3.47. Perkembangan Realisasi 5 Teratas Jenis LLPADyS Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah).....	79
Grafik 3.48. Perkembangan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah per Pemda di Lampung 2021-2023 (miliar rupiah)	80
Grafik 3.49. Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)	80
Grafik 3.50. Perkembangan Realisasi LLPDyS Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)	81
Grafik 3.51. Perkembangan Realisasi PAD dan Rasio Kemandirian Fiskal Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)	81
Grafik 3.52. Rasio Kemandirian Fiskal Daerah per Pemda Tahun 2023	82
Grafik 3.53. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah per Pemda Tahun 2023 (miliar rupiah)	82
Grafik 3.54. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Daerah (miliar rupiah) dan Pertumbuhannya (yoy) s.d. Triwulan 2021-2023	83
Grafik 3.55. Komposisi Belanja Daerah per Pemda, Rasio Belanja Pegawai, dan Rasio Belanja Modal Tahun 2023 (miliar rupiah)	83
Grafik 3.56. Realisasi Belanja Operasi tahun 2021-2023 (miliar rupiah)	84
Grafik 3.57. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah).....	84
Grafik 3.58. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung per Pemda Tahun 2021-2023 (miliar rupiah) ...	85
Grafik 3.59. Realisasi Belanja Tidak Terduga per Pemda 2023 (miliar)	85
Grafik 3.60. Perkembangan Realisasi Belanja Transfer per Pemda Tahun 2021-2023 (miliar rupiah).....	86
Grafik 3.61. Perkembangan Realisasi dan Pertumbuhan Belanja per Fungsi Tahun 2021-2023 (miliar)	87
Grafik 3.62. Perbandingan Realisasi Belanja Transfer Berdasarkan Urusan 2022-2023 (miliar rupiah)	87
Grafik 3.63. Realisasi Belanja Daerah per Kapita Kabupaten/Kota 2023 (juta rupiah).....	88
Grafik 3.64. Realisasi Belanja Modal per Kapita Kabupaten/2023 (ribu rupiah).....	88
Grafik 3.65. Perkembangan Surplus/Defisit APBD Regional Lampung Triwulan 2021-2023.....	89
Grafik 3.66. Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah).....	90



Grafik 3.67. Perkembangan Realisasi Pendapatan BLUD, Belanja BLUD, dan Rasio Kemandirian BLUD Regional Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah).....	91
Grafik 3.68. Surplus Defisit Anggaran Konsolidasian tahun 2021-2023 (miliar rupiah).....	94
Grafik 4.1. Perbandingan Belanja Kementerian/Lembaga RO Harmonis dengan DAK Fisik di Regional Lampung Tahun 2023	97
Grafik 4.2. Pagu dan Realisasi DAK Fisik Pemda Lampung Tahun 2023 (dalam miliar rupiah).....	97
Grafik 4.3. Porsi Pagu DAK Fisik Per Bidang Tahun 2023	97
Grafik 5.1. Belanja Pemerintah Pusat Terkait Peningkatan Kualitas SDM dan Penurunan Pengangguran (dalam miliar Rp dan persentase)	109
Grafik 5.2. Realisasi Belanja K/L Per Jenis KRO (Miliar Rupiah).....	110
Grafik 5.3. Perkembangan DAK Fisik Bidang Pendidikan di Regional Lampung pada 2020 s.d. 2023 (dalam miliar Rp dan persentase)	111
Grafik 5.4. Perkembangan DAK Non Fisik Bidang Pendidikan di Regional Lampung pada 2020 s.d. 2023 (dalam miliar Rp dan persentase)	112
Grafik 5.5. Realisasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2023 per tingkat pendidikan (dalam miliar Rp).....	112
Grafik 5.6. Realisasi DAK Fisik Bidang Pendidikan berdasarkan lokasi di regional Lampung (dalam miliar Rp).	113
Grafik 5.7. Program Penanggulangan Pengangguran Daerah Provinsi Lampung 2023 melalui APBD (Rp Juta)	114
Grafik 5.8. Perkembangan IPM Lampung 2020 s.d. 2023 (Perbandingan Regional dan Nasional)	115
Grafik 5.9. Perkembangan IPM Lampung 2020 s.d. 2023 (Per Klaster Pemerintah Daerah)	115
Grafik 5.10. IPM Lampung per Kabupaten/Kota Tahun 2023	116
Grafik 5.11. Perkembangan RLS Lampung 2020 s.d. 2023 (Perbandingan Regional dan Nasional).....	116
Grafik 5.12. Perkembangan RLS Lampung 2020 s.d. 2023 (Per Klaster Pemerintah Daerah)	117
Grafik 5.13. RLS Lampung per Kabupaten/Kota Tahun 2023	117
Grafik 5.14. Perkembangan HLS Lampung 2020 s.d. 2023 (Perbandingan Regional dan Nasional).....	118
Grafik 5.15. Perkembangan HLS Lampung 2020 s.d. 2023 (Per Klaster Pemda).....	118
Grafik 5.16. HLS Lampung per Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	118
Grafik 5.17. Kondisi Kemantapan Jalan Nasional di Regional Lampung 2018 s.d. 2022 (dalam km dan %).....	120
Grafik 5.18. Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota di Regional Lampung 2018 s.d. 2022 (dalam km dan %)	120
Grafik 5.19. Perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi Regional Sumatera dan Nasional Tahun 2023.....	121
Grafik 5.20. Indeks Kemahalan Konstruksi Per Klaster Pemda di Regional Lampung Tahun 2023	121
Grafik 5.21. Indeks Kemahalan Konstruksi Per Pemda di Regional Lampung Tahun 2023.....	122
Grafik 5.22. Perkembangan UMR Lampung tahun 2015 s.d. 2023 (dalam Rp juta)	123
Grafik 5.23. Perbandingan UMR Sumatera Tahun 2023 (dalam Rp).....	123
Grafik 5.24. Perkembangan PMDN di Regional Lampung pada 2020 s.d. 2023 (Rp juta dan jumlah proyek) ..	123
Grafik 5.25. Realisasi PMDN Per Pemda 2020 s.d. 2023	124



Grafik 5.26. Top 5 Sektor Investasi PMDN terbesar 2020 s.d. 2023 (dalam Rp Triliun) 124

Grafik 5.27. Perkembangan PMA di Regional Lampung pada 2020 s.d. 2023 (USD juta dan jumlah proyek) .. 125

Grafik 5.28. Realisasi PMA Per Pemda 2020 s.d. 2023 (dalam USD Juta) 125

Grafik 5.29. Top 5 Sektor Investasi PMA Tahun 2020 s.d. 2023 125

Grafik 5.30. Perbandingan Nilai antara Proyek PMA dan Proyek PMDN dengan TPT 128

Grafik 5.31. Perbandingan Nilai antara Proyek PMA dan Proyek PMDN dengan TPAK 128

Grafik 5.32. Perbandingan Nilai antara Proyek PMA dan Proyek PMDN dengan TPAK 128

Grafik 5.33. Pengaruh realisasi investasi per sektor (KBLI) dengan serapan tenaga kerja per sektor 2020 s.d. 2023
..... 129



Daftar Tabel

Tabel 1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung 2019-2024	1
Tabel 1.2. Sasaran Indikator Makro Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	2
Tabel 1.3. Sasaran Makro Ekonomi RKPD Provinsi Lampung 2023	4
Tabel 1.4. Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023	4
Tabel 1.5. Tantangan Ekonomi Provinsi Lampung 2023	11
Tabel 1.6. Tantangan Sosial Kependudukan Provinsi Lampung 2023	13
Tabel 2.1. Perkembangan PDRB Pengeluaran Lampung Tahun 2020 – 2023	16
Tabel 2.2. Perkembangan PDRB Lapangan Usaha Lampung Tahun 2020 – 2023	20
Tabel 2.3. Inflasi dan Andil Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran Lampung Tahun 2023 (Persen) ...	23
Tabel 2.4. Sepuluh Komoditas Dengan Frekuensi Andil Inflasi Bulanan Terbanyak di Lampung Selama Tahun 2023	25
Tabel 2.5. Inflasi dan Andil Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Pengeluaran Lampung Tahun 2023 (Persen)...	27
Tabel 2.6. Sepuluh Komoditas Dengan Frekuensi Andil Inflasi Tahunan Terbanyak di Lampung Selama Tahun 2023	28
Tabel 2.7. Komponen Pembentuk IPM Lampung, Rata-rata Regional Sumatera, dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2023	33
Tabel 2.8. Perkembangan Serapan Tenaga Kerja Sektoral di Lampung 2020 – 2023 (persen)	43
Tabel 2.9. Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung per Subsektor 2020 –2023	47
Tabel 2.10. Perkembangan NTUP Lampung per Subsektor Periode 2020 s.d. 2023	48
Tabel 2.11. Hasil Reviu Efektivitas Kebijakan Makro Ekonomi dan Kesejahteraan Provinsi Lampung Tahun 2023	50
Tabel 3.1 <i>I-Account</i> APBN di Provinsi Lampung Realisasi Tahun 2023 (dalam miliar Rp)	51
Tabel 3.2 Capaian Penerimaan Perpajakan s.d. Desember 2023 terhadap Target APBN dan Perpres 75/2023 (miliar rupiah)	52
Tabel 3.3 <i>Tax Ratio</i> Penerimaan Pajak 2021-2023 di Lampung (miliar rupiah)	56
Tabel 3.4 Profil BLU di Wilayah Provinsi Lampung	66
Tabel 3.5 Profil Satker PNBPN Potensial Tahun 2023 di Wilayah Lampung	68
Tabel 3.6 Rincian Jumlah Penerusah Pinjaman Per 31 Desember 2023 (miliar rupiah)	69
Tabel 3.7 Capaian Output Strategis Bidang Kesehatan	71
Tabel 3.8 Capaian Output Strategis Bidang Pendidikan	72
Tabel 3.9 Capaian Output Strategis Bidang Infrastruktur	72
Tabel 3.10. <i>I-Account</i> Realisasi APBD Konsolidasi Provinsi Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)	74
Tabel 3.11. Perbandingan <i>Local Tax Ratio</i> Lampung Tahun 2021-2023	78
Tabel 3.12. Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB 2021-2023	87



Tabel 3.13. Perkembangan Surplus/Defisit APBD Regional Lampung 2021-2023	89
Tabel 3.14. Perkembangan Keseimbangan Umum dan Primer Regional Lampung Tahun 2021-2023	89
Tabel 3.15. Profil BLUD Lampung Tahun 2021-2023	91
Tabel 3.16. Kemandirian Keuangan 10 BLUD di Lampung Tahun 2021-2023	91
Tabel 3.17. Perkembangan Aset 10 BLUD di Lampung Tahun 2021-2023	92
Tabel 3.18. <i>I-Account</i> Konsolidasian APBN dan APBD Regional Lampung 2021-2023 (miliar rupiah)	93
Tabel 3.19. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Konsolidasian Tahun 2021-2023	94
Tabel 3.20. Belanja Perkapita Konsolidasian Tahun 2021-2023.....	94
Tabel 4.1. Perbedaan DAK Fisik dan RO Harmonis K/L DAK Fisik	96
Tabel 4.2. Alokasi Anggaran K/L Secara Umum	98
Tabel 4.3. Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik.....	99
Tabel 4.4. Alokasi Anggaran K/L Bidang Jalan (5 Tertinggi)	99
Tabel 4.5. Alokasi Anggaran K/L Bidang Kesehatan dan KB (5 Tertinggi)	100
Tabel 4.6. Alokasi Anggaran K/L Bidang Pendidikan (5 Tertinggi)	101
Tabel 4.7. Alokasi Anggaran K/L Bidang Pertanian (5 Tertinggi).....	102
Tabel 4.8. Alokasi Anggaran K/L Bidang Transportasi Pedesaan	103
Tabel 5.1. Program dan Kegiatan Penanggulangan Pengangguran Daerah Provinsi Lampung 2023 melalui APBD (Rp Juta)	114



Daftar Gambar

Gambar 1.1. <i>Mapping</i> Keselarasan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Provinsi Lampung.....	5
Gambar 5.1. Realisasi dan <i>Growth</i> (yoy) Belanja K/L per Jenis KRO Tahun 2023.....	110
Gambar 5.2. Hasil <i>Correlation Matrix</i> Pengaruh Belanja Pemerintah, Kualitas SDM, dan Tingkat Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran	126
Gambar 5.3. Tabel ANOVA	126



Executive Summary

Kajian Fiskal Regional Tahunan 2023 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung

Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah

Tujuan bernegara menjadi panduan dalam pembangunan dan pelayanan kepada rakyatnya. Sebagai bagian dari Indonesia, Lampung mengikuti semangat konstitusi UUD 45 yang menegaskan komitmennya untuk melindungi warga, meningkatkan kesejahteraan umum, mengembangkan intelektualitas bangsa, dan berkontribusi pada perdamaian dunia. Lampung mengadopsi kerangka perencanaan nasional yang terstruktur, mulai dari rencana jangka panjang hingga rencana jangka pendek, untuk mencapai tujuan tersebut dengan kesinambungan dan konsistensi dalam pembangunan.

Selaras dengan RPJMD 2019-2024, rencana pembangunan Provinsi Lampung tahun 2023 yang bertema “Penguatan Ekonomi yang Inklusif Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah” ditransmisikan melalui 6 (enam) jalur prioritas pembangunan, yaitu: (1) Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan; (2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia; (3) Pembangunan Infrastruktur; (4) Reformasi Birokrasi; (5) Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya; dan (6) Pembangunan Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana. Guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah, pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan arah sasaran makro tahun 2023 yang tercantum pada target RKPD 2023.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Lampung didukung dengan berbagai potensi yang dimiliki salah satunya yaitu sebagai Lumbung Pangan Nasional yang artinya sektor pertanian di Provinsi Lampung memiliki makna strategis pada

pertanian nasional dan memberikan kontribusi paling dominan dalam perekonomian.

Di samping itu, Pemerintah Provinsi Lampung dihadapkan dengan berbagai tantangan antara lain dari aspek ekonomi, sosial kependudukan, dan lainnya. Dari aspek ekonomi, pengelolaan sumber daya alam dan penciptaan nilai tambah, dukungan permodalan dan penyediaan infrastruktur masih perlu untuk ditingkatkan. Dari aspek sosial kependudukan, masih terdapat kesenjangan sosial yang cukup besar antara desa dan kota dan antar individu, selain itu IPM Lampung yang masih cenderung rendah di regional Sumatera dan Nasional. Sedangkan dari aspek lainnya, Provinsi Lampung sebagai lumbung pangan nasional dituntut untuk menjaga produktivitas pertanian pada masa El Nino demi menjaga pasokan dan stabilisasi harga yang berdampak pada inflasi regional, Lampung juga harus mengembangkan potensi holtikultura sebagai produk alternatif pangan.

Outlook Makroekonomi Regional Lampung

Kinerja ekonomi Lampung tahun 2023 tumbuh sebesar 4,55 persen (ctc) sesuai dalam *range* target RPJMD 2019-2014. Nilai tersebut menguat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 4,28 persen (ctc). Namun, capaian kinerja ekonomi Lampung masih lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang tercatat sebesar 5,05 persen (ctc). Capaian ini mampu diraih, meskipun Lampung menghadapi *downside risk* seperti konflik geopolitik, *scarring effect* pandemi COVID-19, kebijakan suku bunga global, perubahan nilai tukar, dan kondisi El Nino.



Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan penyumbang PDRB terbesar di Lampung dengan kontribusi di tahun 2023 sebesar Rp122.511,10 miliar atau 27,29 persen dari total PDRB, disusul oleh Industri Pengolahan, serta Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 18,01 persen dan 13,98 persen. Namun demikian, kontribusi sektor basis di Lampung yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam 4 tahun terakhir mengalami penurunan kinerja pertumbuhan, karena dampak El Nino, serta penurunan kinerja produksi dan permintaan global.

Selama 2023, inflasi Lampung tetap terjaga di level sasaran $3,0 \pm 1$ persen (yoy) dengan capaian sebesar 3,47 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dari inflasi nasional yang mencapai 2,61 persen (yoy). Tantangan utama inflasi berasal dari komoditas beras, dipengaruhi oleh cuaca panas El Nino yang mengurangi produktivitas dan meningkatkan harga gabah. Secara bulanan, inflasi tahun 2023 mencapai 0,29 persen (mtm), lebih rendah dari tahun sebelumnya (0,45 persen mtm). Peningkatan tekanan inflasi disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Suku bunga acuan dipertahankan pada 5,75% dari triwulan I hingga III 2023 untuk menjaga inflasi IHK tetap sekitar $3,0 \pm 1\%$ hingga akhir tahun 2023. Pada triwulan IV 2023, suku bunga naik menjadi 6,00% untuk mengendalikan inflasi menjadi $2,5 \pm 1\%$ pada 2024. Depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap USD meningkatkan harga barang impor, tetapi impor bahan baku dan barang modal di Lampung meningkat, menunjukkan investasi yang positif di sektor manufaktur. Hal ini mencerminkan kepercayaan pelaku industri terhadap pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur di Lampung meskipun nilai tukar mata uang fluktuatif.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung selama kurun waktu 2020 hingga 2023 terus mengalami kemajuan. IPM Lampung pada tahun 2023 mencapai 74,39, tumbuh 0,96 persen dan meningkat 0,69 basis poin dibandingkan capaian tahun 2022. Provinsi Lampung telah masuk

ke dalam kategori IPM "tinggi". Peningkatan ini didorong oleh semua dimensi IPM, termasuk kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Namun, IPM Lampung masih di bawah capaian IPM pada level nasional dan regional Sumatera.

Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Lampung mencapai 970,67 ribu orang (11,11 persen), menurun 24,92 ribu orang dari September 2022. Namun, tingkat kemiskinan masih di atas rata-rata nasional (9,36 persen). Kemiskinan lebih tinggi di pedesaan (12,65 persen) daripada perkotaan (8,02 persen). Meskipun Indeks Kedalaman Kemiskinan menurun, Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat di pedesaan. Lampung memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional dan regional Sumatera. Indeks Gini Ratio Lampung pada Maret 2023 adalah 0,324, naik 3,51 persen dari September 2022. Lampung menempati peringkat kelima terendah di Sumatera dalam hal Gini Ratio, disebabkan oleh ketimpangan sumber daya alam, demografi, mobilitas barang dan jasa, serta konsentrasi ekonomi di kota besar seperti Bandar Lampung.

NTP Lampung naik menjadi 109,32 pada 2023 dari 104,34 pada 2022. Meskipun di bawah rata-rata nasional dan regional, terjadi peningkatan yang konsisten setiap tahun. Hal ini didorong oleh kenaikan harga komoditas, terutama pada sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan. Pemerintah Provinsi Lampung melakukan berbagai upaya untuk mendukung petani, seperti subsidi benih dan akses permodalan. NTN perikanan tangkap Lampung juga mengalami peningkatan, menempati peringkat keempat di Sumatera dengan nilai 110,61 pada 2023.

Berdasarkan hasil revidi capaian Kinerja Makro dan Kesejahteraan Regional Lampung, Rasio Gini melebihi target maksimal pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sementara itu, indikator lainnya telah mencapai target. Overall, capaian makro ekonomi dan kesejahteraan Provinsi Lampung menggambarkan pembangunan Lampung



yang masih *on the track* dan dapat dimaknai sebagai pembangunan yang berkelanjutan.

Analisis Fiskal Regional: APBN dan APBD

Hingga akhir tahun 2023, realisasi Pendapatan Negara tercatat sebesar Rp10,80 triliun atau 105,65 persen dari target akhir tahun APBN 2023, sedikit terkontraksi -0,95 persen (*yoy*). Realisasi Pendapatan Negara didominasi oleh Penerimaan Perpajakan sebesar Rp9,33 triliun (109,69 dari target awal APBN 2023, atau 100,74 persen dari target Perpres 75/2023) yang terkoreksi -3,90 persen (*yoy*) yang utamanya dipengaruhi oleh penurunan cukup dalam penerimaan pajak Perdagangan Internasional khususnya Bea Keluar.

Penyumbang terbesar Penerimaan Perpajakan bersumber dari penerimaan Pajak Dalam Negeri yang berhasil tumbuh 15,72 persen ditopang oleh penerimaan PPN Dalam Negeri seiring dengan penerapan kebijakan kenaikan tarif PPN dan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Lampung, didukung oleh daya beli masyarakat yang masih terjaga. Pertumbuhan terjadi di seluruh jenis penerimaan Pajak Dalam Negeri selain Cukai. Hal ini menunjukkan kinerja sektor ekonomi domestik di Lampung masih cukup kuat diiringi dengan efektivitas pengawasan perpajakan.

Di sisi lain, Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional yang terdiri dari Bea Masuk dan Bea Keluar, masih tercatat mengalami penurunan sebesar 59,75 persen (*yoy*). Penerimaan Bea Masuk tumbuh cukup tinggi hingga 43,98 persen (*yoy*) didukung adanya kenaikan importasi beras pada Triwulan III untuk menjaga cadangan pangan pokok dan stabilitas harga beras di Lampung. Sedangkan, Bea Keluar terkontraksi sebesar 76,45 persen (*yoy*) akibat moderasi harga referensi CPO beserta turunannya di pasar global yang berlanjut hingga Semester II-2023, khususnya minyak kelapa sawit yang menduduki peringkat pertama komoditas terbesar ekspor dari Lampung.

Capaian penerimaan negara yang bersumber dari PNBPN mencatatkan hasil yang memuaskan. Realisasi PNBPN s.d. Desember 2023 melebihi target hingga

153,02 persen dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 22,99 persen (*yoy*) yang sebagian besar ditopang oleh penerimaan PNBPN Lainnya yang bersumber dari Pendapatan Biaya Pendidikan pada satker Perguruan Tinggi serta pendapatan BLU.

Realisasi BPP s.d. Desember 2023, mencapai Rp10,23 triliun lebih tinggi 15,92 persen (*yoy*) dari tahun lalu dengan tingkat penyerapan sebesar 96,67 persen dari pagu akhir tahun. Kontributor realisasi terbesar disumbang dari Belanja Barang yang tumbuh 50,14 persen (*yoy*) dipengaruhi oleh kenaikan alokasi dan realisasi belanja dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk mendukung infrastruktur konektivitas di daerah yang disalurkan melalui Satuan Kerja Kementerian PUPR. Belanja Pegawai telah terserap 98,79 persen dari pagu yang utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS/TNI/POLRI. Sementara, penyerapan Belanja Modal sebesar 91,07 persen diantaranya karena terdapat belanja infrastruktur yang belum terpenuhi prasyaratnya, khususnya yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri. Kinerja Belanja Bantuan Sosial telah mencapai 100 persen yang seluruhnya dimanfaatkan untuk pemberian bantuan kepada peserta didik yang disalurkan melalui Kementerian Agama.

Kinerja TKD sampai dengan Desember 2023 mengalami pertumbuhan 1,59 persen (*yoy*) dibandingkan tahun lalu dan telah tersalurkan dengan baik sebesar 99,45 persen. Pertumbuhan ini utamanya didukung oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Non Fisik sebagai komponen terbesar TKD yang juga mengalami kenaikan 5,66 persen dan 7,36 persen secara berturut-turut. Kinerja positif ini tidak terlepas dari peningkatan kepatuhan pemerintah daerah dalam melengkapi syarat salur serta efektivitas penyaluran TKD melalui KPPN di daerah yang turut meningkatkan kualitas penyaluran TKD.

Kanwil DJPb Lampung memiliki peran dalam melakukan pembinaan kepada Satker BLU, terdapat



lima BLU yang berada di Wilayah Provinsi Lampung. Total aset yang dikelola oleh BLU per 31 Desember 2023 sebesar Rp8,66 triliun dengan tren yang meningkat selama tiga tahun terakhir sebagai komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan ke masyarakat. Alokasi APBN dalam bentuk Belanja Negara yang dikelola oleh Satuan Kerja BLU di Tahun 2023 sebesar Rp1,27 dan telah terealisasi 93,71 persen. Sedangkan target PNPB BLU ditetapkan sebesar Rp485 miliar dan tercapai 134,42 persen dari target.

Selain pengelolaan BLU, Kanwil DJPb Provinsi Lampung juga memiliki peran dalam menatausahakan investasi pemerintah antara lain berupa penerusan pinjaman (*Subsidiary Loan Agreement/SLA*), kredit program, ultra mikro. Di tahun 2023 terdapat *outstanding* pinjaman SLA dengan total Hak Tagih Pemerintah sebesar Rp42 miliar yang diteruspinjamkan kepada BUMD, Pemda, dan Koperasi. Terkait penyaluran KUR, s.d. Desember 2023 telah terealisasi Rp8,3 triliun kepada 171.667 debitur. Sementara dari sisi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah tersalurkan Rp409,49 miliar kepada 86,107 debitur. Investasi pemerintah dalam bentuk ketiga instrumen ini diharapkan dapat menstimulasi kinerja sektor domestik dan memberikan *multiplier effect* pada ekonomi regional.

Dari sisi APBD, Pendapatan Daerah Lampung tahun 2023 tercatat sebesar Rp28.044,05 miliar atau 88,46 persen dari target APBD-P, terkontraksi -1,28 (*yoy*). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung tumbuh meski tidak signifikan sebesar 0,73 persen (*yoy*). Peningkatan terjadi di hampir seluruh komponen PAD, yaitu Pendapatan Pajak Daerah (4,58 persen, *yoy*), Retribusi Daerah (19,56 persen, *yoy*), serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (1,96 persen, *yoy*). Sementara itu Lain-Lain PAD yang Sah turun 10,76 persen (*yoy*). Komponen Pajak Daerah sendiri mampu menyumbang 70,51 persen terhadap total PAD. Hampir seluruh komponen pendapatan Pajak Daerah mengalami pertumbuhan kecuali Pajak Rokok Sarang Burung Walet (-10,72 persen, *yoy*),

Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (-4,91 persen, *yoy*), Pajak Rokok (-4,48 persen, *yoy*). Namun demikian, meski kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) regional Lampung tahun 2023 meningkat, rasionya terhadap PDRB Lampung cenderung rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi pajak dan retribusi daerah yang belum dioptimalkan.

Pendapatan daerah masih sangat bergantung pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (TKD) yang menyumbang sebesar 73,76 persen dari total Pendapatan Daerah. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi, dan pemda perlu semakin kreatif dalam mencari pembiayaan alternatif serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Kebijakan TKD, meskipun bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal, perlu diimbangi dengan upaya mandiri dalam mengelola pendapatan.

Rasio PAD terhadap total pendapatan, serta rasio Transfer Pemerintah Pusat (TPP) terhadap total pendapatan menunjukkan variasi tingkat kemandirian daerah di regional Lampung. Provinsi Lampung menunjukkan rasio kemandirian tertinggi dengan 55,68 persen, sementara Kabupaten Tanggamus memiliki kemandirian terendah dengan 2,41 persen.

Realisasi Belanja Daerah, hingga triwulan III-2023, mencapai Rp19.344,75 miliar atau 84,90 persen dari pagu, turun 5,12 persen (*yoy*). Hal ini mengindikasikan kinerja yang belum optimal dalam pengelolaan belanja, dengan kontribusi Belanja Operasi mendominasi realisasi Belanja Daerah sebesar 70,42 persen dari total realisasi.

Belanja Modal kembali terkontraksi -15,82 persen (*yoy*) di tahun 2023. Realisasi belanja hanya mencapai 80,79 persen dari pagu atau sebesar Rp3.629,45 miliar. Penurunan realisasi Belanja Modal juga dipengaruhi turunnya alokasinya anggaran tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Alokasi terbesar pada realisasi pada belanja modal berupa pembangunan infrastruktur



jalan yang menyumbang 46,67 persen dari total realisasi belanja modal. Hal ini seiring dengan upaya perbaikan ekonomi dan kelancaran distribusi atau logistik barang.

Keseimbangan umum dan primer APBD di regional Lampung pada tahun 2023 menunjukkan angka positif, yang mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah daerah bersifat kontraktif, di mana belanja daerah lebih rendah daripada pendapatannya. Hal ini perlu diperhatikan agar pemerintah daerah lebih mampu meningkatkan belanja yang mendorong daya beli masyarakat, dengan tetap memastikan kapasitas keuangan daerah dan keberlanjutan fiskal.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD di regional Lampung telah diterapkan pada 337 instansi daerah termasuk diantaranya 16 Rumah Sakit, 302 Puskesmas, 16 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 1 Laboratorium Kesehatan Daerah, 1 Laboratorium Lingkungan, dan 1 UPT Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, BLUD di regional Lampung belum seluruhnya dikategorikan mandiri secara *financial* karena belum mampu memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri.

Analisis Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik

Belanja Pemerintah Pusat, melalui Kementerian/Lembaga yang teridentifikasi sinergis mendukung DAK Fisik di regional Lampung menunjukkan fokus peningkatan pembangunan dan pengembangan pada sektor-sektor strategis seperti jalan, kesehatan dan keluarga berencana, pendidikan, pertanian, dan transportasi pedesaan. Pada akhir tahun 2023, anggaran DAK Fisik yang dialokasikan di regional Lampung mencapai Rp1.232,35 miliar dengan realisasi 96,84 persen dari pagu anggaran, sementara Belanja K/L yang selaras dengan DAK Fisik tersebut mencapai Rp1.559,86 miliar atau 98,21 persen dari pagu anggaran.

Dari segi pembangunan jalan, Belanja K/L yang harmonis dengan DAK Fisik menunjukkan pola alokasi proyek yang cukup merata di seluruh regional Lampung, dengan fokus pada

pemeliharaan, akses transportasi, dan penggantian infrastruktur jalan. Dukungan pada bidang kesehatan, keluarga berencana, pendidikan, pertanian, dan transportasi pedesaan juga menjadi prioritas dengan alokasi anggaran yang signifikan di berbagai daerah yang sama untuk berbagai kegiatan seperti pelatihan, penyaluran benih, peningkatan mutu pendidikan, dan pengembangan infrastruktur transportasi. Hal ini menunjukkan upaya harmonis pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta menjaga stabilitas, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di regional Lampung.

Meskipun realisasi dan pencapaian output dari Belanja K/L yang sinergis dengan DAK Fisik terbilang baik, namun masih terdapat beberapa tantangan selama pelaksanaan anggarannya. Tantangan tersebut meliputi kendala dalam penganggaran, masalah SDM, faktor eksternal seperti kondisi lapangan yang tidak terduga, keterlambatan dalam penerbitan pedoman teknis, serta permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa. Sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga di tingkat daerah perlu didorong untuk mengatasi tantangan tersebut dengan langkah-langkah strategis seperti sinkronisasi perencanaan anggaran, rapat evaluasi, koordinasi dengan lembaga terkait, dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Sinergi Pusat-Daerah Dalam Upaya Pengurangan Pengangguran Dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing

Analisis menunjukkan bahwa kualitas SDM, yang direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta investasi dalam penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), memiliki korelasi negatif dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Hasil ini menegaskan bahwa pembangunan SDM dan peningkatan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri merupakan strategi yang penting untuk mengurangi tingkat pengangguran di regional Lampung.



Selama 2023, pengeluaran pemerintah pusat dan daerah di regional Lampung, melalui APBN dan APBD, dalam empat tahun terakhir secara sinergis meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran. Melalui Belanja Pemerintah Pusat serta DAK Fisik dan DAK Non Fisik, pemerintah memberikan dukungan kepada berbagai sektor seperti UMKM, industri, pertanian, perikanan, pariwisata, dan olahraga. Sementara Belanja Pemerintah Pusat menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan umum dan vokasi, DAK Fisik dan DAK Non Fisik berfokus pada peningkatan kualitas lembaga pendidikan seperti PAUD, sekolah reguler, dan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan dari sisi APBD, program pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja merupakan fokus utama dalam upaya penanggulangan pengangguran di Provinsi Lampung, diikuti oleh program hubungan industrial dan program penempatan tenaga kerja.

Alokasi Belanja K/L, DAK Fisik, dan DAK Non Fisik terkait peningkatan kualitas SDM, ketenagakerjaan, dan penurunan pengangguran di Regional Lampung menunjukkan tren fluktuatif dalam periode 2020 hingga 2023. Pada 2023, belanja terkait Pendidikan merupakan yang paling besar yaitu sebesar Rp469,11 miliar atau tumbuh 2,74 persen (yoy), dimana diarahkan untuk peningkatan akses, kualitas, dan kesetaraan pendidikan reguler PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan sekolah afirmasi. Namun demikian, Belanja terkait pendidikan vokasi mengalami penurunan sebesar 42,39 persen. Pendidikan vokasi penting karena cukup berhubungan langsung dengan peningkatan keterampilan SDM siap kerja pada *entry level*, kewirausahaan, dan keterserapan lulusan pendidikan vokasi baik di sektor usaha formal maupun informal. Sedangkan, realisasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik, hingga Desember 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar dialokasikan pada tingkat pendidikan dasar, yang menegaskan fokus pada peningkatan mutu SDM pada jenjang awal yang fondasional. Sedangkan, dari sisi APBD,

program penempatan tenaga kerja mendapatkan alokasi dana APBD terbesar yaitu sebesar Rp796,98 juta, dengan realisasi mencapai 94,84 persen dari pagu anggaran.

Dalam hal investasi, peningkatan tren jumlah proyek PMA dan PMDN di Lampung diimbangi dengan peningkatan tren Jumlah Penduduk yang Bekerja di Lampung. Hal ini menunjukkan sentimen positif terhadap ketenagakerjaan di tengah nilai realisasi PMDN dan PMA yang cenderung turun akibat *scarring effect* pandemi COVID-19 dan ketidakpastian global. Secara sektoral, pada 2023, meningkatnya jumlah proyek PMA dan PMDN diimbangi dengan peningkatan jumlah pekerja di setiap sektor, kecuali pada sektor Pengadaan Listrik, Gas, dan Pengadaan Air. Adapun sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang merupakan sektor basis di Lampung menyerap tenaga kerja sekitar 40% dari total *share*.

Policy Responses

Rekomendasi mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan fiskal yaitu perencanaan dan penganggaran, peningkatan pendapatan negara dan daerah, optimalisasi belanja pemerintah, serta strategi pembiayaan daerah, dengan highlights berikut:

1. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat perlu segera mengimplementasikan PP 1/2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN). HKFN penting sebagai katalis penyelarasan perencanaan anggaran dan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang meliputi penyelenggaraan sinergi kebijakan fiskal nasional, pembiayaan utang daerah, Dana Abadi Daerah, serta Sinergi Pendanaan APBD dan Non APBD.
2. Akselerasi sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu dilaksanakan melalui penyusunan rencana aksi bersama untuk menyinkronkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Kebijakan Ekonomi Makro dan



Penetapan Plafon Kebutuhan Fiskal (KEM-PPKF) dalam perencanaan penganggaran terkait sasaran pembangunan daerah dan prioritas program pembangunan daerah. Sinergi ini penting untuk meningkatkan ketepatan program dan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional serta regional di Lampung.

3. Program-program prioritas penting untuk diarahkan kepada pembentukan ekosistem/sentra industri yang terintegrasi (hulu-hilir) dan terjamin keberlanjutannya. Fokus pada investasi industri pengolahan bahan baku pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan partisipasi pemegang kewenangan di daerah dan pusat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan PDRB dan menyerap tenaga kerja di Lampung dan sekitarnya.
4. Belanja modal Pemerintah Pusat dan Daerah harus terus disinergikan untuk mendukung konektivitas infrastruktur dan *value chain* di kawasan industri, seperti Kawasan Industri Way Pisang, Tanggamus, Pesawaran, dan Katibung. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produk lokal, menyerap tenaga kerja, dan meratakan pendapatan.
5. Diperlukan stimulus untuk pertanian dan peningkatan produktivitas tanaman pangan. Alokasi anggaran pendukung pertanian, kehutanan, dan perikanan perlu ditingkatkan, dengan fokus pada subsidi benih, permodalan KUR, program asuransi usaha tani, dan pembiayaan melalui Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) untuk mengatasi dampak inflasi pada komoditas strategis.
6. Pemanfaatan energi terbarukan perlu ditingkatkan untuk mendukung kegiatan pertanian di Lampung. Potensi energi terbarukan seperti geotermal, biomassa, matahari, dan air dapat dimanfaatkan, misalnya, Geothermal Way Ratai, Waste to Energy TPA Bakung, dan Proyek Desa Mandiri Energi di Lampung Tengah. Peluang-peluang investasi ini harus mampu segera direalisasikan

melalui kolaborasi lintas sektoral seperti Forum Investasi Lampung (FOILA).

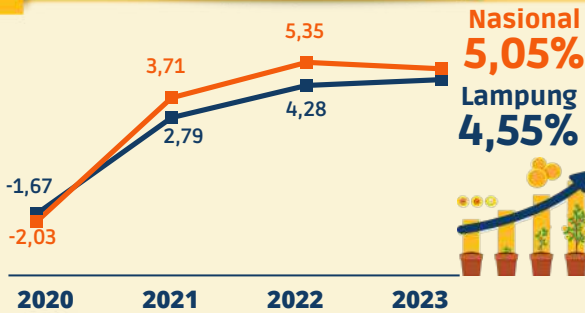
7. Dukungan belanja pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kapasitas hilirisasi produksi pertanian. Pengolahan produk pertanian menjadi produk siap pakai dengan nilai tambah tinggi dapat memperluas pasar dan peluang ekspor, seperti contoh gula cair, kopi bubuk, jus nanas, tepung udang, dan minyak kelapa sawit.
8. Pendekatan simultan pada kebijakan dan koordinasi teknis multi-instansi diperlukan untuk memperkuat pemberdayaan, pendampingan, serta akses keuangan bagi UMKM, dimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat ditingkatkan perannya sebagai pendorong utama peningkatan skala usaha dan produksi unit usaha di pedesaan.
9. Melalui kolaborasi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemerintah pusat, daerah, dan OJK, dan perbankan perlu segera mendorong penyaluran program KUR Khusus berbasis klaster dan Kredit Usaha Alat Mesin Pertanian (Alsintan). Hal ini diperlukan untuk membantu petani menangkal penurunan ekonomi dari perubahan iklim dan menjaga harga pangan. Lampung, sebagai kontributor komoditas ke Jawa, perlu fokus penyaluran pembiayaan tersebut kepada daerah penghasil padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kopi, kakao, dan kelapa sawit.
10. Melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu memperkuat kolaborasi dengan produsen, distributor, pedagang, pengusaha yang menjadi *agent/champion* pendukung ketersediaan pasokan untuk strategi pengendalian harga, manajemen pasokan, mengatasi peralihan musim, dan memitigasi risiko El-Nino yang diprediksi BMKG akan masih berlanjut di tahun 2024 sehingga dapat mempengaruhi produksi bahan pangan, terutama komoditas yang sering kali memiliki andil inflasi besar misalnya Beras, Cabai Rawit, dan Cabai Merah.



11. Pemerintah perlu mendorong program dan belanja yang dapat mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan, pelatihan, dan sektor swasta untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dan mobilitas sosial. Kerjasama dengan sektor swasta dan *Non-Government Organization* (NGO) lokal dan internasional dalam menciptakan program pembangunan yang mampu memberikan peluang kerja dan investasi di daerah pedesaan
12. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan Joint Program antara Ditjen Pajak, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas SDM di bidang pendapatan, peningkatan pelaksanaan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan khususnya Retribusi Daerah, asistensi perumusan tarif dan basis pajak daerah, serta dukungan asistensi pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menekan biaya administrasi pemungutan seperti penyediaan platform pembayaran digital payment, parking meter, tapping box perekam transaksi perhotelan, dan pemanfaatan NIK sebagai interkoneksi data utama antar aplikasi perpajakan daerah.
13. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu berkolaborasi melakukan *spending review* bersama secara berkala serta memastikan pelaksanaan anggaran efektif dan efisien, untuk memastikan anggaran belanja yang telah direalisasikan sesuai dengan target output dan outcome yang dihasilkan lebih optimal, di samping percepatan penyerapan anggaran.
14. Pemerintah Daerah dapat melakukan *exercise* Penyehatan BUMD dengan penambahan penyertaan modal Pemda dari pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, yang diikuti dengan target kinerja terukur pada penguatan *good corporate governance* BUMD. BUMD juga perlu melakukan perluasan usaha di bidang usaha produktif berbasis potensi unggulan daerah di bidang pertanian dan pariwisata, serta sektor teknologi informasi berupa platform *online*.
15. Penting bagi Satker Pusat dan OPD untuk secara bersama-sama melakukan mitigasi risiko dalam pelaksanaan Belanja K/L yang harmonis dengan DAK Fisik. Strategi ini mencakup aspek-aspek seperti estimasi biaya yang akurat, jadwal pelaksanaan yang realistis, serta identifikasi dan penanganan potensi risiko beserta rencana aksi. Langkah-langkah ini penting guna mengurangi ketidakpastian, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran, *project delivery*, sinergi antara belanja nasional dan daerah, serta memastikan manfaat cepat dirasakan masyarakat penerima manfaat.
16. Penguatan kapasitas administratif daerah guna peningkatan efektivitas dan *coverage* Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK). Pemerintah Pusat dan Daerah secara kolaboratif mengembangkan program pelatihan khusus untuk kota/kabupaten yang memiliki kapasitas administratif terbatas, baik di Lampung maupun Nasional.
17. Untuk meningkatkan redistribusi pendapatan antar daerah, Pemerintah Pusat dapat mengembangkan inisiatif Insentif Fiskal kategori Peningkatan Investasi Lokal, yang bertujuan mendorong investasi di sektor-sektor yang memiliki potensi menciptakan lapangan kerja lokal di daerah-daerah Lampung dengan tingkat pembangunan rendah. Selain itu, diperlukan penambahan program perlindungan sosial yang bersifat *targeted*, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang tinggi.



Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 (ctc)



Perekonomian Lampung pada tahun 2023 melanjutkan tren pertumbuhan positif yang didorong oleh seluruh lapangan usaha dan sebagian besar komponen pengeluaran.

Sektor transportasi mengalami pertumbuhan tertinggi dibanding LU lainnya akibat peningkatan penggunaan sebagian besar moda transportasi seperti Angkutan Udara, Angkutan Laut, dan Kereta Api yang dipicu oleh semakin meningkatnya mobilitas masyarakat



Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) LNPRT mengalami pertumbuhan paling tinggi dibandingkan komponen lain yang didorong oleh kegiatan persiapan pemilihan umum baik yang dilakukan oleh peserta maupun penyelenggara pemilu seperti kampanye yang dilakukan partai politik dalam rangka persiapan pemilu 2024.

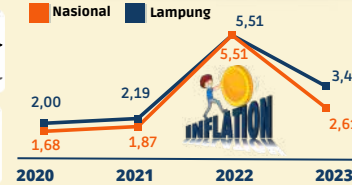


Struktur PDRB Tahun 2023 (ctc)



Inflasi (yoy)

- Penahan (yoy)
- 1 Angkutan Udara
 - 2 Telur Ayam Ras
- Pendorong (yoy)
- 1 Beras
 - 2 Cabai Merah



Inflasi Lampung di tahun 2023 melandai
Inflasi Lampung terjaga pada level sasaran 3 ± 1. Meskipun kondisi anomali cuaca dan El Nino yang terjadi sejak akhir triwulan II-2023 dan berlanjut sampai akhir tahun 2023 berpengaruh pada produksi sektor pertanian dan menyebabkan beberapa harga komoditas naik, terutama beras.

Sumber: BPS

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Lampung tahun 2023 berstatus TINGGI, meningkat 0,69 poin dibandingkan tahun 2022

IPM Lampung 2023 **72,48**

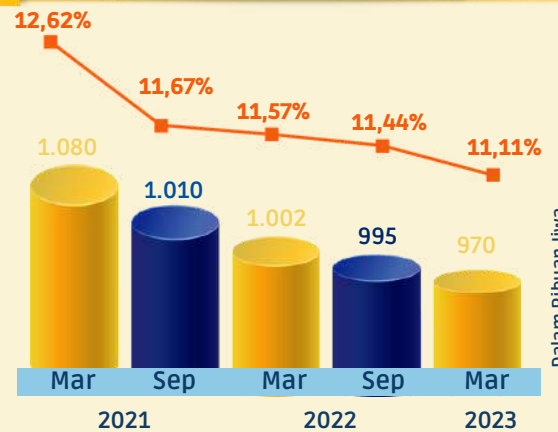


Umur Harapan Hidup Saat Lahir 74,17 tahun



Pengeluaran per Kapita Per Tahun Rp10.769.000,00

Tingkat Kemiskinan



Dalam Ribuan Jiwa



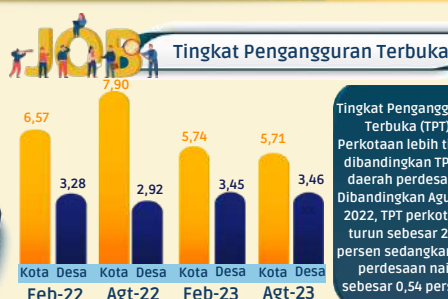
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin berdasarkan Daerah



Jumlah Penduduk miskin Maret 2023 turun sebanyak

24,92 ribu jiwa dibandingkan dengan September 2022

Ketenagakerjaan



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Perkotaan lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan. Dibandingkan Agustus 2022, TPT perkotaan turun sebesar 2,19 persen sedangkan TPT perdesaan naik sebesar 0,54 persen.

Nilai Tukar Petani (NTP)



NTP Lampung tahun 2023 tercatat sebesar 109,32, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 104,34. Sebagian besar NTP per subsektor mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

NTP 109,32 ↑ 4,77% (yoy)

Gini Rasio

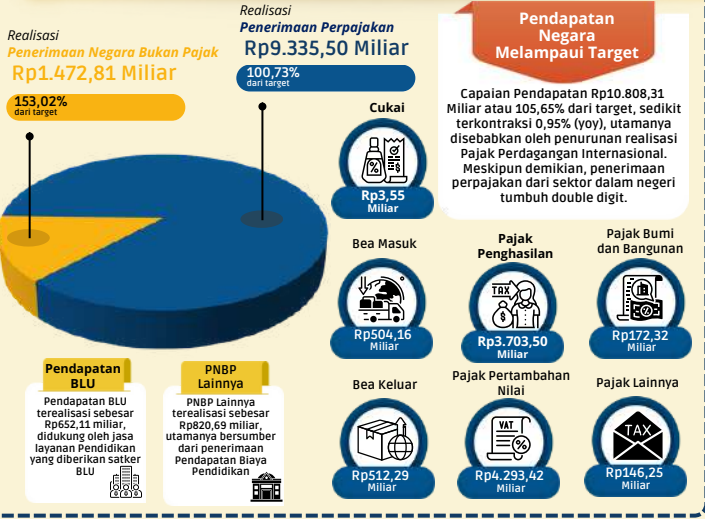


Rasio Gini Provinsi Lampung sebesar 0,324 pada Maret 2023. Lampung termasuk ke dalam 5 provinsi dengan Indeks Gini Rasio terendah di Regional Sumatera.

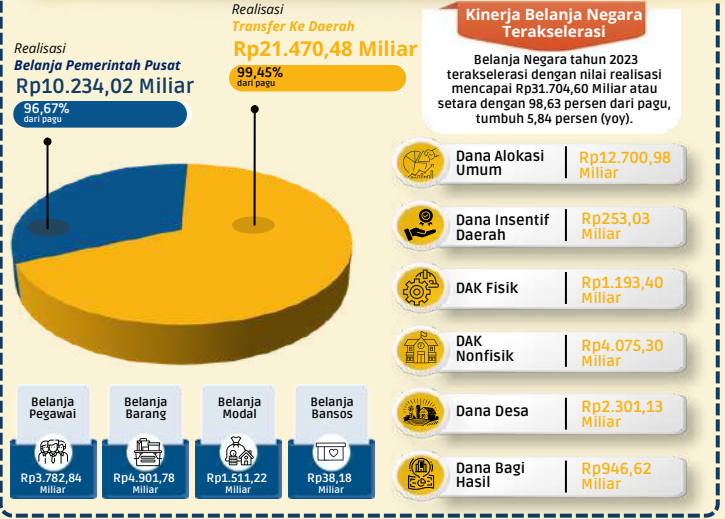


Kinerja Fiskal Provinsi Lampung

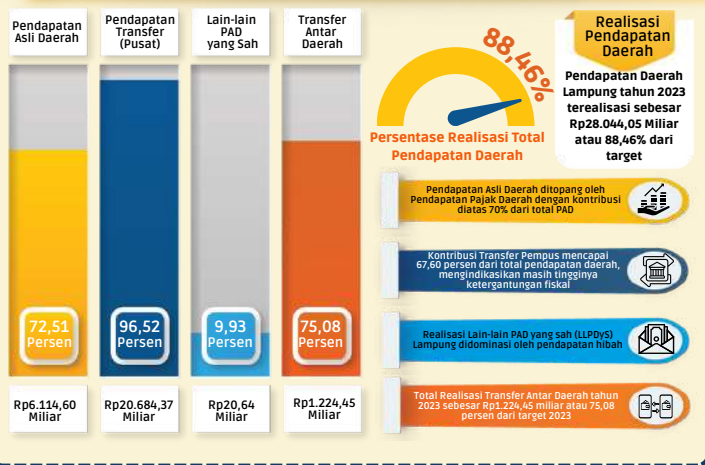
Realisasi Pendapatan Negara



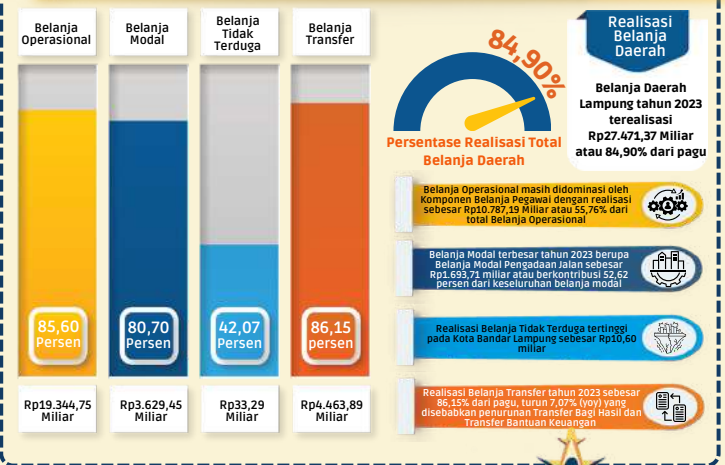
Realisasi Belanja Negara



Realisasi Pendapatan Daerah

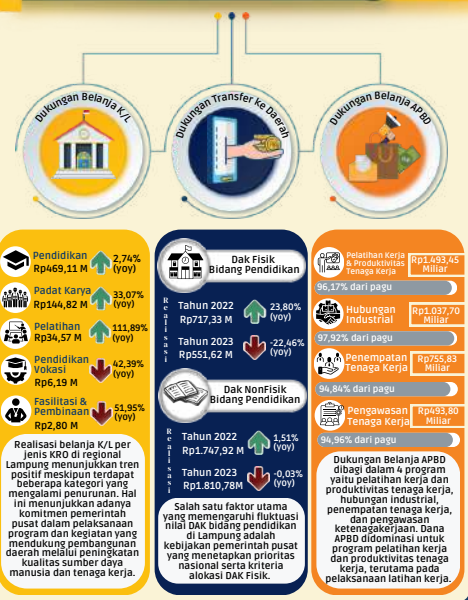


Realisasi Belanja Daerah

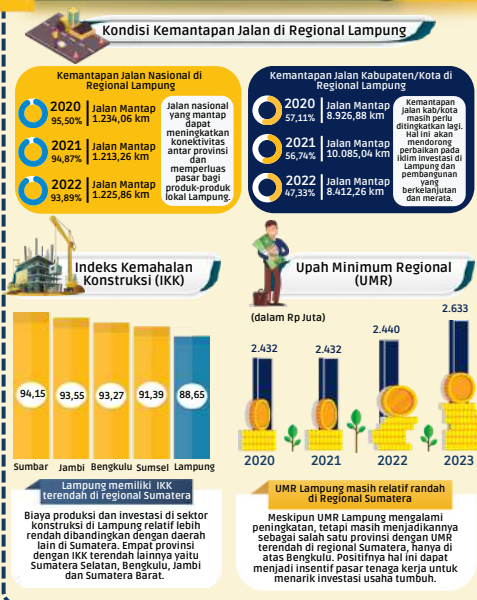


Snapshot Analisis Tematik

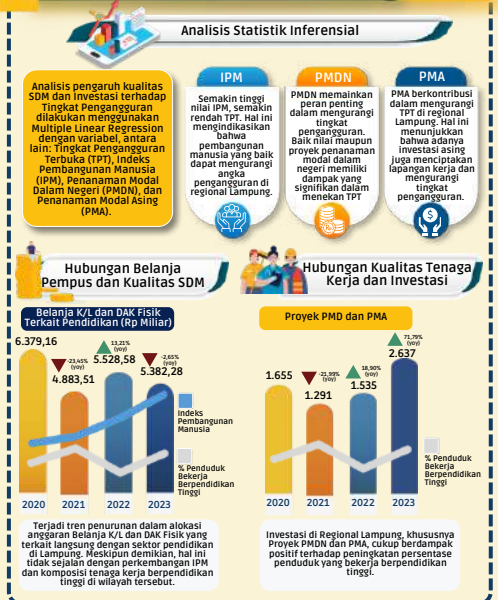
Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja



Upaya Peningkatan Investasi



Pengaruh Kualitas SDM & Tingkat Investasi terhadap Tingkat Pengangguran





Halaman ini sengaja dikosongkan

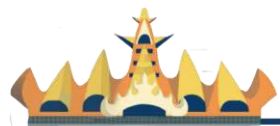
“ *I always enjoy the job and the work that I do, because that's the condition that I attach in accepting any job. This way, I can really work and dedicate myself to the institution for achieving the goal which I believe is a noble one* **”**

**-Sri Mulyani-
Menteri Keuangan RI**

SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH

BAB I





BAB I SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH

1.1. PENDAHULUAN

Tujuan bernegara menjadi panduan dalam pembangunan dan pelayanan kepada rakyatnya. Sebagai bagian dari Indonesia, Lampung mengikuti semangat konstitusi UUD 45 yang menegaskan komitmennya untuk melindungi warga, meningkatkan kesejahteraan umum, mengembangkan intelektualitas bangsa, dan berkontribusi pada perdamaian dunia. Lampung mengadopsi kerangka perencanaan nasional yang terstruktur, mulai dari rencana jangka panjang hingga rencana jangka pendek, untuk mencapai tujuan tersebut dengan kesinambungan dan konsistensi dalam pembangunan.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal memiliki peran krusial sebagai alat pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab dalam memastikan efektivitas kebijakan fiskal sebagai instrumen alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang efektif. Kebijakan fiskal yang tepat diharapkan dapat meningkatkan indikator ekonomi makro dan kesejahteraan di Lampung serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan, dengan memungkinkan pengendalian pelaksanaan rencana untuk penyesuaian yang diperlukan guna mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

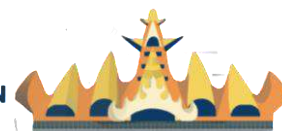
1.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

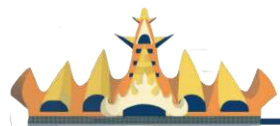
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen strategis yang mengarahkan pembangunan suatu daerah selama lima tahun ke depan, dengan visi "Rakyat Lampung Berjaya" menjadi panduan utama. Dokumen ini mencerminkan cita-cita Kepala dan Wakil Kepala daerah untuk masa jabatan 2019-2024, dengan visi tersebut dijabarkan melalui misi, tujuan, dan sasaran konkret. Dalam konteks adaptasi terhadap perubahan, terjadi penyederhanaan dan perluasan indikator sasaran pembangunan melalui Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, sebagai respons terhadap dampak pandemi Covid-19 dan dinamika situasi ekonomi dan sosial.

Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan responsivitas dan relevansi rencana pembangunan terhadap tantangan ekonomi dan pembangunan yang berasal dari dampak pandemi Covid-19, serta efek domino dari ketegangan geopolitik, perubahan suku bunga yang tinggi, penurunan permintaan global, dan inflasi. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan efektivitas rencana pembangunan sekaligus menjaga keseimbangan antara target pencapaian dengan ketersediaan anggaran di Provinsi Lampung.

Tabel 1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung 2019-2024

TUJUAN	SASARAN
MISI 1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai	
1 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya dan demokratis	1 Meningkatkan kerukunan antar umat beragama 2 Meningkatkan kualitas demokrasi di daerah 3 Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan budaya
MISI 2: Mewujudkan "Good Governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik	
2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1 Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi
MISI 3: Meningkatkan kualitas SDM, mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas	
3 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 2 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah 3 Meningkatkan pengarusutamaan gender 4 Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak





TUJUAN	SASARAN
MISI 4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah	
4 Meningkatkan infrastruktur untuk konektivitas wilayah, pelayanan dasar dan energi	1 Meningkatkan kemantapan jalan provinsi 2 Penguatan sarana dan prasarana dasar wilayah 3 Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi
MISI 5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan	
5 Meningkatnya perekonomian daerah	1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 2 Meningkatnya kesejahteraan petani 3 Menjaga stabilitas harga 4 Menurunnya kemiskinan
MISI 6: Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama	
6 Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	1 Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2 Menurunnya tingkat emisi Gas Rumah Kaca 3 Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Bappeda Lampung (diolah)

Dalam mengantisipasi perubahan dinamika yang terus berkembang, terutama sebagai respons terhadap dampak luas pandemi Covid-19 terhadap aspek sosial, ekonomi, dan pembangunan di Provinsi Lampung, langkah penyederhanaan indikator sasaran pembangunan telah diambil dengan menggabungkan beberapa indikator menjadi satu indikator yang lebih luas, yang kemudian diaplikasikan dalam penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024.

Penyederhanaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan daerah tetap responsif terhadap perubahan kondisi, sambil tetap memperhitungkan ketersediaan anggaran di Provinsi Lampung. Hal ini juga sejalan dengan upaya untuk memastikan bahwa sasaran pembangunan dapat tetap dicapai dengan efisien, meskipun dihadapkan pada tantangan dan perubahan yang tak terduga.

Evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dilakukan melalui penilaian terhadap target dan capaian indikator yang telah ditetapkan. Setiap tahun, target ini ditetapkan dengan tujuan dapat dicapai dan dievaluasi. Indikator kinerja makro menjadi penanda utama dalam menilai kesuksesan pembangunan di Provinsi Lampung, serta berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian indikator pembangunan nasional.

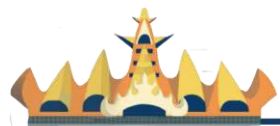
Selain itu, indikator ini juga memberikan arahan bagi pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Lampung dalam usaha mereka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya keselarasan ini, diharapkan upaya pembangunan di tingkat lokal dapat saling mendukung dan menyokong visi pembangunan yang lebih besar untuk Provinsi Lampung secara keseluruhan.

Tabel 1.2. Sasaran Indikator Makro Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Sasaran Makro Kesra	Tahun ke-1 (<i>baseline</i>)	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,27	2,5 – 3,5	3 – 4	3,5 – 4,5	4,5 – 5,5
PDRB Perkapita	45,54	40 – 41	42-43	43 – 44	45 – 46
Inflasi (%)	3.0 – 3.5	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1
IPM	69,57	69,69 – 70	70 – 70,3	70,3 – 70,6	70,6 – 70,9
Kemiskinan (%)	11,1	12,76 – 12,4	12,4 – 11,9	11,9 – 11,4	11,4 – 10,9
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3.85	4,5 – 4,0	4,4 – 4,3	4,3 – 4,0	4,0 – 3,8
Gini Ratio	0,32	0,310 – 0,334	0,308 – 0,324	0,302 – 0,319	0,293 – 0,314
Nilai Tukar Petani (NTP)	106,98	101 – 102	102 – 103	104-105	105 – 106
Tingkat Kemantapan Jalan (%)	79	74	76	77	78
Persentase Peningkatan PAD (%)	2,79	1,37	3,87	4,74	8,47
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	6,86	6,74	6,915	7,066	7,29

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Bappeda Lampung (diolah)





RKPD merupakan penjabaran RPJMD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk satu tahun, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode satu tahun ke depan secara terencana melalui sumber pembiayaan baik APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN.

Selaras dengan RPJMD 2019-2024, rencana pembangunan Provinsi Lampung tahun 2023 yang bertema **“Penguatan Ekonomi yang Inklusif Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”** yang ditransmisikan melalui 6 (enam) jalur prioritas pembangunan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya; dan
6. Pembangunan Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Pasca Pandemi Covid-19, kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung diarahkan pada penguatan ekonomi untuk mendorong akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah.

Guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah, pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan arah sasaran makro tahun 2023 yang tercantum pada target RKPD 2023, antara lain: (1) Menciptakan kesempatan kerja yang tinggi untuk mengurangi kemiskinan; (2) Meningkatkan kapasitas perekonomian daerah; (3) Meningkatkan pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat; (4) Menciptakan

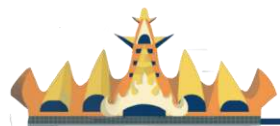
kondisi perekonomian daerah yang stabil; dan (5) Pemerataan distribusi pendapatan.

Dalam Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2023 Pasal 2, disebutkan bahwa RKPD Provinsi Lampung berpedoman pada RKP Tahun 2023 dan program strategis nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat. RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 masih memprioritaskan kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 di daerah. Upaya pemantapan pemulihan ekonomi tersebut, salah satunya adalah melalui Peningkatan Investasi. Pemerintah Provinsi Lampung menilai penting untuk terus mengupayakan peningkatan Investasi dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 di Lampung.

Berbagai kebijakan dirancang sebagai upaya menarik investasi antara lain melalui penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi, pemberian insentif pajak bagi investor, jaminan kepastian hukum berusaha, kepastian biaya pelayanan, promosi investasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mendukung usaha, bisnis dan investasi. Upaya lain yang dilakukan adalah memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan, sesuai dengan basis ekonomi Lampung, dimana mayoritas penduduk usia kerja bekerja di sektor pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung telah memiliki program **“Kartu Petani Berjaya”** yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku pertanian (hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan). Kebijakan selanjutnya adalah Pemulihan sektor UMKM, Industri, Perdagangan, dan Pariwisata, untuk optimalisasi sektor-sektor industri unggulan daerah secara bertahap.

Meninjau perkembangan daerah terkini, memperhatikan tantangan, prospek, dan berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat, serta mencermati kondisi ekonomi dan perkembangan capaian indikator makro ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melakukan penyesuaian terhadap sasaran makro ekonomi yang tercermin dalam RKPD Tahun 2023. Penyesuaian ini dilakukan dengan





memperhatikan salah satunya terkait kemampuan keuangan daerah, sehingga target-target pembangunan perlu disesuaikan agar berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, maka sasaran makro pembangunan dalam RKPDP Provinsi Lampung Tahun 2023, diasumsikan sebagai berikut.

Tabel 1.3. Sasaran Makro Ekonomi RKPDP Provinsi Lampung 2023

Indikator Makro	RKPDP 2023
Pertumbuhan ekonomi (%)	3,5 – 4,5
Inflasi (%)	3.0 ± 1
PDRB per Kapita ADHB (juta)	43- 44
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4 – 4,3
Kemiskinan (%)	11,4 – 11,9
IPM	70,3 – 70,6
Gini Ratio	0.302 – 0.319
Nilai Tukar Petani (NTP)	104- 105
Tingkat Pemantapan Jalan	77
Persentase Peningkatan PAD (%)	4,74
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	7.066

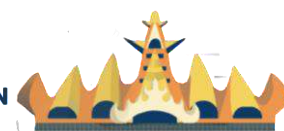
Sumber: RKPDP Provinsi Lampung 2023

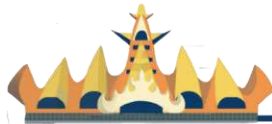
Berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mengacu pada sasaran pokok sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, serta dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional. Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RKPDP Tahun 2023 maupun program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Tabel 1.4. Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023

<p>PRIORITAS 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat - Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Menengah - Meningkatnya penyerapan tenaga kerja - Meningkatnya pengarusutamaan Gender - Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak
<p>PRIORITAS 2 : Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi - Meningkatkan kesejahteraan petani - Menjaga stabilitas harga - Menurunnya Kemiskinan
<p>PRIORITAS 3 : Pembangunan Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi - Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah - Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi
<p>PRIORITAS 4 : Reformasi Birokrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas Implementasi reformasi birokrasi
<p>PRIORITAS 5 : Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kerukunan antar umat beragama - Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah - Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya
<p>PRIORITAS 6 : Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca - Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

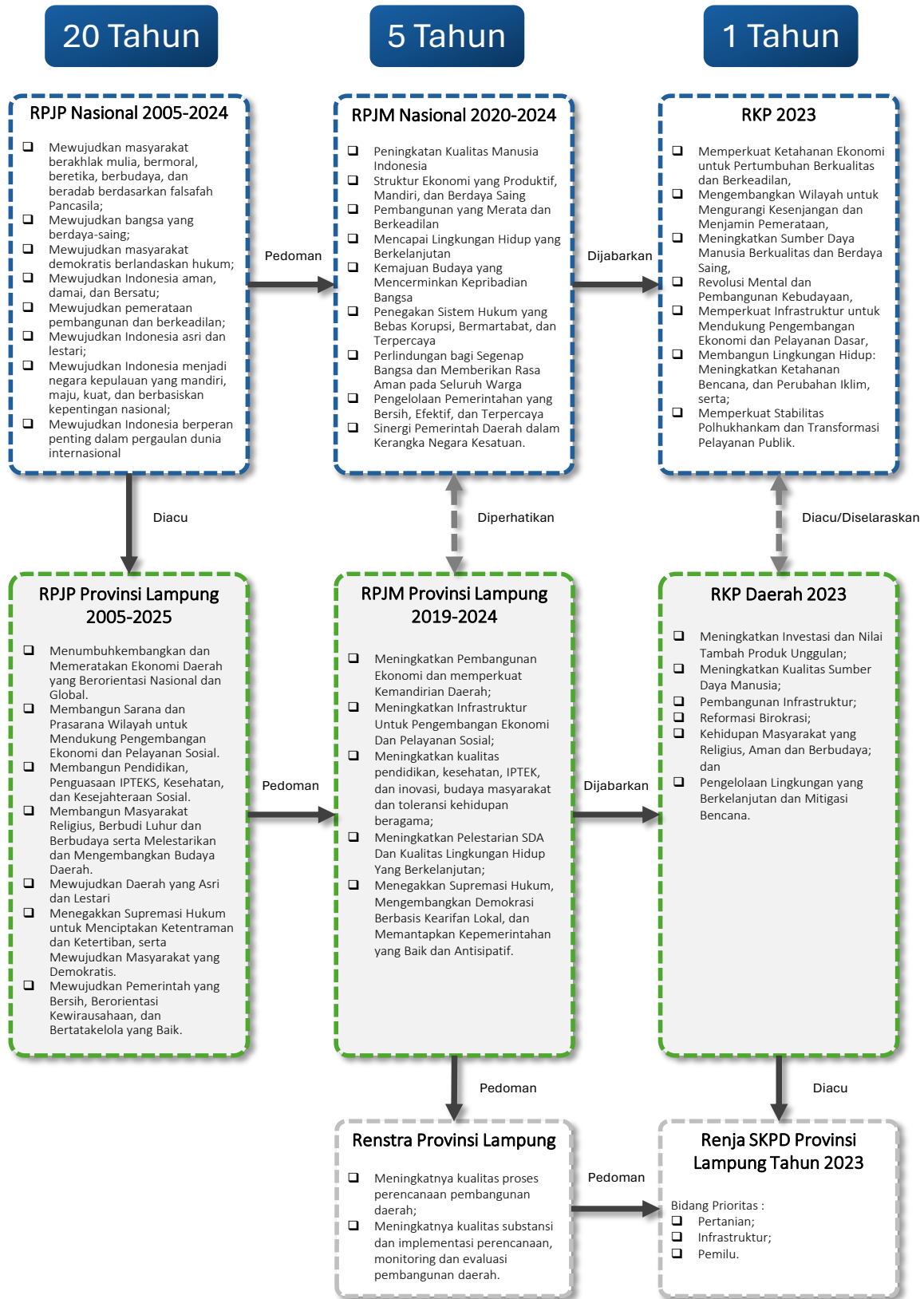
Sumber : Rancangan Akhir RKPDP Provinsi Lampung Tahun 2023, Bappeda Lampung (diolah)



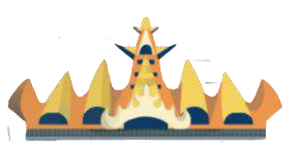


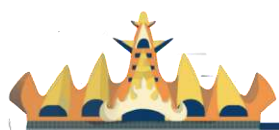
1.3. KESELARASAN RPJMN DENGAN RPJMD

Gambar 1.1. Mapping Keselarasan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Provinsi Lampung



Sumber: Bappenas, Bappeda Lampung (diolah)





RPJMN 2020-2024 sebagai titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, maka penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian peningkatan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan 9 (sembilan) misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia Maju. Untuk menjabarkan RPJMN 2020-2024 secara tahunan, pemerintah telah mencanangkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, dan mengacu pada RKPD Provinsi Lampung, dijelaskan bahwa tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah “PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MENUJU RAKYAT LAMPUNG BERJAYA” dengan 6 (enam) prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya, penyusunan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 telah pula mengintegrasikan 33 Agenda Kerja Gubernur/Wakil Gubernur ke dalam rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah.

1.4. TANTANGAN SASARAN PEMBANGUNAN

1.4.1. Tantangan Ekonomi Daerah

Provinsi Lampung sebagai gerbang pulau Sumatera mempunyai potensi besar untuk berkembang. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol Sumatera yang telah rampung juga menjadi nilai tambah untuk meningkatkan investasi dan perekonomian di Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung juga telah melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dan berdampak terhadap

kehidupan masyarakat yang ditandai dengan indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang kian membaik. Namun demikian, masih terdapat permasalahan dan tantangan ekonomi daerah yang perlu ditangani secara komprehensif.

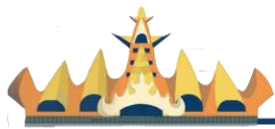
1.4.1.1. Tantangan dalam Pengelolaan SDA

Provinsi Lampung memiliki potensi Sumber Daya Alam melimpah yang berpotensi menjadi penyokong perekonomian daerah. Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang berkontribusi untuk produksi komoditas kopi robusta, lada hitam, dan nanas kaleng untuk produksi nasional dan kebutuhan dunia. Potensi sumber daya alam yang berasal pertanian dan perkebunan juga mendominasi PDRB Provinsi Lampung, pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pihak telah melakukan perencanaan pemetaan jenis tanaman di tiap kawasan yang telah ditentukan agar ke depan Lampung tidak lagi mengalami kesulitan beberapa jenis bahan pangan yang menjadi penyumbang tingginya inflasi.

Pemerintah Provinsi Lampung juga berkomitmen mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki sehingga dapat menjadi salah satu sektor meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu potensi SDA Lampung yaitu panas bumi atau geothermal yang tersebar dalam 13 titik di sekitar wilayah Provinsi Lampung diantaranya terdapat di Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat. Penerimaan negara atas pengelolaan SDA tersebut dikelola oleh Pemerintah Pusat, kemudian masuk ke Provinsi Lampung sesuai skema Dana Bagi Hasil dengan persentase tertentu. Selain itu, di Provinsi Lampung terdapat potensi sumber daya air yang berada di kawasan hutan Kabupaten Tanggamus, Lampung Barat dan Lampung Selatan, dan sungai-sungai seperti Sungai Sekampung, Seputih, Semangko, dan Tulang Bawang.

Salah satu potensi sumber daya air yang telah rampung dibangun di tahun 2023 adalah Bendungan Marga Tiga, bendungan ini difungsikan sebagai penyedia air irigasi untuk mendukung kebutuhan pangan, sebagai penyedia air baku, dan





juga sebagai penampung air hujan sehingga mengurangi risiko banjir pada wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Namun adanya masalah pembebasan lahan menyebabkan Bendungan Marga Tiga belum dapat dioperasikan dan berfungsi hingga akhir tahun 2023.

1.4.1.2. Tantangan dalam Penciptaan Iklim dan Potensi Investasi yang kondusif.

Provinsi Lampung sebagai gerbang pulau Sumatera memiliki potensi besar untuk berkembang. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol Sumatera yang telah rampung juga menjadi nilai tambah untuk meningkatkan investasi dan perekonomian di Lampung. Tumbuhnya investasi yang cukup kuat dengan naiknya nilai proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2023 sebesar 26,64 persen (*yoy*) dibandingkan tahun lalu, didukung oleh upaya mewujudkan Lampung Ramah Investasi.

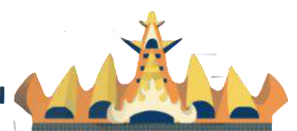
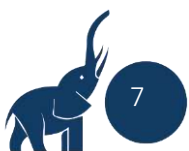
Kepastian hukum dalam investasi di daerah juga memegang peranan sangat penting bagi para investor karena sebaik apa pun pasar dan bahan baku, namun apabila tidak diimbangi oleh regulasi pemerintah yang bersifat mendukung maka para investor akan enggan menginvestasikan modalnya. Peningkatan pelayanan perizinan terus dilakukan dalam rangka menyederhanakan dan meningkatkan keterbukaan proses perizinan melalui penerapan sistem perizinan *online*. Adanya satgas monitoring dan kemudahan berusaha, Pemetaan Peluang Investasi di Provinsi Lampung, serta terbentuknya FOILA (Forum Investasi Lampung) yang berkelanjutan diharapkan dapat ikut menembus perekonomian Lampung dari sisi investasi. Selain itu, pertumbuhan investasi Lampung dapat kembali meningkat dengan prasyarat masuknya investasi PMA dan PMDN yang bernilai besar, seperti pengembang kawasan terintegrasi pariwisata Bakauheni, rencana pembangunan beberapa kawasan khusus, dan rencana proyek strategis nasional baru yang ditetapkan di triwulan akhir tahun 2023.

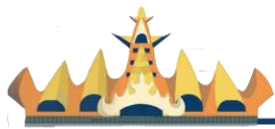
Meski memiliki sumber daya alam baik dalam bentuk PLTA dan geothermal, Provinsi Lampung masih bergantung kepada koneksi Sumatera Selatan dalam penyedia energi sehingga riskan terhadap gangguan dan ketersediaan *supply* energi, terutama listrik, hal ini masih menjadi kendala utama dalam investasi di Provinsi Lampung. Tantangan lain dalam mendorong potensi investasi yang dihadapi oleh Provinsi Lampung adalah belum maksimalnya daerah dalam mempersiapkan kawasan industri yang siap pakai dan terjamin dari sisi keamanan, menjadi penyebab investor memilih opsi kawasan di daerah lain yang terjamin dan lebih rendah dari sisi biaya operasionalnya. Keluarnya proyek pembangunan Kawasan Industri Tanggamus dari Program Strategis Nasional di Provinsi Lampung juga merupakan tantangan tersendiri karena berdampak pada perlambatan investasi dan kinerja sektor konstruksi.

1.4.1.3. Tantangan birokrasi dan pelayanan perizinan

Birokrasi memiliki peran yang strategis dalam pengorganisasian penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah demi tercapainya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Namun pada penerapannya, birokrasi dianggap sebagai proses yang tidak responsif terhadap tuntutan masyarakat dan memberikan pelayanan dengan prosedur yang berbelit-belit. Secara konkrit, permasalahan birokrasi dapat dilihat dari lamanya birokrasi perizinan kepada masyarakat yang dianggap belum maksimal dalam menyediakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat.

Untuk mendukung kemudahan berusaha di daerah dan mewujudkan Provinsi Lampung sebagai provinsi yang berdaya saing, telah disusun Standar Pelayanan Perizinan berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung pada tahun 2021. Jenis pelayanan perizinan di Provinsi Lampung yang diatur pada standar pelayanan





tersebut mencakup atas 11 sektor yang terdiri dari 903 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan.

Usaha lain yang telah diupayakan pemerintah daerah untuk memudahkan pelayanan perizinan adalah pengajuan perizinan secara *online* melalui *Single Submission* (OSS), Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terintegrasi Untuk Publik (Si Cantik *Cloud*) dan/atau sistem lainnya serta melalui sistem manual. Selain itu, pendirian Mal Pelayanan Publik pada beberapa Kabupaten/Kota yang telah dilengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan dan perizinan secara terpadu dari 15 perangkat daerah dan instansi vertikal/BUMN/BUMD juga merupakan terobosan yang harus dilanjutkan. Dengan dilakukannya reformasi birokrasi pelayanan perizinan investasi merupakan salah satu daya tarik dalam peningkatan jumlah realisasi nilai investasi di Provinsi Lampung.

1.4.1.4. Tantangan dukungan permodalan dan infrastruktur ekonomi.

Dengan jumlah tenaga kerja yang mendominasi, sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan Provinsi Lampung. Melalui program Kartu Petani Berjaya (KPB) Provinsi Lampung telah membuktikan keberhasilannya membangun ekonomi berbasis pertanian dan menyejahterakan para petani dengan memberikan jaminan bagi para petani mendapatkan bibit, pupuk, pasar, serta permodalan. Melalui program tersebut, pemerintah daerah juga mendorong pihak perbankan membantu para petani terkait permodalan melalui realisasi penyaluran KUR yang terintegrasi dengan KPB. Selain untuk para petani, pemerintah pusat juga turut berkontribusi dan mendorong pihak perbankan dan non perbankan mendukung pelaku UMKM di Provinsi Lampung dalam penyediaan modal melalui skema KUR dan UMi.

Realisasi penyaluran KUR per 31 Desember 2023 di Provinsi Lampung mencapai Rp8,30 triliun, yang disalurkan kepada total 172.662 debitur. Permodalan pemerintah ini mendukung sektor-sektor basis perekonomian yang ada di Lampung

yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor perdagangan besar dan eceran; industri pengolahan; serta transportasi dan pergudangan. Besarnya dukungan permodalan pemerintah tersebut kepada masyarakat belum disertai penyediaan infrastruktur jalan kabupaten/kota dan infrastruktur konektivitas yang optimal guna mendukung peningkatan mobilitas barang, jasa, dan orang dalam mendukung perekonomian antar wilayah lingkup Provinsi Lampung. Keterbatasan investasi pemerintah dan swasta masih merupakan faktor krusial yang menyebabkan kualitas infrastruktur di Provinsi Lampung memiliki peningkatan kualitas yang moderat.

Di tahun 2023, Provinsi Lampung mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp814,7 miliar yang ditujukan untuk perbaikan 17 ruas jalan provinsi dan kabupaten di Lampung. Hingga akhir tahun 2023 kondisi kemantapan jalan nasional di Provinsi Lampung diprediksi mencapai 94,51 persen. Sedangkan kondisi kemantapan jalan kabupaten/kota diprediksi mencapai 78,68 persen dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 77 persen. Kondisi kemantapan jalan yang sebelumnya mencapai rata-rata 81 persen pada 2022 kini naik menjadi 86,6 persen pada 2023. Selain perbaikan jalan, Provinsi Lampung juga tercatat telah melakukan perbaikan pada tujuh jembatan di berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Hal ini diharapkan menjadi nilai tambah yang diperhitungkan dalam menarik dan mengembangkan investasi daerah. Dengan semakin baiknya infrastruktur diharapkan dapat menekan biaya logistik serta membangkitkan kualitas konektivitas industri hulu dan hilir.

Namun, kualitas infrastruktur dan prasarana di Provinsi Lampung, termasuk terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara, masih perlu pengembangan lebih lanjut untuk mendukung aktivitas ekonomi dalam skala yang lebih besar. Masih terdapat kesenjangan pertumbuhan antara wilayah timur dan barat Provinsi Lampung, sehingga infrastruktur penghubung yang memenuhi





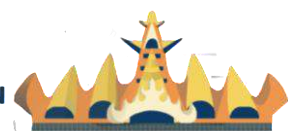
persyaratan untuk menghubungkan jaringan jalan lintas nasional sangat diperlukan. Masih terdapat kerusakan pada tanggul irigasi yang menjadi pendukung utama sektor pertanian di wilayah ini. Pada tahun 2022, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung mencatat adanya kerusakan pada 19 irigasi yang tersebar di wilayah Lampung, dengan dua saluran irigasi utama berhasil diperbaiki pada tahun 2023. Sebagai bukti dari fokus pemerintah daerah terhadap kondisi irigasi yang vital bagi sektor pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung telah membentuk Komisi Irigasi Provinsi Lampung pada tahun 2023 melalui Keputusan Gubernur Lampung nomor G/14/V.04/HK/2023. Komisi ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan, rencana, dan strategi pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi, serta menentukan prioritas alokasi dana untuk infrastruktur irigasi yang lebih baik.

1.4.1.5. Tantangan implementasi teknologi dalam aktivitas perekonomian

Pada masa pandemi Covid-19, hampir semua sektor mengalami kelesuan terutama akomodasi dan jasa pariwisata. Namun kondisi tersebut menjadi momentum UMKM untuk naik kelas dengan memanfaatkan teknologi dalam memasarkan produk, jasa pengantaran barang/jasa, hingga akses perluasan pasar. Didasari oleh semakin cepatnya proses transformasi teknologi yang berkembang, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah mengembangkan penerapan teknologi pertanian kepada para petani di daerah, diharapkan sektor pertanian mulai dapat menerapkan teknologi yang sederhana yang mampu membantu meningkatkan kontribusi agroindustri. Selain melalui teknologi pertanian, pemerintah Provinsi Lampung juga telah meluncurkan aplikasi e-KPB (Kartu Petani Berjaya) yang semakin memudahkan para petani untuk memperoleh fasilitas dan bantuan. Sejalan dengan upaya implementasi teknologi, Pemerintah Provinsi Lampung juga menggiatkan peningkatan transformasi digital melalui program “*Smart Village*”. Program ini merupakan sebuah terobosan

baru yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha-usaha kreatif di pedesaan, meningkatkan nilai tambah, membuka jaringan pemasaran global bagi UMKM serta bagi Pemerintah Desa dapat memberikan pelayanan instan yang optimal bagi warga berbasis pelayanan digital. Selain itu pemerintah dapat memilih alternatif kebijakan terbaik yang didasari analisa *big data (evidence-based policy)* yang terintegrasi antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi.

Meskipun Provinsi Lampung masih menghadapi beberapa tantangan terkait pengembangan teknologi, hal ini menandakan potensi untuk perbaikan. Peningkatan kualitas akses jaringan bagi masyarakat pedesaan perlu menjadi prioritas, diiringi dengan peningkatan infrastruktur yang memadai. Meskipun kualitas internet dan literasi digital masih menjadi fokus, kesadaran akan manfaat penggunaan teknologi untuk pengembangan bisnis sudah semakin meningkat. Melalui pendidikan yang tepat dan pembelajaran kontinu, pemanfaatan teknologi digital secara lebih efektif pada level individu perlu didorong agar dapat mengoptimalkan potensi pasar. Pemerintah diharapkan menjadi garda terdepan dalam menangani permasalahan tersebut agar pengembangan ekonomi digital mencapai potensi penuhnya dan memberikan dampak positif yang nyata. Peran aktif pemerintah dapat tercermin dalam upaya menghadirkan inovasi terkini yang memudahkan masyarakat dalam beraktivitas ekonomi. Pentingnya transisi ke platform digital menjadi semakin jelas, seperti dalam pengisian bahan bakar di SPBU, pembayaran PBB, dan sistem pembayaran digital di pasar tradisional. Edukasi kepada pedagang mengenai penggunaan QRIS dan pemahaman terkait tarifnya perlu ditingkatkan secara luas, sehingga kekhawatiran terkait biaya *merchant* dan *settlement* dapat diminimalisir, sementara konsumen juga merasa nyaman dengan tarif penggunaan QRIS yang lebih terjangkau. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat mendorong adopsi teknologi digital secara





menyeluruh, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung secara keseluruhan.

1.4.2. Tantangan reformasi struktural

Fokus reformasi struktural terbagi menjadi tiga titik. Pertama, pembangunan sumber daya manusia melalui reformasi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kedua, penyediaan infrastruktur yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, digital, energi, pangan, dan upaya mendorong industrialisasi. Terakhir, *institutional development* berupa reformasi birokrasi dan regulasi dan mendorong kemudahan berusaha.

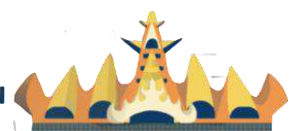
Pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Lampung telah menjalankan agenda reformasi struktural yang diwujudkan antara lain dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pembangunan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan regulasi. Seluruh langkah tersebut dilakukan untuk membangun struktur perekonomian yang lebih baik. Reformasi struktural yang mulai dilaksanakan harus dikesampingkan sementara akibat adanya pandemi Covid-19, kini mulai dijalankan kembali dengan harapan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi ketimpangan, meningkatkan investasi, dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Reformasi Pendidikan telah dijalankan oleh pemerintah melalui dibentuk dan dijalkannya kurikulum merdeka oleh pemerintah pusat yang kemudian menjadi pedoman bagi pemerintah daerah. Pembagian kewenangan antar pemerintah juga telah dijalankan dengan regulasi yang semakin kuat, rencana Pemprov Lampung untuk menciptakan *smart school* dan revitalisasi SMK juga terlihat dengan didorongnya SMK-SMK di Provinsi Lampung menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan vokasi agar memiliki keleluasaan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang

berlaku, sehingga sekolah dapat mengembangkan secara maksimal ekosistem pendidikan vokasi guna melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. Meski telah disahkan di tahun 2023, namun SMK BLUD belum dapat berjalan sepenuhnya karena adanya hambatan dalam regulasi lebih lanjut.

Dari sisi reformasi kesehatan, kewajiban masyarakat untuk mendapatkan perlindungan Jaminan Kesehatan melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang telah dihimpun melalui BPJS Kesehatan merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah pusat dan daerah telah fokus dalam reformasi Kesehatan. Jumlah masyarakat di Provinsi Lampung yang telah dilindungi oleh jaminan kesehatan sampai dengan September 2023 sudah mencapai 96,52 persen dari jumlah penduduk. Sama halnya dengan Pendidikan, pemerintah juga telah melakukan reformasi di bidang kesehatan dengan mendorong Puskesmas dan RS milik pemerintah untuk menjadi BLUD yang memberikan keleluasaan dalam melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Keterbatasan jumlah tenaga kerja kesehatan dan sarana prasarana kesehatan masih menjadi salah satu kendala bagi Provinsi Lampung untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna untuk masyarakat.

Pengelolaan sumber daya alam dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan kelautan di Provinsi Lampung selama ini masih didominasi aspek produksi dan pemasaran yang terbatas dan belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang kini maju pesat. Investasi pada sektor pengelolaan sumber daya alam juga belum diarahkan meningkatkan hilirisasi komoditi lokal yang memberikan nilai tambah optimal. Transformasi ekonomi di Provinsi Lampung sebenarnya bisa dimulai dari sektor agraris. Pemerataan ekonomi akan lebih efektif melalui transformasi sistem pertanian tradisional ke dalam sistem agroindustri. Melalui industrialisasi pertanian diharapkan dapat mendorong





peningkatan di sektor pertanian untuk menjadi lebih tangguh dan memberikan nilai tambah, dengan mengelola sumber daya alam, tenaga kerja, modal, serta memanfaatkan teknologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.

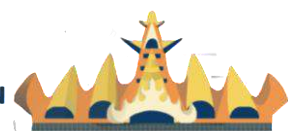
Petani merupakan salah satu aktor utama dalam pembangunan industri pertanian. Kendala yang selama ini dihadapi petani, seperti akses pupuk dan air irigasi yang bermasalah harus difasilitasi dan diatasi oleh pemerintah. Peningkatan nilai tambah komoditi pertanian dan jaringan pemasaran perlu dibangun dan diperkuat bersama, melalui kemitraan usaha pertanian. Pemerintah, dunia usaha dan industri, lembaga penelitian/pendidikan, dan lembaga keuangan perlu menjadi *support system* untuk mendorong transformasi pertanian ini. Hal tersebut sejalan dengan kecenderungan pembangunan industri modern yang diarahkan untuk terbangunnya proses kolaboratif dalam jangka panjang, antara pemerintah, pelaku usaha dan industri, serta akademisi, yang berfokus pada pembelajaran untuk menghadapi hambatan dan peluang dalam mengembangkan daya saing usaha/industri. Oleh karena itu, sektor Pendidikan memiliki andil penting untuk mendukung upaya tersebut. Lembaga Pendidikan kejuruan (vokasi) di daerah perlu meningkatkan kerja sama dan kemitraan dengan industri lokal. Kesenjangan

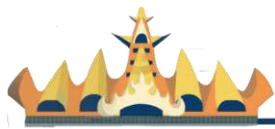
kompetensi SDM dan kebutuhan dunia usaha/industri harus mampu dijumpai melalui lembaga pendidikan yang inklusif dan relevan dengan dunia kerja.

Reformasi struktural juga perlu diimbangi dengan reformasi fiskal. Upaya reformasi fiskal perlu dilakukan untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat. Secara garis besar, reformasi fiskal akan diarahkan untuk optimalisasi pendapatan negara, penguatan belanja yang berkualitas (*spending better*), dan pembiayaan kreatif. Namun reformasi fiskal harus dijalankan secara hati-hati agar tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Dengan adanya UU HKPD tahun 2022, diharapkan reformasi fiskal baik melalui APBN dan APBD dapat berjalan menuju kondisi yang lebih sehat. Penyelarasan belanja negara dan daerah juga harus direncanakan dengan hati-hati melalui kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan demi meminimalisir terjadinya *overlapping* kewenangan. Pelaksanaan UU HKPD di daerah juga masih menemui hambatan salah satunya perubahan skema pemungutan dan kenaikan tarif pajak kendaraan, yang apabila disorot dari sudut pandang masyarakat akan menimbulkan kenaikan besaran pajak.

Tabel 1.5. Tantangan Ekonomi Provinsi Lampung 2023

Bidang	Permasalahan/Tantangan
Pengelolaan SDA	<ul style="list-style-type: none"> - Komoditas ekspor berbasis SDA tergantung harga pasar dan permintaan global - Pertumbuhan sektor industri skala besar masih relatif stagnan - Peluang SDA <i>geothermal</i> dan <i>hydro</i> masih berupa peluang yang perlu dikonversi menjadi investasi riil
Penciptaan Iklim dan Potensi Investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum meratanya investasi di tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, dengan fokus masih terbatas di perkotaan - Masih bergantungnya Lampung kepada koneksi Sumatera Selatan dalam penyediaan energi, menghadirkan risiko ketersediaan supply energi, terutama listrik. - Masih terdapat beberapa kawasan industri yang belum berhasil menarik investor karena isu konektivitas dan market <i>share</i> di Pulau Jawa yang lebih baik.
Birokrasi dan Pelayanan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> - Mal Pelayanan Publik yang mengintegrasikan pelayanan perizinan pada 15 Kabupaten/Kota juga instansi vertikal/BUMN/BUMD perlu peningkatan kapasitas di beberapa Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Lampung.
Dukungan Permodalan dan Infrastruktur Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan belum optimal dan merata di seluruh Kabupaten/Kota dalam mendukung peningkatan mobilitas barang/jasa dan orang, serta mendukung konektivitas industri hulu dan hilir - Kapasitas infrastruktur dan prasarana terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara belum cukup memadai untuk kegiatan ekonomi dalam skala lebih besar
Implementasi Teknologi dalam Aktivitas Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan penerapan teknologi pertanian masih perlu dikembangkan - Kualitas dan <i>coverage</i> internet serta infrastruktur komunikasi masih belum optimal di daerah pedesaan - Perlu penguatan literasi digital dan keuangan sebagai katalis perluasan pangsa pasar lokal maupun internasional
Reformasi Struktural	<ul style="list-style-type: none"> - Reformasi SDM melalui Reformasi Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan serta pembentukan SMK dan Puskesmas BLUD perlu dioptimalkan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat - Reformasi fiskal melalui UU HKPD menghadapi tantangan dari kapasitas fiskal pemerintah daerah Lampung yang terbatas





1.4.3. Tantangan Sosial Kependudukan

1.4.3.1. Struktur, Jumlah, dan Demografi Penduduk

Berdasarkan Data Penduduk BPS Provinsi Lampung tahun 2022, jumlah penduduk Provinsi Lampung berjumlah 9,17 juta jiwa. naik 94,7 ribu jiwa dibandingkan tahun 2021. Jumlah penduduk Lampung tersebut terdiri atas 4,69 juta jiwa penduduk laki-laki dan 4,48 juta jiwa penduduk perempuan. Saat ini Provinsi Lampung masih dalam masa dimana penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 70,31 persen. Mayoritas penduduk di Provinsi Lampung adalah generasi Z (lahir tahun 1997-2012) dan generasi milenial (lahir tahun 1981-1996) yaitu 27,80 persen dan 26,54 persen dari total populasi. Sekitar 7 tahun lagi, generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Kondisi ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah Provinsi Lampung agar penduduk produktif dapat didayagunakan untuk pembangunan daerah.

Luas wilayah Provinsi Lampung sebesar 34,62 ribu km² dengan kepadatan penduduk 260 jiwa/km². Sebaran penduduk terbanyak di Kabupaten Lampung Tengah yaitu 1,5 juta jiwa atau sekitar 16,3 persen dari total penduduk Lampung dan penduduk paling sedikit di Pesisir Barat sebesar 164,8 ribu jiwa atau 1,79 persen. Persebaran penduduk yang tidak merata tidak terlepas dari adanya pengaruh geografis. Selain itu persebaran penduduk Lampung masih berorientasi pada potensi pertanian dan sedikit bergeser pada agroindustri. Akibatnya, terjadi pola pergeseran yang kurang ideal dengan kepadatan tertinggi pada daerah sentral industri dan akses yang baik.

1.4.3.2. Karakteristik masyarakat

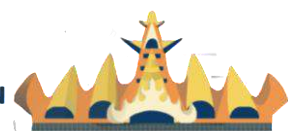
Secara historis, Provinsi Lampung dijadikan tonggak sejarah transmigrasi di Indonesia sejak tahun 1905, dilanjutkan program transmigrasi umum yang dilakukan oleh pemerintah dimulai sejak 1971 sampai tahun 1984. Program transmigrasi yang menawarkan pemberian hak berupa lahan pertanian atau perkebunan untuk diolah menjadi daya tarik bagi masyarakat khususnya yang berasal

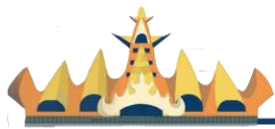
dari Pulau Jawa untuk mengikuti program transmigrasi ke Provinsi Lampung. Sehingga menjadikan Provinsi Lampung menjadi wilayah yang mayoritas dihuni oleh penduduk bersuku Jawa dan mata pencaharian utamanya pada sektor pertanian hingga sekarang.

Wilayah Lampung memiliki *history* lahan yang dijadikan lahan perkebunan untuk penanaman tembakau, kopi, karet, dan kelapa sawit sejak era kekuasaan Belanda. Faktor iklim dan kelembaban udara, dan kontur tanah, merupakan faktor yang mempengaruhi mata pencaharian masyarakat Lampung yang mayoritas berusaha pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Persentase penduduk miskin di Lampung pada Maret 2023 turun menjadi 11,11 persen. Persentase penduduk miskin Lampung yang tahun lalu sudah lebih rendah dibanding persentase nasional, di tahun 2023 menjadi lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Masih terdapat kesenjangan sosial antara desa dan kota dan antar individu. Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Lampung dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi di sektor pendidikan dan kesehatan serta air bersih dapat diterima, mempertajam basis data untuk ketepatan target dan upaya percepatan, melibatkan sektor swasta untuk berperan sebagai *off taker* produk kelompok miskin ekstrem sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Angka stunting Provinsi Lampung pada tahun 2019 tercatat sebesar 26,26 persen dan menurun menjadi 15,2 persen di tahun 2022, dimana Provinsi Lampung masuk dalam kategori 3 (tiga) besar Provinsi di Indonesia dengan prevalensi stunting terendah secara nasional.

Dari sisi pendidikan, rata-rata lama sekolah (RLS) di Provinsi Lampung terus meningkat dan di tahun 2023 mencapai 8,29 tahun, RLS tersebut meningkat 1,34 persen dari tahun 2022 yang mencapai 8,18 tahun. Selama periode 2020-2023, RLS Provinsi Lampung rata-rata meningkat 0,99 persen per tahun. Sedangkan harapan lama sekolah di Provinsi Lampung mencapai 12,77 tahun. Angka melek





huruf telah mencapai 99,91 persen di tahun 2023. Indikator peningkatan kualitas dan kesejahteraan manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam kurun sepuluh tahun terakhir, IPM di Provinsi Lampung menunjukkan tren peningkatan, hingga tahun 2023 IPM Lampung tercatat sebesar 72,48. Pertumbuhan IPM 2023 Lampung mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Semua komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita naik 4,19 persen dibanding tahun 2022.

1.4.3.3. Struktur Mata Pencarian Masyarakat

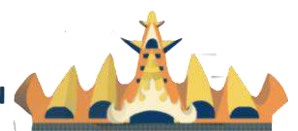
Penduduk usia kerja di Provinsi Lampung pada Agustus 2023 sebanyak 7.003,29 ribu orang, naik sebanyak 443,04 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 4.904,90 ribu orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 2.098,39 ribu orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri dari 4.697,66 ribu orang penduduk yang bekerja dan 207,24 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2022, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 308,97 ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 309,69 ribu orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 0,72 ribu orang. Berlawanan arah dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dibanding Agustus 2022. TPAK pada Agustus 2023 sebesar 70,04 persen, turun 0,02 persen poin dibanding Agustus 2022. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.

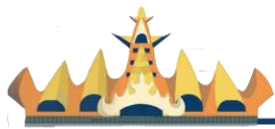
Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2023, TPAK laki-laki sebesar 87,30 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 52,01 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 1,47 persen poin, sedangkan perempuan turun sebesar 1,54 persen poin. Tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Provinsi Lampung adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu sebesar 42,32 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,96 persen; dan Pertambangan dan Industri Pengolahan sebesar 9,51 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan tahun lalu.

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat disimpulkan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Lampung masih relatif rendah dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja di Provinsi Lampung pada tahun 2023 masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 37,35 persen. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 9,13 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan tahun lalu. Namun, secara umum diperoleh data bahwa penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, SMP dan Diploma I/II/III mengalami penurunan persentase. Sedangkan, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Diploma IV, S1, S2, S3 mengalami peningkatan persentase. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Lampung.

Tabel 1.6. Tantangan Sosial Kependudukan Provinsi Lampung 2023

Bidang	Permasalahan/Tantangan
Struktur, Jumlah Penduduk dan Demografi	- Sebaran penduduk yang cenderung tinggi di wilayah kota yang memiliki sentra industri dengan akses yang lebih baik dan wilayah yang dengan potensi pertanian





Bidang	Permasalahan/Tantangan
Kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat IPM Lampung masih rendah di tingkat regional Sumatera dan Nasional - Porsi tenaga kerja masih didominasi penduduk berpendidikan SMA ke bawah - Persentase penduduk miskin secara angka turun, namun masih lebih tinggi dibandingkan nasional
Karakteristik Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat ketimpangan partisipasi angkatan kerja berdasarkan gender, dan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita terus mengalami penurunan - Rata-rata lama sekolah terus meningkat namun masih di bawah angka nasional dan regional Sumatera - Angka stunting Provinsi Lampung termasuk yang paling rendah secara nasional, namun masih terdapat kabupaten yang memiliki level stunting cukup tinggi
Mata Pencaharian	<ul style="list-style-type: none"> - Tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Provinsi Lampung masih didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan rendah di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan - 70,67 persen struktur lapangan kerja didominasi oleh sektor informal

1.4.4. Tantangan Lainnya

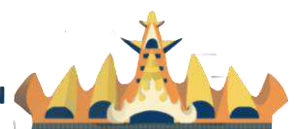
Produksi padi Provinsi Lampung pada 2022 melampaui target menjadi 3,2 juta ton dari yang direncanakan sebesar 2,8 juta ton. Pada 2023, target produksi padi Provinsi Lampung ditetapkan minimal 3 juta ton, dengan kontribusi sebanyak 700 ribu ton untuk kontribusi nasional. Kabupaten Lampung Tengah menjadi kontributor terbesar dengan 10,5 persen produksi. Luas tanam padi periode Oktober 2022 hingga Juni 2023 meningkat menjadi 503.171 hektar dari sebelumnya 495.198 hektar pada tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah menghadapi iklim ekstrem kekeringan Tahun 2023 dengan menyebarkan informasi prakiraan iklim, penyaluran sarana pengendalian OPT, percepatan tanam, optimalisasi sumber air, dan peningkatan program pertanian. Regulasi terkait distribusi gabah diterbitkan untuk mengendalikan pasokan pangan di daerah.

Kondisi kekeringan telah diantisipasi dengan pembangunan bendungan untuk pasokan air pertanian. Namun, inflasi beras masih mempengaruhi masyarakat miskin di Lampung. Dampak inflasi beras juga terasa pada sektor pertanian, dengan peningkatan pendapatan petani namun juga biaya produksi. Selain padi, Provinsi Lampung perlu mempertahankan produktivitas produk hortikultura seperti jagung sebagai alternatif pangan, pakan, dan industri. Namun, pengembangan potensi jagung masih belum

optimal mengingat penurunan produksi dan luas panen pada tahun 2023.

Kendala infrastruktur seperti saluran irigasi yang kurang memadai dan masalah pembebasan lahan menghambat pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun, seperti Bendungan Marga Tiga yang belum dapat dioperasikan hingga tahun 2023 karena masalah kesepakatan dengan masyarakat sekitar.

Tujuan peningkatan produktivitas hasil tani terutama beras telah searah dengan tujuan dibangunnya beberapa proyek infrastruktur, namun terkendala masih kurangnya infrastruktur pendamping. Pembangunan PSN Bendungan Way Sekampung misalnya, masih belum dilengkapi oleh saluran irigasi yang memadai di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran penerima manfaat. Selain saluran irigasi yang belum memadai, pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun di Lampung terkendala oleh masalah pembebasan lahan seperti yang terjadi pada Bendungan Marga Tiga Lampung Timur. Bendungan Marga Tiga yang telah selesai dibangun pada akhir tahun 2022 masih belum dapat dioperasikan hingga tahun 2023 karena belum adanya kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat sekitar. Bendungan yang ditujukan sebagai penyuplai air baku untuk lahan pertanian dan penampung air hujan untuk mengurangi risiko banjir di wilayah timur Provinsi Lampung belum dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.



“ Pengelolaan anggaran yang dilakukan dengan baik bukan hanya menunjukkan kualitas ekonomi yang baik saja, namun hal ini juga akan menunjukkan martabat dan juga kualitas sebuah bangsa yang baik ”

-Sri Mulyani-
Menteri Keuangan RI

ANALISIS EKONOMI REGIONAL

BAB II



BAB II ANALISIS EKONOMI REGIONAL

2.1. ANALISIS INDIKATOR MAKRO EKONOMI

Indikator makro ekonomi berfungsi untuk membantu dan memprediksi perkembangan kinerja perekonomian suatu daerah. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa indikator makro ekonomi, antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Suku Bunga; Inflasi; dan Nilai Tukar.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. Dalam analisis pertumbuhan ekonomi, digunakan data berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) guna memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya, tidak dipengaruhi oleh perubahan harga.

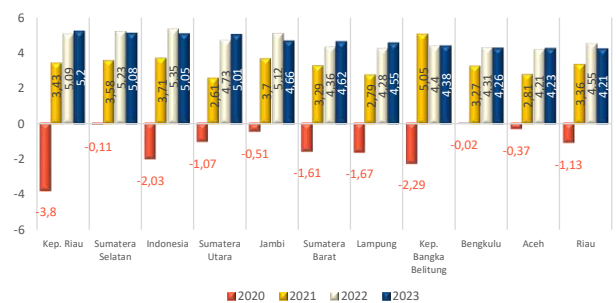
2.1.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Secara Cumulative-to-Cumulative (ctc), Kinerja Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,55 persen (ctc), menguat dibanding tahun 2022 (c-to-c) yang tercatat tumbuh sebesar 4,28 persen (ctc) sebagaimana tampak pada grafik 2.1. Pertumbuhan positif kinerja ekonomi Lampung didorong oleh seluruh lapangan usaha terutama Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 16,66 persen (ctc). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan positif kinerja ekonomi didorong oleh sebagian besar komponen. Komponen yang tumbuh signifikan yaitu Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 10,59 persen (ctc).

Capaian kinerja ekonomi Lampung masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,05 persen (ctc). Tiga Provinsi dengan capaian kinerja ekonomi di atas 5,00 persen yaitu Kepulauan Riau 5,2 persen (ctc), Sumatera Selatan 5,08 persen (ctc), dan

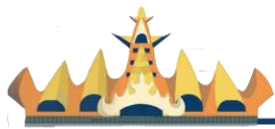
Sumatera Utara 5,01 persen (ctc). Kinerja ekonomi seluruh Provinsi regional Sumatera di tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif yang ditopang oleh perbaikan kinerja hampir seluruh lapangan usaha. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga naik sehingga mendorong daya beli, serta mobilitas masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Lampung, Provinsi di regional Sumatera lainnya dan Nasional mengalami kontraksi pada tahun 2020. Hal ini tidak terlepas dari dampak Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi berbagai sektor karena terhambatnya mobilitas masyarakat.

Grafik 2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Tahun 2020 – 2023 (ctc)

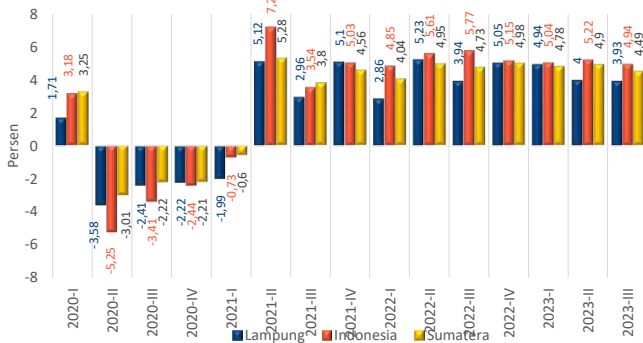


Sumber: BPS (diolah)

Secara year-on-year (yoy), kinerja ekonomi Lampung triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 5,40 persen (yoy), meningkat dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 5,05 persen (yoy) sebagaimana tampak pada grafik 2.2. Capaian kinerja ekonomi Lampung triwulan IV-2023 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,04 persen (yoy) dan Sumatera yang tercatat sebesar 4,59 persen (yoy). Pertumbuhan positif kinerja ekonomi Lampung didorong oleh sebagian besar lapangan usaha terutama konstruksi yang tumbuh sebesar 15,15 persen (yoy). Sementara itu, pertumbuhan positif kinerja ekonomi didorong oleh seluruh komponen pengeluaran. Komponen yang tumbuh signifikan yaitu Komponen PK-LNPRT yang tumbuh sebesar 17,36 persen (yoy).



Grafik 2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung, Sumatera, dan Nasional Tahun 2020 – 2023 (yoy)

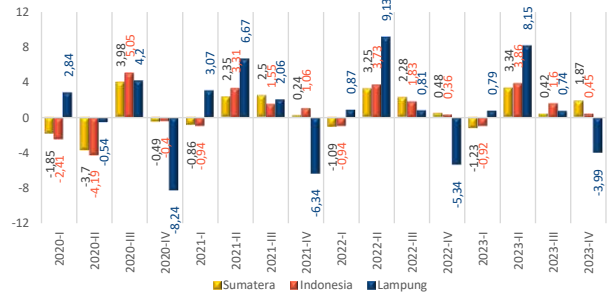


Sumber: BPS (diolah)

Secara *quarter-to-quarter (qtq)*, kinerja ekonomi Lampung triwulan IV-2023 dibanding triwulan III-2023 terkontraksi sebesar 3,99 persen (*qtq*), melemah dari capaian triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,74 persen (*qtq*) dan berada di bawah level pertumbuhan nasional triwulan IV-2023 sebesar 0,4 persen (*qtq*) dan pertumbuhan Sumatera sebesar 1,87 persen (*qtq*) sebagaimana tampak pada grafik 2.3. Namun, capaian ini lebih baik jika dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya (triwulan IV-2022 dibanding triwulan III-2022) yang terkontraksi sebesar 5,34 persen (*qtq*). Untuk triwulan IV, secara *qtq* Lampung menunjukkan *seasonal pattern* pertumbuhan ekonomi yang negatif. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan karena sektor lapangan usaha di Lampung didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pada triwulan IV lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami kontraksi terdalam yakni sebesar 18,69 persen (*qtq*). Dari sisi pengeluaran,

kontraksi didorong oleh pertumbuhan negatif pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 0,86 persen (*qtq*).

Grafik 2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung, Sumatera, dan Nasional Tahun 2020 – 2023 (qtq)



Sumber: BPS (diolah)

2.1.1.1.2. Nominal dan Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, struktur perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2023 masih didominasi oleh dua komponen permintaan domestik yaitu Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Konsumsi RT tercatat memiliki kontribusi 62,34 persen terhadap PDRB Provinsi Lampung, kemudian diikuti oleh Investasi PMTB dengan kontribusi sebesar 32,33 persen dengan nominal PDRB ADHB masing-masing sebesar Rp279,84 miliar dan Rp145,11 miliar serta laju pertumbuhan masing-masing sebesar 5,15 persen (*ctc*) dan 4,14 persen (*ctc*). Perkembangan PDRB Pengeluaran Lampung dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perkembangan PDRB Pengeluaran Lampung Tahun 2020 – 2023

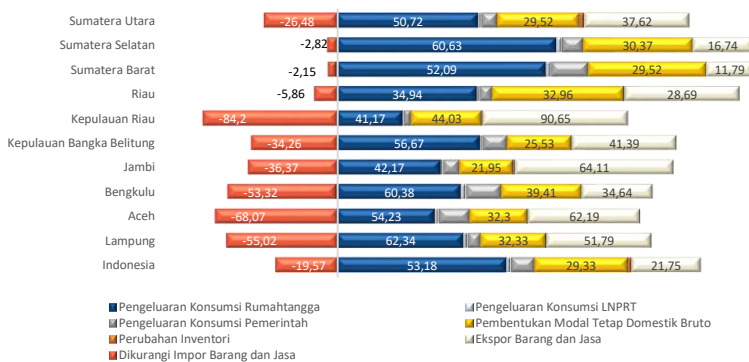
Pengeluaran	2020			2021			2022			2023		
	PDRB ADHB (Miliar Rp)	Distribusi (%)	Growth (%)	PDRB ADHB (Miliar Rp)	Distribusi (%)	Growth (%)	PDRB ADHB (Miliar Rp)	Distribusi (%)	Growth (%)	PDRB ADHB (Miliar Rp)	Distribusi (%)	Growth (%)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	220,93	62,58	-1,62	230,00	61,96	1,68	253,80	61,28	4,74	279,84	62,34	5,15
Pengeluaran Konsumsi LNPR	6,00	1,7	-4,16	6,37	1,72	3,63	6,74	1,63	1,22	7,72	1,72	10,59
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	28,81	8,16	-3,49	29,32	7,9	0,32	28,33	6,84	-5,02	29,62	6,6	2,06
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	116,61	33,03	-4,85	125,50	33,81	3,96	134,44	32,46	2,42	145,11	32,33	4,14
Perubahan Inventori	1,93	0,55	0	0,82	0,22	0	1,07	0,26	0	1,12	0,25	0
Ekspor Barang dan Jasa	144,07	40,81	3,56	182,06	49,05	38,02	218,98	52,88	4,47	232,46	51,79	-6,94
Impor Barang dan Jasa	165,32	46,83	-47,79	202,87	54,65	47,07	229,23	55,35	-1,04	246,99	55,02	-11,11
PDRB	353,03	100	-1,67	371,20	100	2,79	414,13	100	4,28	448,88	100	4,55

Sumber: BPS (diolah)



Adapun kontribusi komponen permintaan domestik lainnya yaitu Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP) sebesar 6,6 persen dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 1,72 persen. Di sisi komponen eksternal, impor memiliki kontribusi yang cukup dominan terhadap PDRB Lampung yakni sebesar 55,02 persen. Namun demikian, kegiatan ekspor di Lampung juga cukup tinggi. Hal ini tercermin dari kontribusi ekspor yang tercatat sebesar 51,79 persen terhadap PDRB. Perkembangan struktur komponen eksternal PDRB Lampung menjadi tantangan untuk mendorong upaya Net Ekspor terhadap perekonomian Lampung. Pada tahun 2023, ekspor dan impor Lampung mengalami kontraksi masing-masing sebesar 6,94 persen (*ctc*) dan 11,11 persen (*ctc*).

Grafik 2.4. Kontribusi PDRB Pengeluaran Provinsi di Regional Sumatera dan Nasional Tahun 2023



Sumber: BPS (diolah)

Apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi di Regional Sumatera lainnya, Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mendominasi komponen permintaan domestik sama seperti Lampung sebagaimana tampak pada grafik 2.4. Namun di sisi komponen eksternal, Nasional dan tujuh Provinsi di regional Sumatera (Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara) menghasilkan Net Ekspor dimana kontribusi ekspor lebih tinggi dibandingkan kontribusi impor.

Kontribusi konsumsi RT terhadap PDRB di tahun 2023 meningkat 1,06 persen dibandingkan kontribusi tahun 2022 yang tercatat sebesar 61,28

persen. Kinerja konsumsi RT Lampung tahun 2023 tumbuh solid sebesar 5,15 persen (*ctc*). Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 terkontraksi sebesar 1,62 persen (*ctc*), 2021 tumbuh positif sebesar 1,68 persen (*ctc*), dan 2022 tumbuh positif sebesar 4,74 persen (*ctc*). Kenaikan UMP tahun 2023 sebesar 7,90 persen mendukung terjaganya daya beli masyarakat Lampung.

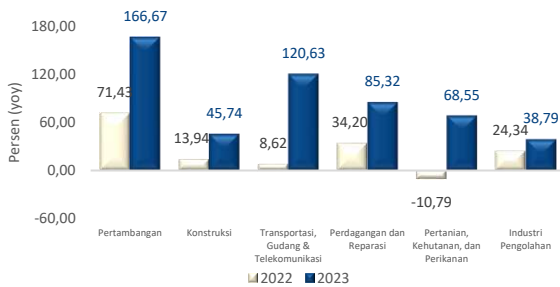
Kontribusi PK-LNPRT terhadap PDRB di tahun 2023 meningkat 0,09 persen dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 1,63 persen. Pada tahun 2023, kinerja PK-LNPRT tumbuh signifikan yakni sebesar 10,59 persen (*ctc*), lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Komponen LNPRT mengalami pertumbuhan paling tinggi dibandingkan komponen lain yang didorong oleh kegiatan persiapan pemilihan umum baik yang dilakukan oleh peserta maupun penyelenggara pemilu seperti kampanye yang dilakukan partai politik dalam rangka persiapan pemilu 2024.

Kontribusi konsumsi pemerintah terhadap PDRB pada tahun 2023 sebesar 6,60 persen, menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 6,84 persen, tahun 2021 sebesar 7,90 persen, dan tahun 2020 sebesar 8,16 persen. Meskipun kontribusi konsumsi pemerintah mengalami penurunan, pada tahun 2023 konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar 2,06 persen (*ctc*) lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022 yang mengalami kontraksi sebesar 5,02 persen (*ctc*). Pagu belanja APBD tahun 2023 lebih rendah 0,54 persen dari pagu tahun sebelumnya, tetapi realisasi belanja daerah Lampung di tahun 2023 tumbuh 1,92 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini didorong oleh Belanja Operasi yang tumbuh sebesar 3,02 persen (*yoy*) dan belanja transfer yang tumbuh 10,79 persen (*yoy*).

Kontribusi PMTB terhadap PDRB tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,13 persen dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 32,46 persen. Walaupun demikian, kinerja PMTB tahun 2023 tercatat tumbuh 4,14 persen (*ctc*), meningkat jika dibandingkan dengan 2,42 persen (*ctc*) pada tahun sebelumnya. Peningkatan investasi

terutama terjadi pada sektor Pertambangan yang tumbuh 166,67 persen (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 71,43 persen (*yoy*) sebagaimana tampak pada grafik 2.5.

Grafik 2.5. Pertumbuhan Jumlah Proyek Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)



Sumber: BKPM (diolah)

Pertumbuhan kuat investasi pada sektor pertambangan didorong aktivitas revitalisasi *main oil line* (pipa bawah air) minyak bumi sepanjang 30 km di perairan Lampung Timur. Lebih lanjut, akselerasi perbaikan 17 ruas jalan Provinsi dan Kabupaten di Provinsi Lampung yang dimulai sejak Juli 2023 mendorong kinerja investasi pada sektor konstruksi.

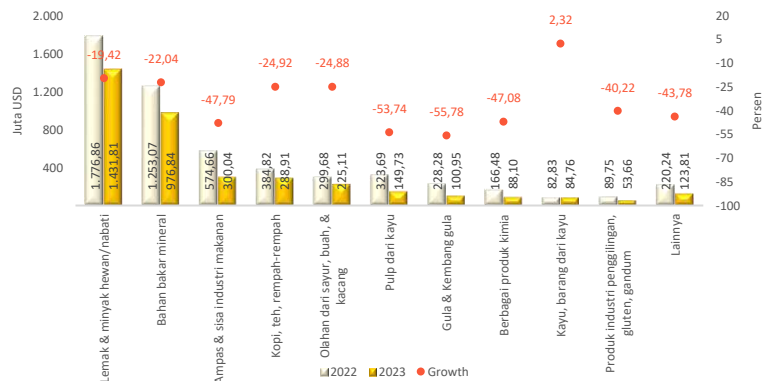
Kontribusi ekspor terhadap PDRB tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,09 persen dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 52,88 persen. Kinerja ekspor Provinsi Lampung tahun 2023 melemah, ekspor berkontraksi sebesar 6,94 persen (*ctc*), lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,47 persen (*ctc*). Dari sisi ekspor luar negeri, berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, ekspor luar negeri Provinsi Lampung pada tahun 2023 tercatat sebesar 3.823,72 juta USD atau berkontraksi 29,20 persen (*yoy*). Penurunan ekspor luar negeri Lampung tahun 2023 disebabkan oleh menurunnya kinerja sebagian besar golongan barang sebagaimana tampak pada grafik 2.6.

Dilihat dari kontribusinya, lemak dan minyak hewan/nabati; bahan bakar mineral (batu bara); Ampas/sisa industri makanan; Kopi, teh, dan rempah-rempah masih menjadi komoditas ekspor

luar negeri utama Provinsi Lampung dengan besarnya kontribusi masing-masing sebesar 37,45 persen, 25,55 persen, 2,85 persen, dan 7,56 persen. Ekspor lemak dan minyak hewan/nabati atau *Crude Palm Oil* (CPO) dan *refined palm oil* (RPO) tahun 2023 berkontraksi sebesar 19,42 persen (*yoy*).

Kinerja ekspor RPO berkontraksi sejalan dengan Langkah Pemerintah untuk memperkuat pasokan minyak goreng domestik melalui kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) yang cukup ketat. Selain itu, harga CPO juga masih pada level tren yang menurun.

Grafik 2.6. Ekspor Luar Negeri Menurut Golongan Barang



Sumber: Kanwil DJBC Sumbagbar (diolah)

Ekspor baru bara Lampung pada tahun 2023 mengalami kontraksi 22,04 persen (*yoy*). Perubahan arus perdagangan batu bara dunia menekan kinerja ekspor batu bara di Lampung. Tekanan permintaan batu bara Indonesia dipengaruhi dengan mulai masuknya batu bara Rusia ke pasar global. Kembalinya Rusia ke pasar baru bara global mendorong peningkatan pasokan baru bara global sehingga rendahnya level harga acuan batu bara dunia.

Ekspor Kopi, Teh, dan Rempah-rempah (Kopi robusta) Lampung berkontraksi sebesar 24,92 persen (*yoy*) pada tahun 2023. Penurunan luas lahan kopi robusta di Lampung Barat akibat banjir di awal tahun 2023 dan penurunan produktivitas pada periode musim kemarau (El Nino) menekan produktivitas kopi robusta tahun 2023.



Pemerintah Lampung terus berupaya mendorong peningkatan ekspor, terutama di beberapa komoditas unggulan Lampung. Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai, mendukung kegiatan ekspor dengan menginisiasi klinik ekspor, dengan program-program antara lain:

- a. Pencarian Potensi.
Gathering Eksportir bertujuan untuk melaksanakan pencarian potensi pengguna fasilitas kepabeanan, yang telah dilaksanakan di Kantor Pusat DJBC dan seluruh Kantor Wilayah DJBC;
- b. Aplikasi Sistem Pendukung Layanan Informasi Terpadu (SPLIT).
SPLIT yang dikembangkan oleh DJBC guna menjaring keluhan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ekspor;
- c. Asistensi.
Pelaksanaan asistensi kepada pengguna jasa dengan memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam ekspor;
- d. Penetapan TIM.
Penetapan Surat Keputusan Tim Klinik Ekspor oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) guna melakukan pelayanan secara *one-on-one meeting* dalam pelaksanaan ekspor.

Kontribusi impor Lampung tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,33 persen dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 55,35 persen. Pada tahun 2023, kinerja impor Lampung berkontraksi sebesar 11,11 persen (*ctc*), lebih dalam jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar 1,04 persen (*ctc*). Impor luar negeri Lampung tahun 2023 tercatat sebesar 2.492,25 juta USD atau berkontraksi 4,89 persen (*yoy*). Penurunan kinerja impor luar negeri Lampung pada tahun 2023 disebabkan oleh berkontraksinya barang konsumsi sebesar 56,32 persen (*yoy*).

Meskipun demikian, kontraksi impor yang lebih dalam tertahan impor bahan baku penolong dan impor barang modal yang masing-masing tumbuh sebesar 3,02 persen (*yoy*) dan 15,39 persen (*yoy*).

2.1.1.1.3. Nominal dan Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto Berdasarkan Lapangan Usaha

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan penyumbang PDRB ADHB terbesar di Lampung dengan kontribusi di tahun 2023 sebesar Rp122.511,10 miliar atau 27,29 persen dari total PDRB di tahun 2023 sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.2. Kontributor terbesar selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan; dan Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan; yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 18,01 persen dan 13,98 persen dari total PDRB di tahun 2023. Total kontribusi ketiga sektor tersebut lebih dari setengah total PDRB atau sebesar 59,28 persen. Ketiga *leading sektor* tersebut, masing-masing mengalami pertumbuhan positif yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh 0,55 persen (*ctc*); sektor Industri Pengolahan tumbuh 1,4 persen (*ctc*); dan sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan tumbuh 9,76 persen (*ctc*).

Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap total PDRB Lampung dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami penurunan, meskipun secara nominal PDRB ADHB-nya meningkat. Pertumbuhan sektor ini di tahun 2023 juga lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun 2022 yang tercatat sebesar 2,02 persen (*ctc*). Kontribusi sektor industri pengolahan turun sejak tahun 2021. Sementara itu, kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga 2023.



Tabel 2.2. Perkembangan PDRB Lapangan Usaha Lampung Tahun 2020 – 2023

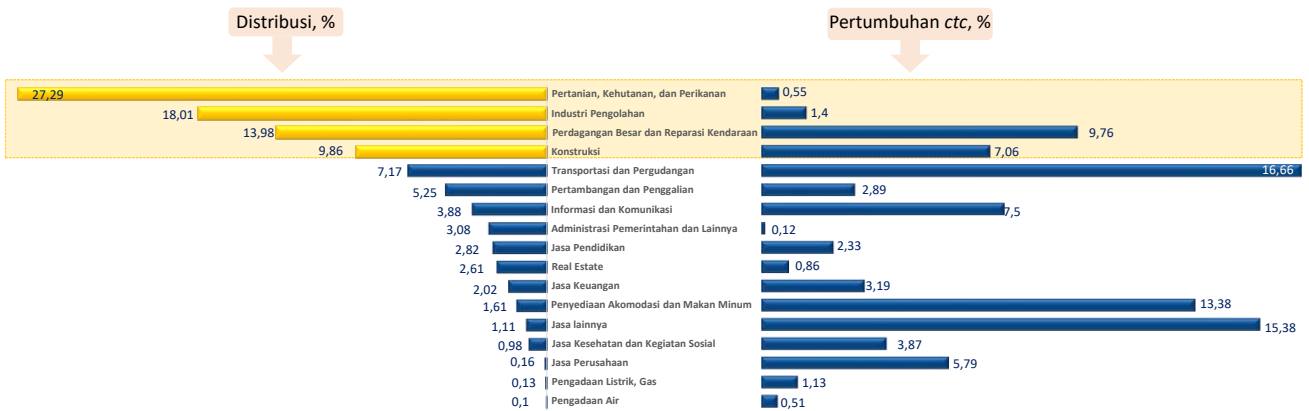
Lapangan Usaha	2020			2021			2022			2023		
	PDRB ADHB (Miliar Rp)	Distribusi (%)	Growth (%)	PDRB ADHB (Miliar Rp)	Distribusi (%)	Growth (%)	PDRB ADHB (Miliar Rp)	Distribusi (%)	Growth (%)	PDRB ADHB (Miliar Rp)	Distribusi (%)	Growth (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	104.967,38	29,73	0,66	105.185,41	28,34	-0,4	115.420,82	27,87	2,02	122.511,10	27,29	0,55
Pertambangan dan Penggalian	17.702,49	5,01	-3,5	20.769,87	5,6	-5,28	24.400,47	5,89	-3,88	23.566,70	5,25	2,89
Industri Pengolahan	68.698,37	19,46	-5,25	73.206,19	19,72	4,57	76.861,29	18,56	0,47	80.849,47	18,01	1,4
Pengadaan Listrik, Gas	568,54	0,16	-0,6	520,33	0,14	-6,8	561,03	0,14	6,22	569,48	0,13	1,13
Pengadaan Air	383,70	0,11	5,06	414,78	0,11	6,94	434,80	0,1	3,72	441,56	0,1	0,51
Konstruksi	33.166,65	9,39	-2,05	36.765,26	9,9	6,95	40.370,42	9,75	3,85	44.255,35	9,86	7,06
Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	39.468,10	11,18	-6,64	43.399,63	11,69	8,26	54.680,67	13,2	15,35	62.733,47	13,98	9,76
Transportasi dan Pergudangan	17.730,57	5,02	-5,61	18.399,55	4,96	2,27	24.749,21	5,98	20,34	32.187,73	7,17	16,66
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.534,14	1,57	-5,01	5.480,92	1,48	-1,54	6.291,25	1,52	12,61	7.225,55	1,61	13,38
Informasi dan Komunikasi	15.272,83	4,33	8,02	15.875,73	4,28	6,17	16.096,27	3,89	0,34	17.395,80	3,88	7,5
Jasa Keuangan	7.729,49	2,19	3,76	8.253,48	2,22	2	8.610,98	2,08	-3,58	9.067,47	2,02	3,19
Real Estate	10.493,85	2,97	-1,73	10.686,70	2,88	1,31	11.377,30	2,75	3,42	11.720,25	2,61	0,86
Jasa Perusahaan	529,86	0,15	-1,43	539,13	0,15	1,05	657,72	0,16	17,49	719,58	0,16	5,79
Administrasi Pemerintahan dan Lainnya	12.825,59	3,63	4,94	13.268,74	3,57	4,21	13.398,08	3,24	-1,26	13.592,94	3,03	0,12
Jasa Pendidikan	10.960,44	3,1	4,11	11.267,40	3,04	1,22	11.983,51	2,89	2,55	12.676,45	2,82	2,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.778,68	1,07	10,93	4.000,44	1,08	3,89	4.115,88	0,99	-0,1	4.405,68	0,98	3,87
Jasa lainnya	3.214,40	0,91	-4,59	3.165,31	0,85	-2,15	4.121,72	1	25,45	4.961,64	1,11	15,38
PDRB	353.025,09	100	-1,67	371.198,88	100	2,79	414.131,42	100	4,28	448.880,25	100	4,55

Sumber: BPS (diolah)

Pada tahun 2023, sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan paling tinggi yakni sebesar 16,66 persen (*ctc*) dengan kontribusi sebesar 7,17 persen, terbesar kelima dari tujuh belas sektor yang ada sebagaimana tampak pada grafik 2.7. Sementara itu, sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling rendah adalah sektor Administrasi Pemerintahan dan

Lainnya yang hanya tumbuh sebesar 0,12 persen (*ctc*) dengan kontribusi sebesar 3,08 persen dari total PDRB Lampung tahun 2023. Namun, capaian kinerja sektor Administrasi Pemerintahan dan Lainnya pada tahun 2023 lebih baik dibandingkan tahun 2022 yang mengalami kontraksi sebesar 1,26 persen (*ctc*).

Grafik 2.7. Distribusi dan Pertumbuhan (*ctc*) PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2023

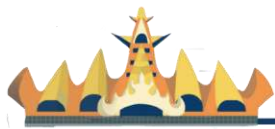


Sumber: BPS (diolah)

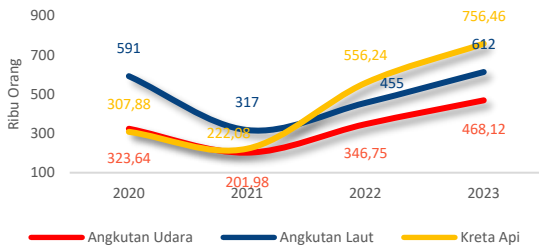
Berdasarkan perhitungan analisis yang telah dilakukan Kanwil DJPb Provinsi Lampung menggunakan analisis *Location Quotient*, *Shift Share*, dan Tipologi Klassen, transportasi dan pergudangan merupakan sektor unggulan yang ada di Provinsi Lampung karena tergolong dalam sektor maju dan memiliki pertumbuhan yang cepat. Sebagai gerbang pulau Sumatera, Lampung memiliki potensi yang cukup besar dalam sektor transportasi dan pergudangan. Pertumbuhan positif pada sektor Transportasi dan Pergudangan pada

tahun 2023 didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan wisata di Lampung.

Peningkatan jumlah arus penumpang moda transportasi angkutan udara, angkutan laut, dan kereta api sebagaimana tampak pada grafik 2.8 mendorong akselerasi kinerja angkutan penumpang pada tahun 2023. Jumlah arus penumpang angkutan udara meningkat sebesar 35,00 persen (*yoy*), penumpang angkutan laut meningkat 34,51 persen (*yoy*), penumpang kereta api meningkat 36,00 persen (*yoy*).



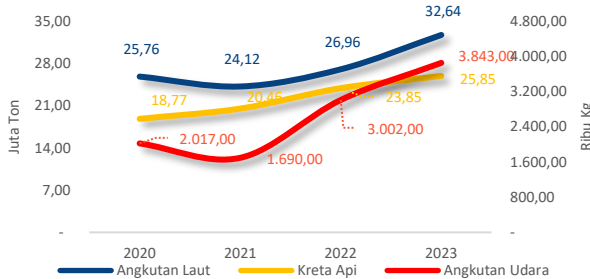
Grafik 2.8. Perkembangan Arus Penumpang Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2023



Sumber: BPS (diolah)

Pada awal tahun 2024, Bandara Radin Intan II akan melayani rute penerbangan baru menuju Bali dan Yogyakarta tanpa transit serta menambah frekuensi penerbangan menuju Jakarta tentunya ini akan semakin meningkatkan sektor Transportasi dan Pergudangan. Dengan berakhirnya pandemi Covid-19, sektor transportasi memiliki peluang untuk tetap tumbuh positif. Masyarakat sudah dapat melaksanakan berbagai kegiatan secara langsung dan pergerakan orang dengan menggunakan kendaraan akan semakin meningkat.

Grafik 2.9. Perkembangan Arus Barang Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2023



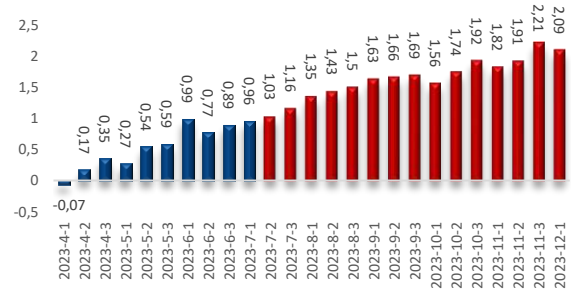
Sumber: BPS (diolah)

Di sisi lain, pertumbuhan sektor Transportasi dan Pergudangan juga didukung oleh tetap kuatnya kinerja pengangkutan barang menggunakan moda transportasi Angkutan Laut, Kereta Api, dan Angkutan Udara yang meningkat di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagaimana tampak pada grafik 2.9. Volume pengiriman barang angkutan udara meningkat sebesar 28,01 persen (yoy), Volume pengiriman barang angkutan laut meningkat 21,07 persen (yoy), Volume pengiriman barang kereta api meningkat 8,39 persen (yoy).

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor potensial yang ada di Lampung karena sektor ini tergolong dalam sektor maju namun tertekan. Dari sisi ekonomi, sektor ini masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Lampung dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2020 hingga 2023), meskipun porsinya cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2023, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dihadapkan pada tantangan *climate change*. El Nino menyebabkan produktivitas beberapa komoditas pertanian mengalami penurunan. Meskipun masih mengalami pertumbuhan positif, tetapi kontribusi sektor ini telah menurun sebesar 2,44 persen sejak tahun 2020.

Grafik 2.10. Indeks El Nino-Southern Oscillation (ENSO)



Sumber: BMKG (diolah)

Pada saat terjadi El Nino, daerah pertumbuhan awan bergeser dari wilayah Indonesia ke wilayah Samudra Pasifik bagian tengah sehingga menyebabkan berkurangnya curah hujan di Indonesia. Hasil monitoring BMKG, ENSO menunjukkan indeks ENSO diatas +1,00 sejak Dasarian I Juli 2023 dan berlanjut sampai Desember 2023 sebagaimana tampak pada grafik 2.10.

Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Provinsi Lampung mengalami pergeseran ke sektor tersier. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023 (ST2023) Jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) di Provinsi Lampung sebanyak 1.371.783 unit atau turun 3,44 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 1.420.607 unit.

Perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan



sangat besar dimana salah satu misi dalam RPJMD 2019-2024 adalah membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dengan program strategis diantaranya meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan hutan. Adapun arah dan kebijakan pembangunan Provinsi Lampung mendukung *grand design* pertanian antara lain:

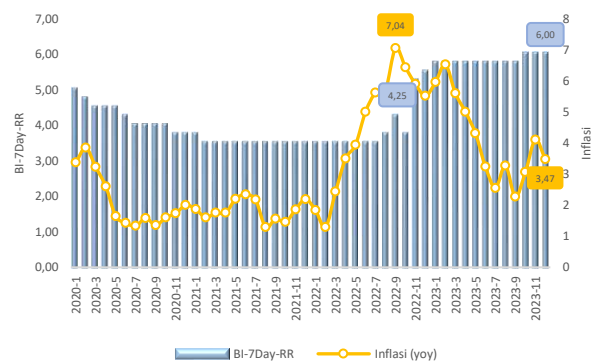
- *Supply chain* atau sistem logistik, memetakan kebutuhan dan ketersediaan produk pertanian (dalam arti luas) Lampung serta memperbaiki *supply chain* (rantai pasok);
- Korporasi Petani, membangun pertanian berbasis korporasi;
- Daya Saing dan Nilai Tambah, peningkatan produk pertanian dan pemasaran *online*;
- Alih Fungsi, kebijakan mengurangi alih fungsi lahan dan stabilitas harga;
- Program Kartu Petani Berjaya, diatur dalam Pergub No. 9 tahun 2022 tentang Program Kartu Petani Berjaya;
- Sumber Daya Manusia, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pertanian;
- *Urban Farming*, menggalakkan kegiatan *Urban Farming* atau kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan untuk bercocok tanam ke masyarakat guna mendukung ketahanan pangan;
- Inovasi Teknologi dan Riset, peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian berbasis teknologi (seperti jalan usaha tani, alat mesin pertanian [alsintan] untuk panen, pompa air, dan lain-lain).

2.1.2. Suku Bunga

BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) adalah instrumen operasi pasar terbuka Bank Indonesia yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi, memperkuat transmisi kebijakan moneter, dan mengatur jumlah uang beredar. Dengan menetapkan suku bunga acuan yang sesuai dengan tingkat inflasi, Bank Indonesia dapat mempengaruhi perilaku kreditur dan debitur. Suku bunga yang

tinggi akan menekan permintaan kredit dan mendorong tabungan, sehingga mengurangi uang beredar dan konsumsi, yang pada akhirnya akan menurunkan inflasi dan melambatkan ekonomi. Sebaliknya, suku bunga yang rendah akan meningkatkan permintaan kredit dan mengurangi tabungan, sehingga menambah uang beredar dan konsumsi, yang pada akhirnya akan meningkatkan inflasi dan mempercepat ekonomi. Dalam menentukan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan pemerintah untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Grafik 2.11. Perkembangan BI 7-Day Repo Rate Tahun 2020 – 2023



Sumber: Bank Indonesia dan BPS (diolah)

Pada triwulan I s.d. triwulan III 2023 suku bunga acuan sebesar 5,75 persen, sementara di triwulan IV 2023 suku bunga acuan sebesar 6,00 persen. Suku bunga acuan dipertahankan pada level 6,00 persen untuk memastikan inflasi terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1$ persen pada 2024. Fokus kebijakan moneter melalui suku bunga acuan tersebut diarahkan untuk menjaga nilai rupiah tetap stabil, agar harga barang-barang impor dari luar negeri tidak naik terlalu tinggi (*imported inflation*), serta untuk menghadapi risiko pasar keuangan global yang masih penuh ketidakpastian, yang menyimpan risiko terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan regional.

2.1.3. Inflasi

Inflasi merupakan fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu,





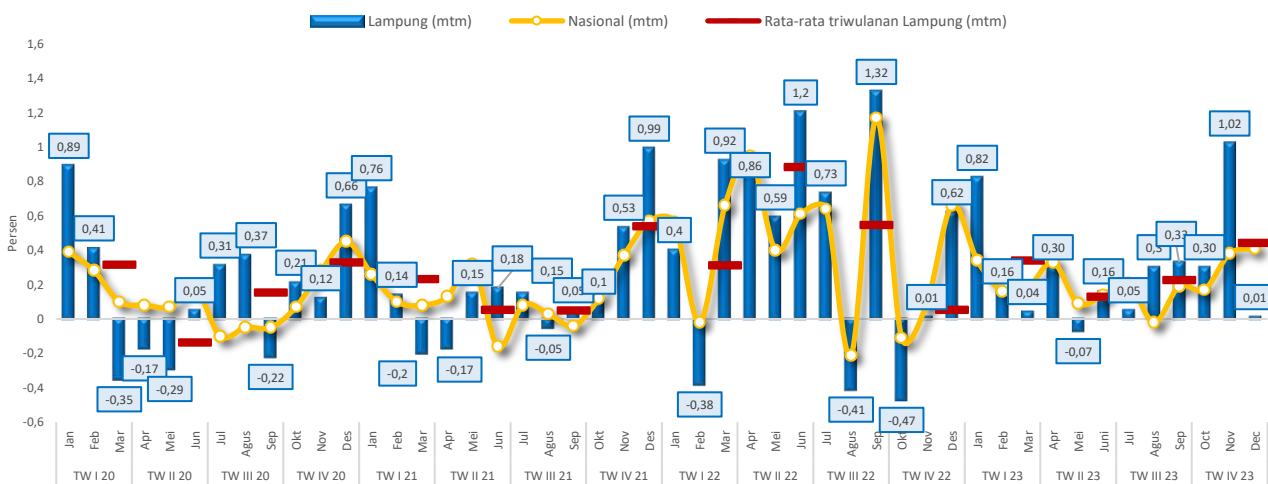
sementara penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu disebut deflasi.

2.1.3.1. Inflasi Bulanan

Pergerakan Laju Inflasi Bulanan Lampung dan Nasional Tahun 2020 – 2023 dapat dilihat pada grafik 2.12. Rata-rata Inflasi Lampung pada tahun 2023 secara bulanan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,29 persen (*mtm*), lebih tinggi

dibandingkan dengan rata-rata inflasi tahun 2020 yang tercatat sebesar 0,17 persen (*mtm*) dan inflasi tahun 2021 yang tercatat sebesar 0,22 persen (*mtm*), tetapi lebih rendah dari rata-rata capaian inflasi tahun 2022 yang tercatat sebesar 0,45 persen (*mtm*). Rata-rata inflasi Lampung pada tahun 2023 secara bulanan juga lebih tinggi dari rata-rata capaian inflasi nasional tahun 2023 yang tercatat sebesar 0,22 persen (*mtm*).

Grafik 2.12. Pergerakan Laju Inflasi Bulanan Lampung dan Nasional Tahun 2020 – 2023



Sumber: BPS (diolah)

Sepanjang periode tahun 2020 hingga 2023, tekanan inflasi bulanan tertinggi terjadi pada bulan September 2022 yaitu sebesar 1,32 persen (*yoy*) dengan andil atau porsi inflasi tertinggi berasal dari kelompok transportasi (*administered price*) sebesar 0,96 persen (*mtm*). Lebih lanjut, komoditas dengan

andil inflasi tertinggi yaitu berasal dari bensin dengan andil sebesar 0,81 persen (*mtm*). Artinya, bensin menyumbang sebesar 0,81 persen (*mtm*) dari porsi inflasi bulanan periode September 2022 yang sebesar 1,32 persen (*mtm*).

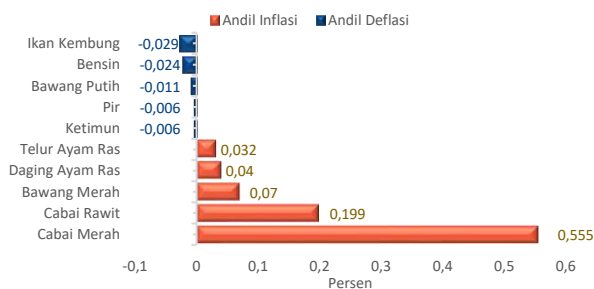
Tabel 2.3. Inflasi dan Andil Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran Lampung Tahun 2023 (Persen)

Wilayah	Jan-23		Feb-23		Mar-23		Apr-23		May-23		Jun-23		Jul-23		Aug-23		Sep-23		Oct-23		Nov-23		Dec-23	
	Andil Inflasi	Inflasi	Andil Inflasi	Inflasi	Andil Inflasi	Inflasi	Andil Inflasi	Inflasi	Andil Inflasi	Inflasi	Andil Inflasi	Inflasi	Andil Inflasi	Inflasi	Andil Inflasi	Inflasi	Andil Inflasi	Inflasi	Andil Inflasi	Inflasi	Andil Inflasi	Inflasi		
Umum	0,82	0,82	0,16	0,16	0,04	0,04	0,3	0,3	-0,07	-0,07	0,16	0,16	0,05	0,05	0,3	0,3	0,33	0,33	0,3	0,3	1,02	1,02	0,01	0,01
Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,72	2,43	0,12	0,4	0,01	0,02	0,13	0,4	0,07	0,25	0,14	0,48	-0,03	-0,09	0,23	0,75	0,23	0,75	0,2	0,66	0,92	3	-0,01	-0,02
Pakaian dan Alas Kaki	0,03	0,49	0,01	0,24	0	-0,03	0,01	0,17	0	0,06	0,01	0,06	0,02	0,32	0	-0,01	0	-0,02	0	0,04	0	0,01	0,01	0,22
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah	0,05	0,26	0	-0,07	0	0,01	0	0	0,03	0,15	0	0	0,07	0,4	0	-0,02	-0,01	-0,03	0	-0,02	0,01	0,04	-0,01	-0,03
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	0,05	1	0	0,05	0,01	0,28	0,01	0,27	0	-0,08	0,02	0,4	0,01	0,2	-0,02	-0,3	0	-0,06	0	0,08	0,01	0,2	0,01	0,1
Kesehatan	0,01	0,3	0	0,01	-0,01	-0,44	0,04	1,8	0	0,02	-0,02	-0,7	0	0,05	0	-0,08	-0,01	-0,25	0,01	0,28	0	0,13	0	0,01
Transportasi	-0,1	-0,69	0,03	0,21	0,03	0,22	0,09	0,64	-0,18	-1,29	-0,01	-0,1	-0,09	-0,58	0	0	0,07	0,52	0,06	0,43	0,05	0,39	0	-0,02
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,02	-0,51	0	0,04	0	-0,03	0	-0,07	0	-0,07	0	-0,08	0	-0,01	0	0	0,02	0,41	0	-0,04	0	-0,04	0	0,12
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0	0,11	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0,02	0,77	0	0	0,01	0,53	0	-0,05	0	0,01	0	0,03	0	0
Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0,87	0,11	2,07	0,03	0,7	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,06	0,73	0	0	0,01	0,07	0	0,06	0	0	0	0,02	0	0,05	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0
Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya	0,02	0,39	0	-0,02	-0,01	-0,1	0,02	0,3	0,01	0,25	0	0,07	0,01	0,25	-0,03	-0,49	0	-0,08	0,03	0,49	0,03	0,43	0,01	0,07

Sumber: BPS (diolah)

Pada tahun 2023, inflasi bulanan tertinggi terjadi pada bulan November 2023 yaitu sebesar 1,02 persen (mtm) dengan andil inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yakni sebesar 0,92 persen (mtm) sebagaimana tampak pada tabel 2.5. Lebih lanjut, komoditas dengan andil inflasi tertinggi yaitu berasal dari cabai merah dengan andil sebesar 0,56 persen (mtm) dan cabai rawit sebesar 0,20 persen (mtm) sebagaimana tampak pada grafik 2.13.

Grafik 2.13. Andil Inflasi dan Deflasi Bulan November 2023 (mtm) yang Merupakan Periode dengan Andil Inflasi (mtm) tertinggi di Tahun 2023



Sumber: BPS (diolah)

Pada bulan ini, Lampung dihadapkan pada kondisi kenaikan harga aneka cabai. Kenaikan harga komoditas cabai disebabkan penurunan pasokan di daerah produksi cabai yaitu di Lampung Selatan dan penurunan kualitas cabai akibat El Nino. Kenaikan harga aneka cabai juga dipengaruhi kenaikan harga cabai rawit dari Sukabumi (Jawa Barat) sebagai salah satu pemasok utama cabai di Lampung.

Komoditas lainnya yang memberikan andil inflasi *mtm* November 2023 adalah Bawang Merah, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,070 persen; 0,040 persen; dan 0,032 persen sebagaimana tampak pada grafik 2.8. Kenaikan harga bawang merah disebabkan oleh berkurangnya pasokan sejalan dengan berakhirnya periode panen Juli-Agustus 2023. Adapun kenaikan harga daging dan telur ayam ras sejalan dengan masuknya periode permintaan tinggi menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

Beberapa komoditas yang menahan laju inflasi November 2023 antara lain Ikan Kembang, Bensin,

Bawang Putih, Pir, dan Ketimun dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,029 persen; 0,024 persen; 0,011 persen; 0,006 persen; dan 0,006 persen. Penurunan harga ikan kembang didorong peningkatan pasokan dampak faktor cuaca. Penurunan harga bensin sejalan dengan penurunan harga BBM non subsidi pada 1 November 2023 yang dilakukan pemerintah sebagai penyesuaian atas turunnya harga minyak dunia. Penurunan harga bawang putih sejalan dengan realisasi impor bawang putih.

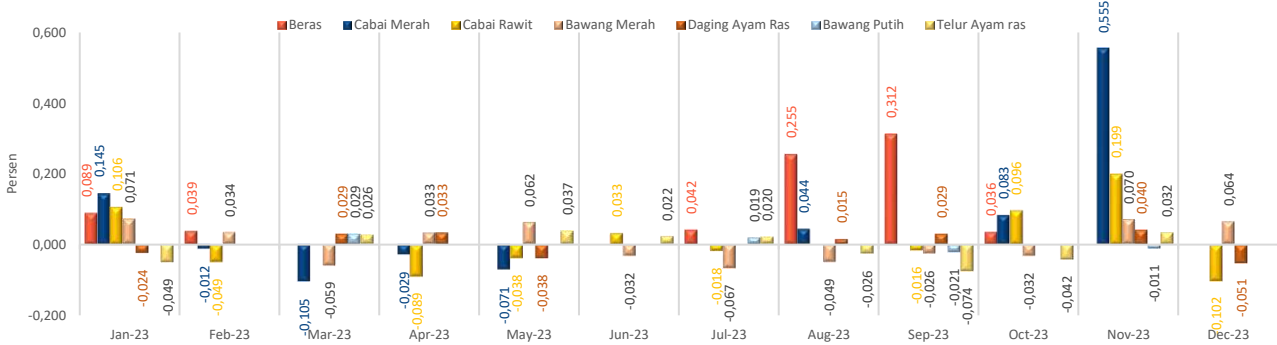
Rata-rata inflasi tertinggi sepanjang tahun 2023 berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yaitu sebesar 0,75 persen (*mtm*) dan rata-rata andil inflasi sebesar 0,23 persen (*mtm*). Angka yang sangat signifikan dari rata-rata andil inflasi secara umum sebesar 0,29 (*mtm*), sementara 0,23 persen (*mtm*) inflasi berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau khususnya pada komoditas beras, rokok kretek filter, dan aneka cabai. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di regional Lampung adalah kesediaan stok komoditas. Penting untuk mengidentifikasi komoditas yang rentan terhadap inflasi. Hal ini dilakukan sebagai *early warning* terhadap kenaikan harga, Jika inflasi terjadi pada komoditas bahan pokok, maka dampaknya akan sangat dirasakan masyarakat lapisan bawah.

Rata-rata andil inflasi kelompok Pendidikan sepanjang tahun 2023 sebesar 0,02 persen (*mtm*), rata-rata andil inflasi tertinggi kedua setelah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Inflasi yang terjadi pada kelompok pendidikan cenderung memiliki pola yang berulang, di sekitar Juli – Desember. Periode tersebut merupakan dimulainya tahun ajaran baru.

Pergerakan laju inflasi/deflasi pada komoditas pangan strategis di Lampung Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik 2.14. Komoditas beras dan aneka cabai di tahun 2023 beberapa kali mengalami inflasi yang tinggi secara bulanan.



Grafik 2.14. Pergerakan Laju Inflasi/Deflasi Pada Komoditas Pangan Strategis di Lampung Tahun 2023 (mtm)



Sumber: BPS (diolah)

Beras menjadi komoditas dengan rata-rata andil inflasi tertinggi sepanjang tahun 2023 dibandingkan dengan komoditas lainnya yaitu sebesar 0,129 persen (mtm) sebagaimana tampak pada tabel 2.6. Selain itu, beras juga merupakan komoditas dengan frekuensi penyumbang andil inflasi terbanyak yakni sebanyak 6 (enam) kali masing-masing andilnya yakni pada Januari 0,089 persen (mtm), Februari 0,039 persen (mtm), Juli 0,042 persen (mtm), Agustus 0,255 persen (mtm), September 0,312 persen (mtm), dan Oktober 0,036 persen (mtm) sebagaimana tampak pada grafik 2.10.

Lampung merupakan Provinsi keenam dengan produksi padi tertinggi secara nasional. Produksi padi di Provinsi Lampung sepanjang Januari hingga Desember 2023 mencapai sekitar 2,7 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Namun demikian, jumlah tersebut tidak sepenuhnya untuk Provinsi Lampung, terdapat *mandatory* pendistribusian beras ke daerah yang defisit. Aktivitas ekspor gabah dari petani menjadi faktor kerentanan *demand shock* inflasi beras dari kenaikan Gabah Kering Panen (GKP) akibat kompetisi perolehan gabah antara Agen RMU (*Rice Milling Unit*) lokal dengan Agen RMU besar dari luar Provinsi Lampung. Selain itu, terdapat faktor cuaca (El Nino) yang menghambat kinerja produksi padi pada tahun 2023, produksi padi hanya meningkat sedikit yakni sebesar 1,51 persen (yoy) sedangkan tahun 2022 produksi padi meningkat sebesar 8,16 persen (yoy). Oleh karena itu, terjadinya kenaikan harga atau inflasi pada beras di Lampung.

Rokok Kretek Filter menjadi komoditas dengan rata-rata andil inflasi tertinggi kedua sepanjang tahun 2023 setelah Beras yakni sebesar 0,077 persen (mtm) dengan frekuensi penyumbang andil inflasi sebanyak 4 (empat) kali masing-masing andilnya yakni pada Januari 0,174 persen (mtm), Februari 0,080 persen (mtm), Mei 0,037 persen (mtm), dan Juni 0,019 persen (mtm). Kenaikan harga komoditas rokok filter disebabkan peningkatan tarif cukai rokok sebesar 10 persen yang diterapkan per 1 Januari 2023 melalui PMK nomor 191/PMK.010/2022.

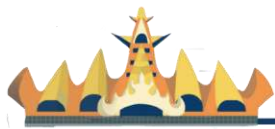
Tabel 2.4. Sepuluh Komoditas Dengan Frekuensi Andil Inflasi Bulanan Terbanyak di Lampung Selama Tahun 2023

Komoditas Inflasi	Frekuensi Top 10 Andil Inflasi(mtm)	Rata-rata Andil Inflasi dan Deflasi (mtm)
Beras	6	0,129
Bawang Merah	6	0,006
Daging Ayam Ras	5	0,004
Telur Ayam ras	5	-0,006
Rokok Kretek Filter	4	0,077
Cabai Merah	4	0,076
Cabai Rawit	4	0,012
Bensin	3	-0,002
Bawang Putih	2	0,004
Jeruk	2	-0,002

Sumber: BPS (diolah)

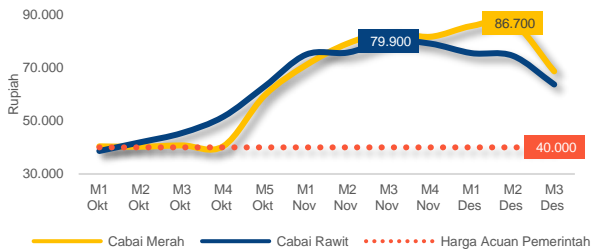
Rata-rata andil inflasi Cabai Merah sepanjang tahun 2023 sebesar 0,076 persen (mtm) dan Cabai Rawit sebesar 0,012 persen (mtm). Cabai Merah menyumbang andil inflasi sebanyak 4 (empat) kali masing-masing pada Januari 0,145 persen (mtm), Agustus 0,044 persen (mtm), Oktober 0,083 persen





(*mtm*), dan November 0,555 persen (*mtm*). Cabai Rawit juga menyumbang andil inflasi sebanyak 4 (empat) kali masing-masing pada Januari 0,106 persen (*mtm*), Juni 0,033 persen (*mtm*), Oktober 0,051 persen (*mtm*), dan November 0,199 persen (*mtm*) sebagaimana tampak pada grafik 2.14. Kenaikan aneka cabai cenderung dipengaruhi oleh ketersediaan stok yang menurun di tengah permintaan yang tinggi. Selain itu, pada periode Oktober dan November produktivitas aneka cabai menurun akibat cuaca panas dan kekeringan (El Nino).

Grafik 2.15. Kenaikan Harga Aneka Cabai di triwulan IV 2023



Sumber: PIHPS Bank Indonesia Regional Lampung per 31 Desember 2023, TPID Provinsi Lampung (diolah)

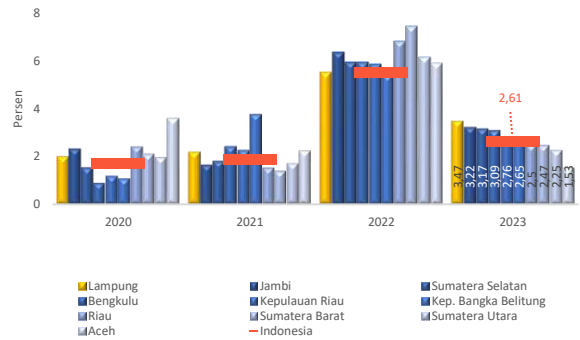
Lampung mengalami defisit stok aneka cabai pada triwulan IV. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, ketersediaan stok aneka cabai di triwulan IV 2023 sebanyak 7.078,4 ton sementara kebutuhannya sebanyak 13.674,5 ton sehingga terjadi defisit sebesar 6.596,15 ton. Defisit stok ini turut mendorong kenaikan harga aneka cabai sebagaimana tampak pada grafik 2.15.

2.1.3.2. Inflasi Tahunan

Inflasi di Lampung tahun 2023 mencapai 3,47 persen (*yoy*), lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 5,51 persen (*yoy*), tetapi masih di atas tahun 2021 yang sebesar 2,19 persen (*yoy*) dan 2020 yang sebesar 2,00 persen (*yoy*) sebagaimana tampak pada grafik 2.16. Capaian inflasi Lampung pada tahun 2023 mencatatkan Lampung sebagai Provinsi dengan inflasi tertinggi di Sumatera dan berada di atas tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,61 persen (*yoy*). Meskipun demikian, capaian ini masih berada dalam level

asaran inflasi sebesar 3 ± 1 persen (*yoy*) dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Lampung tahun 2023 dan sasaran inflasi pemerintah.

Grafik 2.16. Pergerakan Laju Inflasi Lampung, Provinsi di Regional Sumatera dan Nasional (*yoy*)



Sumber: BPS (diolah)

Provinsi di Regional Sumatera dan nasional mengalami Inflasi tertinggi pada tahun 2022. Secara umum inflasi di tahun 2022 dipengaruhi oleh tekanan harga global, kebijakan pengalihan subsidi BBM, selain itu juga meningkatnya permintaan masyarakat pasca pemulihan kondisi Pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 pemerintah mengumumkan penyesuaian harga BBM yang menyebabkan harga *pertalite* naik 30,72 persen, harga solar naik 32,04 persen dan harga *pertamax* (non-subsidi) naik 16,00 persen. Dengan adanya penyesuaian harga BBM, harga komoditas lainnya secara tidak langsung ikut terpengaruh karena terjadi kenaikan biaya distribusi barang.

Penyesuaian harga BBM di tahun 2022 tidak dapat dihindari. Rata-rata *Indonesian Crude Price* (ICP) hingga September 2022 adalah sebesar US \$101,31 per barel. Kenaikan harga minyak mentah menyebabkan belanja subsidi dan kompensasi melonjak. Melalui Peraturan Presiden nomor 98 Tahun 2022, subsidi dan kompensasi diperkirakan sebesar Rp502,4 triliun mengalami lonjakan 300 persen dari anggaran sebelumnya yaitu sebesar Rp152,5 triliun. Sejalan dengan pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 dan mobilitas yang meningkat, kuota BBM bersubsidi yang dianggarkan





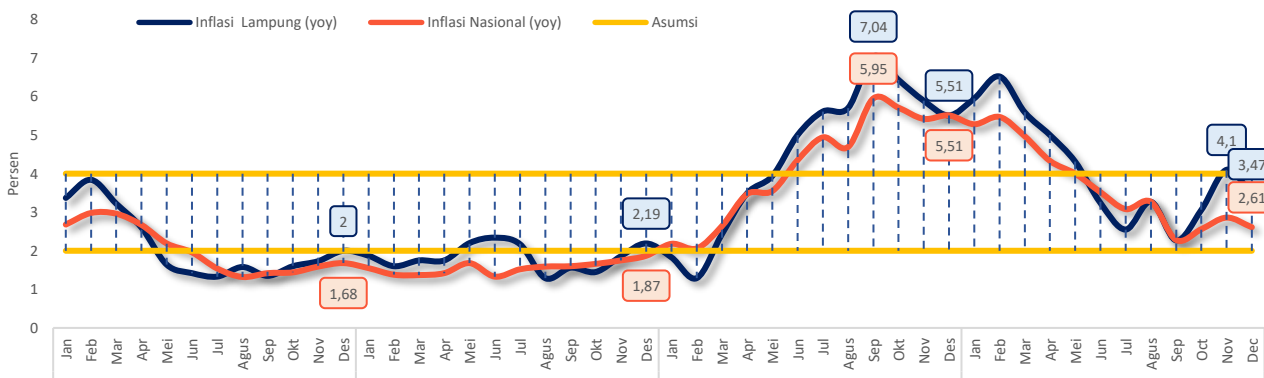
dalam APBN 2022 diperkirakan akan habis pada bulan Oktober 2022. Nilai tukar US Dollar terhadap rupiah juga berada di angka Rp14.750,00, lebih tinggi dari asumsi dasar ekonomi makro 2022 yakni sebesar Rp14.450,00. Harga, kurs, dan konsumsi yang lebih tinggi menyebabkan subsidi dan kompensasi energi tahun 2022 lebih tinggi dari alokasi sehingga anggaran subsidi dan kompensasi harus ditambah.

Berdasarkan konferensi pers tindak lanjut hasil rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait kebijakan subsidi BBM, diolah dari Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Maret 2021, BBM yang bersubsidi lebih banyak dinikmati oleh

masyarakat mampu sehingga anggaran subsidi menjadi tidak tepat sasaran. Pemerintah melakukan penyesuaian subsidi dan kompensasi BBM agar bantuan yang dianggarkan dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan APBN dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat.

Inflasi Lampung dan Nasional Kembali berada pada level sasaran inflasi 3±1 persen pada Juni 2023 sebagaimana tampak pada grafik 2.17 dan bertahan sampai dengan Desember 2023 meskipun pada bulan November 2023 inflasi Lampung sempat berada diatas level sasaran inflasi 3±1 persen yakni sebesar 4,10 persen (yoy).

Grafik 2.17. Pergerakan Laju Inflasi Tahunan Lampung dan Nasional Tahun 2020 – 2023



Sumber: BPS dan Bank Indonesia (diolah)

Tabel 2.5. Inflasi dan Andil Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Pengeluaran Lampung Tahun 2023 (Persen)

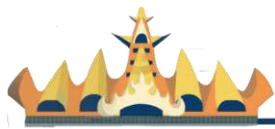
Wilayah Kelompok Pengeluaran	Jan-23		Feb-23		Mar-23		Apr-23		Mey-23		Jun-23		Jul-23		Aug-23		Sep-23		Oct-23		Nov-23		Dec-23	
	Andil inflasi	Inflasi	Andil inflasi	Inflasi	Andil inflasi	Inflasi	Andil inflasi	Inflasi	Andil inflasi	Inflasi	Andil inflasi	Inflasi	Andil inflasi	Inflasi	Andil inflasi	Inflasi	Andil inflasi	Inflasi	Andil inflasi	Inflasi	Andil inflasi	Inflasi	Andil inflasi	Inflasi
Umum	5,95	5,95	6,52	6,52	5,59	5,59	5,00	5,00	4,31	4,31	3,24	3,24	2,55	2,55	3,27	3,27	2,27	2,27	3,06	3,06	4,10	4,10	3,47	3,47
Makanan, Minuman, dan Tembakau	2,12	7,12	2,66	9,01	1,88	6,28	1,56	5,18	1,29	4,25	0,43	1,40	-0,11	-0,35	1,05	3,46	1,43	4,78	2,33	7,93	3,36	11,49	2,77	9,36
Pakaian dan Alas Kaki	0,30	4,98	0,31	5,23	0,28	4,66	0,28	4,70	0,28	4,74	0,28	4,75	0,29	5,04	0,29	5,03	0,11	1,77	0,10	1,62	0,09	1,45	0,09	1,55
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah	0,30	1,70	0,30	1,68	0,29	1,64	0,27	1,57	0,29	1,68	0,27	1,58	0,30	1,77	0,27	1,59	0,16	0,95	0,16	0,94	0,11	0,66	0,12	0,70
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	0,15	2,76	0,14	2,65	0,15	2,86	0,17	3,14	0,14	2,64	0,13	2,53	0,12	2,27	0,10	1,79	0,09	1,70	0,10	1,89	0,11	2,17	0,11	2,15
Kesehatan	0,12	4,79	0,12	4,69	0,08	3,38	0,09	3,77	0,09	3,48	0,05	1,92	0,06	2,36	0,04	1,55	0,03	1,10	0,03	1,37	0,04	1,42	0,03	1,10
Transportasi	1,76	13,33	1,81	13,63	1,86	14,14	1,59	11,93	1,35	10,12	1,19	8,98	0,96	7,17	0,94	6,99	0,05	0,33	-0,07	-0,49	-0,02	-0,14	-0,04	-0,27
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,06	-1,36	-0,05	-1,15	-0,05	-1,14	-0,05	-1,19	-0,05	-1,25	-0,04	-1,06	-0,04	-0,97	-0,03	-0,72	-0,01	-0,31	-0,01	-0,31	-0,01	-0,35	-0,01	-0,28
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,11	5,43	0,11	5,41	0,08	4,11	0,08	4,03	0,05	2,47	0,06	3,08	0,06	2,96	0,06	3,11	0,03	1,32	0,03	1,37	0,03	1,42	0,03	1,41
Pendidikan	0,47	0,00	0,47	9,23	0,46	9,23	0,46	9,23	0,46	9,21	0,45	9,21	0,46	9,39	0,16	2,96	0,19	3,68	0,19	3,68	0,19	3,68	0,19	3,68
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,30	0,73	0,30	3,48	0,25	2,88	0,25	2,94	0,22	2,54	0,21	2,54	0,21	2,56	0,21	2,43	0,09	1,06	0,09	1,07	0,09	1,07	0,08	0,98
Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya	0,38	0,39	0,36	6,41	0,31	5,51	0,30	5,34	0,21	3,82	0,20	3,64	0,24	4,31	0,19	3,47	0,12	2,09	0,11	2,05	0,11	1,89	0,09	1,57

Sumber: BPS (diolah)

Pada tahun 2023, tiga kelompok dengan andil inflasi tahunan tertinggi yaitu kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Kelompok Transportasi; dan Kelompok Pendidikan dengan rata-rata andil inflasi sepanjang tahun 2023 masing-masing sebesar 1,73 persen (yoy), 0,95 persen (yoy), dan

0,35 persen (yoy). Di periode Januari Hingga Mei dan Agustus, inflasi tertinggi dialami oleh kelompok Transportasi, sementara periode Juni dan Juli inflasi tertingginya dialami oleh Kelompok Pendidikan, dan untuk periode September hingga Desember inflasi tertingginya dialami oleh Kelompok Makanan,





Minuman, dan Tembakau sebagaimana tampak pada tabel 2.6.

Tabel 2.6. Sepuluh Komoditas Dengan Frekuensi Andil Inflasi Tahunan Terbanyak di Lampung Selama Tahun 2023

Komoditas Inflasi	Frekuensi Top 10 Andil Inflasi (yoy)	Rata-rata Andil Inflasi dan Deflasi (yoy)
Rokok Kretek Filter	12	0,4975
Beras	12	0,6076
Bensin	8	0,8152
Bawang Putih	5	0,1383
Sekolah Menengah Atas	5	0,2288
Cabai Merah	4	-0,1244
Angkutan Udara	4	-0,0203
Angkutan Dalam Kota	4	0,1339
Cabai Rawit	2	-0,0563
Rokok Putih	2	0,0973

Sumber: BPS (diolah)

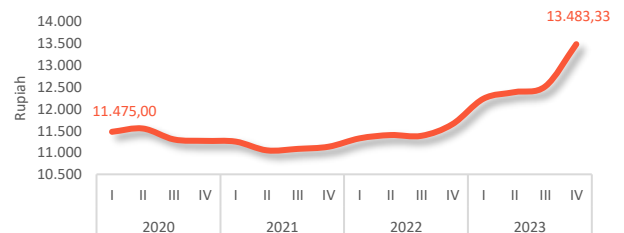
Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami tekanan inflasi yaitu sebesar 9,36 persen (yoy) pada akhir tahun 2023 dengan andil inflasi sebesar 3,47 persen (yoy). Dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, komoditas dengan frekuensi andil inflasi tahunan terbanyak di Lampung selama tahun 2023 yaitu Rokok Kretek Filter sebanyak 12 kali dan Beras sebanyak 12 kali, sebagaimana tampak pada tabel 2.6.

Kenaikan harga rokok disebabkan peningkatan tarif cukai rokok sebesar 10 persen yang diterapkan per

Januari 2023 melalui PMK nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Pemerintah menyusun instrumen cukai dengan mempertimbangkan sejumlah aspek mulai dari tenaga kerja pertanian hingga industri rokok. Di samping itu, pemerintah juga memperhatikan target penurunan prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun menjadi 8,7 persen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai guna mengendalikan baik konsumsi maupun produksi rokok.

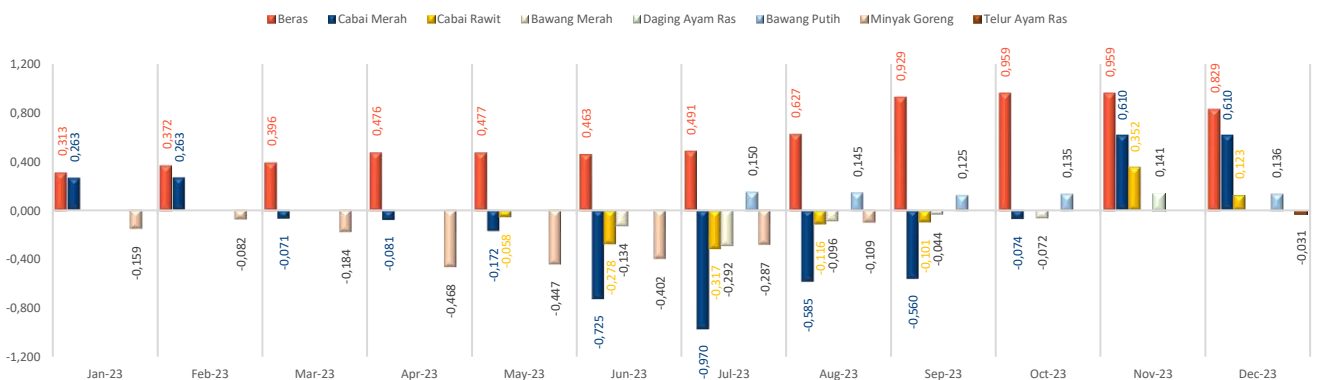
Kenaikan harga beras tertinggi terjadi di tahun 2023 sebagaimana tampak pada grafik 2.18.

Grafik 2.18. Perkembangan Harga Beras di Lampung Tahun 2020 – 2023



Sumber: PIHPS Bank Indonesia Regional Lampung (diolah)

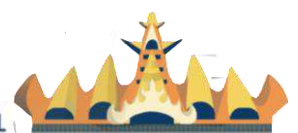
Grafik 2.19. Pergerakan Laju Inflasi/Deflasi Pada Komoditas Pangan Strategis di Lampung Tahun 2023 (yoy)



Sumber: BPS (diolah)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, faktor cuaca (El Nino) yang menghambat kinerja produksi padi pada tahun 2023 mempengaruhi kenaikan harga beras di Lampung. Berdasarkan kajian ilmiah,

El Nino umumnya berdampak pada berkurangnya curah hujan di Indonesia. Dampak El Nino tergantung pada Intensitas El Nino, Durasi El Nino, Musim yang sedang berlangsung. Dampak El Nino



di Indonesia umumnya terasa kuat pada musim kemarau yaitu pada bulan-bulan Juli - Agustus - September – Oktober. Lebih lanjut, Dampak El Nino di Jawa relatif lebih luas dibandingkan dengan pulau lainnya, hal ini berdampak kepada penurunan produksi padi di Jawa yang mendorong permintaan gabah dari Lampung.

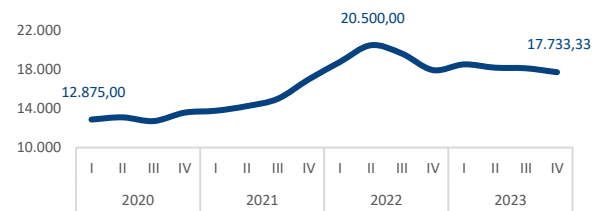
Berdasarkan pergerakan laju inflasi atau deflasi *yoy* pada komoditas pangan strategis di Lampung, Beras merupakan komoditas yang mendominasi terjadi inflasi sejak periode Januari hingga Desember 2023 sebagaimana tampak pada grafik 2.19. Kemudian, untuk Komoditas Cabai Merah, terjadi deflasi *yoy* paling dalam pada triwulan III 2023 yang disebabkan karena stok komoditas yang melimpah dan menyebabkan turunnya harga. Minyak goreng Pada triwulan IV 2023, kelompok transportasi mengalami deflasi. Kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 0,27 persen (*yoy*) di akhir periode tahun 2023. Sementara itu, sepanjang triwulan I hingga triwulan III 2023 kelompok ini mengalami inflasi terutama dipengaruhi oleh *second round effect* dari penyesuaian harga BBM bersubsidi seperti yang tercermin pada kenaikan inflasi bensin, angkutan dalam kota, solar, angkutan kota antar Provinsi. Bensin merupakan komoditas kelompok transportasi yang menjadi komoditas dengan frekuensi andil inflasi sebanyak 8 kali di tahun 2023.

Kelompok Pendidikan mengalami tekanan inflasi Desember 2023 yaitu sebesar 3,68 persen (*yoy*) dengan andil sebesar 0,19 persen (*yoy*). Tahun 2022 masih dipengaruhi pandemi Covid-19 yang mana pembelajaran masih ada yang dilakukan secara daring sehingga banyak penyedia jasa pendidikan yang menurunkan tarif biaya pendidikannya, artinya biaya pendidikan tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Andil Inflasi kelompok pendidikan tertinggi yaitu berasal dari Sekolah Menengah Atas yang mana rata-rata andil inflasi sepanjang tahun 2023 sebesar 0,229 persen (*yoy*).

2.1.3.3. Pengendalian Inflasi

mengalami deflasi sepanjang tahun 2023 karena kondisi pasokan dan harganya yang mulai normal di pasaran yang sebelumnya mengalami peningkatan harga di tahun 2022 sebagaimana tampak ada grafik 2.16. Penurunan harga minyak goreng di tahun 2023 tidak terlepas dari upaya pemerintah yang mengutamakan ketersediaan CPO (*Crude Palm Oil*) di tingkat nasional sebelum diekspor.

Grafik 2.20. Perkembangan Harga Minyak di Lampung Tahun 2020–2023



Sumber: PIHPS Bank Indonesia Regional Lampung (diolah)

Dalam rangka menjaga inflasi di Lampung berada pada level sasaran 3 ± 1 persen, adapun beberapa opsi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Regional Lampung dan *counterparts* Kemenkeu Satu regional Lampung, BI, OJK, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan inflasi, antara lain:

- Bank Indonesia terus memperkuat operasi moneter melalui kenaikan BI *7-day Repo Rate* atau suku bunga acuan. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut adalah sebagai langkah *front loaded, preemptive, dan forward looking* untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini terlalu tinggi *overshooting* dan memastikan inflasi tetap pada level sasaran.
- TPID Provinsi Lampung mengupayakan pengendalian inflasi dengan strategi 4K, yaitu Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
 - Ketersediaan Pasokan: TPID Provinsi/Kabupaten/Kota perlu untuk mengoptimalkan dan meningkatkan penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk memenuhi pasokan dan menjaga disparitas harga komoditas pangan strategis



yang terlalu tinggi antar daerah. Hilirisasi dan kerja sama dengan mitra ataupun *off taker* perlu terus ditingkatkan dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Meningkatkan produksi komoditas non basis yang sensitif inflasi untuk memenuhi pasokan lokal, seperti aneka cabai dan aneka bawang. Selain itu, melanjutkan perluasan akseptasi Kartu Petani Berjaya (KPB) dan perluasan adopsi teknologi dalam budidaya pertanian untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian dan UMKM;

ii. Keterjangkauan Harga: melakukan pemantauan harga harian dan perbandingan harga dengan daerah lain, salah satunya melalui aplikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) (<https://hargapangan.id/>) untuk melihat perkembangan harga terkini dan melakukan intervensi kebijakan yang diperlukan. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan operasi pasar, hingga pasar murah. Selanjutnya, pemberian bantuan sosial dan subsidi juga dapat didorong untuk memastikan keterjangkauan harga. Optimalisasi peran Belanja Tidak Terduga juga dapat diarahkan untuk stabilisasi Harga Bahan Pangan yang berisiko meningkat pada akhir tahun 2023 (Beras dan Hortikultura);

iii. Kelancaran Distribusi: TPID dan Satgas Pangan dapat mendorong kemitraan industri dengan petani melalui inovasi sistem logistik daerah sesuai amanat dari Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Melakukan penguatan dan perluasan KAD dengan mendorong kerja sama perdagangan antar Daerah, terutama antar BUMD. Selain itu, memastikan kelancaran transportasi dengan pembatasan angkutan barang, pengaturan lalu lintas, peningkatan

frekuensi penerbangan, dan optimalisasi pelabuhan Panjang untuk menyebar kepadatan di pelabuhan Bakauheni. Program unggulan yang dicanangkan sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pada 2024 mendatang, yakni bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penjamin suplai komoditas strategis atau *stand by buyer*;

iv. Komunikasi yang efektif: Penguatan koordinasi antara TPID dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Selain itu, TPID melakukan peningkatan validitas dan kesinambungan harga pangan serta melakukan pemantauan indikator terkini ekonomi daerah sebagai *early warning* yang akurat untuk memantau denyut perekonomian daerah. Peningkatan penyebarluasan informasi harga acuan pemerintah kepada pelaku usaha/pedagang komoditas perlu dimaksimalkan.

c. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran secara hati-hati, mengurangi belanja yang inefisien atau tidak mendesak. Di samping itu, fokus pada proyek infrastruktur yang benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dapat membantu mengurangi inefisiensi anggaran dari segi alokasi sumber daya dan meningkatkan potensi distribusi pendapatan kepada masyarakat. Kedua prioritas tersebut dapat membantu mengalokasikan dana secara lebih efisien, dan mengurangi dampak inflasi yang disebabkan oleh peningkatan belanja negara yang tidak produktif, dipadukan dengan perluasan basis pajak guna mengendalikan inflasi.

d. Tekanan inflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau perlu dimitigasi dengan memperkuat kegiatan pencatatan dan





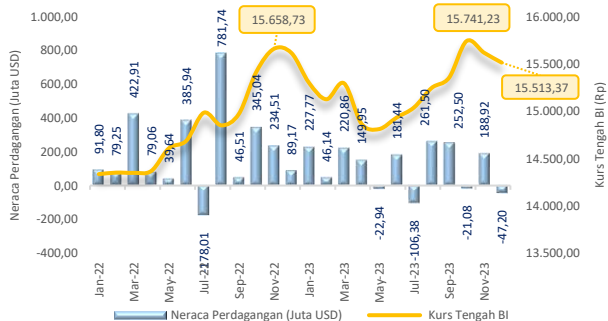
diseminasi stok dan harga komoditas bahan pokok dan penting sebagai acuan bersama dalam pengendalian inflasi.

- e. Bersinergi dalam memitigasi dan mengatasi lahan terdampak El Nino dalam aspek waktu tanam hingga panen, pemetaan curah hujan, serta pengelolaan dan dukungan ketersediaan air.

2.1.4. Nilai Tukar

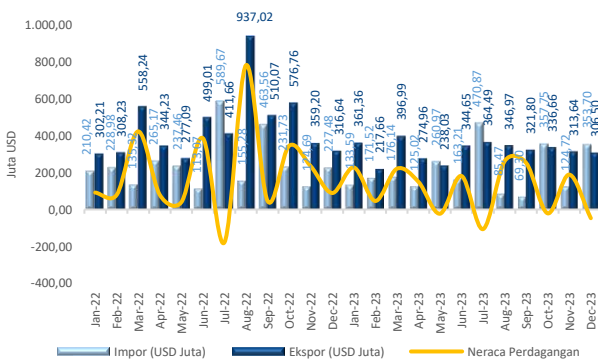
Nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan unit mata uang negara lain. Analisis nilai tukar dilakukan untuk mengetahui nilai mata uang Rupiah terhadap mata uang asing yang mempengaruhi indikator ekonomi salah satunya yaitu Neraca Perdagangan Lampung. Data Ekspor dan Impor Lampung dalam USD tersedia pada tahun 2022 dan 2023, untuk tahun sebelumnya terdapat keterbatasan untuk pengambilan data.

Grafik 2.21. Tren Pergerakan rata-rata Kurs Tengah Rupiah terhadap US\$1 dan Neraca Perdagangan Lampung (juta USD) per bulan Tahun 2022 – 2023



Sumber: Bank Indonesia dan Kanwil DJBC Sumbagbar (diolah)

Grafik 2.22. Tren Ekspor Impor (juta USD) Lampung Tahun 2022 – 2023



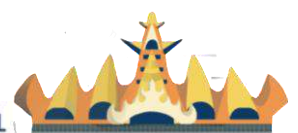
Sumber: Kanwil DJBC Sumbagbar (diolah)

Kurs Rupiah terhadap dolar di tahun 2022 s.d. 2023 berada di kisaran Rp14.335,24 s.d. Rp15.741,23 sebagaimana tampak pada grafik 2.21. Pada tahun 2023, nilai tukar Rupiah terdepresiasi terhadap USD dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berimplikasi pada peningkatan harga barang impor. Faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, perubahan kebijakan moneter di berbagai negara, dan ketidakpastian geopolitik turut berperan dalam fluktuasi nilai tukar mata uang. Perkembangan ini menjadi sorotan perhatian pelaku pasar dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Seiring berjalannya waktu, monitoring terus dilakukan untuk mengantisipasi potensi dampak dan merespons dinamika perubahan dalam pasar keuangan global.

Pada Tahun 2023, ekspor Lampung sebesar 3.823,72 juta USD (rata-rata kurs tengah rupiah sebesar Rp15.236,89) turun 29,20 persen (yoy) dibandingkan Tahun 2022 yang tercatat sebesar 5.400,37 juta USD (rata-rata kurs tengah rupiah sebesar Rp14.849,85).

Nilai tukar yang terdepresiasi tidak mempengaruhi peningkatan nilai ekspor di Lampung, tetapi secara volume ekspor di Lampung mengalami peningkatan. Penurunan nilai ekspor terbesar terjadi pada bulan Agustus 2023 yakni mengalami kontraksi sebesar 62,97 persen (yoy) salah satunya dikarenakan penurunan eksportasi Minyak Kelapa Sawit sebesar 286 juta USD. Secara umum, penurunan ekspor Lampung di tahun 2023 dipengaruhi karena harga CPO (*crude palm oil*) beserta produk turunannya yang sudah termoderasi di pasar global. Nilai ekspor Lampung berpengaruh dikarenakan produk utama ekspor Lampung adalah CPO dan produk turunannya meskipun secara volume ekspor tersebut meningkat.

Nilai Tukar yang terdepresiasi menurunkan nilai impor di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Nilai impor tahun 2023 sebesar 2.492,25 juta USD, turun 16,45 persen (yoy) dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 2.982,82 juta USD.



Berdasarkan data impor dari perspektif penggunaannya, terlihat bahwa nilai tukar yang mengalami depresiasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya memberikan dampak yang signifikan terhadap impor barang-barang konsumsi. Pada tahun 2023, nilai impor barang konsumsi mencapai 156,99 juta USD, mengalami penurunan sebesar 56,32 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan ini dapat diatribusikan langsung kepada terdepresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS.

Di sisi lain, terdapat peningkatan pada impor bahan baku dan penolong, serta barang-barang modal. Impor bahan baku dan penolong mencapai 2.278,85 juta USD, menunjukkan peningkatan sebesar 3,02 persen (*yoy*). Begitu pula, impor barang-barang modal yang mencapai 56,50 juta USD atau meningkat sebesar 15,39 persen (*yoy*). Kenaikan ini menandakan adanya dorongan dalam sektor industri dan investasi, yang mungkin diakibatkan oleh strategi perusahaan untuk memanfaatkan nilai tukar yang menguntungkan.

Menariknya, meskipun terjadi depresiasi nilai tukar Rupiah, impor bahan baku dan penolong, serta barang-barang modal di regional Lampung tetap mengalami peningkatan. Hal ini bisa diinterpretasikan sebagai indikasi positif terkait dengan investasi di sektor manufaktur Lampung. Kondisi ini dapat menjadi cerminan bahwa meskipun nilai tukar mata uang nasional mengalami fluktuasi, tetapi kepercayaan pelaku industri terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan infrastruktur di Lampung tetap tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan sektor manufaktur dan investasi di infrastruktur di regional Lampung berjalan positif dan memberikan kontribusi terhadap dinamika ekonomi yang lebih kuat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

2.2. ANALISIS INDIKATOR KESEJAHTERAAN

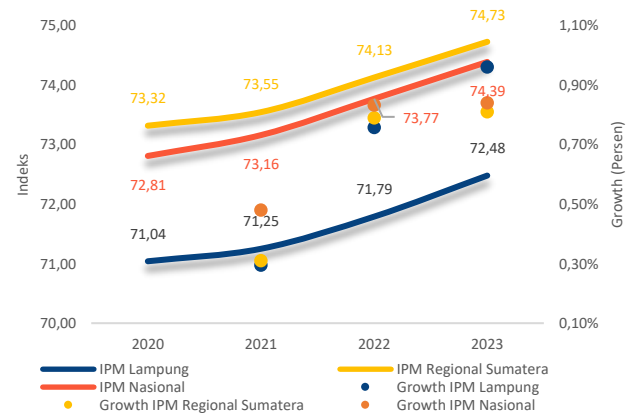
Pencapaian kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi. Di Indonesia, pencapaian kesejahteraan merupakan

salah satu tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa indikator kesejahteraan, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Tingkat Kemiskinan; Rasio Gini; Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran; Nilai Tukar Petani (NTP); dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. IPM terbentuk dari tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup yang layak. Data yang akan dibahas pada bagian ini yaitu *data time series* dari tahun 2020 s.d. 2023 yang mana komponen Umur Harapan Hidup (UHH) disesuaikan menggunakan UHH dari hasil *Long Form* SP2020.

Grafik 2.23. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Lampung, Rata-rata Regional Sumatera, dan Nasional Tahun 2020–2023



Sumber: BPS (diolah)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung dalam kurun waktu tahun 2020 – 2023 terus mengalami kemajuan. IPM Lampung tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tiga tahun sebelumnya yakni tercatat sebesar 74,39 atau tumbuh 0,96 persen, meningkat 0,69 poin dibandingkan capaian tahun 2022. Pada tahun 2020



– 2023 capaian IPM Lampung sudah berada di level “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Selama periode tersebut, IPM Lampung rata-rata meningkat sebesar 0,67 persen per tahun.

Jika dilihat berdasarkan grafik 2.23, IPM Provinsi Lampung mencatatkan angka yang lebih rendah jika dibandingkan level regional Sumatera dan nasional, dengan IPM Sumatera sedikit lebih tinggi daripada nasional. Walaupun demikian, *growth* IPM Lampung terus mengalami percepatan dari tahun sebelumnya yang menandakan pembangunan manusia di Lampung terus mengalami kemajuan.

Tabel 2.7. Komponen Pembentuk IPM Lampung, Rata-rata Regional Sumatera, dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2023

Wilayah	Periode	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran per Kapita (Juta Rp/Orang/Tahun)
Sumatera	2020	73,35	13,14	8,89	10,97
	2021	73,42	13,21	8,93	11,03
	2022	73,67	13,32	9,02	11,41
	2023	73,9	13,29	9,13	11,74
	Rata-rata	73,59	13,24	8,99	11,29
Nasional	2020	73,37	12,98	8,48	11,03
	2021	73,46	13,08	8,54	11,16
	2022	73,7	13,1	8,69	11,48
	2023	73,9	13,15	8,77	11,9
	Rata-rata	73,61	13,08	8,62	11,39
Lampung	2020	73,66	12,65	8,05	9,98
	2021	73,73	12,73	8,08	10,04
	2022	73,95	12,74	8,18	10,34
	2023	74,17	12,77	8,29	10,77
	Rata-rata	73,88	12,72	8,15	10,28

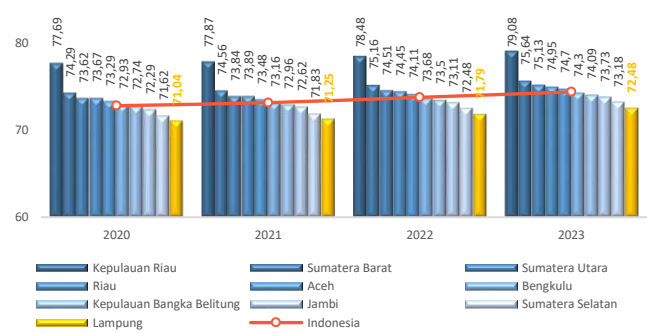
Sumber: BPS, diolah

Dari beberapa komponen pembentuk IPM di Lampung tahun 2020 s.d. 2023, Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) menunjukkan angka yang lebih tinggi dari angka nasional dan regional Sumatera. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Pengeluaran Kapita Disesuaikan menunjukkan angka yang lebih kecil dari angka nasional dan regional Sumatera sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.7.

Dicermati berdasarkan angka IPM masing-masing Provinsi di Regional Sumatera sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2.24, secara nilai Lampung merupakan Provinsi dengan IPM terendah di regional Sumatera selama tahun 2020 s.d. 2023. Namun demikian, IPM Lampung sudah masuk kategori yang sama dengan provinsi lain di Sumatera yaitu, kategori tinggi. Selama periode

2020 hingga 2023, rata-rata laju pertumbuhan IPM Lampung tertinggi ke-3 setelah Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Apabila kondisi ini terus terjaga, maka Lampung beberapa tahun ke depan akan dapat menyusul angka IPM lain di Regional Sumatera

Grafik 2.24. IPM Regional Sumatera Tahun 2020 s.d. 2023



Sumber: BPS (diolah)

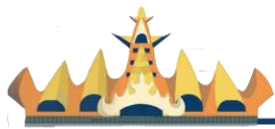
IPM Lampung tahun 2023 yang meningkat dibanding dari tahun 2022 didorong pada semua dimensi IPM, baik kualitas Kesehatan, Pendidikan, maupun Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan.

UHH yang mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, UHH Lampung 73,66 tahun sedangkan pada tahun 2023 mencapai 74,17 tahun. Selama Periode 2020 s.d. 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,51 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,23 persen per tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,22 tahun atau 0,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya (*years on years*).

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu HLS penduduk usia 7 tahun ke atas dan RLS penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 HLS 12,65 tahun dan RLS 8,05 tahun sedangkan pada tahun 2023 HLS 12,77 tahun dan RLS 8,29 tahun. Selama periode 2020 s.d. 2023, HLS telah meningkat 0,12 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,32 persen per tahun, sementara itu, RLS telah meningkat 0,24 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,99 persen per tahun.

Capaian dimensi Pengetahuan (RLS dan HLS) yang rendah dibandingkan dengan Nasional dan Regional Sumatera berdampak pada perhitungan capaian





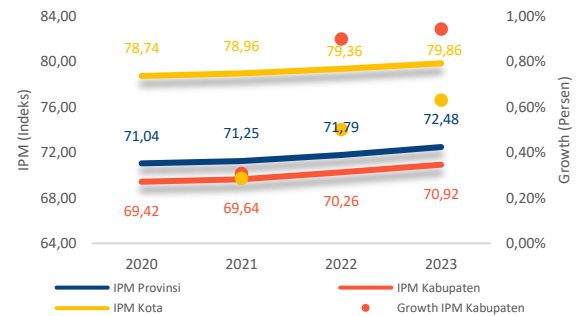
IPM Lampung. Capaian dimensi pengetahuan di Lampung beberapa dipengaruhi oleh adanya disorientasi tujuan masyarakat terhadap Pendidikan pada jenjang Pendidikan menengah atas hingga Pendidikan tinggi sehingga berpengaruh pada variabel RLS penduduk di Provinsi Lampung. Sebagai contoh di Kabupaten Mesuji, masyarakat cenderung memilih langsung bekerja di bidang pertanian karena memiliki perkebunan atau sawah yang siap untuk dijadikan usaha. Selain itu, fasilitas pendidikan di luar daerah yang lebih baik menyebabkan siswa bersekolah di luar daerahnya untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih unggul.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah pengeluaran riil per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan masyarakat Lampung mencapai Rp10,77 juta per tahun. Angka ini meningkat Rp433 ribu rupiah atau 4,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020 s.d. 2022 yang sebesar 1,76 persen per tahun.

Capaian dimensi standar hidup layak dapat dipengaruhi oleh angka kemiskinan sehingga mempengaruhi capaian pendapatan per kapita masyarakat. Selain itu, hal ini dapat mengindikasikan terjadinya disparitas distribusi pendapatan. Lebih lanjut, faktor kemiskinan dapat menghambat berbagai aspek dalam kehidupan diantaranya aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, padahal kedua aspek tersebut merupakan kapabilitas dasar dalam pembangunan manusia.

Jika dibandingkan IPM Kabupaten dan Kota, IPM Kota lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Kabupaten sebagaimana tampak pada grafik 2.25. Sementara itu, jika dicermati dari sisi pertumbuhan atau *growth*-nya. *Growth* IPM Kabupaten lebih tinggi dibandingkan kota.

Grafik 2.25. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Lampung Cluster Pemerintah Daerah Tahun 2020–2023

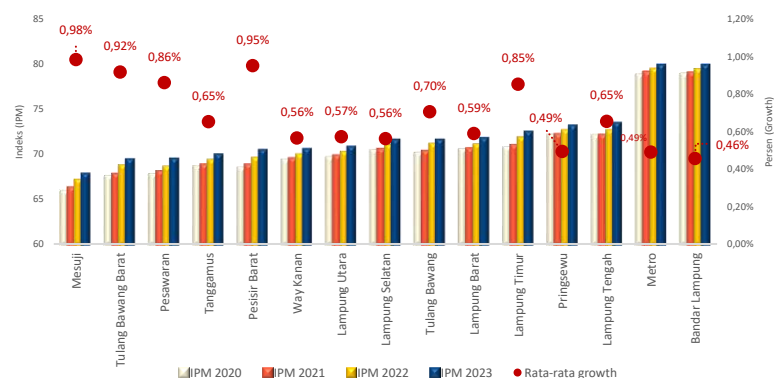


Sumber: BPS (diolah)

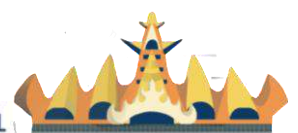
Seiring dengan meningkatnya IPM provinsi, seluruh Kabupaten/Kota mengalami peningkatan IPM. Pada tahun 2023, dicermati berdasarkan Kabupaten/Kota, terdapat 2 Kabupaten yang berubah status capaian IPM nya, yaitu Kabupaten Way Kanan dan Pesisir Barat yang meningkat menjadi berkategori “tinggi”. Dengan demikian, jumlah Kabupaten/Kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$) pada tahun 2023 adalah sebanyak 11 Kabupaten/Kota. Sedangkan 4 kabupaten lainnya berstatus “sedang” (capaian $60 \leq IPM < 70$), yaitu Kabupaten Tanggamus, Pesawaran, Mesuji dan Tulang Bawang Barat.

Sejak tahun 2020 s.d. 2023, Kota Bandar Lampung merupakan Kabupaten/Kota dengan IPM tertinggi di Lampung sedangkan Kabupaten Mesuji merupakan Kabupaten/Kota dengan IPM terendah di Lampung sebagaimana tampak pada grafik 2.26.

Grafik 2.26. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Per Kabupaten/Kota di Lampung Tahun 2020 – 2023



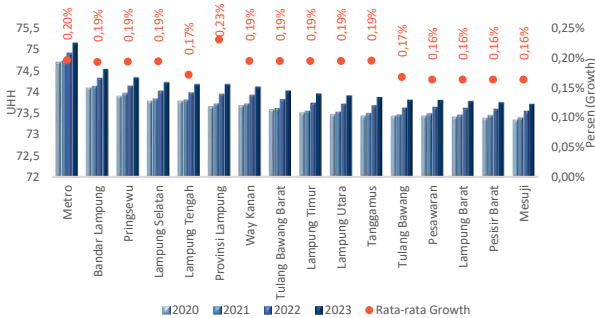
Sumber: BPS (diolah)





Meskipun IPM Mesuji terendah tetapi, rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Mesuji pada periode 2020 hingga 2023 merupakan yang paling tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Lampung.

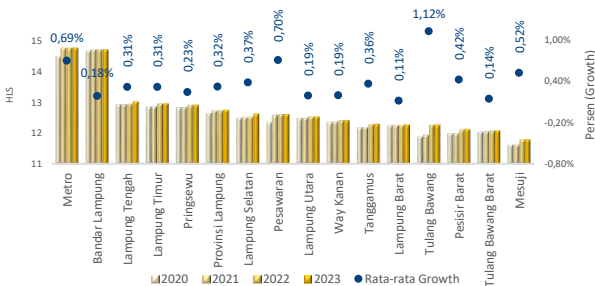
Grafik 2.27. Dimensi Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota Lampung Tahun 2020 – 2023



Sumber: BPS (diolah)

Kabupaten/Kota di Lampung dengan capaian UHH tertinggi adalah Kota Metro sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Mesuji. Kabupaten/Kota di Lampung dengan capaian UHH di atas Provinsi adalah Metro, Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah. Setelah terjadinya pandemi Covid-19, UHH Kabupaten/Kota di Lampung mengalami peningkatan. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat terus meningkatkan fasilitas kesehatan yang merata di pelosok, terutama Kabupaten yang capaian UHH-nya masih rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Lampung. Tidak hanya fasilitas, tetapi tenaga medis maupun tenaga pendukungnya juga harus diperbanyak dan merata. Dimensi Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota Lampung Tahun 2020 – 2023.

Grafik 2.28. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota Lampung Tahun 2020 – 2023

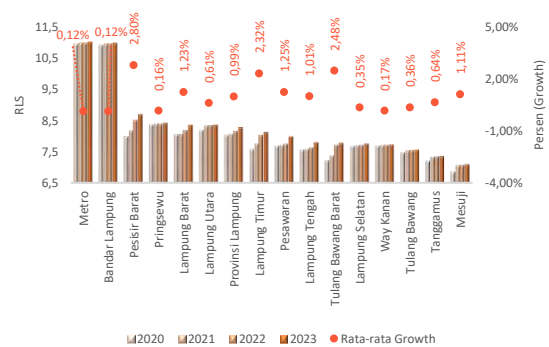


Sumber: BPS (diolah)

Kabupaten/Kota di Lampung dengan capaian HLS tertinggi adalah Kota Metro sedangkan yang

terendah adalah Kabupaten Mesuji. Kabupaten/Kota di Lampung dengan capaian HLS di atas Provinsi adalah Metro, Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Timur dan Pringsewu. Rata-rata pertumbuhan HLS tertinggi tahun 2020 hingga 2023 adalah Tulang Bawang yakni sebesar 1,20 persen (yoy). Meskipun capaian HLS Mesuji terendah di Lampung, tetapi rata-rata pertumbuhan HLS Mesuji tertinggi keempat yaitu sebesar 0,52 persen (yoy).

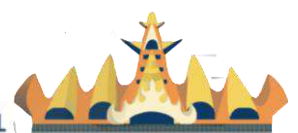
Grafik 2.29. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota Lampung Tahun 2020 – 2023



Sumber: BPS (diolah)

Kabupaten/Kota di Lampung dengan capaian RLS tertinggi adalah Kota Metro sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Mesuji. Kabupaten/Kota di Lampung dengan capaian RLS di atas Provinsi adalah Metro, Bandar Lampung, Pesisir Barat, Pringsewu, Lampung Barat, dan Lampung Utara. Rata-rata pertumbuhan RLS tertinggi tahun 2020 hingga 2023 adalah Pesisir Barat yakni sebesar 2,80 persen (yoy).

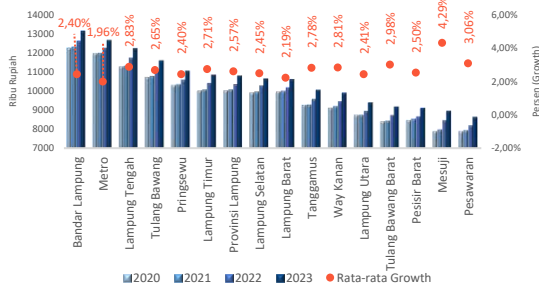
Angka HLS dan RLS dapat ditingkatkan dengan cara memberikan dukungan pada bidang pendidikan. Dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan bidang pendidikan melalui kebijakan alokasi anggaran pendidikan yang produktif. Pemerintah daerah diharapkan terus mendukung pembangunan infrastruktur yang merata agar akses ke sekolah menjadi lebih mudah dengan peningkatan sarana dan prasarana bidang pendidikan, baik dalam pendidikan formal maupun nonformal berupa kejar paket A, B, dan C sehingga masyarakat dapat memperoleh hak yang sama dalam akses layanan di bidang pendidikan. Selain



itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan melalui sosialisasi dan edukasi wajib belajar 12 tahun yang melibatkan seluruh pihak kepentingan.

HLS dan RLS sebagai pembentuk IPM pada Kabupaten Mesuji masih tergolong rendah dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Lampung. Pemerintah Mesuji akan bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk percepatan paket A, B, dan C untuk memperkecil RLS, menjaga keberlangsungan bersekolah pada usia 24 menuju 25 tahun di Kabupaten Mesuji. Kemudian, pemerintah akan fokus menyusun *By Name By Address* (BNBA) per keluarga untuk memperkuat data HLS dan menjaga umur 7 sampai dengan 25 tahun tetap bersekolah dan jika ada data yang putus sekolah akan didorong untuk melanjutkan Pendidikan.

Grafik 2.30. Dimensi Pendapatan Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten/Kota Lampung Tahun 2020 – 2023



Sumber: BPS (diolah)

Kabupaten/Kota di Lampung dengan capaian Pendapatan Per Kapita tertinggi adalah Kota Bandar Lampung sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Pesawaran. Kabupaten/Kota di Lampung dengan capaian Pendapatan Per Kapita di atas Provinsi adalah Bandar Lampung, Metro, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Pringsewu, dan Lampung Timur. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Per Kapita tertinggi tahun 2020 hingga 2023 adalah Mesuji yakni sebesar 4,29 persen (yoy).

2.2.2. Tingkat Kemiskinan

Pada dasarnya kemiskinan identik dengan taraf hidup yang rendah, yang menggambarkan suatu keadaan dimana penghidupan penduduk ditandai

oleh serba kekurangan. Berdasarkan konsep *Basic Needs Approach* yang digunakan BPS dalam mengukur kemiskinan, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Definisi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada bagian ini akan dibahas Tingkat Kemiskinan sesuai dengan data terakhir yang tersedia yaitu Maret 2023. Perhitungan tingkat kemiskinan dilakukan sekali mulai tahun 2023 dan di tahun berikutnya sehingga untuk periode September 2023 data tingkat kemiskinan tidak tersedia.

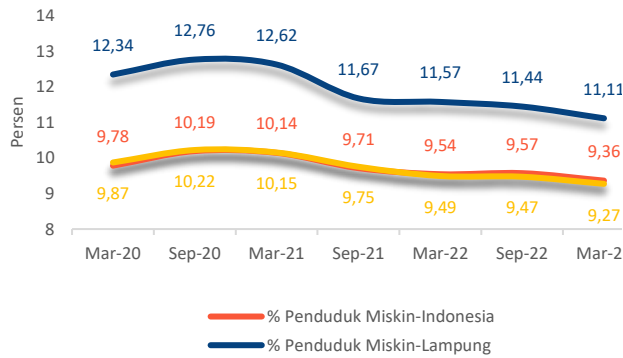
Garis Kemiskinan (GK) pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp559.011/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar Rp417.252 (74,64 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp141.759 (25,36 persen).

Garis Kemiskinan Maret 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,38 persen dibandingkan September 2022 yang sebesar Rp545.992/kapita/bulan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2023 yaitu sebesar 74,64 persen, artinya kenaikan harga bahan makanan di tengah masyarakat menjadi salah satu penyebab kenaikan garis kemiskinan yang terjadi di Provinsi Lampung. Komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik perkotaan maupun pedesaan pada umumnya hampir sama dan beras masih memberi sumbangan terbesar yakni 18,92 persen di perkotaan dan 20,86 persen di pedesaan.

Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin (Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Lampung mencapai 970,67 ribu orang atau 11,11 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan nasional 9,36 persen dan tingkat kemiskinan regional Sumatera 9,27 persen, sedikit di bawah nasional. Persentase penduduk miskin di Lampung masih berada di atas tingkat regional Sumatera dan Nasional sebagaimana tampak pada grafik 2.31.



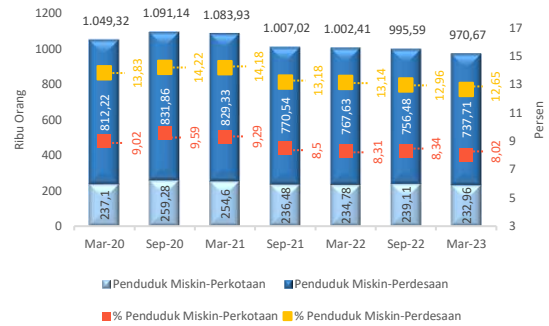
Grafik 2.31. Persentase Penduduk Miskin di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional 2020 – 2023 (persen)



Sumber: BPS (diolah)

telah mengalami penurunan sebesar 78,65 ribu orang.

Grafik 2.33. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Lampung Menurut Tempat Tinggal 2020 – 2023

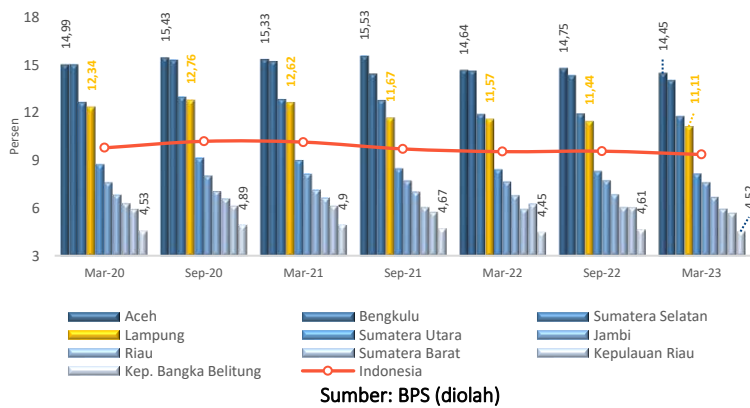


Sumber: BPS (diolah)

Jumlah dan persentase penduduk miskin yang terkonsentrasi di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Persentase kemiskinan berdasarkan tempat tinggal menunjukkan tren yang fluktuatif dari Maret 2020 hingga Maret 2023 sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2.33. Penduduk miskin di Lampung hingga Maret 2023 yang tinggal di Kawasan pedesaan berjumlah 737,71 ribu orang setara dengan 12,65 persen dari total penduduk di pedesaan. Sedangkan penduduk miskin di perkotaan tercatat sebesar 232,96 ribu orang atau setara dengan 8,02 persen dari total penduduk di kawasan perkotaan. Jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 6,2 ribu orang (dari 239,11 ribu orang pada September 2022 menjadi 232,96 ribu orang pada Maret 2023). Sementara itu, jumlah penduduk miskin di pedesaan turun sebesar 18,8 ribu orang (dari 756,48 ribu orang pada September 2022 menjadi 737,71 ribu orang pada Maret 2023).

Dicermati berdasarkan persentasenya, penurunan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2023 sedikit lebih banyak dibandingkan di daerah pedesaan. Persentase penduduk miskin di daerah pedesaan turun 0,31 poin dibandingkan September 2022 yang sebesar 12,96 persen. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun 0,32 poin dibandingkan September 2022 yang sebesar 8,34 persen.

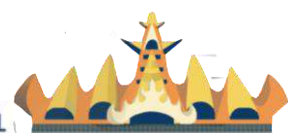
Grafik 2.32. Tingkat Kemiskinan Regional Sumatera Tahun 2020 s.d. 2023 (persen)



Sumber: BPS (diolah)

Dicermati berdasarkan tingkat kemiskinan masing-masing Provinsi di Regional Sumatera sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2.32, Lampung merupakan Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ke-4 di regional Sumatera selama periode 2020 s.d. 2023. Dengan tren tingkat kemiskinan yang turun setiap periodenya, diharapkan kemiskinan Provinsi Lampung pada periode berikutnya akan mengalami penurunan yang signifikan.

Tingkat kemiskinan di Lampung turun, baik dari sisi jumlah maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 menurun sebesar 24,92 ribu orang dibandingkan dengan kondisi pada September 2022 yang mencapai 995,59 ribu orang sebagaimana tampak pada grafik 2.33. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin turun 31,74 ribu orang. Dari periode Maret 2020 hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Lampung

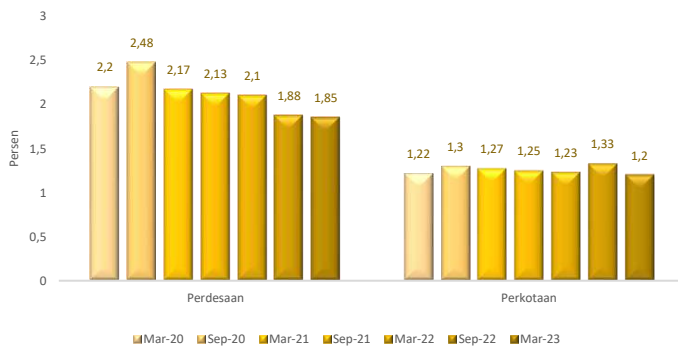


Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan sebagaimana grafik 2.34. Sementara itu, Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin sebagaimana grafik 2.35.

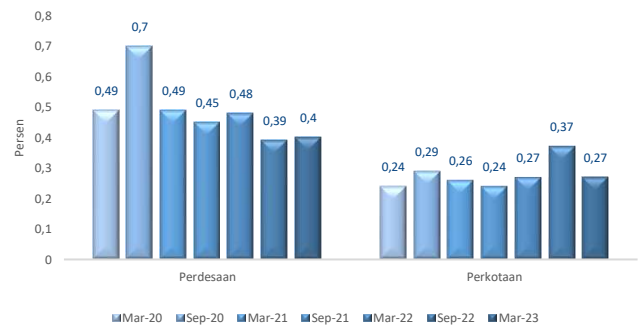
Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran

penduduk dari Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mempengaruhi seberapa besar usaha yang dibutuhkan untuk mengangkat rakyat keluar dari Garis Kemiskinan. Kemudian, semakin tinggi nilai Indeks Keparahannya (P2), maka semakin parah tingkat kemiskinannya dan harus terukur dan tepat sasaran alokasi dana yang dibutuhkan untuk daerah agar keluar dari kemiskinan. Dengan mengetahui tidak hanya jumlah orang miskin, tetapi P1 dan P2 di wilayah akan membantu pembuat kebijakan dalam mengalokasikan anggaran yang lebih efisien.

Grafik 2.34. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2020 – 2023 (persen)



Grafik 2.35. Indeks Keparahannya (P2) 2020 – 2023 (persen)



Sumber: BPS (diolah)

Pada Provinsi Lampung, dalam periode September 2022 – Maret 2023, secara keseluruhan antara pedesaan dan perkotaan, P1 mengalami penurunan. Kemudian, P2 mengalami kenaikan di wilayah pedesaan namun untuk wilayah perkotaan mengalami penurunan. Apabila dibandingkan pada periode Maret 2020 – Maret 2023 P1 dan P2 di masing-masing wilayah mengalami penurunan kecuali P2 di daerah perkotaan yang stagnan.

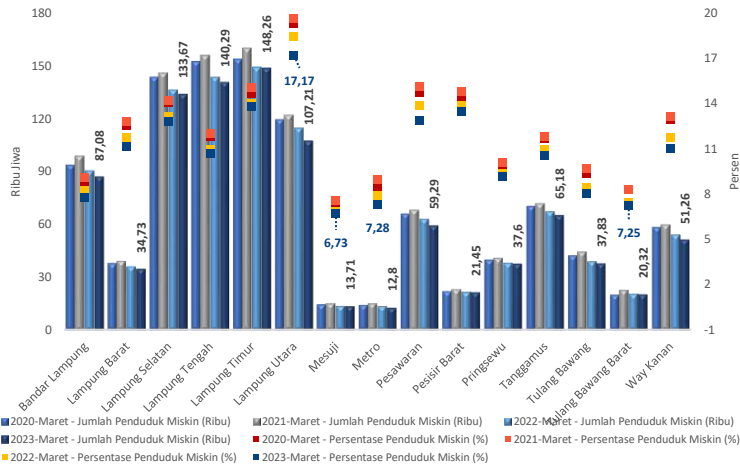
P1 pada wilayah pedesaan mengalami penurunan sebesar 0,03 persen (dari 1,88 persen pada September 2022 menjadi 1,85 pada Maret 2023), kemudian pada wilayah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,13 persen (dari 1,33 persen pada September 2022 menjadi 1,20 pada Maret 2023). Penurunan P1 mengindikasikan bahwa rata-rata jarak kedalaman atau kesenjangan kemampuan konsumsi penduduk miskin semakin mendekati Garis Kemiskinan.

P2 pada wilayah pedesaan mengalami kenaikan sebesar 0,01 persen (dari 0,39 persen pada September 2022 menjadi 0,40 pada Maret 2023), sedangkan pada wilayah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,1 persen (dari 0,37 persen pada September 2022 menjadi 0,27 persen pada Maret 2023). Penurunan P2 mengindikasikan bahwa variasi pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin semakin merata dan sebaliknya.

Persentase penduduk miskin di Lampung pada Maret 2023 berada pada kisaran 6,73 persen sampai dengan 17,17 persen, menunjukkan perbedaan persentase yang cukup jauh antar daerah Kabupaten/Kota di Lampung. Berdasarkan data BPS, tiga Kabupaten/Kota yang memiliki persentase penduduk miskin terendah pada Maret 2023 yaitu Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kota Metro masing-masing

sebesar 6,73 persen; 7,25 persen; dan 7,28 persen sebagaimana tampak pada grafik 2.36.

Grafik 2.36. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Maret 2020 – Maret 2023



Sumber: BPS (diolah)

Meskipun persentase penduduk miskin di Kabupaten Lampung Utara tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Lampung, tetapi selama periode Maret 2020 hingga Maret 2023, Kabupaten Lampung Utara berhasil menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 2,13 persen, paling dalam penurunannya dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Lampung.

Data terakhir yang tersedia terkait kemiskinan ekstrem yaitu tahun 2021 dan tahun 2022. Di tahun 2022, persentase kemiskinan ekstrem Kabupaten/Kota di Lampung rata-rata turun sebesar 0,13 persen. Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Selatan berhasil menekan persentase kemiskinan ekstrem paling dalam dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Lampung. Tahun 2022, persentase kemiskinan ekstrem Kabupaten Lampung Barat 3,37 persen (turun 1,37 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 4,74 persen) dan Kabupaten Lampung Selatan 2,43 (turun 0,84 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 3,27 persen) sebagaimana tampak pada grafik 2.26. Namun, masih ada enam Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan persentase kemiskinan antara lain yaitu Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten

Tulang Bawang Barat. Pemerintah memerlukan *extra effort* untuk mencapai target kemiskinan ekstrem Indonesia yang di tahun 2024 harus tuntas. Dibutuhkan sinergi bersama dalam peningkatan kualitas pelaksanaan program, pengembangan dan pemutakhiran basis data untuk program yang tepat sasaran, serta konvergensi program antar Kementerian dan Lembaga dengan program daerah maupun non-pemerintah.

Disclaimer: Dalam perhitungan terkait data kemiskinan ekstrem terdapat *error* yang masih tinggi, sehingga mengakibatkan kemungkinan ketidaktepatan sasaran.

Penurunan kemiskinan pada periode Maret 2023 tentunya merupakan hal yang positif. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan periode Maret 2023 yaitu:

- Pertumbuhan ekonomi Lampung triwulan I-2023 (4,96 persen) lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Lampung triwulan III-2022 (3,91 persen) secara *yoy*;
- Pertumbuhan Konsumsi rumah tangga tumbuh, dimana konsumsi RT triwulan I-2023 dibandingkan triwulan 3 2022 meningkat sebesar 1,91 persen;
- Laju inflasi menunjukkan penurunan, dimana inflasi pada periode September 2022 – Maret 2023 (1,19) lebih rendah dibandingkan inflasi periode September 2021 – Maret 2022 (2,57);
- Pada Februari 2023, Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,18 persen turun dibandingkan periode Februari 2022 sebesar 0,13 poin;
- Bantuan sosial tetap diupayakan untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Pemanfaatan bansos program PKH tahap 1 mencapai 95,3 persen. Sementara pemanfaatan sembako telah mencapai 92,7 persen;
- Tren Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2023 sebesar 104,29 dibandingkan September 2022 sebesar 101,54 atau naik 2,75 persen.

Dalam hal mengatasi tingkat kemiskinan, pemerintah Lampung melakukan berbagai cara. Salah satunya menerapkan aplikasi berbasis web



dengan nama Simnangkis (Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan) guna melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung. Dengan aplikasi tersebut, diharapkan kualitas *database* kemiskinan menjadi lebih baik dan tepat sasaran.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan dimana pedesaan menjadi kantong utama kemiskinan. Untuk mengatasi kesenjangan, pemerintah baik pusat maupun daerah harus bersinergi untuk membangun infrastruktur di pedesaan agar desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Dana Desa dapat lebih dioptimalkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa seperti mendirikan BUMDes, mendirikan UMKM kreatif berbasis keunggulan desa serta mendirikan desa wisata di desa potensial. Pemda dapat mencanangkan satu desa percontohan di setiap kecamatan untuk diberdayakan setiap tahunnya sehingga menjadi *benchmark* desa lainnya pada tahun berikutnya. Desa percontohan dibuat berdasarkan potensi unggulan di desa tersebut.

Di samping itu, diketahui bahwa sektor andalan Provinsi Lampung adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, memerlukan dukungan melalui berbagai program strategis, misalnya hilirisasi. Program-program yang bertujuan untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian memiliki potensi untuk meredam kenaikan harga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Melalui upaya ini, diharapkan petani dapat memperoleh harga jual produk mereka yang mampu menutupi dan melebihi biaya produksi, memberikan dorongan positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Lampung.

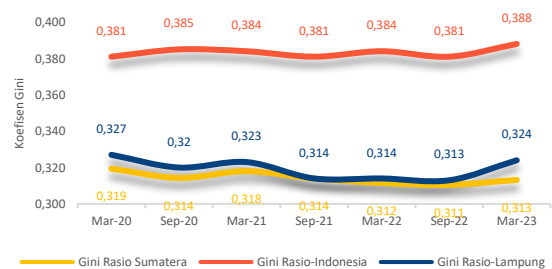
Kemiskinan memiliki berbagai faktor penyebab yang kompleks, oleh karenanya diperlukan keterlibatan intervensi lintas sektor dengan penanganan spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing lokus wilayah. Peran Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD) sangat diperlukan terutama dalam memetakan sumber-sumber utama kemiskinan utama kemiskinan ekstrem dan juga potensi sumber daya yang dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem.

2.2.3. Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini)

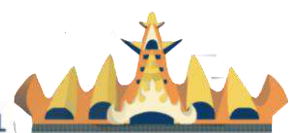
Gini Ratio adalah indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Rasio Gini (*Gini Ratio*) mampu memberikan gambaran derajat ketimpangan dalam suatu daerah dengan nilai yang terletak antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketidakmerataan sempurna). Semakin kecil angka *Gini Ratio* maka akan semakin baik karena mengindikasikan peningkatan pemerataan distribusi ekonomi penduduk suatu wilayah atau berkurangnya tingkat ketimpangan ekonomi. Selain itu, penurunan ketimpangan juga mengindikasikan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Pada periode 2020 hingga 2023 *Gini Ratio* Lampung berada di bawah tingkat Nasional yang menandakan capaian yang lebih baik dibandingkan nasional, tetapi berada sedikit di atas rata-rata Regional Sumatera sebagaimana tampak pada grafik 2.37.

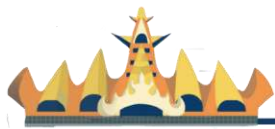
Grafik 2.37. Perkembangan Gini Ratio Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional 2020 – 2023 (persen)



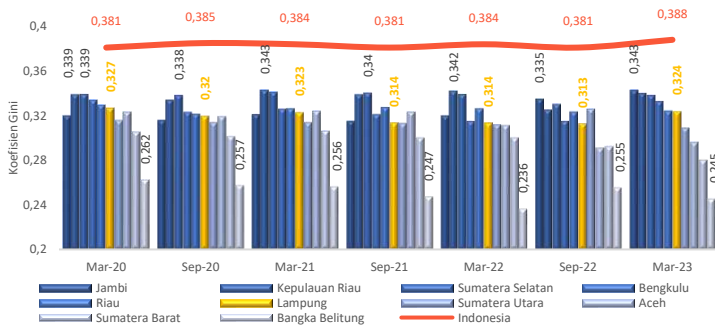
Sumber: BPS (diolah)

Gini Rasio semua Provinsi di Regional Sumatera berada di bawah Nasional sebagaimana tampak pada grafik 2.38. Pada Maret 2023, Lampung termasuk ke dalam 5 Provinsi dengan Indeks Gini Rasio terendah di Regional Sumatera setelah Bangka Belitung (0,245), Sumatera Barat (0,28), Aceh (0,296), dan Sumatera Utara (0,309).





Grafik 2.38. Gini Ratio Regional Sumatera Tahun 2020 s.d. 2023 (persen)



Sumber: BPS (diolah)

Pada Maret 2023, *Gini Ratio* Provinsi Lampung tercatat 0,324, Angka ini meningkat sebesar 3,51 persen atau naik 0,11 poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2022 yang sebesar 3,313. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, rasio gini Maret 2023 meningkat sebesar 3,18 persen atau naik 0,01 persen dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 0,314. Tren *Gini Ratio* Lampung dari tahun 2020 hingga 2023 cenderung fluktuatif dengan rata-rata mengalami penurunan sebesar 0,0005 poin per semester.

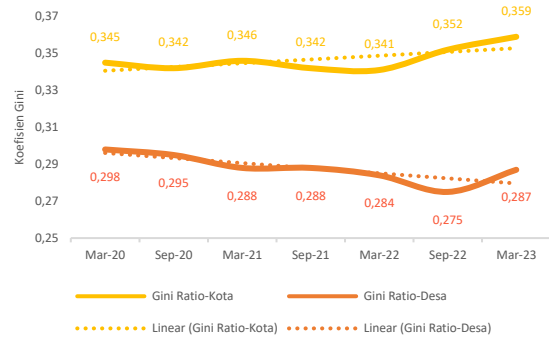
Tren *Gini Ratio* di daerah perkotaan cenderung mengalami peningkatan sedangkan di daerah perdesaan cenderung mengalami penurunan sebagaimana tampak pada grafik 2.39.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,359. Angka tersebut meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2022 yang sebesar 0,352. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, *Gini Ratio* daerah perkotaan pada Maret 2023 meningkat sebesar 0,018 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 0,314.

Sementara itu, *Gini Ratio* di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,287. Angka ini meningkat 0,012 poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2022 yang sebesar 0,275. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, *Gini Ratio* daerah perdesaan pada Maret 2023 meningkat sebesar 0,03 poin

dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 0,284.

Grafik 2.39. Perkembangan *Gini Ratio* Lampung Menurut Tempat Tinggal Tahun 2020–2023



Sumber: BPS (diolah)

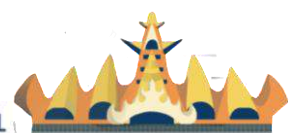
Di samping *Gini Ratio*, indikator ketimpangan lain yang biasanya digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori yang terdiri dari tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen; ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12 – 17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Berdasarkan pengukuran dengan metode ini, ketimpangan di Lampung memiliki persentase sebesar 21,32 persen yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2.40.

Grafik 2.40. Distribusi Pengeluaran Penduduk Lampung Tahun 2020–2023



Sumber: BPS (diolah)

Beberapa penyebab ketimpangan di Provinsi Lampung antara lain perbedaan sumber daya alam yang ada pada masing-masing Kabupaten,





perbedaan kondisi demografis, kurangnya mobilitas barang dan jasa pada daerah-daerah tertentu, terkonsentrasinya kegiatan perekonomian di kota besar, misalnya Bandar Lampung, dan adanya ketimpangan alokasi dana pembangunan.

Upaya yang telah Pemerintah Lampung lakukan dalam penurunan tingkat ketimpangan pendapatan antara lain yaitu:

1. Pembangunan pertanian dan perdesaan sehingga terjadi peningkatan ekonomi di perdesaan yang berdampak mengurangi ketimpangan antara daerah perkotaan dan perdesaan;
2. Peningkatan infrastruktur jalan, Usaha Tani, dan adanya program Kartu Petani Berjaya (KBP) sehingga petani mendapatkan kemudahan dari sarana dan prasarana pertanian, kemudahan mendapatkan pembiayaan pengolahan pertanian, manajemen pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan dengan pengalokasian pengeluaran pemerintah hingga level desa tentunya merupakan langkah yang positif. Hal ini dilakukan agar pembangunan lebih merata yang menjangkau seluruh wilayah. Namun masih diperlukan pengawasan agar infrastruktur yang dibangun dan penggunaan alokasi anggaran memberikan pembangunan yang memiliki *multiplier effect* tinggi dan inklusif ke semua lapisan masyarakat. Perluasan program bantuan sosial juga dapat dilakukan pemerintah sebagai langkah untuk mengurangi ketimpangan. Selain itu, dalam penyediaan pelayanan publik hendaknya memprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal sehingga kesenjangan antara kota dan desa tidak semakin tinggi.

"Real development is not about the richness of a few, but the well-being of many." - Jeffrey Sachs

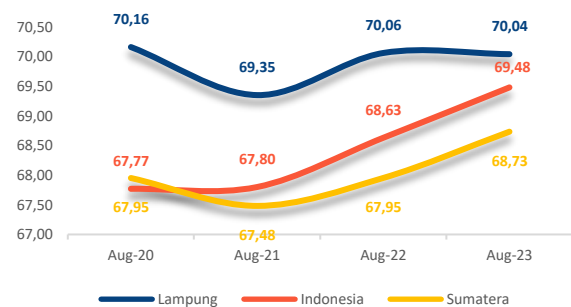
2.2.4. Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran

Pada Agustus 2023, ketenagakerjaan di Lampung mengalami kenaikan pada jumlah Angkatan Kerja

maupun Bukan Angkatan Kerja. Jumlah Angkatan kerja di Lampung mencapai 4.904,90 ribu orang atau meningkat 308,97 ribu orang dibanding Agustus 2022, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 309,69 ribu orang, pengangguran berkurang sebanyak 0,72 ribu orang. Sementara itu, jumlah Bukan Angkatan Kerja di Lampung mencapai 2.098,39 ribu orang atau meningkat 134,07 ribu orang dibanding Agustus 2022.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat diartikan sebagai perbandingan antara jumlah Angkatan Kerja dengan Penduduk Usia Kerja (PUK). TPAK merupakan indikator yang dapat mengukur besarnya penyerapan tenaga kerja. TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*Labour Supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi nilai TPAK berarti semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam perekonomian.

Grafik 2.41. Perkembangan TPAK di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional 2020 – 2023 (persen)



Sumber: BPS (diolah)

TPAK Lampung lebih tinggi dibandingkan dengan regional Sumatera dan Nasional. Pada Agustus 2023, TPAK Lampung tercatat sebesar 70,04 persen, lebih tinggi dari TPAK nasional yang tercatat sebesar 69,48 persen dan rata-rata TPAK Regional Sumatera yang tercatat sebesar 68,73 persen sebagaimana pada grafik 2.41. Namun, Lampung mengalami penurunan TPAK pada Agustus 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Persentase Kenaikan





jumlah Bukan Angkatan Kerja yang lebih tinggi dari persentase jumlah Angkatan Kerja berdampak pada penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) periode Agustus 2023 dibandingkan Agustus 2022. Sementara itu, pada tingkat nasional dan rata-rata regional Sumatera, TPAK mengalami peningkatan.

Tabel 2.8. Perkembangan Serapan Tenaga Kerja Sektoral di Lampung 2020 – 2023 (persen)

Lapangan Pekerjaan Utama	Aug-20	Aug-21	Aug-22	Aug-23	Perubahan Aug-22 s.d Aug-23	Perubahan Aug-2020 s.d Aug-23
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	44,76	43,03	43,62	42,32	-1,3	-2,44
Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan	9,69	9,85	9,73	9,51	-0,22	-0,18
Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air	0,33	0,4	0,58	0,48	-0,1	0,15
Konstruksi	5,63	5,86	4,94	5,56	0,62	-0,07
Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	18,86	19,36	19,74	18,96	-0,78	0,1
Transportasi & Pergudangan; Informasi & Komunikasi	3,78	3,86	3,79	4,51	0,72	0,73
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,94	4,55	4,18	5,11	0,93	1,17
Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan	1,44	1,18	1,54	1,77	0,22	0,33
Administrasi Pemerintahan	2,88	3,09	2,75	3,08	0,33	0,2
Jasa Pendidikan	4,22	4,33	4,37	4,17	-0,2	-0,05
Jasa Pendidikan dan Kegiatan Sosial	1,06	1,43	1,44	1,04	-0,4	-0,02
Jasa Lainnya	3,39	3,06	3,33	3,5	0,18	0,11

Sumber: BPS (diolah)

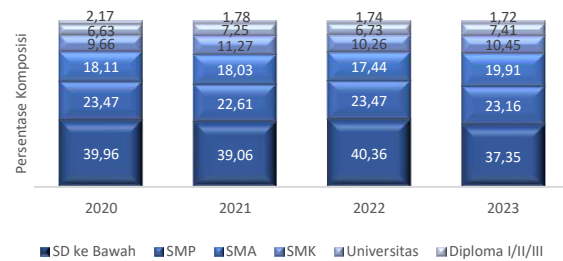
Pada Agustus 2023, Jumlah penduduk yang bekerja di Lampung sebanyak 4.697,65 ribu orang. Berdasarkan Lapangan Usaha sebagaimana pada tabel 2.8, penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung pada Agustus 2023 masih didominasi oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan pangsa sebesar 42,32 persen atau sebesar 1.987,97 ribu orang, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 43,62 persen atau sebesar 1.914,13 ribu orang, meskipun secara jumlah meningkat sebesar 73,84 ribu orang. Sementara itu, penambahan tenaga kerja secara masif terjadi pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan kenaikan sebesar 0,92 persen. Sementara itu, lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja paling dalam adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 1,30 persen bahkan sepanjang periode Agustus 2020 hingga Agustus

2023 telah mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 2,44 persen.

Dalam menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja Lampung, terdapat tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak antara lain per Agustus 2023 yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 42,32 persen atau 1.987,97 ribu orang; perdagangan besar dan eceran sebesar 18,96 persen atau 890,46 ribu orang; dan pertambangan, industri pengolahan sebesar 9,51 persen atau 446,68 ribu orang.

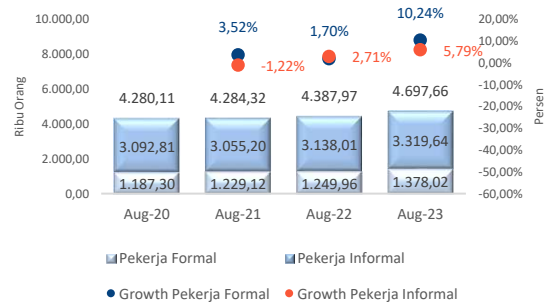
Tingkat Pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2023, komposisi tenaga kerja di Provinsi Lampung masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 37,35 persen atau 1.754,59 ribu orang. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas sebesar 9,13 persen atau 428,95 ribu orang sebagaimana pada grafik 2.42.

Grafik 2.42. Komposisi Tenaga Kerja di Provinsi Lampung berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Tahun 2020 – 2023 (Persen)

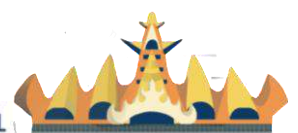


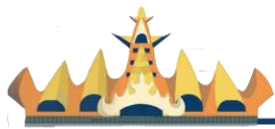
Sumber: BPS (diolah)

Grafik 2.43. Perkembangan Struktur Pekerja Formal dan Informal di Lampung Tahun 2020 – 2023



Sumber: BPS (diolah)

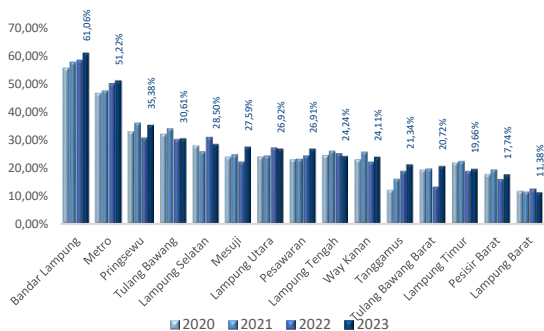




International Labour Organization (ILO) mendefinisikan pekerja informal adalah mereka yang bekerja sebagai pekerja mandiri (berusaha sendiri) dan pekerja yang membantu keluarga (pekerja keluarga). BPS menambahkan definisi pekerja informal yaitu pekerja bebas dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar. Dalam empat tahun terakhir, proporsi pekerja formal dan pekerja informal di Lampung mengalami kenaikan tiap tahunnya sebagaimana tampak pada grafik 2.43. Periode Agustus 2020 hingga Agustus 2023, proporsi pekerja informal mendominasi di atas 70 persen.

Pada Agustus 2023, jumlah pekerja formal di Lampung sebanyak 1.378,02 ribu orang atau 32,20 persen dari total struktur pekerja sedangkan jumlah pekerja informal di Lampung sebanyak 3.319,64 ribu orang atau 77,56 persen dari total struktur pekerja. Sekitar 7 dari 10 orang bekerja pada sektor informal di Lampung. Sektor informal di Lampung cenderung memilih upah yang kurang memadai, produktivitas rendah dan kondisi kerja yang relatif kurang baik seperti tidak ada jaminan kerja sehingga rentan mengalami risiko dalam bekerja.

Grafik 2.44. Persentase Proporsi Pekerja Formal Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Agustus 2020 – Agustus 2023



Sumber: BPS (diolah)

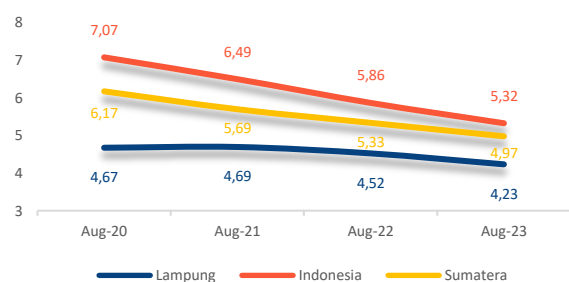
Grafik 2.44 menunjukkan persentase pekerja formal pada masing-masing Kabupaten/Kota di Lampung. Pada Tahun 2023, hanya dua kota yakni Bandar Lampung dan Metro yang penduduk bekerjanya didominasi oleh pekerja formal, yaitu persentase pekerja formal lebih dari 50 persen. 13 (Tiga belas) Kabupaten menunjukkan penduduk bekerjanya didominasi oleh pekerja informal. Hal ini

menunjukkan bahwa wilayah administrasi kota yang menjadi pusat perekonomian di Lampung, cenderung memiliki proporsi pekerja formal yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Pada periode tahun 2020 hingga 2023, pekerja di Bandar Lampung telah didominasi oleh pekerja formal. Sementara itu, Dominasi pekerja formal di Metro dimulai pada tahun 2022 yang mana proporsi pekerja formalnya sebesar 50,23 persen dan dilanjutkan tren proporsinya pada tahun 2023 yakni sebesar 51,22 persen. Tanggamus merupakan Kabupaten/Kota di Lampung yang selama periode 2020 hingga 2023 mengalami peningkatan proporsi pekerja formal tertinggi yaitu meningkat sebesar 9,09 persen, kemudian disusul oleh Bandar Lampung yang meningkat sebesar 5,41 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dalam jumlah penduduk angkatan kerja. TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih kecil dari pada permintaan tenaga kerja.

Grafik 2.45. Perkembangan TPT di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional 2020 – 2023 (persen)



Sumber: BPS (diolah)

TPT Lampung lebih rendah dibandingkan dengan regional Sumatera dan Nasional. Pada Agustus 2023, TPT Lampung tercatat sebesar 4,23 persen, lebih rendah dari TPT nasional yang tercatat sebesar 5,32 persen dan rata-rata TPT Regional Sumatera yang tercatat sebesar 4,97 persen sebagaimana pada grafik 2.45. Sejak periode Agustus 2020 hingga

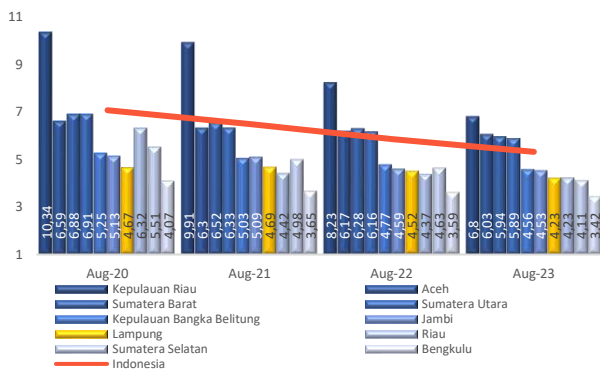




Agustus 2023, TPT Lampung, Nasional, dan regional Sumatera terus mengalami penurunan.

Pada periode Agustus 2023, Provinsi Lampung berada di urutan keempat TPT terendah di regional Sumatera setelah Bengkulu (3,42), Sumatera Selatan (4,11), dan Riau (4,23) sebagaimana tampak pada grafik 2.46. Tingkat pengangguran tahun 2020 hingga 2021 menunjukkan nilai lebih tinggi dari tahun 2022 dan 2023. Hal ini merupakan dampak dari adanya pandemi Covid-19, sehingga berdampak pada usaha-usaha yang ada. Kemudian, seiring dengan pemulihan ekonomi, maka di tahun 2022 TPT mengalami tren yang menurun sebagaimana pada grafik 2.47.

Grafik 2.46. TPT Regional Sumatera Tahun 2020 s.d. 2023 (persen)



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 2.47. TPT Provinsi Lampung 2019 – 2023



Sumber: BPS (diolah)

Angka TPT sebesar 4,23 persen mencerminkan proporsi pengangguran dari total angkatan kerja, di mana dari setiap 100 orang angkatan kerja, sekitar 4 orang di antaranya tidak bekerja. Jumlah penduduk yang bekerja di Lampung semakin meningkat setiap tahunnya dan diiringi dengan penurunan jumlah penduduk yang menganggur tentunya.

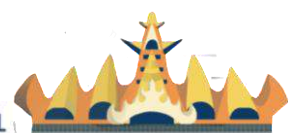
Tenaga kerja yang tersedia banyak tanpa diimbangi jumlah kebutuhan tenaga kerja yang memadai akan memberikan dampak pada rendahnya nilai jual tenaga kerja yang ada. Jika tidak diatasi maka akan menciptakan pengangguran lebih banyak dan melemahkan perekonomian.

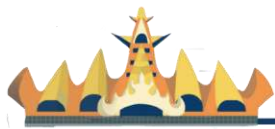
Dalam upaya memperluas lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja baru pada lingkup aktivitas ekonomi riil masyarakat, Pemerintah Daerah Lampung terus melanjutkan upaya-upaya untuk memperkuat daya saing UMKM melalui pemberian insentif fiskal dan non fiskal, kemudahan izin berusaha, sertifikasi, dukungan promosi, informasi pasar ekspor dan kemudahan akses pasar, serta dukungan permodalan, baik melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), maupun Bantuan Pelaku Usaha Mikro.

Bagi tenaga kerja yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri, pemerintah menyediakan fasilitas pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang khusus diperuntukkan untuk calon PMI dengan plafon pembiayaan mencapai Rp100 juta. Provinsi Lampung merupakan provinsi urutan keempat penempatan PMI berdasarkan asal Provinsi di Indonesia, setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2023, penempatan PMI di Lampung sebanyak 21.539 pekerja. Program KUR PMI hadir untuk membantu para PMI yang terhambat keuangan untuk memenuhi biaya sebelum keberangkatan ke negara tujuan.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung dengan melakukan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja melalui kegiatan *Job Fair*, Pelatihan Tenaga Kerja dan penempatan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia melalui Aplikasi Sigajahlampung.

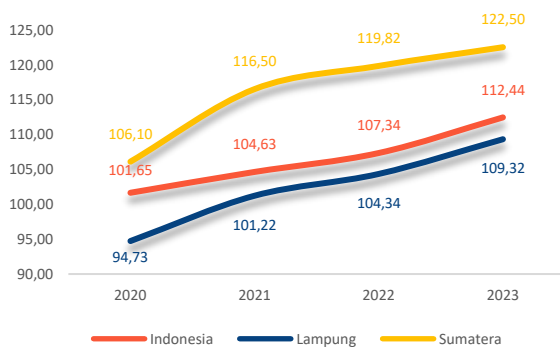
2.2.5. Nilai Tukar Petani (NTP)





Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Penghitungan NTP berlandaskan pada pemikiran bahwa sebagai agen ekonomi, baik sebagai produsen dan konsumen, petani memproduksi hasil pertanian yang kemudian hasilnya dijual dan petani juga merupakan konsumen yang membeli barang dan jasa untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga mengeluarkan biaya produksi dalam usahanya untuk memproduksi komoditas/produk pertanian. Semakin besar NTP pada suatu periode maka semakin besar pendapatan petani yang diterima dari pada pengeluarannya dan relatif semakin kuat tingkat kemampuan/daya beli petani.

Grafik 2.48. Perkembangan NTP Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia Tahun 2020 – 2023

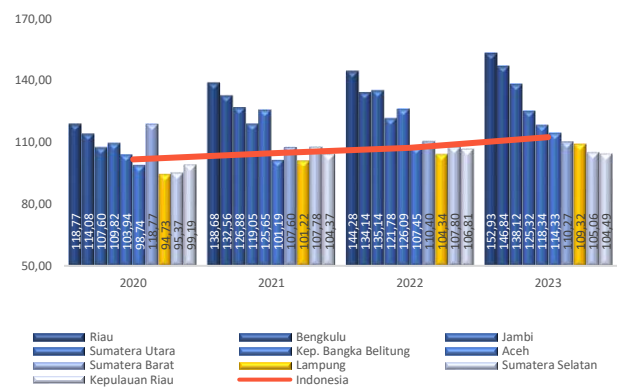


Sumber: BPS (diolah)

NTP Lampung lebih rendah dibandingkan dengan regional Sumatera dan Nasional sebagaimana tampak pada grafik 2.48. Jika dibandingkan perkembangan NTP dari 2020 hingga 2023, tahun 2020 menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan tahun 2021, 2022, dan 2023. Hal tersebut tidak terlepas dari dampak Pandemi Covid-19 yang terjadi dimana terjadi penurunan Indeks Harga yang diterima petani (It) dan Biaya Produksi serta penambahan Barang Modal meningkat. Seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, NTP tahun 2021, 2022, dan 2023 mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2020.

Secara umum, capaian NTP masing-masing Provinsi di Regional Sumatera pada tahun 2023 meningkat kecuali Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau yang mengalami penurunan NTP dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana tampak pada grafik 2.49. Pada tahun 2023, Jika dibandingkan dengan NTP provinsi lain di regional Sumatera, NTP Lampung sebesar 109,23 menempati posisi ketiga terbawah dari 10 Provinsi setelah Kepulauan Riau (104,49) dan Sumatera Selatan (105,06). Sementara itu, pada periode 2020 hingga 2023 Riau tetap konsisten menjadi Provinsi dengan capaian NTP tertinggi di regional Sumatera.

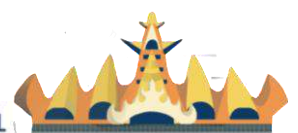
Grafik 2.49. NTP Regional Sumatera Tahun 2020 s.d. 2023 (persen)



Sumber: BPS (diolah)

Pada tahun 2023, NTP Lampung menunjukkan tren yang positif meningkat. Capaian NTP ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Rerata NTP Lampung pada 2023 yang tercatat sebesar 109,32, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 4,77 persen (*yoy*) sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.19. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya NTP pada periode sebelumnya, tingkat kemampuan atau daya beli petani di Lampung menguat, sehingga nilai kesejahteraan petani secara umum di tahun 2023 mengalami peningkatan.

Secara tahunan, peningkatan NTP Lampung pada tahun 2023 didorong oleh peningkatan kinerja Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 7,94 persen (*yoy*); Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) sebesar 4,94 persen (*yoy*); Nilai Tukar Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) sebesar 4,16 persen





(yoy); dan Nilai Tukar Petani Perikanan Tangkap sebesar 1,99 persen (yoy). Namun, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) dan Nilai Tukar Petani

Perikanan Budidaya (NTPi) mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,56 persen (yoy) dan 1,83 persen (yoy).

Tabel 2.9. Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung per Subsektor 2020 –2023

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)	2020					2021					2022					2023					Perubahan %yoy
	I	II	III	IV	Tahunan	I	II	III	IV	Tahunan	I	II	III	IV	Tahunan	I	II	III	IV	Tahunan	
Nilai Tukar Petani																					
Tanaman Pangan	97,55	93,64	93,90	91,96	94,26	90,90	90,54	93,43	94,44	92,33	96,79	94,31	93,10	94,47	94,67	97,81	98,33	103,42	109,18	102,19	7,94%
Hortikultura	97,58	95,10	95,06	97,63	96,34	99,92	95,45	94,81	96,70	96,72	97,96	105,67	118,99	107,16	107,45	105,68	105,87	112,65	126,82	112,75	4,94%
Tanaman Perkebunan Rakyat	94,51	87,70	92,31	98,38	93,22	102,85	110,21	114,03	119,70	111,70	123,12	119,00	110,38	109,56	115,52	111,99	117,92	124,21	127,15	120,32	4,16%
Peternakan	99,58	98,05	100,84	99,73	99,55	99,01	102,10	104,25	104,24	102,40	104,37	104,58	102,61	100,48	103,01	98,46	100,06	100,35	98,53	99,35	-3,56%
Perikanan Tangkap	101,45	99,79	101,50	102,63	101,35	103,57	104,95	106,22	108,14	105,72	109,23	110,04	108,26	106,28	108,45	108,25	110,85	111,61	111,74	110,61	1,99%
Perikanan Budidaya	100,78	99,73	100,09	100,89	100,37	100,57	101,68	101,40	101,28	101,23	100,98	100,02	98,98	99,65	99,91	96,88	97,17	98,86	99,42	98,08	-1,83%
Gabungan																					
Nilai Tukar Petani	96,72	92,11	94,29	95,78	94,73	97,05	99,79	102,69	105,36	101,22	107,77	105,59	102,32	101,70	104,34	103,74	106,42	111,45	115,66	109,32	4,77%
Indeks Harga yang diterima Petani (%)	101,93	97,38	99,74	101,89	100,23	104,58	107,74	111,00	114,16	109,37	118,74	119,11	117,43	117,17	118,11	120,99	124,77	131,31	137,85	128,73	8,99%
Indeks Harga yang dibayar Petani (%)	105,39	105,71	105,77	106,38	105,81	107,75	107,97	108,10	108,34	108,04	110,17	112,82	114,78	115,20	113,25	116,63	117,24	117,82	119,18	117,72	0,04

Sumber: BPS (diolah)

NTP pada tahun 2023 sebesar 102,19, meningkat secara signifikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan indeks pada kelompok penyusun NTP yakni kelompok padi, di mana terjadi peningkatan pada harga penjualan gabah. Lebih lanjut, indeks kelompok palawija juga mendorong peningkatan NTP dikarenakan stok komoditas ketela pohon yang menurun menyebabkan harga naik.

NTPH pada tahun 2023 sebesar 112,75. Peningkatan disebabkan oleh kenaikan indeks pada kelompok penyusun NTPH yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan (khususnya komoditas tomat, kol, cabai merah, dan wortel).

NTPR pada tahun 2023 sebesar 120,32. Peningkatan disebabkan oleh kenaikan indeks pada kelompok penyusun NTPR yaitu Tanaman Perkebunan Rakyat (khususnya komoditas kopi, karet, kelapa sawit, dan kakao). Kenaikan harga komoditas tersebut tidak terlepas dari pergerakan harga di dunia yang meningkat karena produktivitas yang menurun akibat dampak cuaca, dan mahal nya harga pupuk.

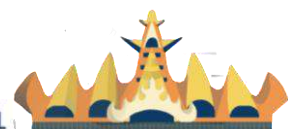
NTN pada tahun 2023 sebesar 110,61. Peningkatan disebabkan oleh kenaikan indeks pada kelompok penyusun NTN yaitu penangkapan laut (khususnya ikan kembung, ikan tongkol, udang laut, rajungan dan ikan teri). Kenaikan harga komoditas rajungan disebabkan karena ketersediaan pasokan yang sedikit di tengah permintaan yang tinggi. Sementara

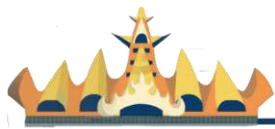
itu, kenaikan harga ikan disebabkan karena ketersediaan pasokan yang sedikit akibat musim dan cuaca.

NTPT pada tahun 2023 sebesar 99,35. NTP < 100 berarti petani mengalami defisit atau merugi yang berarti indeks harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan indeks harga yang dibayar petani. Angka ini mengindikasikan bahwa kemampuan daya beli peternak tidak lebih baik dibandingkan tahun 2018 (tahun dasar perhitungan). Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya. Sebelumnya, NTPT < 100 juga terjadi di tahun 2020 yang mana di tahun tersebut dampak Covid-19 mempengaruhi daya beli masyarakat. Komoditas pemicu penurunan NTPT yaitu komoditas sapi potong seiring dengan melandanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi. Selain itu juga, dipicu oleh komoditas ayam ras pedaging akibat permintaan yang berkurang dan pasokan yang banyak menyebabkan penurunan harga komoditas ini.

NTPi pada tahun 2023 sebesar 98,08, berbeda dengan capaian NTP subsektor perikanan tangkap (NTN) yang mencapai nilai di atas 100. Capaian NPTi Lampung di bawah 100 terjadi di tahun 2022 dan 2023. Komoditas pemicu penurunan NTPi adalah udang payau.

Perhitungan NTP mencakup seluruh pengeluaran rumah tangga petani termasuk biaya produksi, sekolah, berobat, membeli sandang, papan dan





lainnya sehingga tidak mencerminkan pengeluaran riil dari usahanya. Untuk itu digunakan indikator Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) yang merupakan perbandingan antara indeks Harga yang Diterima Petani dengan Indeks yang Dibayar Petani yang hanya meliputi biaya produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Perkembangan NTUP Lampung dapat dilihat pada

Tabel 2.10. Pada tahun 2023, NTUP Lampung tercatat sebesar 110,23 meningkat sebesar 4,68 persen (yoy). Peningkatan NTUP terbesar secara tahunan yaitu dari subsektor Perikanan Tangkap (NTN) yakni sebesar 9,91 persen (yoy), disusul oleh subsektor Tanaman Pangan 7,78 persen (yoy), dan subsektor Hortikultura 5,56 persen (yoy).

Tabel 2.10. Perkembangan NTUP Lampung per Subsektor Periode 2020 s.d. 2023

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)	2020					2021					2022					2023					Perubahan %yoy
	I	II	III	IV	Tahunan	I	II	III	IV	Tahunan	I	II	III	IV	Tahunan	I	II	III	IV	Tahunan	
Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)	97,63	93,15	95,10	96,87	95,69	98,55	101,10	103,67	104,63	101,99	108,53	107,26	104,03	101,40	105,30	103,96	107,01	112,31	117,65	110,23	4,68%
Tanaman Pangan	98,66	94,83	94,96	93,22	95,41	92,61	92,22	94,68	95,31	93,71	97,89	96,31	95,54	95,09	96,21	98,74	99,57	104,91	111,55	103,69	7,78%
Hortikultura	99,77	97,13	97,01	100,04	98,49	102,75	98,10	97,31	104,06	100,56	100,70	109,87	123,64	110,25	111,12	109,04	109,68	117,19	133,28	117,30	5,56%
Tanaman Perkebunan Rakyat	94,98	88,35	92,62	99,10	93,76	103,99	110,90	114,48	115,70	111,27	123,09	120,12	111,16	107,46	115,46	110,68	117,03	123,62	128,06	119,85	3,80%
Peternakan	100,59	99,29	101,73	100,62	100,56	100,05	102,83	104,70	103,24	102,70	104,71	104,96	102,70	100,16	103,13	98,81	100,57	101,02	100,08	100,12	-2,92%
Perikanan Tangkap	102,53	100,79	102,28	103,51	102,28	104,82	105,99	107,22	108,68	106,68	110,60	111,91	76,48	106,03	101,26	108,44	111,29	112,32	113,09	111,29	9,91%
Perikanan Budidaya	102,26	101,46	101,72	102,65	102,02	102,76	103,86	103,39	102,57	103,14	102,83	102,76	102,06	101,94	102,40	99,58	100,17	102,10	103,09	101,24	-1,13%

Sumber: BPS, diolah

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para petani, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan kewenangannya berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di mana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah Provinsi Lampung juga turut mengupayakan para petani agar memiliki kemudahan dalam akses permodalan melalui KUR, dukungan asuransi usaha, fasilitas sosial program pemerintah ataupun swasta, dan akses terkait kepastian ketersediaan pupuk, baik yang digunakan pada tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, baik subsidi maupun non subsidi.

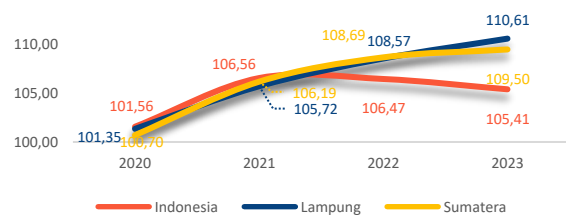
Pemerintah Provinsi Lampung juga membentuk sebuah program berupa Kartu Petani Berjaya (KPB) yang mampu menghubungkan segala kepentingan pertanian dalam pemanfaatan teknologi informasi. Program ini menghubungkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara bersama-sama. Berupaya menjaga Ketersediaan benih, bibit dan pupuk, Penanganan panen dan pasca panen, Pendampingan budidaya

Ketersediaan teknologi pertanian, Permodalan, Manajemen Risiko usaha tani, Jadwal tanam, Penyaluran air irigasi. Adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain *Supplier*, Distributor, Perbankan, Petani, Pembeli, Pemerintah Provinsi. Program Kartu Petani Berjaya akan terus dilakukan penyempurnaan di berbagai aspek sehingga harapannya NTP Provinsi Lampung akan lebih baik daripada capaian NTP Nasional dalam beberapa tahun mendatang.

2.2.6. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

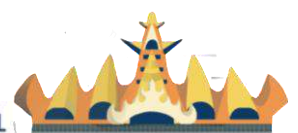
Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Grafik 2.50. Perkembangan NTN Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia Tahun 2023 – 2023



Sumber: BPS, diolah

Pada tahun 2023, NTN Lampung tercatat sebesar 110,61, berada di atas rerata NTN regional

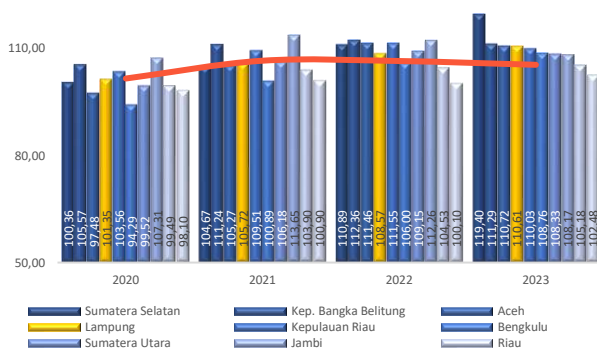




Sumatera dan Nasional sebagaimana tampak pada grafik 2.50. NTN Lampung dan Regional Sumatera menunjukkan peningkatan setiap periodenya, tetapi NTN Nasional menurun di tahun 2022 dan 2023. Berbeda dengan capaian NTP yang berada di bawah regional Sumatera dan Nasional, rata-rata NTN Lampung tahun 2020 hingga 2023 sebesar 106,56 di atas rerata NTN regional Sumatera yang sebesar 106,27 dan NTN Nasional yang sebesar 105,00.

Sama halnya dengan perkembangan nilai NTP sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, jika dibandingkan perkembangan NTN dari 2020 hingga 2023, tahun 2020 menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan tahun 2021, 2022, dan 2023. Hal tersebut tidak terlepas dari dampak Pandemi Covid-19 yang terjadi dimana terjadi penurunan Indeks Harga yang diterima petani (It) dan Biaya Produksi serta penambahan Barang Modal meningkat. Seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, NTN tahun 2021, 2022, dan 2023 mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2020.

Grafik 2.51. NTN Regional Sumatera Tahun 2020 s.d. 2023 (persen)



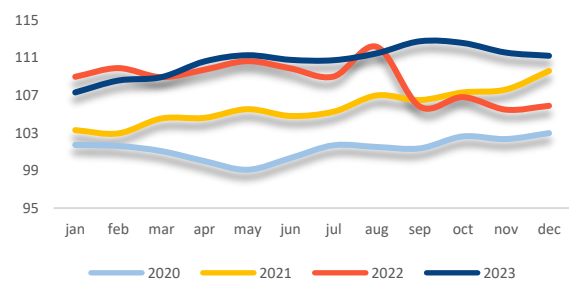
Sumber: BPS, diolah

Pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan NTN provinsi lain di regional Sumatera, NTN Lampung sebesar 110,61 menempati posisi keempat tertinggi dari 10 Provinsi setelah Sumatera Selatan (119,40), Kep. Bangka Belitung (111,29), dan Aceh (110,72) sebagaimana tampak pada grafik 2.51. Sumatera Selatan menempati posisi NTN tertinggi di regional Lampung pada tahun 2023.

NTN Lampung tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, dan 2022 sebagaimana tampak pada grafik 2.52. Pada tahun 2023,

peningkatan NTN Lampung terjadi di Februari, Maret, April, Mei, Agustus dan September. NTN mengalami peningkatan sebesar 1,18 persen (*mtm*) pada Februari 2023, pemicunya adalah naiknya komoditas udang laut, ikan teri, dan ikan kembung. NTN mengalami peningkatan sebesar 0,36 persen (*mtm*) pada Maret 2023 yang dipicu oleh naiknya komoditas cumi-cumi. NTN peningkatan sebesar 1,51 persen (*mtm*) pada April 2023, pemicunya adalah naiknya komoditas ikan kembung dan udang laut. NTN mengalami peningkatan sebesar 0,59 persen (*mtm*) pada Mei 2023 yang dipicu oleh naiknya komoditas cumi-cumi dan ikan teri. Komoditas pemicu kenaikan NTN Agustus adalah rajungan. Komoditas pemicu kenaikan NTN September adalah Ikan Teri. Kenaikan harga komoditas tersebut disebabkan karena faktor ketersediaan pasokan yang kurang akibat cuaca dan musim di tengah permintaan yang tinggi.

Grafik 2.52. Perkembangan NTN Lampung Tahun 2020–2023



Sumber: BPS, diolah

Salah satu bentuk dukungan yang dilakukan pemerintah Provinsi Lampung kepada nelayan adalah mendorong usulan adanya penambahan jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBN) untuk mempermudah keterjangkauan akses bahan bakar. Usulan penambahan SPBN sebelumnya direkomendasikan di Pesisir Barat dan saat ini dalam progres pembangunan.

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, selama tahun 2023 sebanyak 2.400 nelayan telah menerima premi asuransi. Asuransi nelayan merupakan bentuk apresiasi kepada para nelayan atas hasil kerja keras dan upaya



meningkatkan stabilitas ekonomi di sektor kelautan dan perikanan dengan memberikan hak-hak perlindungan bagi nelayan. Manfaat asuransi ini untuk memberikan jaminan perlindungan dalam menghindari risiko kecelakaan kerja yang dialami nelayan pada saat melaut. Harapannya dengan asuransi ini para nelayan terlindungi dan kesejahteraannya tetap terjaga.

2.3. **Reviu Capaian Kinerja Makro Kesra Regional Lampung**

Dalam rangka mengukur efektivitas kebijakan fiskal, maka dapat dilakukan dengan membandingkan antara target dengan capaian berbagai indikator ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Indikator yang mencapai target bahkan melebihi target mengindikasikan efektivitas berbagai kebijakan pemerintah termasuk kebijakan fiskal. Sebaliknya, indikator yang belum tercapai perlu diidentifikasi dan menjadi bahan untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang, tentu saja dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhinya.

Berdasarkan hasil reviu atas target dan realisasi indikator makroekonomi dan kesejahteraan Provinsi Lampung, Rasio Gini melebihi target maksimal yang disusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung. Rasio Gini lebih tinggi 0,005 basis poin dibandingkan target yang diasumsikan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Sementara itu indikator lainnya telah mencapai target sebagaimana tampak pada tabel 2.11.

Rasio Gini perkotaan lebih tinggi dari pedesaan karena *gap* lapisan penduduk di perkotaan yang lebih tinggi dibanding di pedesaan sehingga pekerjaan masyarakat perkotaan yang lebih beragam dibandingkan pedesaan sehingga *range*

penghasilan pun berbeda. Pemerintah perlu *extra effort* untuk menurunkan kantung-kantung kemiskinan yang menyebabkan ketimpangan yang semakin melebar.

Tabel 2.11. Hasil Reviu Efektivitas Kebijakan Makro Ekonomi dan Kesejahteraan Provinsi Lampung Tahun 2023

No.	Sasaran Makro Kesra	Target RKPD 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Hasil Reviu
1.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	3,5–4,5	4,55 (ctc)	5,0–5,5	Tercapai melebihi target
2.	PDRB Perkapita (Juta Rp)	43–44	48,2	45–46	Tercapai melebihi target
3.	Inflasi (persen)	3±1	3,47	3±1	Tercapai
4.	IPM (poin)	70,3–70,6	72,48	70,6–71,1	Tercapai melebihi target
5.	Kemiskinan (persen)	11,4–11,9	11,11	10,9–10,4	Tercapai
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,0–4,3	4,23	3,8–4,0	Tercapai
7.	Rasio Gini (poin)	0,302–0,319	0,324	0,293–0,314	Target Tidak Tercapai Melebihi target maksimal
8.	NTP (poin)	104–105	109,32	105–106	Tercapai melebihi target

Sumber: RPJMD dan BPS, diolah

Overall, capaian makro ekonomi dan kesejahteraan Provinsi Lampung menggambarkan pembangunan Lampung yang masih *on the track* dan dapat dimaknai sebagai pembangunan yang inklusif serta mempunyai relevansi yang baik antar indikator pencapaiannya. Dalam RPJMD dijelaskan bahwa Pemerintah daerah Provinsi Lampung telah meninjau perkembangan perekonomian daerah terkini serta dengan memperhatikan tantangan dan prospek serta berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat, kemudian meninjau hasil yang dicapai pada tahun 2023. Berdasarkan hasil tersebut, maka penetapan target indikator makro ekonomi di 2022 sudah *proved reasonable*.

“Sinergi antara APBN dan APBD sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional”

-Sri Mulyani-
Menteri Keuangan RI

ANALISIS FISKAL REGIONAL

BAB III





BAB III ANALISIS FISKAL REGIONAL

3.1. PELAKSANAAN APBN

Kinerja pelaksanaan APBN di Provinsi Lampung sampai dengan akhir tahun 2023 terjaga solid dan akuntabel untuk mendukung ketahanan ekonomi regional dan pelaksanaan program strategis pemerintah. Di tengah berbagai tantangan perekonomian global dan perubahan iklim yang berdampak pada fluktuasi harga dan stabilitas ekonomi, instrumen APBN berperan dalam memberikan stimulus pembangunan di daerah dan mendorong kebijakan fiskal pusat dan daerah yang bekerja di level regional.

Capaian Pendapatan Negara sedikit terkontraksi dari tahun sebelumnya, utamanya disebabkan oleh penurunan realisasi Pajak Perdagangan Internasional khususnya Bea Keluar yang menurun tajam dari tahun lalu. Meskipun demikian, penerimaan perpajakan dari sektor dalam negeri

tumbuh *double digit*. Dari sisi Belanja Negara mencatatkan pertumbuhan yang menunjukkan adanya percepatan penyerapan anggaran khususnya pada Belanja Pemerintah Pusat, serta seiring dengan peningkatan alokasi pagu untuk mendukung pelaksanaan Pemilu, pembangunan infrastruktur konektivitas, serta meredam dampak El Nino dan stabilitasi harga. Selain itu, penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang seluruhnya disalurkan oleh KPPN di Lingkup Provinsi Lampung pada Tahun 2023 berjalan secara efektif dan optimal, hal ini ditunjukkan oleh persentase penyaluran TKD yang lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya dan tumbuh sejalan dengan peningkatan alokasi Dana TKD khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Insentif Fiskal. Pelaksanaan APBN Tahun 2023 menghasilkan Defisit Anggaran sebesar Rp20,89 triliun atau lebih lebar 9,72 persen (*yoy*) untuk akselerasi dan pemerataan pembangunan di daerah.

Tabel 3.1 I-Account APBN di Provinsi Lampung Realisasi Tahun 2023 (dalam miliar Rp)

I-Account (Miliar Rupiah)	2021			2022			2023			% Growth 2022-2023
	Pagu	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real	
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	8.028,87	10.451,24	130,17	9.670,84	10.912,00	112,83	10.229,84	10.808,31	105,65	(0,95)
1. Pendapatan Perpajakan	7.297,71	9.367,81	128,37	8.794,52	9.714,49	110,46	9.267,37	9.335,50	100,74	(3,90)
a. Pajak Dalam Negeri	6.875,66	7.167,33	104,24	6.600,93	7.189,20	108,91	8.054,66	8.319,05	103,28	15,72
i. Pajak Penghasilan	3.312,88	2.936,45	88,64	3.508,37	3.223,60	91,88	3.557,99	3.703,50	104,09	14,89
ii. Pajak Pertambahan Nilai	3.312,46	3.901,35	117,78	2.802,46	3.686,55	131,55	4.180,11	4.293,42	102,71	16,46
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	81,49	191,34	234,80	155,03	143,70	92,69	160,43	172,32	107,41	19,92
v. Cukai	0,09	0,09	96,43	0,03	3,42	11.178,34	2,93	3,55	121,35	3,95
vi. Pajak Lainnya	168,74	138,11	81,85	135,03	131,93	97,70	153,20	146,25	95,46	10,86
b. Pajak Perdagangan Internasional	422,05	2.200,48	521,38	2.193,59	2.525,29	115,12	1.212,71	1.016,45	83,82	(59,75)
i. Bea Masuk	393,14	361,79	92,03	287,75	350,15	121,69	285,08	504,16	176,85	43,98
ii. Bea Keluar/Pungutan Ekspor	28,91	1.838,69	6.358,95	1.905,84	2.175,13	114,13	927,63	512,29	55,23	(76,45)
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak	731,17	1.083,44	148,18	876,32	1.197,51	136,65	962,47	1.472,81	153,02	22,99
a. PNBPN Lainnya	280,48	484,47	172,73	409,06	578,78	141,49	477,33	820,69	171,94	41,80
b. Pendapatan Badan Layanan Umum	450,68	598,97	132,90	467,26	618,73	132,42	485,14	652,11	134,42	5,40
3. Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. BELANJA NEGARA	32.217,48	31.550,43	97,93	30.716,55	29.956,47	97,53	32.176,49	31.704,50	98,53	5,84
1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP)	10.662,61	10.177,99	95,45	9.151,31	8.822,40	96,41	10.587,06	10.234,02	96,67	16,00
a. Belanja Pegawai	3.760,18	3.742,08	99,52	3.791,56	3.754,41	99,02	3.829,19	3.782,84	98,79	0,76
b. Belanja Barang	3.336,99	3.150,10	94,40	3.404,28	3.264,86	95,90	5.060,35	4.901,78	96,87	50,14
c. Belanja Modal	3.539,16	3.259,54	92,10	1.923,35	1.771,01	92,08	1.659,35	1.511,22	91,07	18,87
d. Bantuan Sosial	26,28	26,27	99,98	32,11	32,11	100,00	38,18	38,18	100,00	10,87
2. Transfer Ke Daerah (TKD)	21.554,87	21.372,44	99,15	21.565,25	21.134,07	98,00	21.589,43	21.470,48	99,45	1,59
a. Dana Transfer Umum (DTU)	12.911,74	12.911,22	100,00	13.108,79	13.121,87	100,10	13.649,87	13.647,60	99,98	4,01
i. Dana Alokasi Umum (DAU)	12.015,51	12.015,51	100,00	12.021,11	12.021,11	100,00	12.701,28	12.700,98	100,00	5,66
ii. Dana Bagi Hasil	896,23	895,71	99,94	1.087,68	1.100,76	101,20	948,59	946,62	99,79	(14,00)
b. Dana Transfer Khusus (DTK)	5.925,59	5.744,54	96,94	6.016,88	5.573,83	92,64	5.379,97	5.268,70	97,93	(5,47)
i. Dana Alokasi Khusus Fisik	1.771,66	1.659,16	93,65	1.920,27	1.777,88	92,58	1.232,35	1.193,40	96,84	(32,87)
ii. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	4.153,92	4.085,38	98,35	4.096,61	3.795,95	92,66	4.147,62	4.075,30	98,26	7,36
c. Dana Otsus, DIY, IF	276,39	276,39	100,00	112,75	112,75	100,00	255,96	253,05	98,86	124,44
i. Insentif Fiskal	276,39	276,39	100,00	112,75	112,75	100,00	255,96	253,05	98,86	124,44
d. Dana Desa	2.441,16	2.440,29	99,96	2.326,83	2.325,62	99,95	2.303,63	2.301,13	99,89	(1,05)
i. Dana Desa	2.441,16	2.440,29	99,96	2.326,83	2.325,62	99,95	2.303,63	2.301,13	99,89	(1,05)
C. SURPLUS (DEFISIT)	(24.188,61)	(21.099,19)	87,23	(21.045,72)	(19.044,47)	90,49	(21.946,65)	(20.896,19)	95,21	9,72
D. PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	(24.188,61)	(21.099,19)	87,23	(21.045,72)	(19.044,47)	90,49	(21.946,65)	(20.896,19)	95,21	9,72

Sumber: OM-SPAN, Simtrada, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, ALCo (data diolah)



3.1.1. Pendapatan Negara

Sampai dengan akhir Tahun 2023, Pendapatan Negara menunjukkan capaian yang positif dengan nilai realisasi mencapai Rp10,8 triliun atau setara dengan 105,65 persen dari target pada akhir tahun yakni Rp10,22 triliun. Pada November 2023, terdapat Penyesuaian target pendapatan berdasarkan Perpres 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian APBN Tahun Anggaran 2023, sebagaimana target yang tersaji pada Tabel 3.1.

Secara kumulatif, pendapatan negara terkontraksi 0,95 persen (yoy) utamanya disebabkan oleh penerimaan yang bersumber dari Bea Keluar yang menurun tajam akibat moderasi harga komoditas di pasar global. Namun kinerja Perpajakan Dalam Negeri melanjutkan tren peningkatan dari tahun sebelumnya, didukung oleh penyempurnaan layanan perpajakan dan sektor-sektor utama perekonomian domestik yang menguat.

Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak menunjukkan capaian yang memuaskan dan melampaui target hingga 153,02 persen atau secara nominal sebesar Rp1,47 triliun. Capaian ini turut didukung oleh kualitas pelayanan masyarakat di bidang Pendidikan dan Kesehatan, serta peningkatan manajemen dan tata Kelola BLU yang terus dilakukan dengan berorientasi pada kesempurnaan dalam memberikan layanan.

3.1.1.1. Penerimaan Perpajakan

Pada awal Tahun 2023 Penerimaan Perpajakan di Lampung ditetapkan sebesar Rp8,5 triliun, kemudian berdasarkan Perpres 75 Tahun 2023 terdapat penyesuaian target penerimaan pajak menjadi Rp9,26 pada akhir tahun 2023. Penyesuaian target ini meningkat 8,89 persen dari target awal Tahun 2023. Capaian Penerimaan Perpajakan s.d. Desember 2023 sebesar ditunjukkan sebagaimana Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Capaian Penerimaan Perpajakan s.d. Desember 2023 terhadap Target APBN dan Perpres 75/2023 (miliar rupiah)

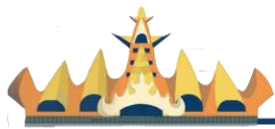
Uraian	Pagu		Realisasi s.d. Desember 2023	% Ketercapaian Target	
	APBN 2023	PERPRES 75/2023		APBN 2023	PERPRES 75/2023
A. Pajak Dalam Negeri	7.749,22	8.054,66	8.319,05	107,35	103,28
Pajak Penghasilan	3.364,47	3.557,99	3.703,50	110,08	104,09
Pajak Pertambahan Nilai	4.069,23	4.180,11	4.293,42	105,51	102,71
Pajak Bumi dan Bangunan	169,56	160,43	172,32	101,63	107,41
Cukai	2,98	2,93	3,55	119,24	121,35
Pajak Lainnya	142,98	153,20	146,25	102,29	95,46
B. Pajak Perdagangan Internasional	761,40	1.212,71	1.016,45	133,50	83,82
Bea Masuk	285,08	285,08	504,16	176,85	176,85
Bea Keluar/Pungutan Ekspor	476,31	927,63	512,29	107,55	55,23
Total	8.510,62	9.267,37	9.335,50	109,69	100,74

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar.

Capaian Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri berdasarkan target awal APBN 2023 adalah sebesar 109,69 persen. Capaian Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri sebesar 107,35 persen dari target, sementara untuk Capaian Penerimaan Perpajakan Perdagangan Internasional adalah 133,50 persen dari target.

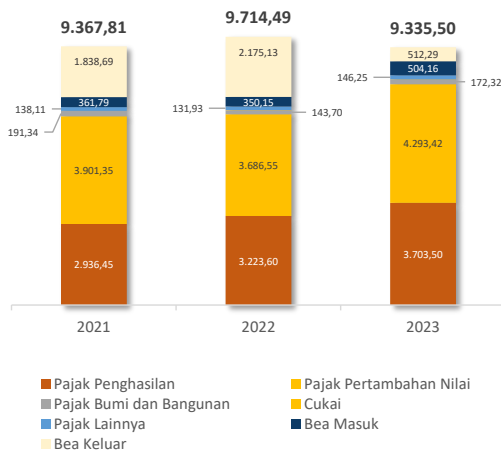
Selanjutnya, apabila melihat ketercapaian target berdasarkan Perpres 75 Tahun 2023, Capaian Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri sebesar 103,28 persen dari target, sementara untuk Capaian Penerimaan Perpajakan Perdagangan Internasional adalah 83,82 persen dari target. Capaian yang belum optimal khususnya pada komponen Bea Keluar disebabkan karena harga referensi CPO yang masih lebih rendah di bawah prediksi akhir tahun. Dengan demikian, persentase total Pendapatan Perpajakan terhadap target Perpres 75 Tahun 2023 adalah 100,74 persen.

Grafik 3.1 menunjukkan tren komponen realisasi Penerimaan Perpajakan pada tiga tahun terakhir. Penerimaan Perpajakan sejak tahun 2021-2023 masih didominasi oleh penerimaan PPN dan PPh yang jumlahnya terus menunjukkan pertumbuhan sampai dengan akhir tahun 2023. Sementara penerimaan Bea Masuk yang menjadi kontributor terbesar ketiga realisasinya mengalami fluktuasi pada tiga tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena penerimaan Bea Keluar atau pungutan ekspor sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas di pasar global, khususnya CPO yang menopang ekspor dari Lampung. Pada tahun 2022,



terjadi kenaikan harga CPO yang menyebabkan harga referensi pengenaan Bea Keluar menjadi lebih tinggi. Sementara itu, pada Semester-II Tahun 2022 hingga akhir Tahun 2023 terjadi moderasi harga CPO, sehingga penerimaan Bea Keluar di Tahun 2023 menjadi lebih rendah meskipun secara volume ekspor terhadap komoditas CPO bertambah dari tahun sebelumnya.

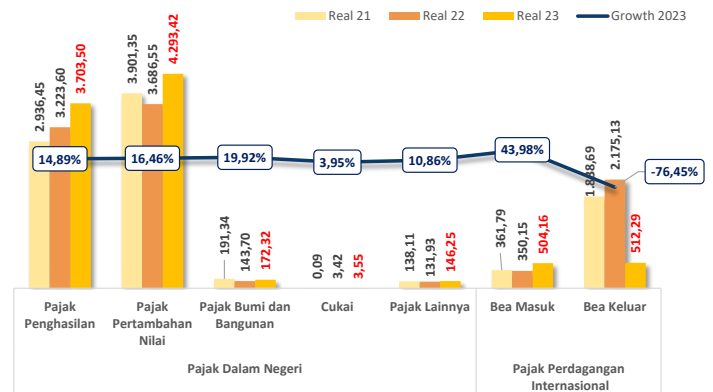
Grifik 3.1 Tren Kontribusi Komponen Penerimaan Perpajakan Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)



Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, OM-SPAN (data diolah)

Selanjutnya, berfokus pada tahun 2023, realisasi penerimaan perpajakan pemerintah pusat di regional Lampung secara agregat tumbuh negatif sebesar -3,90 persen (yoy) atau secara nominal mencapai sebesar Rp9,33 triliun. Penerimaan Perpajakan di Lampung didominasi oleh penerimaan Pajak Dalam Negeri yang tumbuh hingga 15,72 persen tanpa memperhitungkan penerimaan dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di tahun 2022. Seluruh komponen penerimaan Perpajakan Dalam Negeri menunjukkan pertumbuhan *double-digit* selain penerimaan dari Cukai. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi domestik di Lampung masih terjaga solid dan terus berlanjut tumbuh. Sementara, dari sisi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional terkontraksi cukup dalam sebesar -59,75 persen (yoy.) Capaian Realisasi dan Pertumbuhan pada setiap komponen Penerimaan Perpajakan ditunjukkan sebagaimana Tabel 3.2.

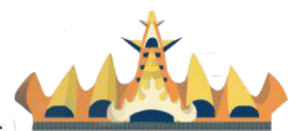
Grifik 3.2 Target, Realisasi, Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan di Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah, persen)



Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar (data diolah)

Kontributor utama Penerimaan Pajak Dalam Negeri bersumber dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 4,29 triliun, secara persentase tercapai 105,51 persen dari target awal APBN 2023 atau 102,71 persen dari target Perpres 75/2023. Penerimaan PPN mendominasi capaian Penerimaan Pajak Dalam Negeri dengan proporsi 51,61 persen. Realisasi PPN tumbuh 16,46 persen (yoy) utamanya berasal dari pertumbuhan pada jenis PPN Dalam Negeri, seiring penerapan kebijakan kenaikan tarif PPN 11 persen dan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Lampung dengan daya beli masyarakat yang terjaga.

Di samping itu, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) juga turut menjadi kontributor terbesar kedua Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Lampung sebesar Rp Rp3,70 triliun atau 44,52 persen dari total Penerimaan Pajak Dalam Negeri. Secara persentase, penerimaan PPh tercapai 110,08 persen dari target awal APBN 2023 atau 104,09 persen dari target Perpres 75/2023. Penerimaan PPh mencatatkan pertumbuhan sebesar 14,89 persen (yoy) tanpa memperhitungkan penerimaan pajak Program PPS, utamanya disumbang oleh penerimaan PPh 25/29 Badan yang tumbuh 32,74 persen (yoy) atau secara nominal menyumbang Rp1,08 triliun. Pertumbuhan juga ditunjukkan pada penerimaan PPh 21 sebesar 7,18 persen yang menyumbang secara nominal Rp1,37 triliun. Pertumbuhan ini didukung oleh sektor Administrasi



Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai implikasi penerapan kebijakan PMK-59/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Penguatan dan Pencabutan Penguatan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah. Selanjutnya, untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Lainnya di Lampung tercatat tumbuh 19,92 persen dan 10,86 (yoy).

Di sisi lain, Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional masih tercatat tumbuh negatif sebesar 59,75 persen (yoy). Secara persentase ketercapaian target, apabila mengacu pada target awal APBN Tahun 2023 yakni Rp764,37 miliar, capaian Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional telah mencapai target hingga 133 persen. Namun apabila dilihat dari persentase ketercapaian target berdasarkan Perpres 75 Tahun 2023, Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional tercapai sebesar 83,82 persen dari target.

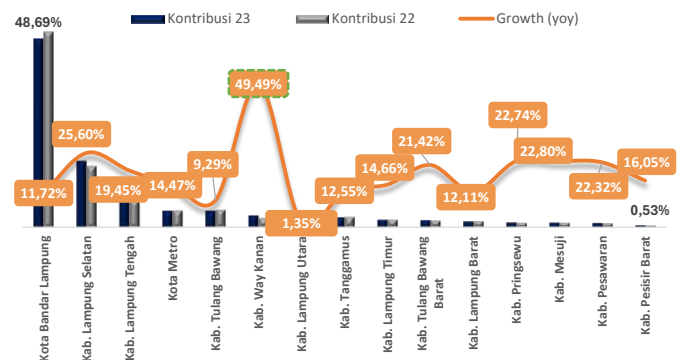
Penerimaan Bea Masuk terealisasi sebesar Rp504,16 miliar, atau 176,85 persen dari target APBN 2023 dan Perpres 75/2023, berhasil tumbuh 43,98 persen (yoy). Pertumbuhan ini didukung oleh kenaikan importasi beras untuk menjaga cadangan pangan pokok dan stabilitas harga pangan di Lampung sebagai dampak perubahan iklim yang berpengaruh pada produktivitas beras dalam negeri.

Sementara itu, penurunan terjadi pada penerimaan yang bersumber dari Bea Keluar sebesar -76,45 persen (yoy) atau terealisasi sebesar Rp512,29 miliar atau tercapai 107,55 persen dari target awal APBN 2023 atau 55,23 persen dari target Perpres 75/2023. Penurunan ini utamanya terjadi akibat moderasi harga referensi CPO beserta turunannya di pasar global, khususnya minyak kelapa sawit yang menduduki peringkat pertama komoditas terbesar ekspor dari Lampung.

Dari sisi penerimaan negara berupa Cukai, pada tahun 2022 mencatatkan pertumbuhan yang signifikan yang disebabkan karena adanya realisasi

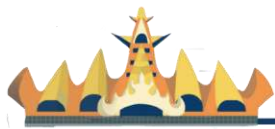
dokumen CK-1 Hasil Tembakau merek RL 1204. Selanjutnya di tahun 2023, secara yoy melanjutkan tumbuh 3,95 persen atau secara nominal mencapai Rp3,55 triliun yang diantaranya berasal oleh penerimaan atas denda administrasi cukai dengan berlakunya peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai. Secara persentase, realisasi Cukai mencapai 119,24 persen dari target awal APBN 2023 atau 121,35 persen dari target Perpres 75/2023. Pada Kuartal IV, realisasi penerimaan Cukai meningkat cenderung lebih tinggi dipengaruhi oleh Pemesanan Pita Cukai atas rokok elektrik yang memiliki tren peningkatan di akhir tahun.

Grafik 3.3 Kontribusi Penerimaan Pajak Dalam Negeri per Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung (data diolah)

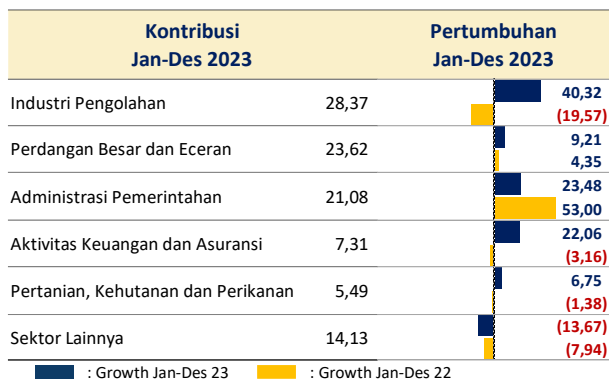
Selanjutnya, melihat kontribusi penerimaan pajak dalam negeri, berdasarkan Grafik 3.3, apabila dilihat dari sebaran wilayahnya, Kota Bandar Lampung merupakan daerah dengan sumber penerimaan pajak yang dominan mencapai 48,69 persen dari total penerimaan Pajak Dalam Negeri yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak di Lampung. Meskipun secara kontribusi menurun dari tahun sebelumnya, penerimaan pajak pemerintah pusat secara nominal di Bandar Lampung tumbuh 11,72 persen (yoy), yang utamanya karena Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota dan sebagai sentra perekonomian di Provinsi Lampung, sehingga terdapat banyak perkantoran, pusat hiburan, dan perbelanjaan yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan daerah di lainnya.



Selanjutnya, penerimaan Pajak Dalam Negeri di Kabupaten Lampung Selatan memiliki kontribusi terbesar kedua sebesar 17,19 tumbuh cukup tinggi 25,60 persen (*yoy*). Sedangkan Kabupaten Pesisir Barat memiliki kontribusi paling rendah sebesar 0,53 persen dari total Penerimaan Pajak Dalam Negeri.

Dilihat dari pertumbuhannya, Kabupaten Way Kanan merupakan kabupaten yang memiliki pertumbuhan tertinggi mencapai 49,49 persen yang didukung oleh pertumbuhan realisasi PPh, sedangkan pertumbuhan terendah pada Kabupaten Lampung Utara. Secara keseluruhan, pertumbuhan realisasi Pajak Dalam Negeri terlihat pada seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dengan rata-rata pertumbuhan 18,40 persen. Hal ini mencerminkan kinerja penerimaan pajak Tahun 2023 tumbuh secara merata tidak terlepas dari yang oleh peningkatan aktivitas ekonomi, serta efektivitas *tax collection* yang dilakukan di seluruh wilayah.

Grafik 3.4 Penerimaan Pajak Neto Kumulatif per Sektor di Lampung Tahun 2023 (persen)



Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung (data diolah)

Selanjutnya, apabila ditinjau berdasarkan sektor pajak sebagaimana pada Grafik 3.4, Industri Pengolahan masih menjadi sektor utama dalam menyumbang penerimaan Pajak Dalam Negeri di Lampung dengan kontribusi 28,37 persen. Meskipun kinerja kumulatif secara *yoy* pada Tahun 2022 tumbuh negatif, pada akhir tahun 2023 kinerja penerimaan pajak dari sektor Industri Pengolahan berhasil kembali tumbuh positif sebesar 40,32 persen dipicu oleh kenaikan setoran pajak pada

industri gula pasir, industri pati ubi kayu dan industri minyak mentah kelapa sawit (CPO).

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang merupakan sektor terbesar kedua dengan kontribusi 23,62 persen dari total Pajak Dalam Negeri, melanjutkan pertumbuhan 9,21 persen dari tahun lalu sejalan dengan pertumbuhan PDRB pada sektor tersebut, dan didukung oleh adanya peningkatan kegiatan ekonomi pada perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) kontrak, perdagangan besar kopi, teh dan kakao serta perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya. Sementara itu, Sektor Administrasi Pemerintahan mencatat pertumbuhan sebesar 23,48 persen (*yoy*), pertumbuhan ini dipicu oleh peningkatan pembayaran pajak dari pemerintah daerah terkait dengan pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 yang dipengaruhi oleh perbaikan tata kelola khususnya pada administrasi pelayanan pemerintah Bidang Pendidikan, Perumahan, dan Kesehatan.

Sementara itu, kinerja kumulatif penerimaan pajak dari Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, tercatat tumbuh dari tahun sebelumnya dipengaruhi oleh peningkatan pada Industri Perbankan seperti meningkatnya jasa kredit yang ditopang oleh kredit investasi dan kredit modal kerja. Kinerja sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai sektor basis di Lampung berhasil kembali tumbuh 6,75 persen dengan kontribusi 5,49 persen dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri. Peningkatan penerimaan Pajak dari Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Tahun 2023 ini dipicu oleh kenaikan harga komoditas pertanian.

Secara keseluruhan kinerja Penerimaan Pajak di Lampung sampai dengan akhir 2023 melanjutkan tren positif, hal ini tercermin dari kelima sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pajak Dalam Negeri di Lampung menunjukkan tren pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Capaian tersebut didukung oleh upaya pemerintah melalui penyempurnaan layanan dan regulasi di bidang perpajakan dan kerja sama

masyarakat dalam membangun negara melalui kepatuhan pembayaran dan pelaporan perpajakan.

3.1.1.2. Analisis Tax Ratio

Tax ratio digunakan untuk melihat seberapa besar porsi pajak dalam perekonomian suatu daerah dengan mengukur perbandingan antara penerimaan perpajakan dengan PDRB suatu daerah pada periode tertentu. Penerimaan Perpajakan dihitung dengan menjumlahkan Penerimaan Pajak Dalam Negeri dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional. Tabel XX menyajikan perhitungan tax ratio Tahun 2023 di Lampung.

Tabel 3.3 Tax Ratio Penerimaan Pajak 2021-2023 di Lampung (miliar rupiah)

Uraian	2021	2022	2023
Pajak Dalam Negeri	7.167,33	7.189,20	8.319,05
Pajak Perdagangan Internasional	2.200,48	2.525,29	1.016,45
Penerimaan Pajak	9.367,81	9.714,49	9.335,50
PDRB Tahunan 2023	371.198,88	414.131,42	448.880,25
Tax Ratio	2,52%	2,35%	2,08%

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, BPS (data diolah)

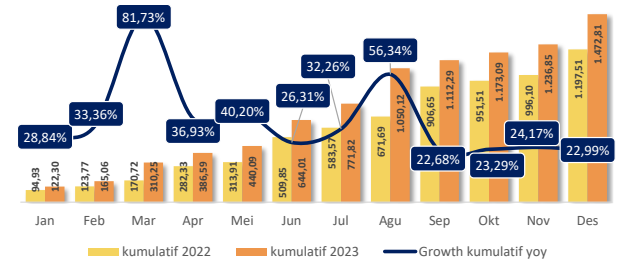
Berdasarkan Tabel 3.3 tersebut diperoleh informasi bahwa tax ratio pemerintah pusat sampai dengan Desember 2023 di Lampung sebesar 2,08 persen, menurun dari tax ratio s.d. Desember 2022 sebesar 2,35 persen. Menurunnya angka tax ratio ini terjadi seiring dengan realisasi Pajak Perdagangan Internasional yang terkoreksi cukup dalam akibat penurunan harga CPO yang merupakan komoditas utama ekspor di Lampung, sehingga berpengaruh signifikan pada penurunan realisasi Bea Keluar. Namun di sisi lain, Penerimaan Pajak Dalam Negeri menunjukkan tren pertumbuhan selaras dengan pertumbuhan PDRB secara kumulatif. Pertumbuhan ini didukung oleh momentum pemulihan ekonomi serta peningkatan kualitas layanan yang adaptif dan kebijakan di bidang perpajakan yang terus disempurnakan.

3.1.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kinerja kumulatif sampai dengan akhir 2023 menunjukkan peningkatan secara yoy sebesar 22,99 persen. Sepanjang tahun 2023, kenaikan tertinggi realisasi PNBP terjadi pada Bulan Maret dan

Agustus yang dipengaruhi oleh peningkatan pengesahan pendapatan yang diterima Satker BLU berupa pendapatan atas jasa pelayanan pendidikan yang diterima oleh Perguruan Tinggi dan jasa layanan Kesehatan.

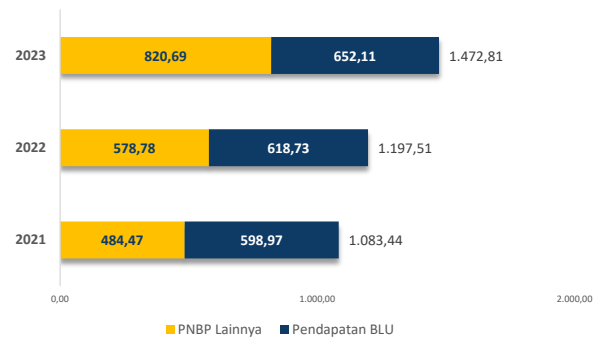
Grafik 3.5 Pertumbuhan Kumulatif PNBP Tahun 2023 (miliar rupiah)



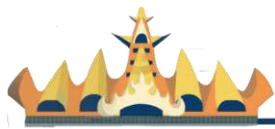
Sumber: OM-SPAN (data diolah)

Capaian penerimaan negara yang bersumber dari PNBP mencatatkan hasil yang memuaskan dan melebihi target hingga 153,02 persen pada akhir tahun. Secara nominal, realisasi PNBP di Lampung pada Tahun 2023 mencapai angka Rp1,47 triliun. Capaian ini didominasi oleh penerimaan PNBP Lainnya yang mampu tumbuh 41,8 persen (yoy).

Grafik 3.6 Tren PNBP Provinsi Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)



Di tahun 2023, komponen PNBP Lainnya menyumbang realisasi 56 persen dari total PNBP, atau secara nominal sebesar Rp820,69 miliar setara dengan 171,94 persen dari target. Realisasi PNBP Lainnya utamanya bersumber dari penerimaan Pendapatan Biaya Pendidikan pada Perguruan Tinggi yang sebagian besar merupakan penerimaan Satker Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Selain itu, penerimaan PNBP Lainnya disumbang oleh Pendapatan Jasa Kepelabuhanan khususnya Pelabuhan Panjang yang merupakan Pelabuhan



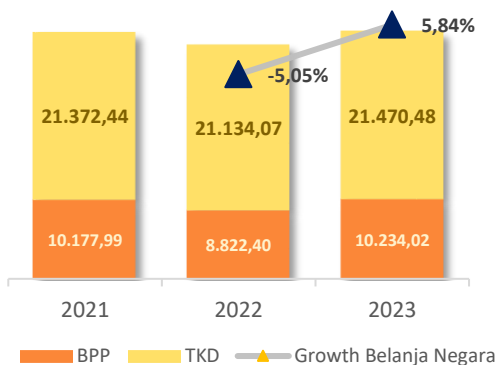
Internasional sebagai pintu utama keluar masuknya barang/jasa ke Kota Bandar Lampung, serta Pendapatan atas Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Selanjutnya, PNBPN yang disumbang dari pendapatan Satker BLU terealisasi sebesar Rp625,11 miliar atau 134,42 persen dari target APBN yang tumbuh 5,40 persen (yoy). Capaian ini sebagian besar didukung oleh Pendapatan jasa layanan Pendidikan yang diberikan oleh Satker BLU, dengan pendapatan tertinggi berasal dari Universitas Lampung. Selain itu, Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit Bhayangkara juga turut menyumbang PNBPN di Lampung melalui penerimaan atas layanan kesehatan. Dengan terus bertumbuhnya penerimaan dari Satker BLU mencerminkan kualitas layanan yang lebih baik dan kepercayaan masyarakat yang meningkat atas peran serta pemerintah.

3.1.2. Belanja Negara

Alokasi Belanja Negara di wilayah Lampung pada APBN Tahun 2023 sebesar Rp32,17 triliun. Per 31 Desember 2023 Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp31,7 triliun atau tumbuh 5,84 persen (yoy) dibandingkan dengan tahun 2022 dengan persentase penyerapan mencapai 98,53 persen.

Grafik 3.7 Tren Belanja Negara Tahun 2021 s.d. 2023 Provinsi Lampung (miliar rupiah)



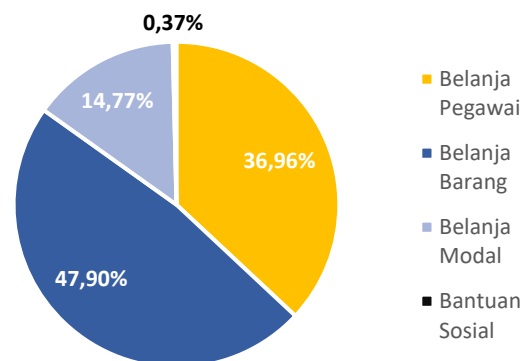
Tren belanja negara provinsi Lampung selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan pada tahun 2022 dan kembali naik pada tahun 2023.

Realisasi Belanja Negara didominasi oleh kinerja Transfer ke Daerah (TKD) yang berkontribusi 67,72 persen dari total Belanja APBN di Lampung. Komposisi utama realisasi Belanja Negara berasal dari penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang tumbuh 0,77 persen (yoy) dari periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, kontribusi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terhadap total Belanja Negara yakni 32,28 persen yang komposisi terbesarnya merupakan realisasi Belanja Barang dan Belanja Pegawai yang secara berurutan tumbuh 50,14 persen (yoy) dan 0,76 persen (yoy).

3.1.2.1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

Realisasi BPP sampai dengan akhir Desember 2023, mencapai Rp10,23 triliun lebih tinggi 16 persen (yoy) dari tahun lalu dengan tingkat penyerapan sebesar 96,67 persen dari alokasi pagu.

Grafik 3.8. Proporsi Belanja Pemerintah Pusat 2023 (miliar rupiah)



Sumber: OM-SPAN (data diolah)

Kontributor realisasi terbesar disumbang dari Belanja Barang dengan besaran 47,90 persen, kemudian Belanja Pegawai 36,96 persen, Belanja Modal 14,77 persen, dan Belanja Bantuan Sosial 0,37 persen.

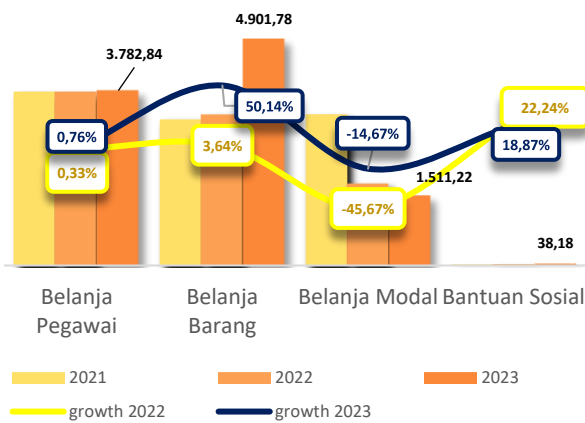
3.1.2.2. Berdasarkan Jenis Belanja

Dari keseluruhan jenis belanja, Belanja Barang memiliki pertumbuhan yang paling tinggi mencapai 50,14 persen (yoy) atau secara nominal sebesar Rp4,9 triliun dengan kontribusi 47,9 persen dari total BPP di Lampung. Pertumbuhan tersebut seiring dengan peningkatan Belanja Bahan dan



Belanja Barang Non Operasional Lainnya khususnya dalam rangka mendukung persiapan agenda strategis nasional yakni pelaksanaan pemilu 2024, serta peningkatan Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan diantaranya melalui Satuan Kerja (Satker) Kementerian PUPR. Belanja Barang juga dimanfaatkan diantaranya untuk membiayai keperluan operasional layanan pemerintah oleh Satker, serta pemeliharaan dan perawatan baik infrastruktur maupun Barang Milik Negara (BMN). Rincian realisasi per jenis belanja dapat dilihat pada Grafik 3.3.

Grafik 3.9 Growth Belanja Pemerintah Pusat per Jenis Belanja (miliar rupiah)



Sumber: OM-SPAN (data diolah)

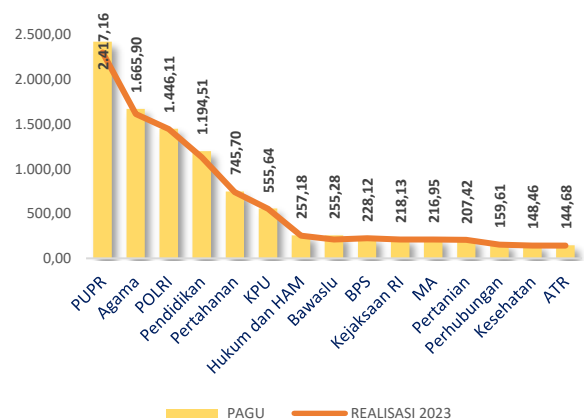
Sementara itu, realisasi Belanja Modal sebesar Rp1,5 triliun atau terkontraksi 14,67 persen seiring dengan penurunan pagu di tahun 2023. Dalam pagu Belanja Modal yang belum terserap, diantaranya terdapat sisa anggaran kontraktual yang merupakan selisih atas nilai riil pelaksanaan kontrak yang telah selesai. Meskipun demikian, sisa Belanja Modal tersebut dapat mencerminkan adanya efisiensi pelaksanaan kontrak. Selain itu, penyerapan Belanja Modal yang belum optimal diantaranya karena terdapat belanja infrastruktur yang belum terpenuhi prasyaratnya, khususnya yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri. Belanja Modal antara lain dimanfaatkan untuk memperpanjang umur ekonomis aset melalui penambahan nilai jalan dan jembatan, pembangunan jaringan, gedung sarana

pendidikan, serta pengadaan BMN diantaranya peralatan, mesin, dan aset fisik lainnya.

Kinerja Belanja Bantuan Sosial tumbuh 18,87 persen atau secara nominal sebesar Rp38,18 miliar dengan tingkat penyerapan 91,07 persen dari alokasi pagu. Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Lampung dimanfaatkan untuk pemberian bantuan kepada peserta didik yang disalurkan melalui UIN Raden Intan Lampung, IAIN Metro, dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, sehingga alokasi dan kinerja penyaluran Belanja Bantuan sosial dipengaruhi oleh jumlah peserta didik yang merupakan calon penerima bantuan dan jadwal penyaluran yang mengacu pada kalender akademik.

3.1.2.3. Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga

Grafik 3.10 Perbandingan Pagu dan Realisasi pada Lima Belas K/L Pagu Terbesar (miliar)

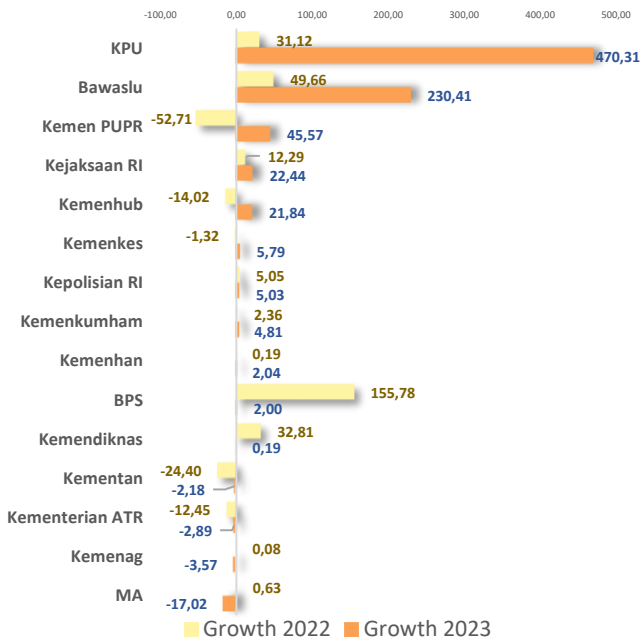


Sumber: OM SPAN (data diolah)

Apabila melihat kinerja BPP sampai dengan akhir tahun 2023, tentunya tidak terlepas dari kinerja lima belas Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki alokasi pagu APBN terbesar di Provinsi Lampung yang berkontribusi sebesar 93,14 persen dari total pagu BPP TA 2023. Sampai dengan akhir tahun 2023, Satker Kementerian PUPR memiliki alokasi anggaran terbesar di Lampung mencapai Rp2,4 triliun yang didominasi oleh Belanja Modal, dengan persentase pertumbuhan realisasi tahun 2023 sebesar 45,57 persen dari tahun sebelumnya.



Grafik 3.11 Pertumbuhan Realisasi Belanja pada Lima Belas K/L Pagu Terbesar (persen)



Sumber: OM SPAN (data diolah)

Grafik 3.9. menunjukkan pertumbuhan dan kontraksi realisasi belanja sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 pada lima belas K/L dengan alokasi pagu terbesar.

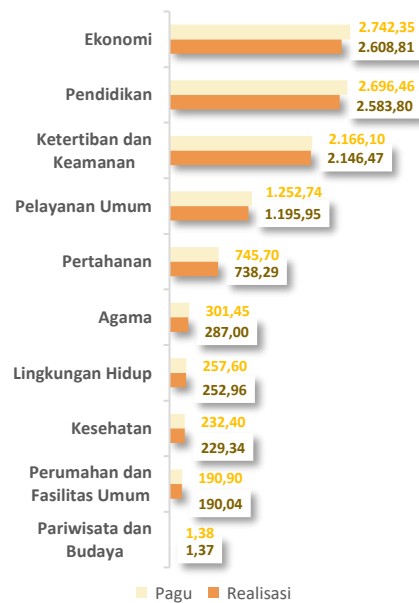
Apabila dilihat dari tingkat pertumbuhan, tingkat pertumbuhan terbesar terjadi pada Satker Komisi Pemilihan Umum dengan persentase peningkatan realisasi tahun 2023 sebesar 470,31 persen (yoy). Kemudian diikuti oleh Satker Badan Pengawasan Pemilu dengan peningkatan 230,41 persen. Pertumbuhan realisasi belanja yang tinggi ini utamanya dipengaruhi oleh penyerapan Belanja Barang untuk mendukung persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Tahun 2024 yang dilaksanakan serentak secara nasional. Hal ini mencerminkan peran APBN dalam menunjang proses konsolidasi demokrasi melalui fungsi alokasi Belanja Negara.

3.1.2.4. Berdasarkan Fungsi

Jenis BPP juga diklasifikasikan berdasarkan fungsi pemerintahan yang menyangkut beberapa aspek dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaran BPP berdasarkan Fungsi ditunjukkan sebagaimana pada

Grafik 3.12. Alokasi belanja terbesar terdapat pada fungsi Ekonomi dengan persentase penyerapan 95,13 persen dari total pagu. Alokasi belanja negara pada fungsi ekonomi dilaksanakan oleh K/L teknis yang memiliki tugas dan fungsi strategis yang mendukung aspek-aspek perekonomian antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, dan beberapa K/L lainnya. Alokasi belanja tersebut dituangkan pada beberapa program yang mencakup antara lain: infrastruktur konektivitas; ketahanan sumber daya air; ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas; pengelolaan perikanan dan kelautan; nilai tambah dan daya saing industri; serta 12 program lainnya yang secara spesifik diarahkan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Lampung.

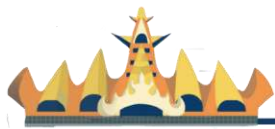
Grafik 3.12. Realisasi BPP Berdasarkan Fungsi (miliar rupiah)



Sumber: MEBE (data diolah)

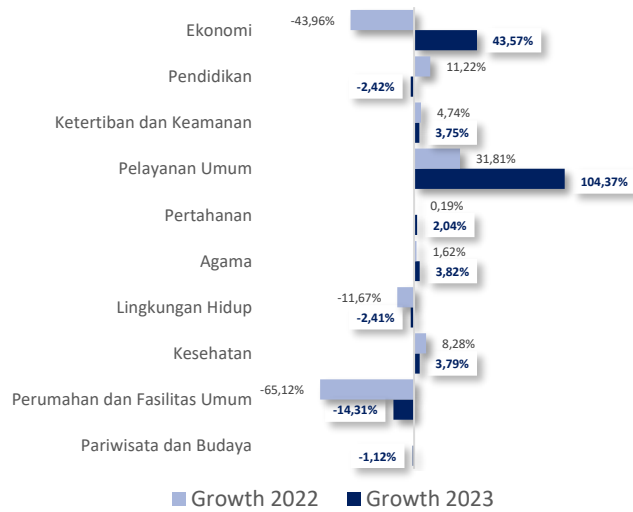
Selanjutnya, fungsi pendidikan memiliki alokasi BPP terbesar kedua yang khususnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM serta dukungan sarana prasarana yang optimal untuk menunjang pelaksanaan pendidikan mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Apabila dilihat dari tingkat serapan, BPP pada fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum memiliki





persentase penyerapan tertinggi yakni sebesar 99,55 persen dari total pagu.

Grafik 3.13. Tren Pertumbuhan BPP Berdasarkan Fungsi (miliar rupiah)



Sumber: MEBE (data diolah)

Sementara apabila dilihat dari pertumbuhan realisasi belanja, Fungsi Pelayanan Umum memiliki pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun lalu yakni mencapai 104,37 persen (yoy) dipengaruhi penyerapan belanja operasional untuk mendukung penyelenggaraan layanan masyarakat termasuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang merupakan agenda strategis nasional di tahun 2024. Selanjutnya, pertumbuhan tertinggi kedua berasal dari Fungsi Ekonomi dengan besaran 43,57 persen (yoy) dalam bentuk Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendanai pembangunan infrastruktur konektivitas berupa jalan daerah.

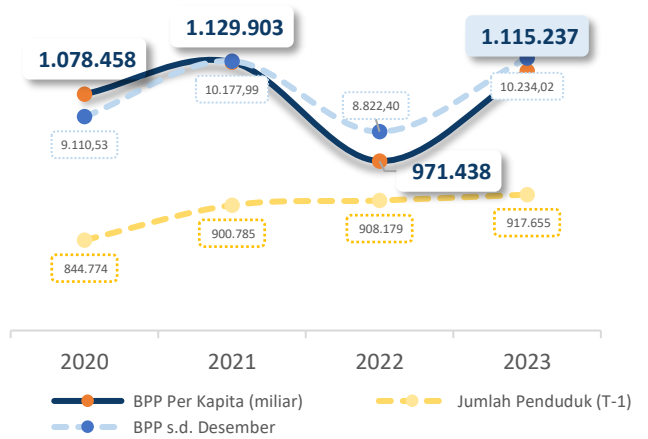
3.1.2.5. Belanja Pemerintah Pusat Per kapita

Berdasarkan tren selama tahun 2019 hingga 2023, realisasi BPP mengalami tren yang fluktuatif. Tren ini berbeda dengan tren jumlah penduduk yang terus meningkat di Lampung selama tahun lima tahun terakhir, dan lebih cenderung pada pertumbuhan realisasi Belanja Negara. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, jumlah penduduk di provinsi Lampung pada tahun 2022 mencapai 9,18 juta

penduduk, angka ini naik 1,04 persen (yoy) dari jumlah penduduk pada tahun 2021.

Perhitungan BPP Per Kapita dilakukan menggunakan realisasi BPP sampai dengan akhir 2023 dibagi dengan jumlah penduduk tahun sebelumnya (T-1) berdasarkan data yang dirilis dari BPS. Pada akhir Desember 2023, BPP Per Kapita di Lampung sebesar Rp1.115.237 atau meningkat 14,80 persen (yoy) seiring dengan realisasi BPP yang lebih tinggi. Perkembangan BPP Per Kapita tahun 2021-2023 ditunjukkan pada grafik 3.14.

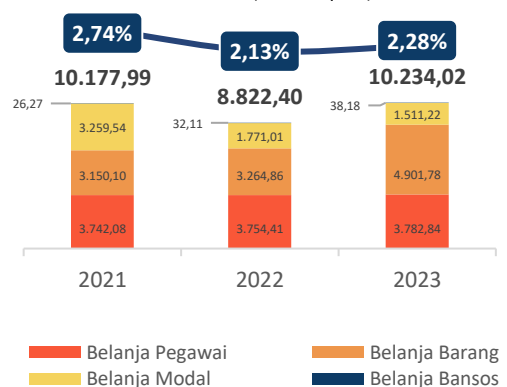
Grafik 3.14. Perkembangan BPP Per Kapita s.d. Desember 2023 (rupiah, orang)



Sumber: OM-SPAN, BPS Provinsi Lampung (diolah)

3.1.2.6. Kontribusi BPP Terhadap PDRB

Grafik 3.15. Perkembangan Kontribusi BPP Terhadap PDRB 2021-2023 (miliar rupiah)



Sumber: OM-SPAN, BPS Provinsi Lampung (diolah)

Realisasi BPP di Lampung sampai dengan Desember 2023 memberikan kontribusi terhadap PDRB 2023 sebesar 2,28 persen atau naik 0,15 persen dari periode yang sama tahun lalu. Tren kontribusi BPP tentunya sangat dipengaruhi oleh perkembangan

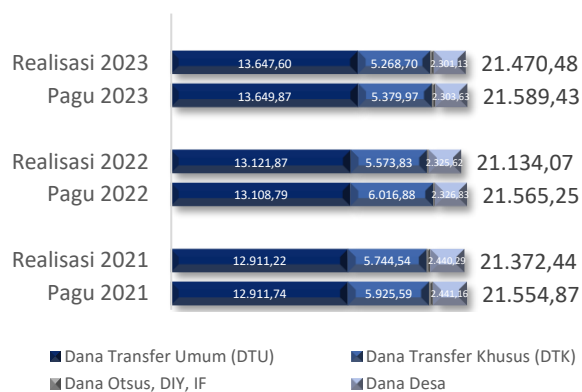


realisasi belanja setiap tahunnya. Kontribusi ini mencerminkan belanja yang berasal dari Kementerian/Lembaga menyumbang PDRB Lampung dari sisi pengeluaran yang dihasilkan oleh perekonomian khususnya melalui konsumsi barang dan jasa pemerintah yang meningkat pada Triwulan IV, belanja pegawai, pembangunan fisik dari belanja modal, dan bantuan sosial kepada masyarakat.

3.1.3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

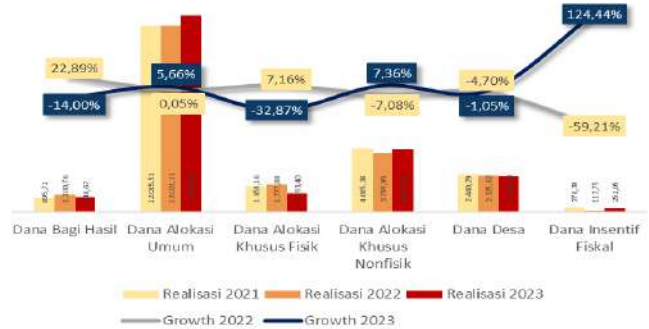
Kinerja Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan Desember 2023 tumbuh secara positif 1,59 persen (yoy) dibandingkan tahun lalu dan telah tersalurkan 99,45 persen dari anggaran atau secara nominal sebesar Rp21,47 triliun. Capaian ini meningkat dibandingkan periode yang sama TA 2022 sebesar 98,00 persen atau Rp21,13 triliun. Rincian pagu dan realisasi komponen TKD dapat dilihat pada Grafik 3.16.

Grafik 3.16. Pagu Realisasi dan Pertumbuhan Realisasi Penyaluran TKD s.d. Desember 2023 per Jenis (miliar rupiah, persen)



Secara keseluruhan, pertumbuhan penyaluran Transfer ke Daerah mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan di regional Lampung. Tumbuhnya penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) terutama didorong oleh pertumbuhan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, serta Insentif Fiskal. Namun demikian, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa mengalami kontraksi secara yoy. Adapun tren realisasi TKD periode tahun 2021 s.d. 2023 sesuai grafik 3.17.

Grafik 3.17. Tren Realisasi TKD berdasarkan DTU, DTK, Dana IF, dan Dana Desa Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)

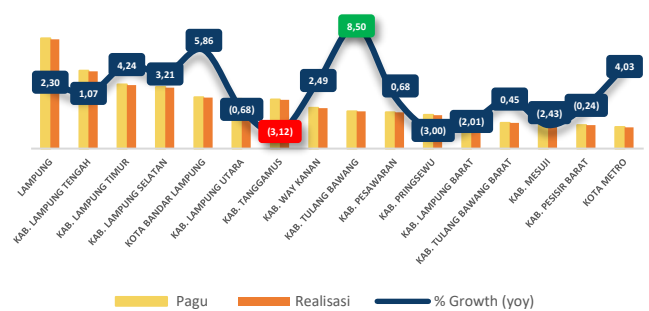


Sumber: OMSPAN (diolah)

Pertumbuhan tertinggi berasal dari Dana Insentif Fiskal, dimana dana tersebut merupakan penghargaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang memiliki kinerja baik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan pelayanan umum pemerintahan.

Sedangkan, komponen yang mendominasi Realisasi TKD Provinsi Lampung adalah DAU, yang pada tahun 2023 secara global difokuskan untuk mendorong dan memperbaiki produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kebijakan dukungan atas penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), meningkatkan kualitas SDM, infrastruktur, dan layanan publik dasar.

Grafik 3.18. Pagu Realisasi dan Pertumbuhan Realisasi Penyaluran TKD s.d. Desember 2023 per Pemerintah Daerah (persen)



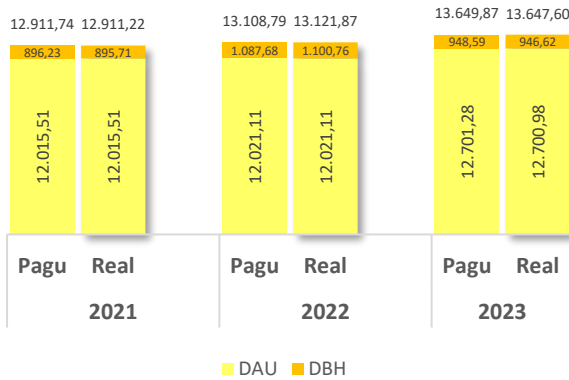
Sumber: OM-SPAN dan Simtrada (diolah)

Untuk mencermati kinerja penyaluran TKD secara lebih dalam, perlu ditelusuri kinerja penyaluran pada masing-masing pemerintah daerah. Berdasarkan Grafik 3.18. pertumbuhan tertinggi penyaluran TKD berada pada Kabupaten Tulang Bawang sebesar 8,50 persen (yoy) diikuti oleh Kota

Bandar Lampung sebesar 5,86 persen (*yoy*). Sedangkan pertumbuhan negatif pada Kabupaten Tanggamus sebesar 3,12 persen (*yoy*).

3.1.3.1. Dana Transfer Umum (DTU)

Grafik 3.19 Pagu Realisasi DTU s.d. Desember 2021-2023 (miliar rupiah)

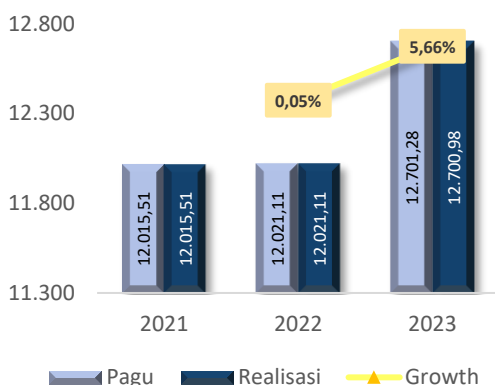


Sumber: OMSPAN (diolah)

Realisasi Dana Transfer Umum (DTU) pada akhir tahun 2023 adalah sebesar 13,64 triliun , mencapai 99,98 persen atau tumbuh 4,01 persen (*yoy*) dibanding tahun sebelumnya. Kontribusi DTU terbesar berasal dari penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 93,06 persen dari keseluruhan DTU di Provinsi Lampung. Sedangkan Dana Bagi Hasil berkontribusi sebesar 6,94 persen terhadap keseluruhan realisasi DAU tahun 2023.

3.1.3.1.1. Dana Alokasi Umum

Grafik 3.20 Tren Penyaluran DAU Lampung 2021-2023 (miliar rupiah)



Sumber: OMSPAN (diolah)

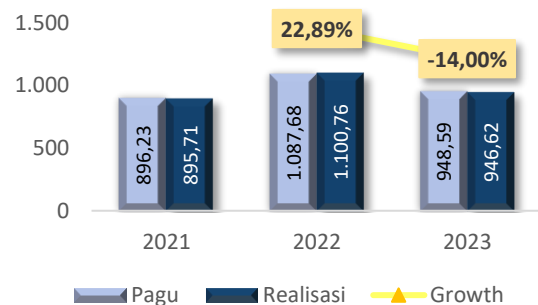
Penyaluran DAU se-Provinsi Lampung telah terealisasi Rp12,7 triliun atau 100 persen dari total pagu, angka ini tumbuh 5,66 persen (*yoy*) dari tahun

lalu. Seluruh DAU *Block Grant* per bulan hingga Desember 2023 telah tersalurkan seluruhnya. Sedangkan, DAU *Specific Grant* diarahkan untuk meningkatkan harmonisasi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung prioritas nasional, peningkatan layanan dasar dan infrastruktur, serta merupakan implementasi atas amanat UU No 1 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

Performa kinerja realisasi pada triwulan IV-2023, secara spesifik, merupakan kontribusi dari akselerasi realisasi DAU *Block Grant* untuk 16 Pemda pada 30 November 2023, serta realisasi atas tambahan alokasi DAU TA 2023 pada Desember 2023 sebesar Rp84,19 miliar yang digunakan untuk dukungan pendanaan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi ASN guru berdasarkan KMK nomor 464 Tahun 2023.

3.1.3.1.2. Dana Bagi Hasil

Grafik 3.21 Tren Penyaluran DBH Lampung 2021-2023 (miliar rupiah)



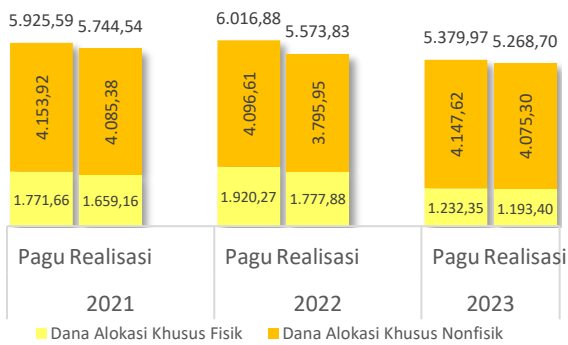
Sumber: OMSPAN (diolah)

Realisasi DBH s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp946,62 miliar atau 99,79 persen dari pagu, dimana nilai tersebut menunjukkan kontraksi 14,00 persen (*yoy*). Penurunan ini tidak hanya disebabkan oleh penurunan pagu 2023 dibanding tahun sebelumnya tetapi juga terutama akibat penyaluran DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang belum optimal. Sampai dengan 31 Desember 2023 realisasi DBH CHT sebesar 70,59 persen dari alokasi pagu Rp 6,69 miliar. Hal ini disebabkan tidak disampainya rencana kerja program dan persyaratan salur lainnya terkait pencairan DBH CHT oleh Pemda.

Penurunan ini dipicu oleh kebijakan kenaikan cukai rokok rata-rata 10 persen yang dimulai pada tahun 2023, dimana untuk golongan I dan II yang mengalami kenaikan tarif paling tinggi. Hal ini menyebabkan peralihan konsumsi ke golongan III yang lebih murah. Adapun DBH CHT merupakan penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau yang dibagikan kepada pemerintah daerah, dimana memiliki peruntukan spesifik untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

3.1.3.2. Dana Transfer Khusus (DTK)

Grafik 3.22 Pagu Realisasi DTK s.d. Desember 2021-2023 (miliar rupiah)



Sumber: OMSPAN (diolah)

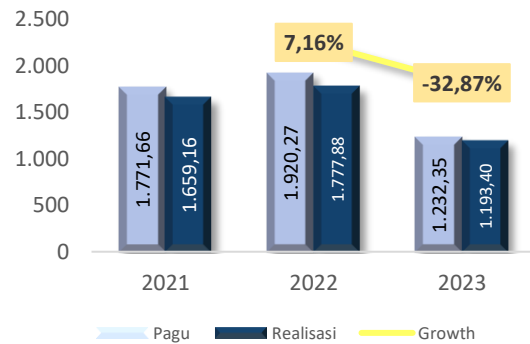
Dana Transfer Khusus (DTK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non fisik. Dalam APBN Provinsi Lampung, realisasi DTK 2023 mencapai Rp5,27 triliun dengan penyaluran sebesar 97,93 persen dari pagu anggaran, terkontraksi menurun 5,47 persen (yoy) dibanding tahun lalu.

3.1.3.2.1. Dana Alokasi Khusus Fisik

Penyaluran Dana Transfer Khusus melalui DAK Fisik pada Provinsi Lampung tahun 2023 sebesar Rp1.193,40 miliar atau 96,84 persen terhadap pagu, dimana nilai tersebut terkontraksi sebesar 32,87 persen (yoy) atau secara nominal Rp584,48

miliar. Hal ini disebabkan oleh pagu DAK Fisik yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Namun, dicermati dari tingkat serapan, terdapat peningkatan dengan kinerja realisasi sebesar 96,84 persen, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar 92,58 persen.

Grafik 3.23 Tren Penyaluran DAK Fisik Lampung 2021-2023 (miliar rupiah)

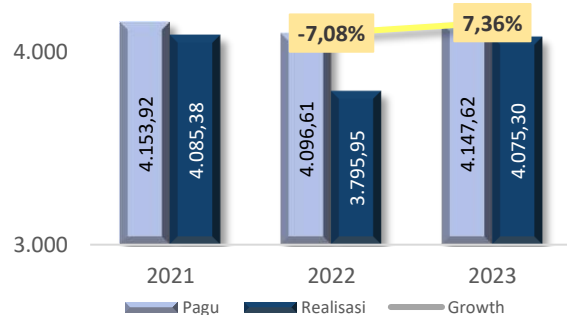


Sumber: OMSPAN (diolah)

3.1.3.2.2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Komponen DAK Non Fisik tumbuh sebesar 7,36 persen (yoy) dipengaruhi oleh peningkatan kepatuhan pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan puskesmas dalam melengkapi syarat salur. Sehingga, terdapat peningkatan yang cukup tinggi pada kinerja penyaluran Dana BOK, TPG, dan Dana BOS, dibandingkan tahun sebelumnya masing-masing sebesar 36,50 persen, 4,17 persen, dan 2,85 persen. Selain itu, pada tahun 2023 terdapat jenis DAK Non Fisik Lainnya baru yaitu Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (KISM) yang telah tersalurkan 100 persen senilai Rp 2,75 miliar.

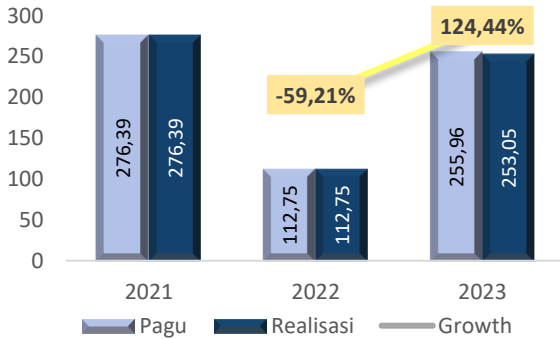
Grafik 3.24 Tren Penyaluran DAK Non Fisik Lampung 2021-2023 (miliar rupiah)



Sumber: OMSPAN (diolah)

3.1.3.3. Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

Grafik 3.25 Tren Penyaluran Dana Insentif Fiskal Lampung 2021-2023 (miliar rupiah)



Sumber: OMSPAN (diolah)

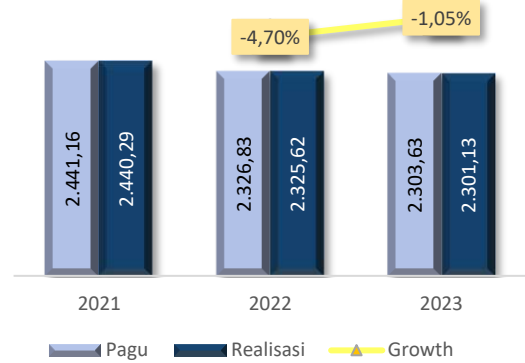
Dana Insentif Fiskal Provinsi Lampung pada tahun 2023 mencatat pertumbuhan signifikan hingga 124,44 persen (yoy) dengan persentase penyaluran mencapai 98,86 persen atau senilai Rp253 miliar. Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh penambahan alokasi Insentif Fiskal atas Kinerja Tahun Anggaran Berjalan dalam kategori Kinerja Kesejahteraan Masyarakat untuk 14 Pemda di Provinsi Lampung, sebesar Rp141,54 miliar sebagaimana tercantum dalam PMK 97 Tahun 2023. Meskipun demikian, masih terdapat sedikit kendala dalam penyerapan, yang disebabkan oleh penyempurnaan kebijakan penyaluran Insentif Fiskal atas kinerja tahun berjalan, di mana pada tahun 2022 disalurkan secara sekaligus tanpa syarat salur, namun pada 2023 disalurkan secara bertahap dengan syarat salur.

3.1.3.4. Dana Desa (DD)

Dari sisi perkembangan penyaluran Dana Desa, realisasi s.d. 31 Desember 2023 mencapai Rp2,30 triliun atau 99,89 persen dari pagu anggaran. Adapun tren pagu dan realisasi Dana Desa di Lampung selama 3 tahun terakhir menunjukkan sedikit penurunan, akibat dari alokasi pagu yang juga sedikit menurun. Sehingga, tahun 2023 menunjukkan kontraksi realisasi Dana Desa sebesar 1,05 persen (yoy). Namun demikian, kontraksi tersebut masih lebih baik dibandingkan kontraksi

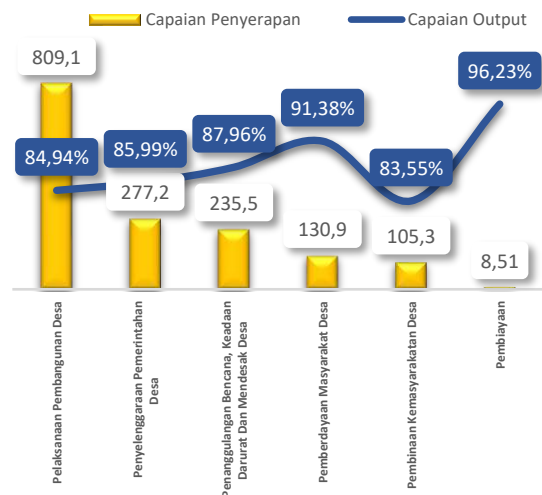
pada periode sebelumnya, yaitu sebesar 4,70 persen (yoy) pada 2022.

Grafik 3.26 Tren Penyaluran Dana Insentif Fiskal Lampung 2021-2023 (miliar rupiah)



Sumber: OMSPAN (diolah)

Grafik 3.27. Clustering Penyerapan Dana Desa s.d. 31 Desember 2023 (persen)



Sumber: OMSPAN, SIMTRADA (diolah)

Dari total Dana Desa sebesar Rp 2,3 triliun yang telah disalurkan, hingga 31 Desember 2023 mencapai rata-rata ketercapaian output sebesar 85,78 persen. Penyerapan terbesar terjadi pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dengan total penyerapan mencapai Rp809,1 miliar. Dana ini sebagian besar dialokasikan untuk Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani, sepanjang kurang lebih 722,97 kilometer, dengan ketercapaian mencapai 95,09 persen, serta untuk Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa, sepanjang sekitar 273,45 kilometer, dengan ketercapaian mencapai 95,41 persen. Sementara itu, Bidang Pembiayaan mencatatkan ketercapaian output

tertinggi hingga akhir tahun 2023, yaitu sebesar 96,23 persen, yang disumbangkan oleh Penyertaan Modal senilai Rp8,52 miliar.

Dalam perjalanan penyaluran Dana Desa pada 2023, terdapat 1 desa tidak salur pada tahap I, 2 desa pada tahap II, dan 3 desa pada tahap III. Hal ini dikarenakan terdapat permasalahan internal desa dan permasalahan hukum perangkat desa. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah kabupaten secara holistik dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan memberikan pembinaan kepada aparatur desa, serta perlu adanya penguatan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengoptimalkan penyaluran Dana Desa serta menjaga efektivitas pemanfaatannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di desa.

3.1.4. Surplus/ Defisit APBN

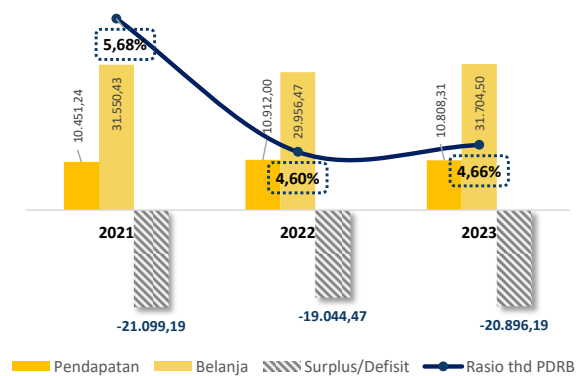
Pada tahun 2023, Pemerintah melanjutkan penerapan kebijakan fiskal ekspansif yang terukur, terarah dan secara konsisten menciptakan akselerasi pembangunan nasional maupun pemerataan pembangunan di daerah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap tumbuh berkesinambungan. Untuk mendukung implementasi kebijakan fiskal yang ekspansif tersebut, Pemerintah mengimplementasikan anggaran defisit yang didasari dengan penguatan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan. Kebijakan fiskal ekspansif dijalankan Pemerintah juga untuk menghindari *opportunity loss* sejalan dengan semakin tingginya pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan nasional.

Selama tiga tahun terakhir, Posisi APBN di Provinsi Lampung mengalami defisit dengan rasio defisit terhadap PDRB Provinsi Lampung yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, defisit APBN di Regional Lampung berada pada angka 5,68 persen terhadap PDRB Tahunan 2021, untuk menstimulasi perekonomian regional dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kemudian, rasio tersebut menurun pada Tahun 2022 seiring dengan menurunnya alokasi

Belanja Negara, sehingga berada pada angka 4,60 persen dari PDRB Tahunan 2022.

Pada tahun 2023, dari total realisasi Belanja Negara Rp31,7 triliun dengan Pendapatan Negara sebesar Rp10,8 triliun menghasilkan nominal defisit sebesar Rp20,89 triliun atau lebih lebar 9,72 persen dengan rasio terhadap PDRB Tahunan 2023 sebesar 4,66 persen. Rasio ini meningkat seiring dengan meningkatnya realisasi Belanja Negara, khususnya Belanja Pemerintah Pusat berupa Belanja Barang untuk mendukung penyelenggaraan pemilu, dan peningkatan alokasi Dana TKD berupa DAU yang memiliki porsi terbesar dari total Belanja Negara keseluruhan di Lampung.

Grafik 3.28 Perkembangan Surplus/Defisit APBN Regional Lampung Tahun 2021-2023



Sumber: OM-SPAN (diolah)

3.1.5. Pengelolaan BLU Pusat

Kanwil DJPb Lampung memiliki peran dalam melakukan pembinaan kepada Satker BLU, diantaranya melalui monitoring dan evaluasi kinerja dan pengelolaan keuangan BLU, serta mendorong Satker PNBPN menjadi lebih mandiri dengan menerapkan tata Kelola BLU. Bagian berikut merupakan profil dan jenis layanan, perkembangan BLU di Wilayah Provinsi Lampung, serta Satker PNBPN yang potensial untuk menjadi BLU.

3.1.5.1.1. Profil dan Jenis Layanan BLU Pusat

Badan Layanan Umum (BLU) memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan masyarakat di berbagai bidang. Di wilayah Provinsi Lampung, terdapat lima BLU dengan rincian sebagaimana Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Profil BLU di Wilayah Provinsi Lampung

No	Nama BLU	Bidang Usaha
1	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Lampung	Jasa Lainnya (Industri)
2	Politeknik Kesehatan Tanjungkarang	Kesehatan
3	Rumkit Bhayangkara Bandar Lampung	Kesehatan
4	UIN Raden Intan Bandar Lampung	Pendidikan
5	Universitas Lampung	Pendidikan

Sumber: OM-SPAN (diolah)

Adapun profil singkat masing-masing BLU adalah sebagai berikut:

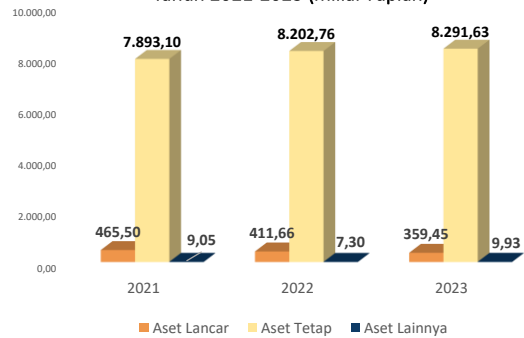
1. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Lampung merupakan lembaga pengawasan mutu dengan status sebagai Proyek Penelitian dan Pengawasan Mutu Industri yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Politeknik Kesehatan Tanjung Karang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kemenkes RI dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan bertugas untuk melaksanakan pendidikan vokasi dalam bidang kesehatan ;
3. Layanan utama RSB Lampung berupa layanan kesehatan kepolisian, termasuk bagi anggota POLRI, pegawai negeri pada POLRI, keluarganya, dan masyarakat umum;
4. UIN Raden Intan Lampung merupakan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dengan kegiatan utama menyelenggarakan pelayanan di bidang pendidikan tinggi yang bernuansa keislaman. Layanan yang diberikan terdiri dari tarif layanan akademik dan tarif layanan penunjang akademik;
5. Universitas Lampung menyelenggarakan layanan di bidang Pendidikan dan pengajaran, layanan di bidang penelitian, layanan di bidang pengabdian masyarakat, layanan di bidang kerja sama, dan layanan manajemen universitas.

3.1.5.1.2. Perkembangan Pengelolaan Aset, PNBPN, dan Belanja BLU

Nilai aset yang dimiliki oleh BLU yang merupakan bagian dari Neraca Pemerintah memiliki nilai yang

cukup signifikan. Tren nilai total aset selama tahun 2021 hingga 2023 terus meningkat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih baik secara berkelanjutan, melalui peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang operasional BLU khususnya dalam bentuk peningkatan aset tetap. Total aset tetap yang dikelola BLU di Wilayah Provinsi Lampung per 31 Desember 2023 sebesar Rp8,29 triliun. Grafik 3.29 menunjukkan tren perkembangan jumlah aset BLU Tahun 2021 s.d. 2023. Peningkatan aset BLU utamanya bersumber dari alokasi APBN dalam bentuk Belanja Negara pada Satker BLU.

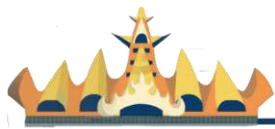
Grafik 3.29 Tren Perkembangan Aset Tetap BLU per 31 Desember Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)



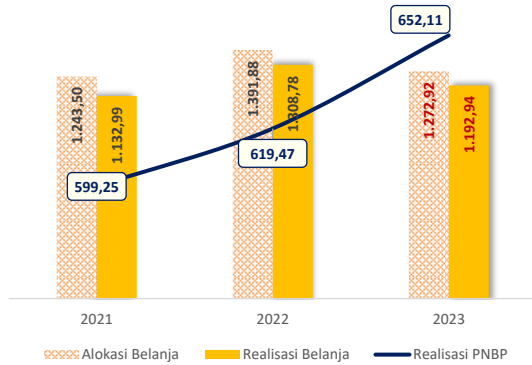
Sumber: MON-SAKTI

Total alokasi Belanja Negara dalam APBN yang dikelola oleh kelima BLU di wilayah Lampung berjumlah Rp1,27 triliun, dan sampai dengan Desember 2023 telah terealisasi Rp1,19 triliun. Belanja tersebut diantaranya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal, yang ditujukan dalam rangka penyelenggaraan layanan operasional dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang layanan khususnya di Bidang Pendidikan. Alokasi Belanja BLU terbesar dikelola oleh Universitas Lampung yang didominasi oleh Belanja Barang.

Di samping itu, target PNBPN atas Pendapatan BLU yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp485,14 miliar, sampai dengan Desember 2023 telah terealisasi Rp652,11 miliar jauh melampaui target hingga 134,42 persen. Tren Realisasi Belanja dan PNBPN selama tiga tahun terakhir ditunjukkan pada Grafik 3.30 berikut.



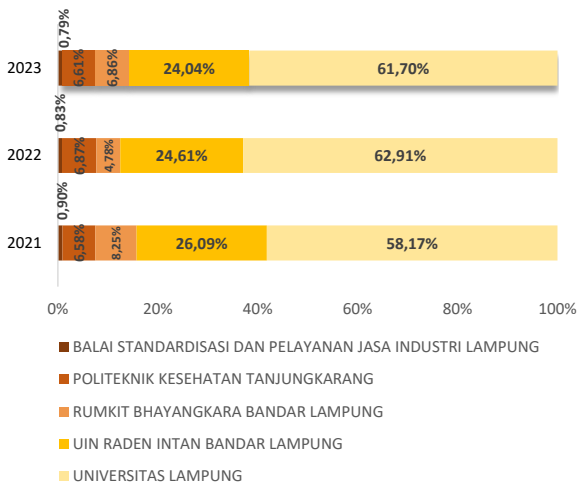
Grafik 3.30 Perkembangan Realisasi Belanja RM dan PNPB BLU di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2021-2023 (miliar Rp)



Sumber : OM-SPAN, MEBE (diolah)

Kontribusi Pendapatan BLU terhadap total realisasi PNPB keseluruhan selama tahun 2021-2023 secara berturut-turut sebesar 55 persen, 52 persen, 44 persen. Meskipun secara tren tiga tahun kontribusinya mengalami penurunan, namun secara persentase capaian target, Pendapatan BLU secara konsisten berada di atas target selama tiga tahun terakhir diatas 130 persen.

Grafik 3.31 Perkembangan Kontribusi PNPB BLU pada Satker BLU di Wilayah Lampung Tahun 2021-2023



Sumber : OM-SPAN, MEBE (diolah)

BLU Universitas Lampung menyumbang PNPB BLU terbesar terhadap total PNPB BLU di Provinsi Lampung hingga menyentuh Rp402,34 miliar pada tahun 2023 dengan persentase ketercapaian target sebesar 140 persen, kemudian diikuti oleh UIN Raden Intan Lampung yang menyumbang PNPB BLU sebesar Rp156,77 atau 127 persen dari target. Di sisi lain, apabila melihat ketercapaian target PNPB

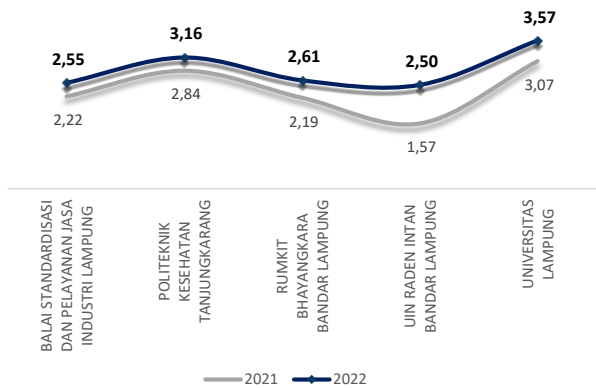
paling tinggi pada BLU Rumkit Bhayangkara yang mencapai 185 persen di tahun 2023.

3.1.5.1.3. Tingkat Kemandirian BLU

Mempunyai misi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas layanan dan tata kelola BLU terus dikembangkan secara berkelanjutan untuk memberikan kinerja pelayanan yang semakin baik. Untuk mengukur kinerja BLU dilakukan melalui penilaian *Maturity Rating*, dimana komponen penilaiannya antara lain terdiri atas menilai aspek keuangan, aspek pelayanan dan *Total Quality Management (TQM)*. *Maturity Rating* juga digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat kemandirian suatu BLU sebagai entitas pemerintah yang berorientasi layanan yang menerapkan prinsip fleksibilitas keuangan.

Berdasarkan aplikasi BIOS nilai *Maturity Rating* pada BLU lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung tahun 2021-2022 disajikan pada Grafik berikut.

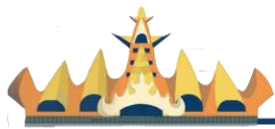
Grafik 3.32 Maturity Rating BLU Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2021-2022



Sumber : Aplikasi BIOS

Berdasarkan Grafik tersebut, Universitas Lampung memiliki nilai *Maturity Rating* tahun 2022 tertinggi jika dibandingkan dengan BLU lainnya di wilayah Provinsi Lampung yaitu sebesar 3,57. Nilai tertinggi atas *Maturity Rating* BLU Universitas Lampung terdapat pada komponen layanan yang menunjukkan adanya upaya perbaikan pelayanan yang berkelanjutan. Sedangkan nilai *Maturity Rating* terendah di Tahun 2022, terdapat pada BLU UIN Raden Intan, namun meningkat dari tahun sebelumnya.





Secara keseluruhan, kelima Satker BLU di Wilayah Lampung menunjukkan kenaikan *Maturity Rating* dari tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas layanan dan perbaikan tata Kelola BLU terus dilakukan terutama pada aspek-aspek utama penilaian antara lain Keuangan, Layanan, Kapabilitas Internal, Tata Kelola & Kepemimpinan, inovasi, dan lingkungan. Meskipun demikian, masih terdapat ruang perbaikan untuk peningkatan pola manajerial yang akan membawa dampak pada pelayanan yang diberikan.

3.1.5.1.4. Profil Satker PNBP Potensial Menjadi BLU

Dalam rangka menjangkau dan mengembangkan potensi satker di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung untuk menjadi BLU rumpun Pendidikan, Kanwil DJPb Provinsi berperan sebagai katalisator bagi satker-satker yang ingin dan berpotensi menjadi BLU. Fungsi katalisator tersebut telah dilakukan dengan mengadakan asistensi kepada satker-satker pengguna PNBP di bidang pendidikan yang berpotensi menjadi BLU, yaitu Politeknik Negeri Lampung dan Institut Teknologi Sumatera, profil Satker beserta potensinya disajikan melalui Tabel berikut.

Tabel 3.5 Profil Satker PNBP Potensial Tahun 2023 di Wilayah Lampung

No	Nama	Bidang Usaha	Potensi
1	Politeknik Negeri Lampung	Pendidikan	Tren penerimaan meningkat dari tahun 2018 sampai dengan 2023 disebabkan peningkatan jumlah mahasiswa yang mendaftar Potensi penerimaan dari Kebun Raya ITERA, asrama, layanan sewa gedung dan aula, dan beberapa pendapatan lainnya dari hasil KSO.
2	Institut Teknologi Sumatera	Pendidikan	Peningkatan jumlah mahasiswa yang mendaftar Potensi penerimaan dari laboratorium, asrama, layanan sewa gedung dan aula, dan beberapa pendapatan lainnya dari hasil KSO.

Sumber: Hasil Money Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Progres pengusulan kedua Satker PNBP Potensial untuk menjadi BLU dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Pengusulan Polinela menjadi BLU telah dimulai sejak tahun 2022, di mana Kanwil DJPb Provinsi Lampung telah melakukan asistensi kepada satker baik secara luring sebanyak 2(dua) kali. Pada November 2023, unit Eselon I Kemendikbudristek dan Kanwil DJPb Lampung melakukan asistensi *offline* kepada satker dalam rangka persiapan ujian menjadi BLU yang akan direncanakan dilaksanakan pada awal Desember 2023, serta memberikan langkah strategis yang dalam rangka mempersiapkan pimpinan Satker dan tim dalam menghadapi *assessment* menjadi satker Pengelolaan Keuangan BLU. Sampai dengan akhir tahun 2023, satker masih menunggu jadwal *assessment* calon satker BLU yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PK-BLU.
2. Pengusulan ITERA menjadi BLU telah dilakukan sejak tahun 2021, namun pada tahun 2022 terkendala oleh pergantian SDM. Pengusulan kembali mulai dilakukan pada bulan Juli 2023, di mana Kanwil DJPb Provinsi Lampung telah melakukan asistensi kepada satker baik secara daring maupun luring sebanyak 6 (enam) kali. Pada November 2023, unit Eselon I Kemendikbudristek dan Kanwil DJPb Lampung melakukan asistensi *offline* kepada satker atas perbaikan dokumen usulan dan Langkah strategis yang dapat dilakukan satker dalam persiapan sebagai satker BLU. Perbaikan dokumen dimaksud akan diajukan kembali ke unit Eselon I pada awal tahun 2024 untuk kemudian diteruskan ke Direktorat PK-BLU.

3.1.6. Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat Kinerja Penyaluran Kredit Program Pemerintah

Kanwil DJPb Provinsi Lampung juga memiliki peran dalam menatausahakan investasi pemerintah antara lain berupa penerusan pinjaman (*Subsidiary Loan Agreement*), kredit program, ultra mikro, dan investasi lainnya. Investasi pemerintah dalam berbagai instrumen tersebut ditujukan untuk



mengakselerasi pembangunan dan perekonomian khususnya di daerah. Kedepannya, diharapkan dengan adanya peran fiskal dalam memberikan modal baik dalam bentuk penerusan pinjaman maupun kredit program kepada para pelaku UMKM, mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya yang lebih besar, serta menghasilkan *multiplier effect* bagi ekonomi regional.

3.1.6.1. Penerusan Pinjaman

Jumlah penerusan pinjaman (*Subsidiary Loan Agreement*)/ SLA) yang ditatausahakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung per 31 Desember sebesar Rp41,99 miliar dengan total lima debitur yang terdiri dari: 3 debitur pemerintah daerah, 2 debitur BUMD, dan 1 debitur koperasi. Rincian jumlah pinjaman per 31 Desember 2023 untuk masing-masing debitur disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.6 Rincian Jumlah Penerusan Pinjaman Per 31 Desember 2023 (miliar rupiah)

No.	Nama Debitur	Posisi Piutang Negara (Miliar)			
		Tunggakan Pokok	Tunggakan Non Pokok	Belum Jatuh Tempo	Hak Tagih Pemerintah
1	Pemkab Lampung Utara	-	15,45	-	15,45
2	Pemkab Lampung Utara	-	-	3,36	3,36
3	Pemkab Lampung Tengah	-	14,00	-	14,00
4	PDAM Kab. Lampung Tengah	-	-	-	-
5	PDAM Kab. Lampung Utara	-	-	-	-
6	KLP Sinar Siwo Mego	1,67	7,52	-	9,19
Total		1,67	36,97	3,36	42,00

Sumber: Aplikasi SLIM

Terkait pinjaman Pemkab Lampung Utara sebesar Rp3,36 miliar berstatus lancar dan masih dalam tahap pelunasan dan rencana pembayarannya telah dianggarkan dalam APBD. Pinjaman tersebut merupakan hasil restrukturisasi pinjaman pokok atas PDAM Lampung Utara. Sementara, untuk pinjaman kepada PDAM Lampung Tengah, telah dilakukan pelunasan atas pinjaman pokoknya sebesar Rp5 miliar di tahun 2023.

Selanjutnya, terkait Pinjaman Pemkab Lampung Utara sebesar Rp15,45 miliar dan Pemkab Lampung Tengah sebesar Rp14 miliar merupakan hasil restrukturisasi Pinjaman milik PDAM Kabupaten Lampung Utara dan PDAM Lampung Tengah berupa Tunggakan Non Pokok. Atas kedua pinjaman hasil restrukturisasi tersebut, telah diterbitkan

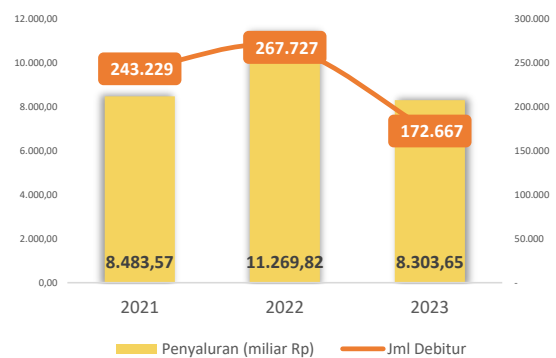
Persetujuan Penghapusan Penetapan Penghapusan Piutang Negara Non Pokok secara Bersyarat yang Telah Mendapatkan Persetujuan Presiden, dan saat ini dalam proses penghapusan Hak Tagih Pemerintah.

Terkait pinjaman KLP Sinar Siwo Mego sebesar Rp9,19 miliar saat ini telah dilimpahkan pengurusannya kepada PUPN dikarenakan debitur koperasi tersebut sudah tidak aktif lebih dari 20 tahun. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung, ditemukan kondisi bangunan koperasi yang sudah lama di tinggalkan dan tidak ada pengurus yang dapat ditemui dikarenakan sudah lama tidak beroperasi.

3.1.6.2. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Lampung sampai dengan 31 Desember 2023 telah mencapai Rp8,303 triliun kepada 171,667 debitur atau 99,996 persen dari alokasi kuota KUR di Provinsi Lampung Tahun 2023 yang di revisi dari awal tahun menjadi Rp8,304 triliun per Oktober. Penurunan nilai penyaluran KUR sebesar -26,32 persen (*yoy*) dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan kebijakan terbaru KUR Tahun 2023 mulai berlaku secara efektif sejak Bulan Februari dan perbankan selaku penyalur KUR juga memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian SOP, sehingga tidak terdapat penyaluran KUR pada Bulan Januari 2023. Tren penyaluran KUR selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.13.

Grafik 3.33 Tren Penyaluran KUR di Provinsi Lampung Tahun 2021-2023

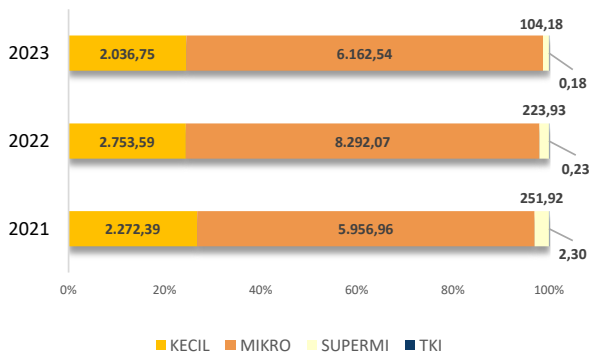


Sumber : SIKP

Berdasarkan skema penyaluran KUR, skema Mikro merupakan skema yang paling banyak diminati oleh para debitur dan porsi terhadap total penyaluran terus meningkat selama tiga tahun terakhir. Sementara skema TKI masih menjadi skema dengan penyaluran paling kecil, dan secara nasional kuota untuk skema TKI secara nasional juga masih minim. Selain itu terkait skema TKI juga terdapat isu antara lain terkait kolektibilitas atau pembayaran kembali pinjaman debitur yang berada di Luar Negeri dan secara nasional hanya beberapa perbankan tertentu yang memiliki kuota KUR untuk skema TKI.

Pada tahun 2023, sebaran penyaluran KUR berdasarkan skema yakni: Skema Kecil sebesar Rp2,03 triliun kepada 9.012 debitur, Skema Mikro sebesar Rp 6,16 triliun kepada 152.569 debitur, dan Skema TKI Rp180 juta kepada 7 debitur. Tren porsi penyaluran KUR berdasarkan skema ditunjukkan pada Grafik berikut.

Grafik 3.34 Penyaluran KUR Provinsi Lampung Berdasarkan Skema Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)

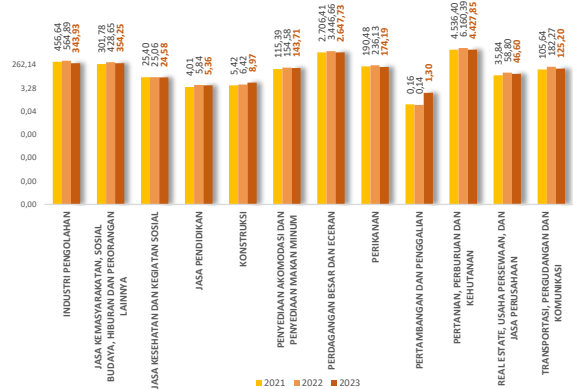


Sumber : SIKP

Dari perspektif sektor, penyaluran KUR terbesar di Lampung terdapat pada Sektor Pertanian dan Perdagangan. Kedua sektor tersebut memiliki porsi hingga 85,21 persen dari total penyaluran KUR dengan jumlah 153.667 debitur dari kedua sektor tersebut. Hal ini seiring dengan kontribusi dominan Sektor Pertanian dan Perdagangan dalam perekonomian Lampung dan merupakan sektor unggulan. Penyaluran KUR terkonsentrasi di Kabupaten Lampung Tengah yang mencapai Rp 1,54 triliun kepada sebanyak 34.355 debitur dan

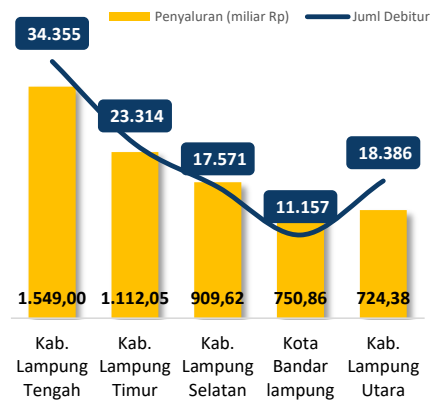
penyaluran paling rendah pada Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp45,94 miliar kepada sebanyak 1.066 debitur. Penyaluran KUR di Provinsi Lampung Sebagian besar disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar 70 persen dari total penyaluran, diikuti oleh Bank Mandiri dan BPD Lampung secara berturut-turut 9,8 dan 9,7 persen dari total penyaluran.

Grafik 3.35 Penyaluran KUR Provinsi Lampung Berdasarkan Sektor (miliar rupiah)



Sumber : SIKP

Grafik 3.36 Lima Daerah Penyaluran KUR Terbesar di Lampung Tahun 2023



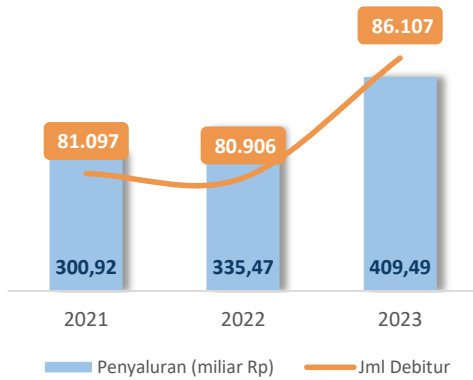
Sumber : SIKP

3.1.6.3. Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Pembiayaan UMi ditargetkan untuk para pelaku UMKM yang masih berskala sangat kecil termasuk di antaranya pedagang kaki lima. Realisasi penyaluran pembiayaan UMi di Lampung tahun 2023 mencapai Rp409,49 miliar kepada 86.107 debitur yang sebagian besar disalurkan melalui PT Penanaman Nasional Madani secara *linkage*. Tren penyaluran

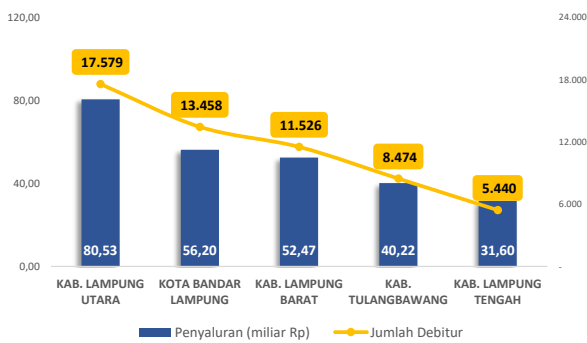
UMi di Lampung selama tiga tahun terakhir meningkat sebagaimana Grafik 3.37.

Grafik 3.37 Penyaluran UMi di Provinsi Lampung Tahun 2021-2023



Sumber : SIKP

Grafik 3.38. Lima Daerah Penyaluran UMi Terbesar di Lampung s.d. September 2023



Sumber : SIKP

Apabila dilihat penyaluran per daerah sebagaimana grafik 2.17, penyaluran UMi di Lampung terkonsentrasi di Kabupaten Lampung Utara mencapai Rp80,53 miliar kepada 17.579 debitur dan terendah Kota Metro sebesar Rp100 juta kepada 6 debitur. Peningkatan penyaluran UMi pada Tahun 2023 sebesar 22,06 persen (yoy) menunjukkan bahwa masyarakat pelaku usaha yang memanfaatkan program pemerintah ini terus meningkat setiap tahunnya. Pembiayaan KUR maupun UMi bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dengan memberikan akses yang lebih mudah ke pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, super mikro, kecil, dan ultra mikro. Diharapkan mekanisme pembiayaan ini dapat membantu banyak UMKM, menciptakan lapangan usaha dan mengurangi tingkat kemiskinan di tingkat daerah. Sosialisasi kepada UMKM juga terus

diupayakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung berkolaborasi lembaga penyalur maupun OJK sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan adanya program pembiayaan UMi.

3.1.7. Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah

3.1.7.1. Capaian Output Strategis APBN

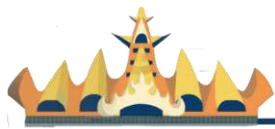
Belanja Negara untuk Bidang Kesehatan dialokasikan dalam rangka menjamin terselenggaranya layanan kesehatan yang berkualitas untuk menciptakan masyarakat yang sehat secara merata dan berkeadilan. Akses layanan dasar Kesehatan yang merata terus dioptimalkan melalui peningkatan sarana prasarana dan tata Kelola unit pelayanan baik rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Berikut merupakan rincian Belanja Negara di Bidang Kesehatan Tahun 2023 disajikan sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 3.7 Capaian Output Strategis Bidang Kesehatan

Uraian	Pagu	Realisasi	% Real	Volume Capaian Output
Sarana Pendidikan di Poltekkes Kemenkes (SDM)	12,21	12,20	99,88	1.022 Paket
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Mendukung Germas	1,10	0,75	67,77	3 Kelompok/ Masyarakat
Dukungan peningkatan Mutu, Akreditasi, Keselamatan pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,93	0,75	80,10	1 Provinsi
Pelayanan kesehatan haji (HS)	0,76	0,70	91,46	7.200 Orang
Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	0,71	0,71	99,03	150 Orang
Pembinaan Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi Posyandu (LP)	0,35	0,34	97,99	15 Kabupaten/ Kota

Sumber: OM-SPAN

Selanjutnya, realisasi Belanja pada Bidang Pendidikan telah terlaksana pada beberapa kegiatan serta program-program nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga maupun dukungan kepada pemerintah daerah melalui dana Transfer ke Daerah. Realisasi belanja pada Bidang Pendidikan telah menghasilkan beberapa output strategis di antaranya sebagaimana pada Tabel 3.8.



Tabel 3.8 Capaian Output Strategis Bidang Pendidikan

Uraian	Pagu	Realisasi	% Real	Volume Capaian Output
Penerima BOS	57,99	57,85	99,76	62.009 Orang
Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Menengah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi Keagamaan	36,75	36,74	99,98	42,00 Unit
Penjaminan mutu satuan Dikdasmen	13,31	13,26	99,59	6.764 Lembaga
Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru dan Dosen Non PNS	9,90	9,74	98,42	269 Orang
Penerima KIP	34,64	34,64	100,00	3.149 Orang
Penerima Bidikmisi	3,50	3,50	100,00	531 Orang
Penerima PIP	0,06	0,06	100,00	135 Orang
Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)	64,44	57,53	89,27	58 Unit
Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN)	44,79	43,17	96,37	2 Unit

Sumber: OM-SPAN

Percepatan dan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia masih menjadi fokus utama pemerintah. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Lampung terus didorong di antaranya untuk membangun konektivitas wilayah, mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan jaringan irigasi untuk mendukung sektor pertanian dalam menghadapi perubahan iklim, serta mendorong sektor perumahan. Belanja negara di Bidang Infrastruktur dimanfaatkan untuk beberapa output strategis sebagaimana Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Capaian Output Strategis Bidang Infrastruktur

Uraian	Pagu	Realisasi	% Real	Volume Capaian Output
Dukungan Penanganan Jalan Daerah	794,47	767,26	96,57	42.697 km
Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) yang dilaksanakan	186,62	119,86	64,23	20,80 km
Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	154,33	154,09	99,84	1.500 km
Pengamanan Pantai Kalianda yang dibangun	141,29	107,03	75,76	409 km
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	92,57	92,42	99,84	4.344 Unit
Penggantian Jembatan	84,81	84,81	100,00	2.476 m
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	74,04	74,04	99,99	113.629 km
Jalan Strategis (ProPN)	72,10	72,10	100,00	1.337 km
Irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	72,09	71,49	99,17	2.455 km
Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	64,62	64,62	100,00	1.012 km

3.1.7.2. Reviu Pelaksanaan Anggaran

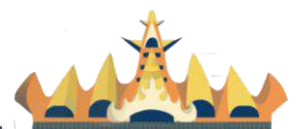
Reviu pelaksanaan anggaran merupakan upaya dalam rangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan APBN di regional dan mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi untuk memberikan solusi kepada Satker atas kendala tersebut. Berikut ini merupakan kendala yang ditemui terkait

pelaksanaan anggaran yang diklasifikasikan berdasarkan klaster permasalahan, diantaranya:

3.1.7.2.1. Permasalahan Terkait Data Capaian Output

Capaian output adalah indikator kinerja yang terdapat pada Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian output pada Satker. Hingga akhir Semester II 2023, nilai capaian output Satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung adalah 98,92. Namun, nilai capaian output di Tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 99,26. Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi oleh Satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung terkait capaian output antara lain:

1. Adanya rincian output yang tidak mencapai target karena pencapaian targetnya bergantung pada pihak lain atau pihak pengguna jasa seperti pada Kementerian ATR/BPN;
2. Masih terdapat satker yang tidak mencapai target output dikarenakan jumlah murid yang diterima pada tahun ajaran baru tidak sesuai dengan yang ditargetkan pada awal pengalokasian anggaran di tahun sebelumnya seperti pada satker MAN 1 Tulang Bawang dan MTsN Tulang Bawang Barat;
3. Target RO tidak sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan, yang menjadi kendala dalam menentukan progres capaian sesuai periode berkenaan;
4. Masih terdapat satker yang belum disiplin dalam melakukan input target dan capaian output sesuai dengan batas waktu;
5. Masih terdapat satker yang mengisi target dan capaian output hanya sekedar untuk "formalitas" dan belum memahami proses dan urgensi pengisian capaian output, sehingga proses pengisian target dan capaian, serta polarisasi output dilakukan hanya dengan justifikasi personal satker, menyebabkan akurasi data tidak valid.





3.1.7.2.2. Permasalahan Terkait Belanja Kontraktual

Sampai dengan akhir tahun 2023, Belanja Modal merupakan jenis belanja dengan Tingkat penyerapan yang paling rendah di antara jenis belanja lainnya. Hal ini disebabkan karena karakteristik Belanja Modal yang berbeda, diantaranya pelaksanaan Kontraktual. Beberapa permasalahan yang ditemukan terkait Belanja Kontraktual antara lain:

1. Nilai IKPA belanja kontraktual untuk komponen ketepatan waktu masih belum optimal karena masih adanya kontrak Belanja Modal yang terlambat didaftarkan. Keterlambatan tersebut disebabkan antara lain kelalaian satker dalam kedisiplinan penyampaian ADK kontrak ke KPPN secara tepat waktu; kendala pada aplikasi maupun dokumen yang belum terpenuhi; terdapat pejabat pengadaan yang sedang berhalangan sampai batas maksimal hari pendaftaran ADK kontrak ke KPPN;
2. Terdapat penambahan pagu Belanja Modal yang melewati Triwulan I, sehingga ketika belanja dilakukan dengan sistem kontrak yang membutuhkan waktu dan proses pengadaan lebih panjang, kontrak baru dimulai pada Triwulan II, dan akan mempengaruhi komponen akselerasi belanja modal;
3. Kontrak praDIPA masih belum optimal dilakukan satker akibat ketidakpastian akan blokir anggaran;
4. Adanya permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa seperti adanya proses PBJ terpusat yang membutuhkan waktu lama, kontrol satker terhadap proses PBJ terpusat tersebut rendah, serta kelengkapan prasyarat administratif, sehingga proses PBJ terlambat dari waktu yang ditargetkan;
5. Terdapat paket pekerjaan yang putus kontrak sehingga satker harus melaksanakan pengadaan ulang yang menyebabkan penyelesaian pembayaran menjadi tertunda.

3.1.7.2.3. Permasalahan Terkait Transfer ke Daerah

Penyaluran TKD melalui KPPN yang dimulai secara penuh pada Tahun 2023 menunjukkan kinerja penyaluran TKD yang efektif dan optimal. Hal ini ditunjukkan oleh persentase penyaluran TKD yang lebih tinggi di tahun sebelumnya. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemda terkait penyaluran TKD, di antaranya:

1. Kebijakan baru terkait DAU yang baru terkait pembagian *Block Grant* dan *Specific Grant* membuat kesulitan beberapa Pemda dalam melakukan manajemen kas;
2. Terbatasnya SDM di Puskesmas yang kompeten dalam pengelolaan dana (BOK Puskesmas). Untuk itu, diperlukan adanya penyederhanaan administrasi proses penyaluran TKD tetapi tetap memenuhi aspek akuntabilitas pengelolaan dana.
3. Kendala dalam penyaluran Dana Desa erat kaitannya dengan kurangnya komunikasi antara Pendamping Desa dengan pihak Pemda.

3.1.7.2.4. Permasalahan dan tantangan dalam Upaya Akselerasi Belanja APBN di Daerah

1. Masih terdapat satker yang mengajukan Dispensasi SPM atas keterlambatan penyampaian SPM yang melewati batas waktu penyampaian SPM, sebagai akibat satker tidak tertib dan disiplin atas batas-batas waktu pada akhir tahun.
2. Adanya pagu minus belanja sampai dengan akhir tahun anggaran yang disebabkan diantaranya oleh satker yang tidak melaksanakan pemutakhiran POK dengan revisi DIPA, alokasi anggaran yang tidak mengakomodasi kebutuhan belanja pegawai satker, dan satker yang tidak mengevaluasi ketersediaan dana secara berkala.
3. Lonjakan jumlah SPM pada akhir tahun yang membutuhkan *extra effort* dalam pemrosesannya di KPPN. Tingginya volume





SPM pada akhir tahun juga menyebabkan peningkatan kesalahan SPM baik dari waktu pengajuan maupun dokumen pendukung SPM.

3.2. PELAKSANAAN APBD

APBD-Perubahan (APBD-P) tahun 2003 menargetkan pendapatan agregat regional Lampung yang naik 4,89 persen menjadi Rp31.702,97 miliar dibanding tahun 2022. Peningkatan target dilakukan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan realisasi pada tahun berjalan sekaligus menjaga momentum pemulihan ekonomi, dengan mengharapkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 21,94 persen (yoy). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diharapkan naik 0,5 persen (yoy) seiring dengan

meningkatnya alokasi TKD pada APBN di Lampung, namun Pendapatan Transfer Antar Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS) tetap ditargetkan turun. Sejalan dengan hal tersebut, alokasi belanja pemerintah daerah regional Lampung secara total juga naik 0,90 persen (yoy) menjadi Rp32.358,72 miliar. Peningkatan pagu dialokasikan pada Belanja Operasi khususnya komponen Belanja Pegawai sebesar 4,41 persen (yoy), Belanja Subsidi 57,48 persen (yoy), dan Belanja Hibah 30,40 persen (yoy). Belanja Transfer juga mendapatkan kenaikan alokasi sebesar 5,59 persen (yoy). Sementara itu, Belanja Modal dialokasikan 13,30 persen lebih rendah dibanding tahun 2022 dan Belanja Tidak Terduga yang juga turun 50,29 persen (yoy).

Tabel 3.10. I-Account Realisasi APBD Konsolidasi Provinsi Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)

I-Account (dalam Miliar Rp)	TA 2021*			TA 2022*			TA 2023**			%Growth (2022-2023)
	PAGU-P	REALISASI	%REAL	PAGU-P	REALISASI	%REAL	PAGU-P	REALISASI	%REAL	
PENDAPATAN DAERAH	30.622,13	28.949,01	94,54%	30.226,14	28.406,35	93,98%	31.702,97	28.044,05	88,46%	-1,28%
PAD	6.345,80	5.552,90	87,51%	6.915,77	6.070,32	87,78%	8.433,08	6.114,60	72,51%	0,73%
Pendapatan Transfer (Pusat)	21.234,80	21.242,36	100,04%	21.325,51	20.835,20	97,70%	21.431,18	20.684,37	96,52%	-0,72%
Transfer Antar daerah	1.719,77	1.108,88	64,48%	1.658,72	1.371,37	82,68%	1.630,79	1.224,45	75,08%	-10,71%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.321,77	1.044,87	79,05%	326,14	129,46	39,70%	207,91	20,64	9,93%	-84,06%
BELANJA DAERAH	32.004,52	28.789,32	89,95%	32.070,38	28.954,69	90,28%	32.358,72	27.471,37	84,90%	-5,12%
Belanja Operasi	22.016,43	20.184,25	91,68%	21.815,87	19.776,07	90,65%	22.600,15	19.344,75	85,60%	-2,18%
Belanja Pegawai	11.286,25	10.729,67	95,07%	11.293,36	10.613,49	93,98%	11.791,05	10.787,19	91,49%	1,64%
Belanja Barang dan Jasa	8.234,99	7.121,17	86,47%	8.982,02	7.823,42	87,10%	8.858,81	7.120,14	80,37%	-8,99%
Belanja Bunga	54,15	50,83	93,87%	54,12	49,40	91,28%	53,52	48,97	91,49%	-0,87%
Belanja Subsidi	1,15	1,00	87,14%	4,41	5,35	121,23%	6,95	5,40	77,71%	0,95%
Belanja Hibah	2.309,72	2.163,55	93,67%	1.409,13	1.242,73	88,19%	1.837,55	1.335,29	72,67%	7,45%
Belanja Bantuan Sosial	130,18	118,03	90,67%	72,84	41,69	57,23%	52,26	47,75	91,37%	14,56%
Belanja Modal	4.892,35	3.812,11	77,92%	5.187,69	4.311,62	83,11%	4.497,65	3.629,45	80,70%	-15,82%
Belanja Modal	4.892,35	3.812,11	77,92%	5.187,69	4.311,62	83,11%	4.497,65	3.629,45	80,70%	-15,82%
Belanja Tidak Terduga	200,09	90,26	45,11%	159,13	63,40	39,84%	79,11	33,29	42,07%	-47,50%
Belanja Tidak Terduga	200,09	90,26	45,11%	159,13	63,40	39,84%	79,11	33,29	42,07%	-47,50%
Belanja Transfer	4.895,64	4.702,71	96,06%	4.907,69	4.803,61	97,88%	5.181,81	4.463,89	86,15%	-7,07%
Belanja Bagi Hasil	1.316,88	1.148,34	87,20%	1.449,98	1.406,88	97,03%	1.747,66	1.246,29	71,31%	-11,41%
Belanja Bantuan Keuangan	3.578,77	3.554,37	99,32%	3.457,71	3.396,73	98,24%	3.434,15	3.217,60	93,69%	-5,27%
SURPLUS/ (DEFISIT)	-1.382,39	159,69	-11,55%	-1.844,24	-548,34	29,73%	-655,75	572,68	-87,33%	-204,44%
PEMBIAYAAN	1.287,39	998,37	77,55%	1.844,24	1.436,35	77,88%	655,75	514,35	78,44%	-64,19%
Penerimaan Pembiayaan	1.739,60	1.406,16	80,83%	2.225,00	1.742,01	78,29%	1.008,92	820,68	81,34%	-52,89%
Pengeluaran Pembiayaan	452,21	407,78	90,17%	380,76	305,66	80,28%	353,17	306,32	86,73%	0,22%
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA	-95,00	1.158,06		0,00	888,01		0,00	1.087,03		22,41%

Sumber: *) LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS Audited (diolah)

**) LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS Preliminary (diolah)

3.2.1. Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah regional Lampung tahun 2023 tercatat sebesar Rp 28.044,05 miliar

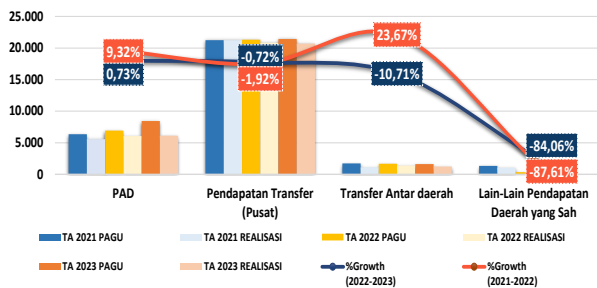
atau 88,46 persen dari target APBD, terkontraksi turun -1,28 persen dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Kontraksi ini disebabkan oleh turunnya





penerimaan pendapatan di hampir seluruh komponen pendapatan yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah seta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu tumbuh sedikit sebesar 0,73 persen (*yoy*). Perbandingan pagu dan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2021-2023 dan pertumbuhannya dapat dilihat pada Grafik 3.39.

Grafik 3.39. Perbandingan Pagu dan Realisasi Pendapatan daerah (miliar rupiah) dan Pertumbuhannya (*yoy*) 2021-2023

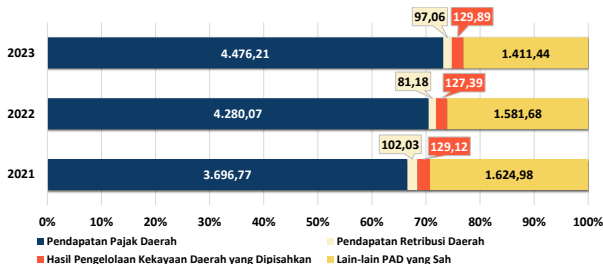


Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)

3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hingga akhir tahun 2023 PAD Lampung tercatat sebesar Rp6.114,60 miliar atau 72,51 persen dari target, tumbuh 0,73 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Pertumbuhan ini seiring dengan peningkatan kinerja realisasi Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sedangkan Lain-lain PAD yang Sah justru terdegradasi hingga -10,76 persen. Perbandingan komposisi PAD secara total pada regional Lampung tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada grafik 3.40

Grafik 3.40. Perbandingan Komposisi PAD Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)

Sebagaimana tergambar dalam grafik, dalam kurun 3 tahun terakhir, kontribusi Pajak Daerah terhadap

PAD maupun total pendapatan terus menunjukkan dominasinya. Sedangkan kontribusi Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berfluktuasi namun menguat pada tahun 2023. Sementara itu, kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terhadap PAD maupun total pendapatan daerah terus mengalami situasi kontraksi hingga tahun 2023.

3.2.1.1.1. Pajak Daerah

Realisasi pendapatan Pajak Daerah regional Lampung dalam kurun 3 tahun terakhir terus mengalami tren peningkatan. Hingga akhir tahun 2023 tumbuh positif mencapai 4,58 persen dan mencatatkan realisasi sebesar Rp4.476,21 miliar atau 94,40 persen dari target APBD-P. Realisasi ini berkontribusi sebesar 73,21 persen terhadap total PAD, meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 70,51 persen dan 2021 yang sebesar 66,57 persen.

Hampir seluruh komponen pendapatan Pajak Daerah mengalami pertumbuhan kecuali Pajak Sarang Burung Walet (-10,27 persen, *yoy*), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (-4,91 persen, *yoy*), Pajak Rokok (-4,48 persen, *yoy*), serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (-1,52 persen, *yoy*).

Meski Pajak Rokok dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan, namun bersama dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor masih menjadi tumpuan utama pendapatan Pajak Daerah di regional Lampung yang menduduki peringkat 4 jenis pajak terbesar di regional Lampung. Peningkatan PAD dari sektor PKB merupakan salah satu dampak positif atas diberlakukannya program relaksasi pajak kendaraan bermotor sesuai Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 tahun 2023 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023 yang diberlakukan mulai 1 April 2023 sampai dengan 30 September 2023. Relaksasi ini dilakukan agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak, sebelum pemberlakuan kebijakan penghapusan data registrasi dan identifikasi (*regident*) kendaraan bermotor yang juga akan diberlakukan pada tahun



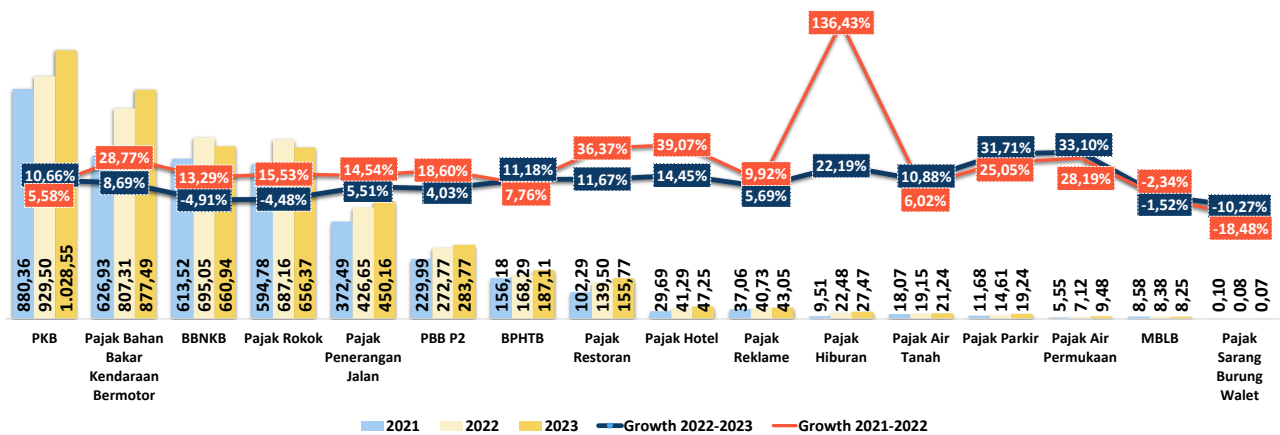


ini (UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)). Selain itu, kondisi ini juga didukung dengan adanya peningkatan mutu layanan pembayaran Pajak Daerah, seperti penyediaan *platform* pembayaran digital dan pemanfaatan e-SamDes yang merupakan inovasi layanan Pemerintah Provinsi Lampung berupa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Realisasi PKB tahun 2023 bahkan merupakan yang tertinggi dalam kurun 3 tahun terakhir.

Sementara itu, pertumbuhan tertinggi pendapatan atas Pajak Daerah mayoritas dicapai oleh pajak yang

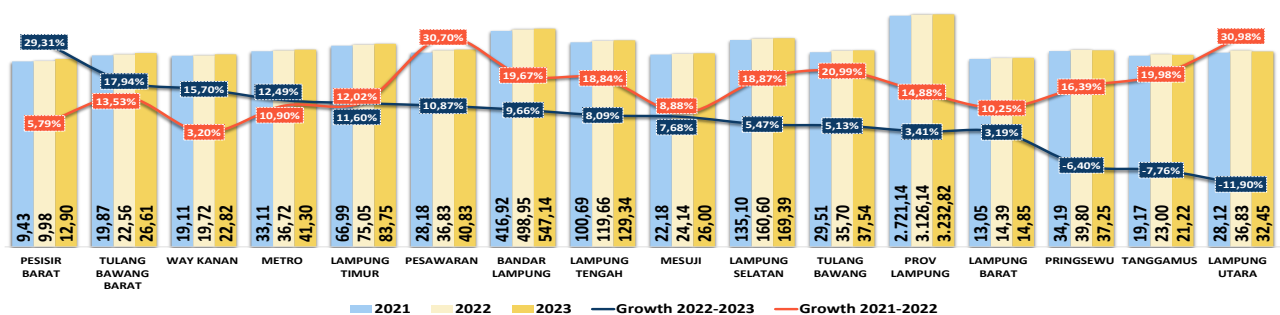
bersifat konsumsi yaitu Pajak Air Permukaan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran. Pertumbuhan pajak-pajak konsumtif tersebut dapat menandakan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat di Lampung. Hal ini juga turut mengindikasikan meningkatnya *compliance* dalam pembayaran pajak dimana pemerintah daerah telah mengadopsi pendekatan pajak yang lebih efektif dalam mengumpulkan pajak-pajak, seperti penggunaan teknologi/digitalisasi untuk memantau dan mengelola pembayaran pajak. Perbandingan realisasi per jenis Pajak Daerah dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 3.41

Grafik 3.41. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah per Jenis di Lampung 2021-2023 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)

Grafik 3.42. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah per Pemda di Lampung 2021-2023 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, dan SIKRI (diolah)

Secara spasial, Pemerintah Daerah dengan nominal realisasi pendapatan Pajak Daerah terbesar adalah Pemerintah Provinsi Lampung yang mencapai Rp3.232,82 miliar atau 97,70 persen dari target.

Sementara itu, Kota Bandar Lampung tercatat menjadi penyumbang Pajak Daerah tertinggi pada tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan tingkat ketercapaian target tertinggi dicatatkan oleh





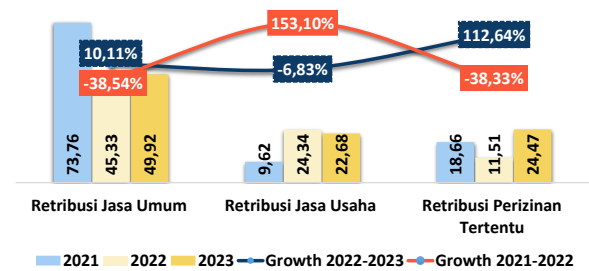
Kabupaten Way Kanan dengan capaian yang melebihi target sebesar 104,89 persen. Lebih lanjut, pertumbuhan realisasi Pajak Daerah tertinggi dicapai oleh Kab. Pesisir Barat dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 29,31 persen. Realisasi Pajak Daerah pada masing-masing Pemda di regional Lampung dan pertumbuhannya dapat dilihat pada grafik 3.42

3.2.1.1.2. Retribusi Daerah

Perkembangan realisasi Retribusi Daerah dalam kurun 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2022, hingga akhir tahun 2023, realisasi pendapatan Retribusi Daerah regional Lampung secara total mencapai Rp97,06 miliar, tumbuh 19,56 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Namun demikian capaian ini masih jauh dari target yaitu hanya sebesar 54,48 persen. Kontribusi terhadap pendapatan Retribusi Daerah terutama disumbang oleh Retribusi Jasa Umum sebesar Rp49,92 miliar atau 51,43 persen dari total penerimaan Retribusi Daerah, sedangkan Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu masing-masing sebesar 23,37 persen dan 25,21 persen. Lebih detail, kontribusi terbesar berasal dari Pelayanan Persampahan/Kebersihan 27,68 persen, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 23,23 persen, dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 22,34 persen. Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

juga mencatatkan pertumbuhan tertinggi mencapai 141,79 persen (yoy), sedangkan kinerja realisasi Retribusi Izin Trayek dan Pelayanan Kesehatan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam masing-masing sebesar -95,20 persen dan -75,83 persen (yoy). Perbandingan realisasi per jenis Retribusi Daerah dalam kurun 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 3.43

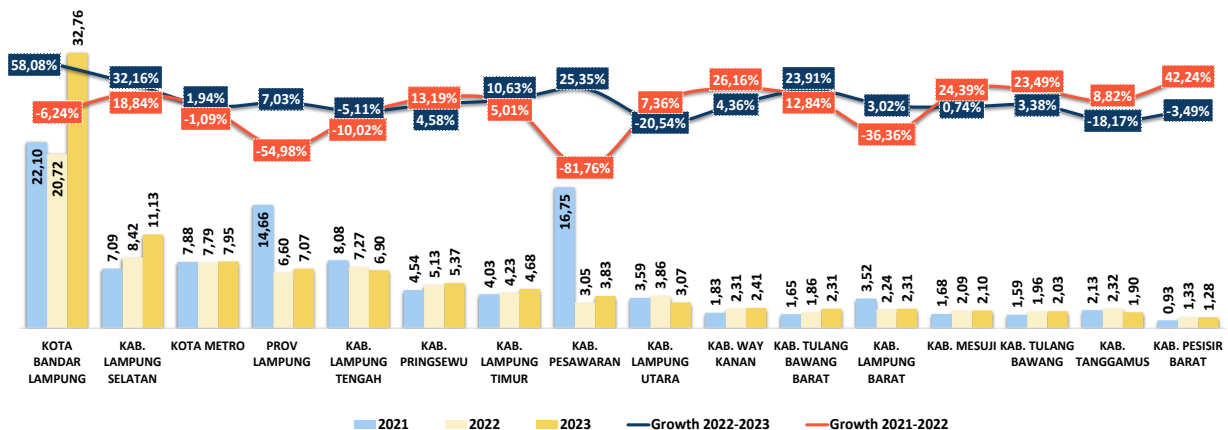
Grifik 3.43. Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah per Jenis di Lampung 2021-2023 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)

Sementara itu, Pemerintah Daerah dengan realisasi penerimaan retribusi Daerah terbesar adalah Kota Bandar Lampung yaitu sebesar Rp32,76 miliar atau berkontribusi sebesar 33,75 persen dari total realisasi Retribusi Daerah di regional Lampung. Sedangkan Kabupaten Way Kanan mencatatkan persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah terbesar dibanding target yaitu sebesar 105,72 persen. Realisasi Retribusi Daerah pada masing-masing Pemda di regional Lampung dapat dilihat pada grafik 3.44

Grifik 3.44. Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah per Pemda di Lampung 2021-2023 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung dan GFS (diolah)



3.2.1.1.3. Rasio Pajak Daerah (*Local Tax Ratio*)

Rasio pajak daerah merupakan rasio antara pajak daerah (total pajak daerah dan retribusi daerah/PDRD) dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). *Local Tax Ratio* digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi perpajakan dalam perekonomian di daerah. Berikut adalah perbandingan *Local Tax Ratio* Regional Lampung tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang disajikan dalam Tabel 3.11

Tabel 3.11. Perbandingan *Local Tax Ratio* Lampung Tahun 2021-2023

Komponen (miliar Rupiah)	2021	2022	2023
Pendapatan Pajak Daerah	3.696,77	4.280,07	4.476,21
Pendapatan Retribusi Daerah	102,03	81,18	97,06
Total Pajak dan Retribusi Daerah (PDRC)	3.798,81	4.361,25	4.573,28
PDRB Tahunan (ADHB)	371.198,88	414.131,42	448.880,25
Local Tax Ratio	1,02%	1,05%	1,02%

Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, BPS (diolah)

Rasio pajak daerah di Regional Lampung dalam periode 3 tahun terakhir masih jauh dari ideal (kurang dari 3 persen). Pada tahun 2023, rasio pajak daerah terhadap perekonomian regional Lampung kembali termoderasi dibanding periode sama tahun 2022. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kinerja PDRD yang tumbuh positif mencapai 4,86 persen (yoy) dan peningkatan PDRB sebesar 8,39 persen (yoy). Hal ini menandakan bahwa kontribusi PDRD terhadap peningkatan PDRB masih rendah. Lebih lanjut, rendahnya *local tax ratio* mengindikasikan bahwa masih banyak potensi PDRD khususnya Retribusi Daerah yang belum dioptimalkan sehingga realisasinya masih jauh dari target. Untuk itu perlu dilakukan upaya optimalisasi penerimaan yang salah satunya melalui pengawasan terhadap pelaporan serta pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, untuk menghindari potensi penerimaan yang tidak terpungut sehingga menjadi penghambat akselerasi rasio pajak daerah.

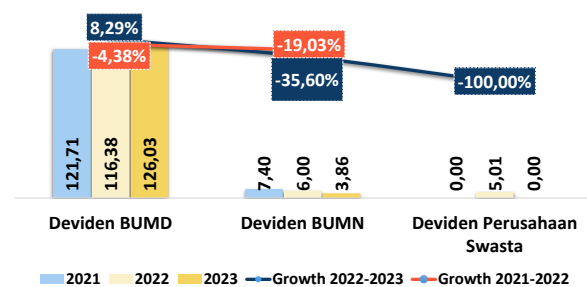
Selain itu, dilihat dari sisi distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha, terdapat ketidakseimbangan porsi dan kontribusi lapangan usaha dengan penerimaan pajak. Sektor pertanian berperan besar dalam menggerakkan ekonomi Lampung yaitu sebesar 23,29 persen, namun sumbangsih sektor pertanian pada penerimaan pajak dan retribusi daerah amat

terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan industrialisasi berbasis hilirisasi sektor pertanian. Kontribusi industri pengolahan pada PDRB Lampung menempati urutan kedua terbesar setelah pertanian yaitu sebesar 18,01 persen.

3.2.1.1.4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan seluruh Pemerintah Daerah di regional Lampung tahun 2023 tumbuh 1,96 persen (yoy) atau terealisasi sebesar Rp129,89 miliar. Meski mengalami pertumbuhan namun realisasi ini juga masih jauh dari target APBD-P 2023 yaitu hanya mencapai 20,79 persen.

Grifik 3.45. Perkembangan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)

Pertumbuhan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan utamanya ditopang oleh Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang menguat 8,29 persen (yoy) dan secara proporsi juga mendominasi dengan kontribusi sebesar 97,03 persen. Sementara itu, deviden atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN terkoreksi turun hingga -35,60 persen. Hal ini dikarenakan adanya penurunan target akibat tahun ini hanya Kab. Pringsewu yang memiliki target atas pos tersebut. Namun demikian, pendapatan deviden atas penyertaan modal pada BUMN telah terealisasi 100 persen mencapai target dengan mencatatkan realisasi sebesar Rp3,86 miliar. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

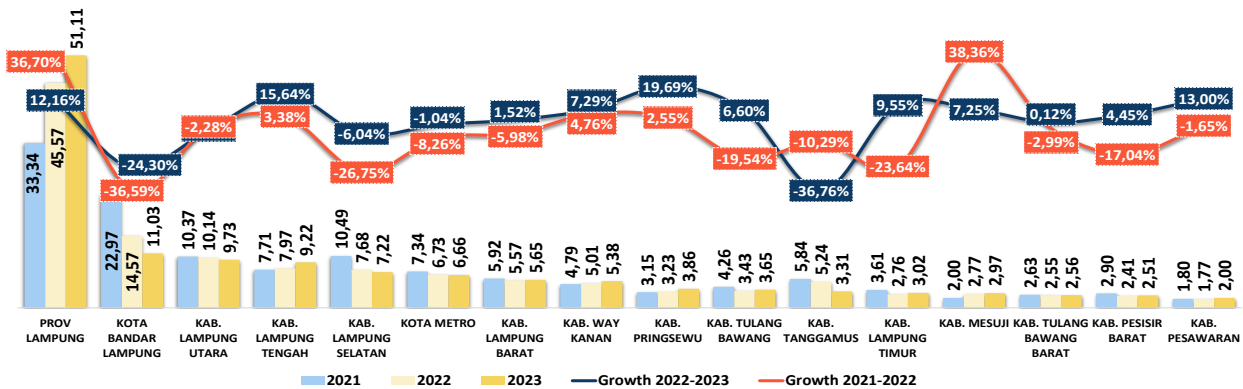


Daerah yang dipisahkan dalam 3 tahun terakhir di regional Lampung dapat dilihat pada grafik 3.45.

Lebih lanjut, Pemerintah Daerah dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terbesar secara nominal dicapai oleh Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung. Sedangkan Kab. Way Kanan, mencatatkan kinerja pencapaian target tertinggi yang bahkan melebihi target.

Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada 7 kabupaten yaitu Kab. Pringsewu, Kab. Lampung Tengah, Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang, Kab. Lampung Barat, Kab. Tulang Bawang Barat dan Kab. Lampung Selatan terealisasi penuh 100 persen. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada masing-masing Pemda di regional Lampung dapat dilihat pada grafik 3.46.

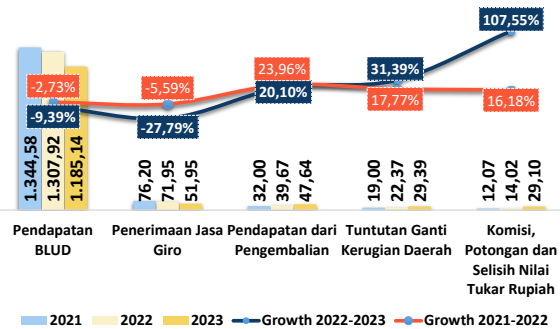
Grafik 3.46. Perkembangan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per Pemda di Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)

3.2.1.1.5. Lain-Lain PAD yang Sah

Grafik 3.47. Perkembangan Realisasi 5 Teratas Jenis LLPADyS Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)

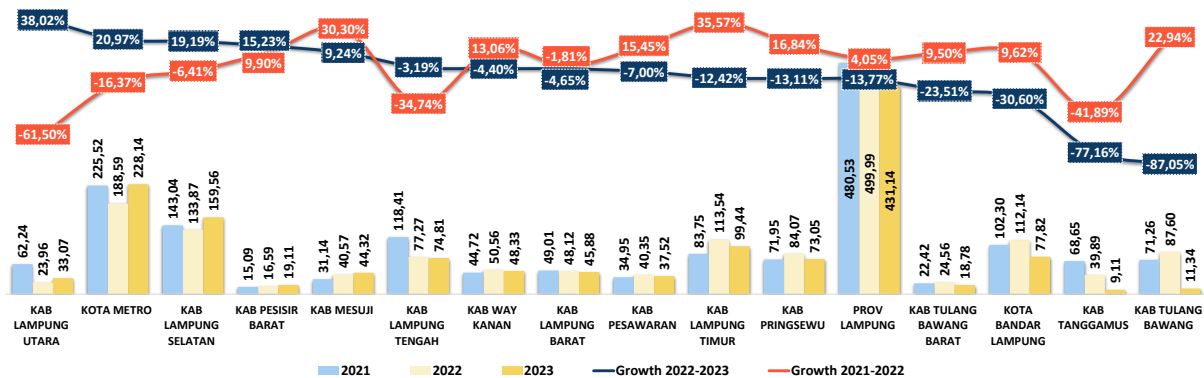
Total realisasi Lain-Lain PAD yang Sah (LLPADyS) di regional Lampung dalam 3 tahun terakhir terus menunjukkan tren menurun meski beberapa jenis LLPADyS juga menunjukkan pertumbuhan. Realisasi penerimaan dari LLPADyS pada tahun 2023

terkontraksi -10,76 persen (yoy). Kondisi ini sekaligus menurunkan kontribusinya terhadap PAD menjadi hanya 23,08 persen. Porsi terbesar (83,97 persen) pada komponen ini didominasi oleh Pendapatan BLUD yang mencapai Rp1.185,14 miliar yang meski realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dan 2021. Grafik 3.47 berikut menggambarkan perkembangan realisasi LLPADyS tahun 2021-2023 pada 5 jenis LLPADyS dengan kontribusi tertinggi di regional Lampung.

Dilihat secara spasial, realisasi Lain-lain PAD yang sah tertinggi secara nominal dicapai Provinsi Lampung dengan realisasi sebesar Rp431,14 miliar, sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota dicapai oleh Kota Metro yang mencatatkan realisasi sebesar Rp228,14 miliar. Realisasi lain-lain PAD yang sah masing-masing Pemda di regional Lampung tahun 2021-2023 sebagaimana grafik 3.48.



Grifik 3.48. Perkembangan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah per Pemda di Lampung 2021-2023 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)

3.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pada total target pendapatan seluruh pemerintah daerah di regional Lampung tahun 2023, porsi terbesar dimiliki oleh pendapatan transfer yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (TKD) dan Transfer Antar Daerah yaitu sebesar 72,74 persen. Dari nilai tersebut, kontribusi Transfer Pemerintah Pusat sendiri mencapai 67,60 persen yang mengindikasikan masih cukup tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Kebijakan TKD sendiri pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal di daerah. Namun demikian, Pemerintah Daerah diharapkan semakin kreatif dalam menciptakan pembiayaan alternatif ataupun mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya. Kondisi ini disebabkan Pemerintah Pusat beberapa tahun terakhir cenderung secara bertahap mengurangi alokasi dana transfer terutama komponen yang menggunakan alokasi perhitungan berdasarkan alokasi dasar dan celah fiskal dengan melakukan redesign seperti halnya kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang mulai tahun 2023 dibagi menjadi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*Block Grant*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*Specific Grant*).

Realisasi Pendapatan Transfer total secara nominal pada 3 tahun terakhir mengalami penurunan terutama pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah berfluktuasi namun juga mengalami

pertumbuhan negatif dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022. Pada tahun 2023, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat di regional Lampung tercatat sebesar Rp20.684,37 miliar atau 97,70 persen dari pagu, turun 0,72 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Total realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat juga masih menjadi kontributor utama yaitu sebesar 73,76 terhadap total Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Angka ketergantungan ini sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 73,35 persen.

Grifik 3.49. Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)

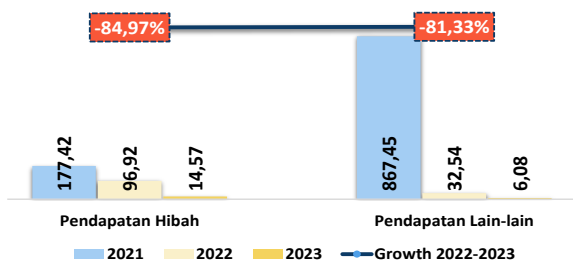
Terdapat perbedaan realisasi antara TKD (APBN) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (APBD) dikarenakan adanya perbedaan penggunaan aplikasi oleh Pemerintah Daerah (SIPD) dan SIKD DJPK yang belum terinterkoneksi sehingga terjadi lag data dalam penyajian informasi keuangan daerah. Pada dasarnya, TKD yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat secara keseluruhan menjadi pendapatan daerah pada komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Realisasi Pendapatan

Transfer Lampung tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik 3.49

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tumbuh negatif dipengaruhi oleh turunnya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) terutama DAK Fisik, serta Dana Desa. Realisasi ketiganya mengalami penurunan secara nominal tidak lepas dari alokasi yang juga menurun dibanding tahun sebelumnya. Lebih lanjut, realisasi DBH turun salah satunya juga akibat rendahnya realisasi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang hanya terealisasi sebesar 70,59%. Sementara itu, realisasi DAU dan Insentif Fiskal justru mengalami pertumbuhan positif meski belum mampu mendorong peningkatan pendapatan transfer secara keseluruhan.

3.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Grafik 3.50. Perkembangan Realisasi LLPDyS Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)

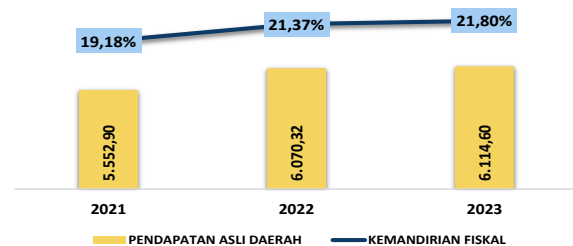
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS) terdiri atas pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam periode 3 tahun terakhir, realisasi LLPDyS Lampung didominasi oleh pendapatan hibah dan pendapatan lainnya yang terus termoderasi. Pada 2023, realisasi LLPDyS tercatat hanya sebesar Rp20,64 miliar, terkoreksi signifikan hingga -84,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Realisasi ini terdiri atas Pendapatan Hibah sebesar Rp14,56 miliar dan Pendapatan lainnya Rp6,08 miliar. Pendapatan Hibah sendiri terdiri atas Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp3,55 miliar, Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp3,88 miliar, dan Hibah dari Kelompok

Masyarakat/Perorangan sebesar Rp7,13 miliar. Perkembangan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021-2023 tergambar dalam grafik 3.50

3.2.1.4. Analisis Tingkat Kemandirian Daerah

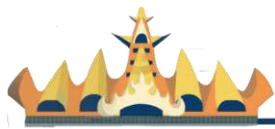
Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio Transfer Pemerintah Pusat (TPP) terhadap total pendapatan. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah. Rasio kemandirian fiskal daerah regional Lampung secara agregat terus meningkat dalam periode 3 tahun terakhir seiring dengan menguatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah. Perkembangan realisasi PAD dibandingkan dengan Rasio kemandirian Fiskal Lampung Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik 3.51

Grafik 3.51. Perkembangan Realisasi PAD dan Rasio Kemandirian Fiskal Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)

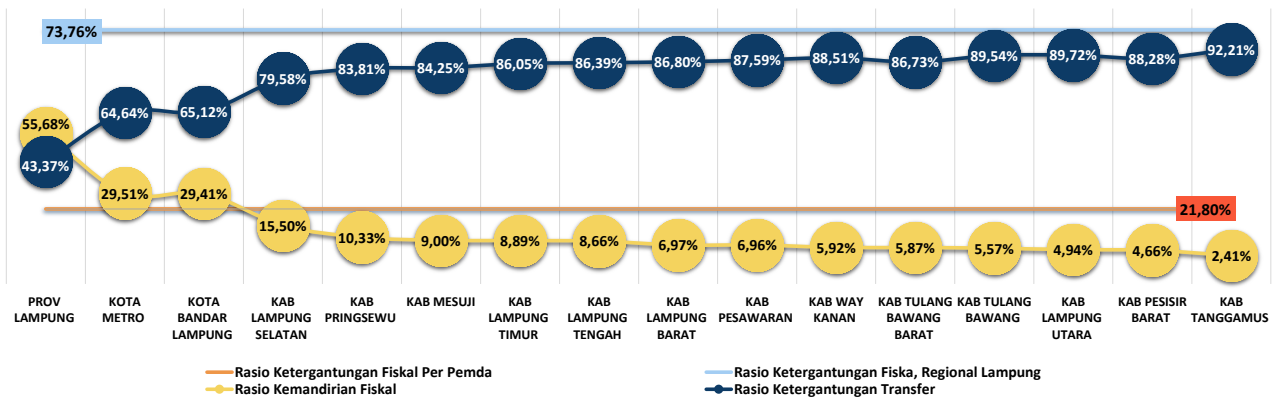


Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)

Lebih lanjut, berdasarkan perbandingan PAD terhadap total Pendapatan Daerah secara spasial, rasio kemandirian tertinggi dicapai Provinsi Lampung yaitu sebesar 55,68 persen, sedangkan kemandirian terendah adalah Kabupaten Tanggamus 2,41 persen. Sementara itu, angka ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat tertinggi pada Kabupaten Tanggamus yaitu sebesar 92,21 persen, sedangkan angka ketergantungan terhadap Transfer Pemerintah Pusat terendah sebesar 43,37 persen yaitu pada Provinsi Lampung. Rasio kemandirian daerah tahun 2023 dan komposisi realisasi pendapatan masing-masing Pemda di Regional Lampung dapat dilihat pada grafik 3.52 dan grafik 3.53.

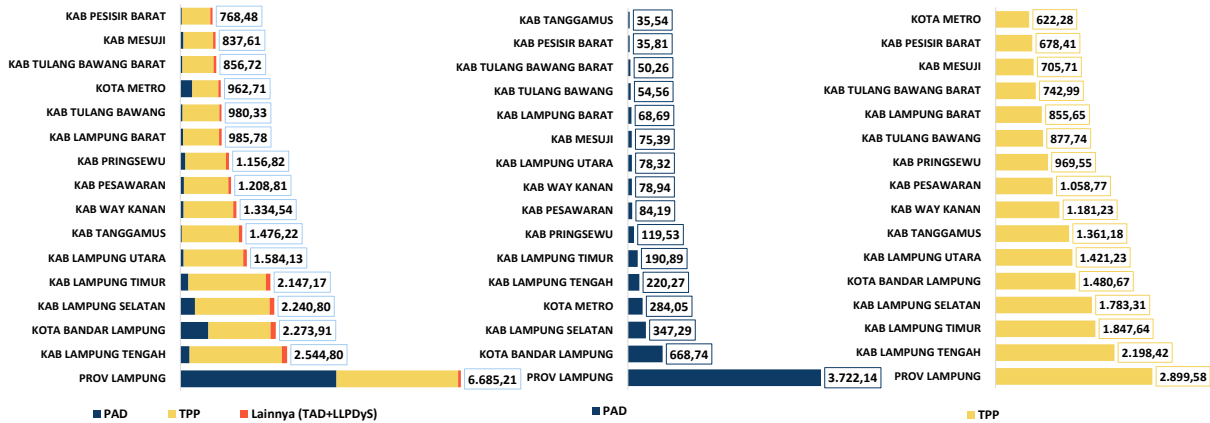


Grafik 3.52. Rasio Kemandirian Fiskal Daerah per Pemda Tahun 2023



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)

Grafik 3.53. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah per Pemda Tahun 2023 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)

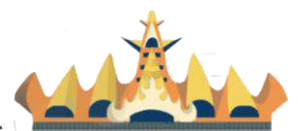
3.2.1.5. Upaya Daerah dalam Peningkatan PAD

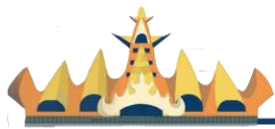
Dalam periode 3 tahun terakhir, kemandirian daerah regional Lampung secara agregat meningkat seiring dengan peningkatan realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD). Sebagai kontributor utama dalam PAD, upaya peningkatan realisasi pajak telah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah daerah di regional Lampung yaitu antara lain:

- Memperluas aksesibilitas dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak khususnya kendaraan bermotor melalui pemanfaatan Teknologi Informasi seperti mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi perpajakan yang telah tersedia antara lain *e-Salam 1* (pembayaran elektronik Samsat Lampung

melalui ATM) dan *e-Salam 2* (pembayaran elektronik Samsat Lampung melalui aplikasi berbasis Android), *e-Samdes* (pembayaran pajak kendaraan bermotor sampai tingkat pedesaan yang pembayarannya dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa/BUMDes), dan *Signal* (Pembayaran dan Pengesahan Pajak Kendaraan Bermotor secara Digital).

- Memberlakukan program relaksasi pajak kendaraan bermotor sesuai Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 tahun 2023 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023 yang diberlakukan mulai 1 April 2023 sampai dengan 30 September 2023 juga turut andil dalam peningkatan perolehan PKB tahun 2023.



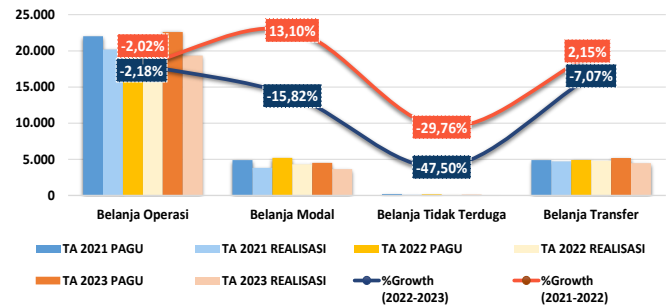


- c. Menambah unit layanan Samsat Keliling untuk menjangkau daerah terpencil yang berada di Provinsi Lampung seperti pemberian bantuan hibah oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu berupa mobil Samsat Keliling untuk UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Wilayah VII Pringsewu.
- d. Meningkatkan Sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan melalui optimalisasi perencanaan dan pengawasan pada tata kelola BUMD sehingga mampu meningkatkan realisasi deviden BUMD hingga 8,29 persen (yoy).

3.2.2. Belanja Daerah

Dalam periode 3 tahun terakhir, Realisasi Belanja Daerah mengalami fluktuasi. Setelah sempat meningkat pada tahun 2022, realisasi Belanja tahun 2023 daerah kembali berkontraksi. Realisasi Belanja Daerah regional Lampung tahun 2023 tercatat sebesar Rp19.344,75 miliar atau sebesar 84,90 persen dari pagu. Realisasi tersebut tumbuh negatif 5,12 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Perbandingan pagu, realisasi, dan pertumbuhan realisasi belanja per jenis belanja 2021-2023 dapat dilihat pada grafik 3.54.

Grafik 3.54. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Daerah (miliar rupiah) dan Pertumbuhannya (yoy) s.d. Triwulan 2021-2023

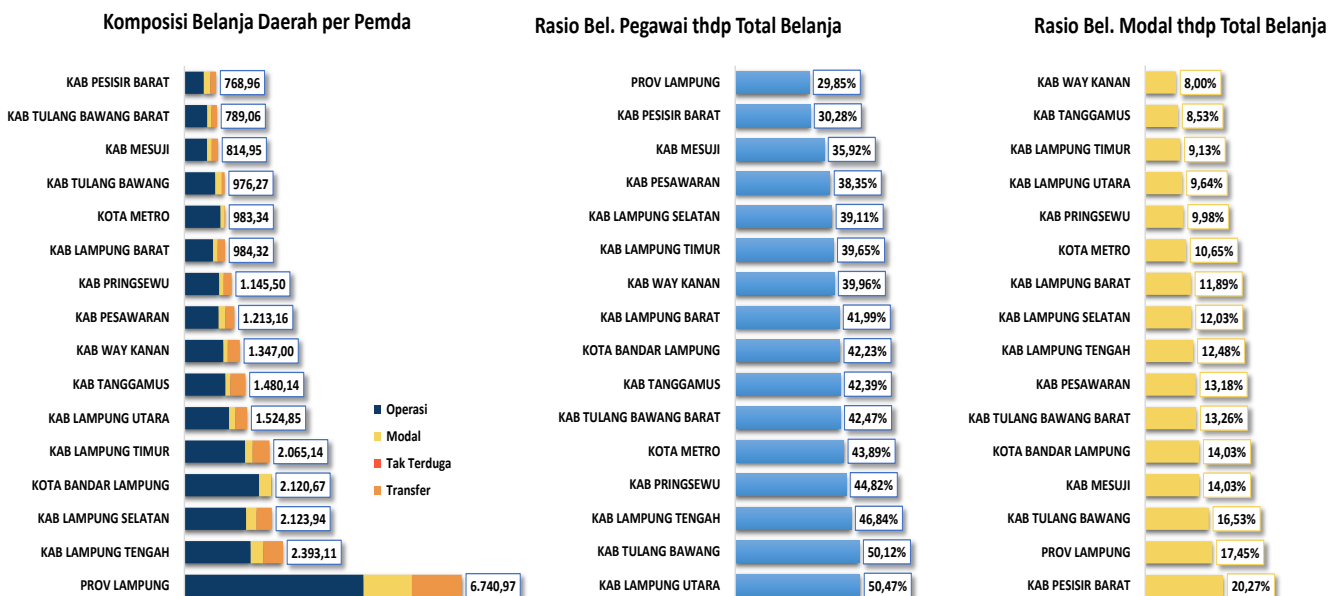


Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, SIKRI, DJPK (diolah)

3.2.2.1. Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja Daerah berdasarkan jenis diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Berdasarkan jenis belanja, agregat realisasi belanja daerah Lampung tahun 2021-2023 didominasi oleh belanja operasi dengan kontribusi terhadap total realisasi belanja pada tahun 2023 adalah sebesar 70,42 persen, meningkat dibanding tahun 2022 yang sebesar 68,30 persen dan tahun 2021 yang sebesar 70,11 persen. Komposisi Belanja Daerah per Pemda menurut jenis belanja dapat dilihat pada grafik 3.55

Grafik 3.55. Komposisi Belanja Daerah per Pemda, Rasio Belanja Pegawai, dan Rasio Belanja Modal Tahun 2023 (miliar rupiah)



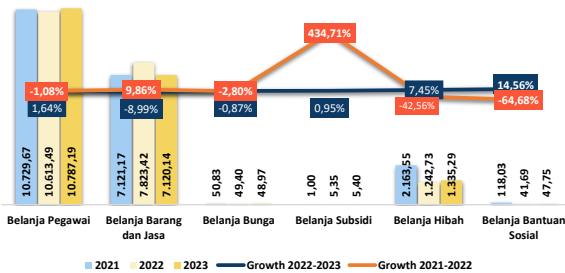
Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)



3.2.2.1.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi dalam periode 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Meski demikian, realisasi Belanja Operasi masih mendominasi komposisi Belanja Daerah Lampung. Pada tahun 2023, realisasi Belanja Operasi sebesar Rp19.344,75 miliar atau 2,18 persen lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2022. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh realisasi Belanja Barang dan Jasa sebagai kontributor utama kedua yang termoderasi hingga -8,99 persen dan hanya mencatatkan realisasi sebesar Rp7.120,14 miliar atau 80,37 persen dari pagu. Belanja Operasi sendiri masih didominasi oleh Belanja Pegawai yang memiliki andil sebesar 55,76 persen atau sebesar Rp10.787,19 miliar, tumbuh 1,64 persen (yoy). Selain Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial juga tumbuh positif dibanding periode yang sama tahun 2022. Belanja Sosial mencatatkan pertumbuhan tertinggi hingga 14,56 persen seiring dengan meningkatnya realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat yang mencapai 15,45 persen. Perbandingan realisasi Belanja Operasi tahun 2021-2023 sebagaimana grafik 3.56

Grafik 3.56. Realisasi Belanja Operasi tahun 2021-2023 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)

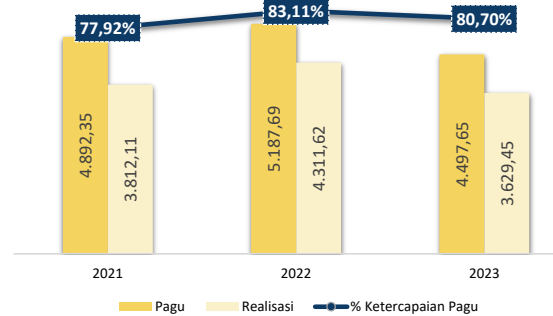
Lebih lanjut, pemda dengan rasio realisasi Belanja Pegawai terhadap total belanja tertinggi dicatatkan Kabupaten Lampung Utara dengan rasio sebesar 50,47 persen. Sedangkan rasio terendah pada Provinsi Lampung yaitu sebesar 29,85 persen. Perbandingan Rasio realisasi Belanja Pegawai

terhadap total belanja di regional Lampung dapat dilihat pada grafik 3.56.

3.2.2.1.2. Belanja Modal

Kinerja Belanja Modal dalam kurun 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Setelah tumbuh positif 13,10 persen di tahun 2022, realisasi Belanja Modal Kembali berkontraksi -15,82 persen (yoy) dengan mencatatkan realisasi sebesar Rp3.629,45 miliar atau 80,70 persen dari pagu belanja modal. Turunnya Realisasi Belanja Modal juga dipengaruhi penurunan alokasi belanjanya.

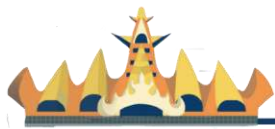
Grafik 3.57. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)



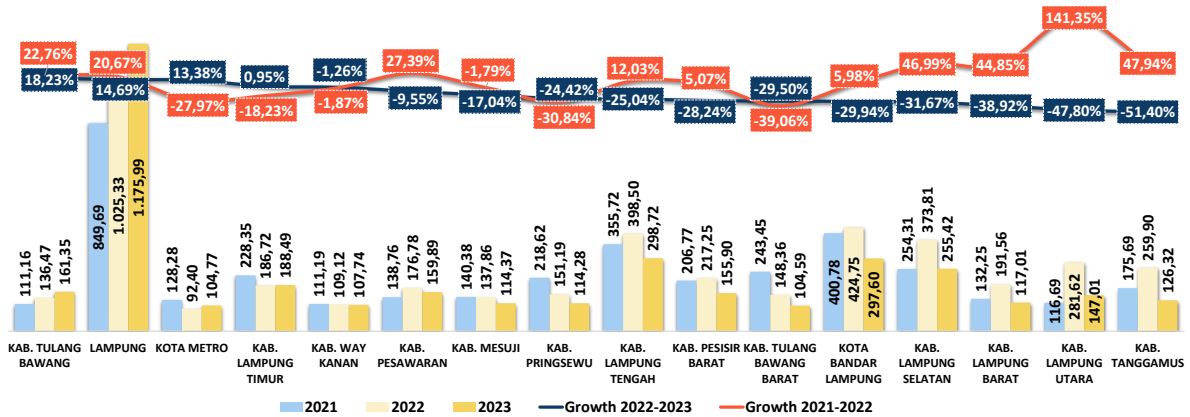
Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)

Belanja Modal terbesar tahun 2023 berupa Belanja Modal Pengadaan Jalan sebesar Rp1.693,71 miliar atau berkontribusi 46,67 persen dari keseluruhan belanja modal. Kemudian diikuti Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp948,92 miliar yang berkontribusi 26,15 persen dari keseluruhan belanja modal. Hal ini seiring dengan upaya perbaikan ekonomi dan kelancaran distribusi atau logistik barang

Meski secara agregat mengalami penurunan, namun secara spasial realisasi Belanja Modal beberapa pemda mengalami pertumbuhan positif yaitu pada Kab. Tulang Bawang (18,23, yoy), Provinsi Lampung (14,69, yoy), Kota Metro (13,38 persen, yoy), serta Kab. Lampung Timur (0,95 persen, yoy). Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung per Pemda Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik 3.58



Grafik 3.58. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Lampung per Pemda Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)

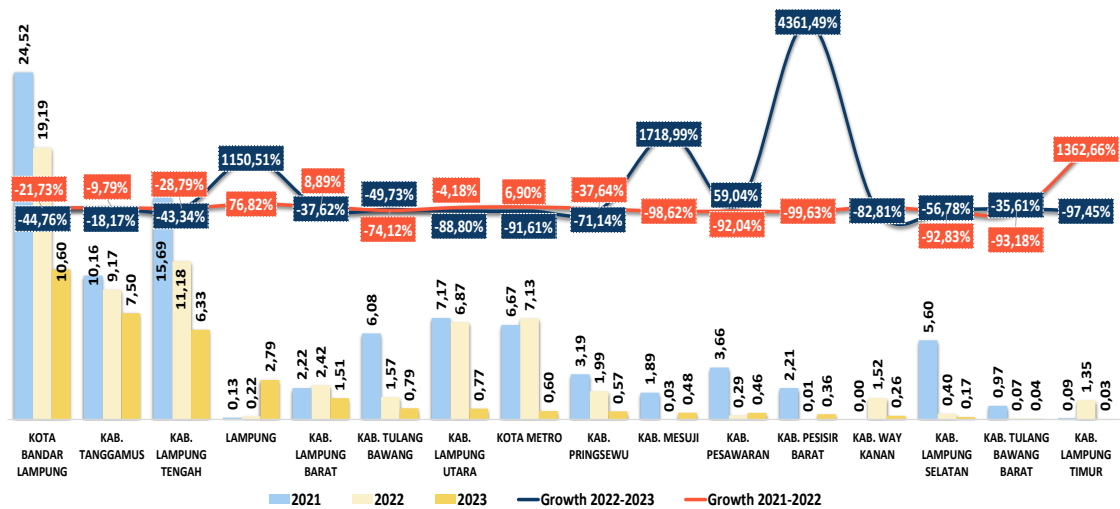
Lebih lanjut, Rasio realisasi Belanja Modal terhadap Belanja tertinggi pada Kabupaten Pesisir Barat, yang mana realisasi belanja modalnya menyumbang 20,27 persen dari keseluruhan Belanja. Sementara itu, rasio terendah pada Kab. Way Kanan dimana Belanja Modal hanya menyumbang 8,00 persen dari keseluruhan realisasi belanjanya. Perbandingan realisasi Belanja Modal sampai dengan 2021-2023 di Regional Lampung dapat dilihat pada grafik 3.58.

tahun 2023, Realisasi Belanja Tidak Terduga pemerintah daerah regional Lampung tercatat turun -47,50 persen (yoy) di angka Rp33,29 miliar atau 42,07 persen dari pagu. Realisasi Belanja Tidak Terduga tertinggi pada Kota Bandar Lampung sebesar Rp10,60 miliar, sedangkan Kabupaten Lampung Timur mencatatkan realisasi Belanja Tidak Terduga terendah sebesar Rp0,03 miliar. Realisasi Belanja Tidak Terduga masing-masing Pemda lingkup regional Lampung 2021-2023 dan pertumbuhannya sebagaimana grafik 3.59.

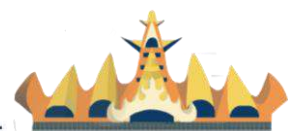
3.2.2.1.3. Belanja Tidak Terduga

Dalam waktu 3 tahun terakhir, Realisasi belanja tidak terduga terus mengalami penurunan. Pada

Grafik 3.59. Realisasi Belanja Tidak Terduga per Pemda 2023 (miliar)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)

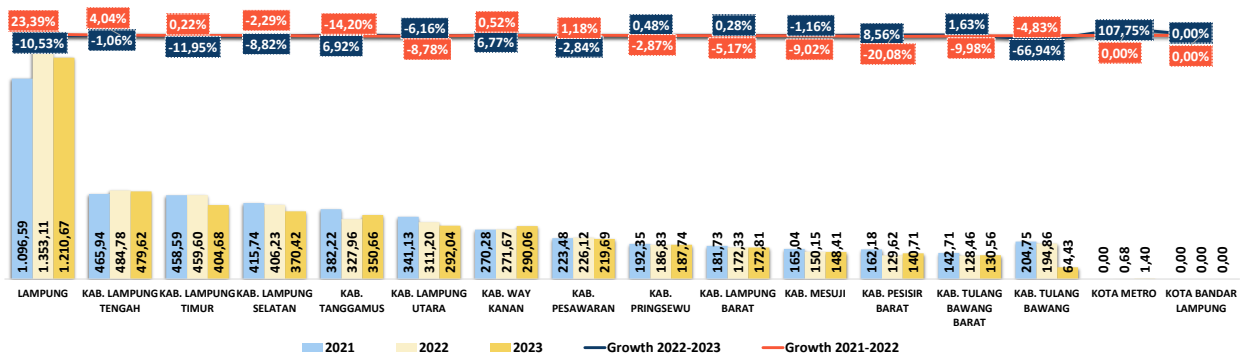


3.2.2.1.4. Belanja Transfer

Secara total, kinerja realisasi Belanja transfer menunjukkan fluktuasi pada periode 3 tahun terakhir. Pada tahun 2023, realisasi Belanja transfer mencatatkan realisasi sebesar Rp4.4863,89 miliar atau 86,15 persen dari pagu, turun 7,07 persen dibandingkan tahun 2022 setelah sempat naik 2,15 persen di tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan dari semua komponen Belanja Transfer, yaitu Transfer Bagi Hasil (-11,41 persen, yoy), dan Transfer bantuan Keuangan (-5,27 persen, yoy). Realisasi Belanja Transfer didominasi oleh Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yang mencapai 71,83 persen dari total realisasi Belanja Transfer

atau sebesar Rp3.206,24 miliar. Meski terkontraksi, seluruh Pemda di regional Lampung telah memenuhi alokasi minimal Alokasi Dana Desa (ADD) 2023 sebesar 10 persen dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten/kota dalam APBD atau perubahan APBD. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 20/KM.7/2023 tentang Pemotongan Penyaluran DAU dan/atau DBH atas Daerah yang Tidak Memenuhi Ketentuan ADD Tahun Anggaran 2023, tidak ada Pemda di regional Lampung yang mendapatkan sanksi dimaksud. Realisasi Belanja Transfer masing-masing Pemda lingkup regional Lampung tahun 2021-2023 sebagaimana grafik 3.60.

Grifik 3.60. Perkembangan Realisasi Belanja Transfer per Pemda Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)

3.2.2.2. Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan fungsi, alokasi belanja seluruh Pemda regional Lampung telah memenuhi konstitusi terkait *mandatory spending*. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah antara lain sebagai berikut:

- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2023 tentang Penundaan

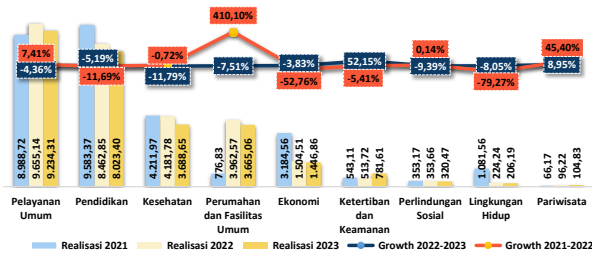
Penyaluran Dana Transfer Umum Bagi Pemerintah Daerah Yang Tidak Memenuhi Pengalokasian Belanja Wajib Tahun Anggaran 2023 tanggal 15 Mei 2023, tidak ada Pemda di regional Lampung yang mendapatkan sanksi penundaan dimaksud.

Realisasi belanja regional Lampung berdasarkan fungsi terdistribusi sebagaimana grafik 3.61. Secara nominal, realisasi belanja tertinggi pada fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp9.234,31 miliar atau tercapai 87,42 persen dari pagu. Kontribusi realisasi fungsi pariwisata menjadi yang terendah, hanya sebesar Rp104,83 miliar atau 0,36 persen dari keseluruhan realisasi belanja. Pertumbuhan realisasi belanja tertinggi dicatatkan oleh fungsi ketertiban dan Keamanan yang mencapai 52,15 persen (yoy), sedangkan pertumbuhan terendah



pada fungsi kesehatan yang bahkan terkontraksi hingga -11,79 persen (yoy).

Grafik 3.61. Perkembangan Realisasi dan Pertumbuhan Belanja per Fungsi Tahun 2021-2023 (miliar)

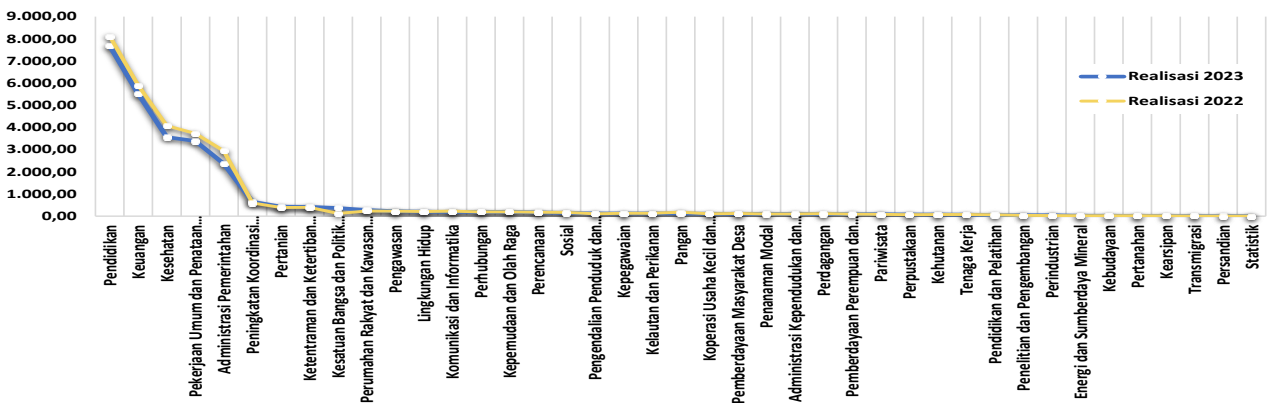


Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, DJPK (diolah)

3.2.2.3. Berdasarkan Urusan

Berdasarkan urusan, Realisasi Belanja regional Lampung tahun 2023 tertinggi dialokasikan untuk

Grafik 3.62. Perbandingan Realisasi Belanja Transfer Berdasarkan Urusan 2022-2023 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)

3.2.2.4. Kontribusi Belanja Terhadap PDRB

Salah satu komponen PDRB Pengeluaran adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P). PK-P Provinsi sendiri mencakup PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi, PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan, PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi, serta PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan. Berikut adalah tabel Kontribusi Daerah terhadap PDRB regional Lampung dalam periode 3 tahun terakhir.

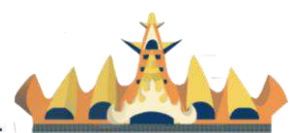
Belanja Urusan Pendidikan yaitu sebesar Rp7.680,42 miliar atau menyumbang 27,96 persen dari keseluruhan belanja, diikuti Urusan Keuangan (20,08 persen) dan Kesehatan (12,98 persen). Sedangkan realisasi belanja urusan pertanian, sebagai sektor unggulan di Lampung menempati urutan ke-7 (tujuh) dengan kontribusi terhadap realisasi hanya sebesar 1,54 persen. Namun realisasi ini meningkat 9,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Hal ini menunjukkan meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap sektor pertanian sebagai sektor unggulan di Provinsi Lampung. Realisasi belanja berdasarkan urusan regional Lampung 2022-2023 dapat dilihat pada grafik 3.62.

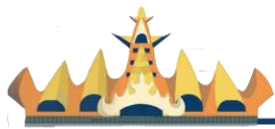
Tabel 3.12. Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB 2021-2023

Komponen	2021	2022	2023
Belanja Daerah (miliar rupiah)	28.789,32	28.954,69	27.471,37
PDRB Tahunan ADHB (miliar rupiah)	371.198,88	414.131,42	448.880,25
Ratio	7,76%	6,99%	6,12%

Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, BPS (diolah)

Pada tahun 2023, PDRB (Pengeluaran ADHB) Provinsi Lampung mencapai Rp448.880,25 miliar dengan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar Rp29.615.331 miliar atau berkontribusi sebesar 6,60 persen dari keseluruhan PDRB, lebih rendah 0,24 persen lebih rendah dibanding distribusi PK-P tahun 2022. Lebih lanjut, pengeluaran Belanja Daerah Lampung pada tahun 2023 sebesar Rp27.471,37 miliar atau sebesar 6,12

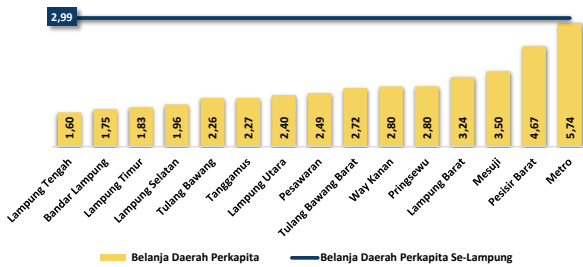




persen dari total PDRB. Bila dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya, kontribusi Belanja daerah terhadap PDRB mengalami penurunan sebesar 0,87 persen.

3.2.2.5. Analisis Belanja per Kapita

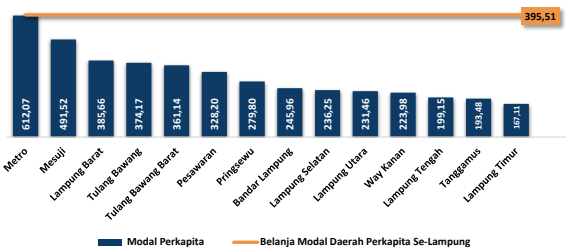
Grafik 3.63. Realisasi Belanja Daerah per Kapita Kabupaten/Kota 2023 (juta rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, BPS (diolah)

Rasio belanja daerah terhadap jumlah penduduk (belanja daerah per kapita) akan menunjukkan seberapa besar belanja yang digunakan untuk menyejahterakan per penduduk di suatu daerah. Semakin besar nilainya, semakin besar belanja yang dikeluarkan untuk menyejahterakan satu orang penduduk wilayah tersebut sehingga semakin besar kemungkinan tercapainya kesejahteraan.

Grafik 3.64. Realisasi Belanja Modal per Kapita Kabupaten/2023 (ribu rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, BPS (diolah)

Berdasarkan realisasi Belanja Daerah tahun 2023 dan jumlah penduduk Lampung 2022 (data BPS), rasio belanja kapita Kabupaten/Kota di regional Lampung tertinggi adalah di Kota Metro dengan belanja per kapita sebesar Rp5.744.855,34 dan terendah adalah Lampung Tengah dengan belanja per kapita sebesar Rp1.595.385,88. Sedangkan belanja per kapita agregat se-Provinsi Lampung sebesar Rp 2.993.650,76. Realisasi Belanja Daerah

per Kapita dan Realisasi Belanja Modal per Kapita Kabupaten/Kota di regional Lampung sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik 3.63 dan grafik 3.64.

Kemudian, rasio belanja modal per kapita akan menunjukkan seberapa besar belanja yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur daerah per penduduk. Rasio belanja modal per kapita memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi karena belanja modal merupakan salah satu jenis belanja pemerintah yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Rasio ini dapat digunakan untuk menunjukkan perhatian pemerintah dalam meningkatkan perekonomian penduduknya dari pembangunan infrastruktur yang dikeluarkan.

Rasio belanja modal per kapita agregat Lampung pada tahun 2023 hanya sebesar Rp 395.513,50. Sedangkan yang memiliki rasio belanja modal per kapita Kabupaten/Kota di regional Lampung tertinggi adalah Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebesar Rp945.929,49 dan terendah adalah Kab. Lampung Utara yang hanya sebesar Rp231.460,28 dimana Belanja Modal yang direalisasikan pada tahun 2023 hanya sebesar Rp147,01miliar sedangkan jumlah penduduk Kab Lampung Utara sebanyak 635.129 jiwa.

3.2.3. Perkembangan Surplus/Defisit APBD

Pada tahun 2023, Realisasi APBD regional Lampung secara agregat mengalami surplus Perkembangan surplus/defisit APBD dapat dilihat menggunakan tiga rasio yaitu surplus terhadap pendapatan, surplus terhadap realisasi dana transfer, surplus terhadap PDRB, dan SiLPA terhadap alokasi belanja. Berdasarkan perhitungan dapat dijelaskan bahwa:

- Rasio surplus APBD terhadap total pendapatan daerah mencerminkan performa fiskal pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan untuk menutup belanja dalam kondisi pendapatan tertentu. Rasio menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan periode yang sama tahun



sebelumnya sehingga memberi gambaran kinerja fiskal yang meningkat karena kemampuan pendapatan untuk membiayai belanja juga meningkat. Namun dengan rendahnya capaian realisasi belanja dibanding tahun sebelumnya juga mengindikasikan belum maksimalnya optimalisasi pendapatan daerah untuk merealisasikan Belanja.

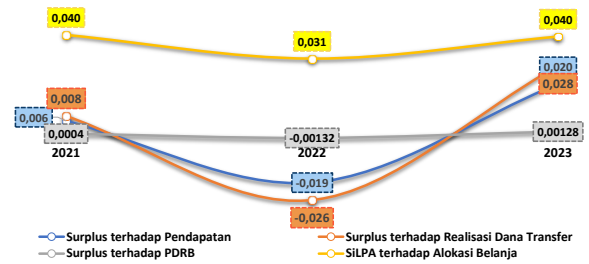
- b. Rasio surplus APBD terhadap dana transfer digunakan untuk mengetahui proporsi surplus terhadap salah satu sumber pendapatan daerah yaitu dana transfer (dana transfer pemerintah pusat). Pada tahun 2023, rasio ini mengalami kenaikan yang mengindikasikan bahwa dana transfer dari Pemerintah Pusat masih belum dimanfaatkan dengan optimal sementara di sisi lain APBN terus mengalami defisit. Oleh karena itu diperlukan adanya penyempurnaan kebijakan penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja.
- c. Rasio surplus APBD terhadap PDRB menggambarkan kesehatan ekonomi regional. Rasio pada tahun 2023 mengalami peningkatan akibat naiknya surplus yang disebabkan turunnya belanja daerah. Kondisi ini menunjukkan belanja pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat lebih rendah dibandingkan PAD untuk meningkatkan kesehatan ekonomi regional.
- d. Rasio SiLPA terhadap alokasi belanja APBD mencerminkan proporsi belanja atau kegiatan yang tidak digunakan dengan efektif oleh pemerintah daerah. Rasio SiLPA pada tahun 2023 terhitung mengalami peningkatan sehingga penggunaan anggaran regional Lampung diasumsikan kurang efektif dibandingkan periode sebelumnya.

Tabel 3.13. Perkembangan Surplus/Defisit APBD Regional Lampung 2021-2023

Tahun	Surplus terhadap Pendapatan	Surplus terhadap Realisasi Dana Transfer	Surplus terhadap PDRB	SiLPA terhadap Alokasi Belanja
2021	0,006	0,008	0,00043	0,040
2022	-0,019	-0,026	-0,00132	0,031
2023	0,020	0,028	0,00128	0,040

Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, DJPK, BPS (diolah)

Grifik 3.65. Perkembangan Surplus/Defisit APBD Regional Lampung Triwulan 2021-2023



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS, DJPK, BPS (diolah)

Selanjutnya, keseimbangan umum pada postur APBD di regional Lampung tahun 2023 sebagaimana tabel 2.15 menunjukkan nilai positif sebesar Rp572,68 miliar. Sementara itu, keseimbangan primer APBD di regional Lampung juga menunjukkan angka positif sebesar Rp621,65 miliar setelah mengeluarkan komponen bunga. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil pemerintah daerah bersifat kontraktif yang mana belanja daerah lebih rendah dibandingkan dengan pendapatannya.

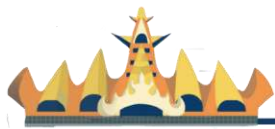
Tabel 3.14. Perkembangan Keseimbangan Umum dan Primer Regional Lampung Tahun 2021-2023

Tahun	Pendapatan APBD	Belanja APBD	Belanja Bunga	Keseimbangan Umum	Keseimbangan Primer
2021	28.949,01	28.789,32	50,83	159,69	210,51
2022	28.406,35	28.954,69	49,40	-548,34	-498,94
2023	28.044,05	27.471,37	48,97	572,68	621,65

Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)

3.2.4. Pembiayaan Daerah

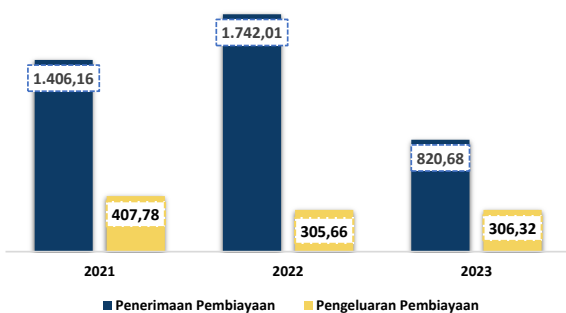
Pada tahun 2023, Pembiayaan netto turun signifikan hingga -64,19 persen (yoy). Hal ini terutama dikarenakan turunnya penerimaan pembiayaan dan meningkatnya pengeluaran pembiayaan. Komponen penerimaan pembiayaan terkonsentrasi utamanya disebabkan turunnya penggunaan SiLPA tahun lalu sebagai sumber pembiayaan terbesar pemerintah daerah yaitu dari



Rp1.158,01 miliar pada tahun 2022 menjadi hanya Rp777,15 miliar di tahun 2023 serta berkurangnya Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri. Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri pada tahun 2023 hanya berasal dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-jangka menengah pada Kabupaten Pesawaran. Selain Penggunaan SILPA dan Pinjaman Dalam Negeri, sumber pembiayaan tahun 2023 juga diperoleh dari Penerimaan Kembali Dana Bergulir pada Masyarakat Kota Metro.

Sementara itu, komponen pengeluaran pembiayaan tahun 2023 sedikit meningkat (0,22 persen, *yoy*) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penyertaan modal pemerintah pada BUMD meningkat 21,33 persen dibanding tahun 2022. Penyertaan modal pemerintah pada BUMD terealisasi pada 7 (tujuh) kabupaten/kota di regional Lampung yaitu Kab. Lampung Barat, Lampung Timur, Way Kanan, Pringsewu, Pesisir Barat, Kota Bandara Lampung dan Kota Metro. Pembayaran Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank juga mengalami peningkatan hingga 21,51 persen (*yoy*). Sedangkan Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat turun -97,90 persen yang pada tahun 2023 hanya Kab. Lampung Utara yang masih memiliki dan melakukan pembayaran pokok pinjaman kepada pemerintah pusat yaitu atas hasil restrukturisasi pinjaman milik PDAM Kabupaten Lampung Utara tahun 2018. Pembiayaan Daerah Regional Lampung tahun 2021-2023 sebagaimana grafik 3.66.

Grafik 3.66. Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)

3.2.5. Perkembangan BLU Daerah

3.2.5.1. Profil BLU Daerah

BLUD merupakan unit di bawah pemerintah daerah yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Pada tahun 2023, BLUD di regional Lampung berjumlah 337 BLUD yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota. Belum terdapat entitas BLUD di Kab. Pesisir Barat, namun sejak tahun 2022 Pemda Pesisir Barat telah memulai persiapan dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK)-BLUD Kesehatan pada 1 unit Rumah Sakit dan 11 unit Puskesmas yang berada di Kab. Pesisir Barat. Jika dirinci lebih lanjut, Profil BLUD di regional Lampung terdiri atas 319 BLUD rumpun Kesehatan, 16 BLUD rumpun Pendidikan, 1 BLUD rumpun Barang dan Jasa Lainnya, serta 1 BLUD rumpun Pengelola Dana.

BLUD Kesehatan di Lampung didominasi oleh Puskesmas yang berjumlah 302 unit, Rumah Sakit 16 unit, sedangkan sisanya adalah 1 unit Laboratorium Kesehatan Daerah. BLUD rumpun Pendidikan semuanya berupa SMK yang baru dikukuhkan statusnya sebagai BLUD pada tahun 2023. Selanjutnya satu-satunya BLUD rumpun Barang dan Jasa di Lampung berupa Laboratorium Lingkungan.

Kemudian, BLUD Pengelola Dana berupa Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah (UPT-BLUD) Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan satu-satunya unit yang memberikan pemberian pinjaman kepada masyarakat.

Berikut adalah tabel jumlah dan profil BLUD di regional Lampung.



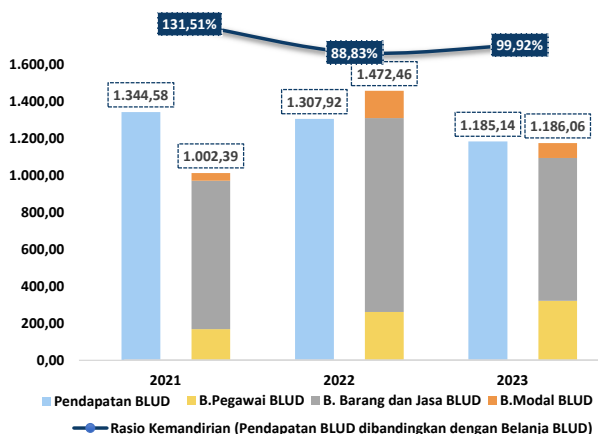
Tabel 3.15. Profil BLUD Lampung Tahun 2021-2023

NAMA PEMDA	RUMPUN						Jumlah
	Kesehatan			Pendidikan	Pengelola Dana	Barang dan Jasa Lainnya	
	Rumah Sakit	Puskesmas	Kesehatan Lainnya				
Provinsi Lampung	2	-	1	16	-	1	20
Kab. Lampung Selatan	1	27	-	-	-	-	28
Kab. Lampung Tengah	1	39	-	-	-	-	40
Kab. Lampung Utara	1	27	-	-	-	-	28
Kab. Lampung Barat	1	15	-	-	1	-	17
Kab. Tulang Bawang	1	20	-	-	-	-	21
Kab. Tanggamus	1	24	-	-	-	-	25
Kab. Lampung Timur	1	34	-	-	-	-	35
Kab. Way Kanan	1	20	-	-	-	-	21
Kab. Pesawaran	1	13	-	-	-	-	14
Kab. Pringsewu	1	13	-	-	-	-	14
Kab. Mesuji	1	12	-	-	-	-	13
Kab. Tulang Bawang Barat	-	16	-	-	-	-	16
Kab. Pesisir Barat	-	-	-	-	-	-	0
Kota Bandar Lampung	1	31	-	-	-	-	32
Kota Metro	2	11	-	-	-	-	13
	16	302	1	16	1	1	337

3.2.5.2. Analisis Tingkat Kemandirian BLUD

Dalam periode 3 tahun terakhir, berdasarkan I-Account Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah yang disampaikan ke Kanwil DJPb Provinsi Lampung, pendapatan BLUD terus menunjukkan penurunan sedangkan Belanja BLUD berfluktuasi. Penurunan realisasi disebabkan meredanya kasus Covid-19 yang berdampak pada penurunan pendapatan yang diperoleh BLUD yang hampir seluruhnya bergerak di sektor Kesehatan. Pada tahun 2023, pendapatan BLUD turun-9,39 persen dibanding tahun 2022 dan mencatatkan realisasi sebesar Rp1.185,14 miliar.

Grafik 3.67. Perkembangan Realisasi Pendapatan BLUD, Belanja BLUD, dan Rasio Kemandirian BLUD Regional Lampung Tahun 2021-2023 (miliar rupiah)



Sumber: Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)

Belanja BLUD juga mengalami kontraksi -19,45 persen (yoy) dengan realisasi sebesar Rp1.186,06 miliar. Meski turun, besaran realisasi Belanja BLUD lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi

pendapatannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa BLUD di regional Lampung masih belum mandiri secara *financial* dimana pendapatan BLUD belum mampu memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri. Kemandirian BLUD sempat tercapai pada tahun 2021 dimana realisasi Pendapatan BLUD mampu melampaui belanjanya.

Berdasarkan 174 sampel dari 337 BLUD di regional Lampung yang berhasil dihimpun oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung, 49 dari 149 BLUD memiliki rasio kemandirian di atas 100 persen pada tahun 2021 (32,88 persen), 83 dari 166 BLUD memiliki rasio kemandirian di atas 100 persen pada tahun 2022 (50 persen), serta 134 dari 174 BLUD memiliki rasio kemandirian di atas 100 persen pada tahun 2023 (77,01 persen). Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah BLUD di regional Lampung yang masuk dalam kategori mandiri secara *financial*. Berikut adalah tabel Perkembangan Kemandirian Keuangan 10 BLUD dengan nilai pendapatan terbesar di tahun 2023 pada sampel.

Tabel 3.16. Kemandirian Keuangan 10 BLUD di Lampung Tahun 2021-2023

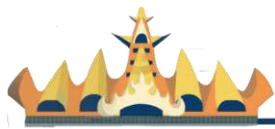
No	NAMA BLUD	Data Keuangan (Miliar Rupiah)								
		2021			2022			2023		
		Pendapatan BLUD (PNBP)	Belanja	Rasio Kemandirian	Pendapatan BLUD (PNBP)	Belanja	Rasio Kemandirian	Pendapatan BLUD (PNBP)	Belanja	Rasio Kemandirian
1	RSUD A. Yani	211,27	165,24	127,85%	173,63	200,41	86,64%	210,99	206,25	102,30%
2	RSUD Dr H. Bob Bazer, Skm	83,13	65,72	126,49%	81,60	100,03	81,58%	92,71	83,40	111,16%
3	RSUD Sukadana	32,85	30,37	108,16%	64,26	65,22	98,53%	30,19	54,93	54,96%
4	RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo	29,33	60,08	48,82%	38,05	64,40	59,08%	26,38	87,04	30,31%
5	RSUD Alimuddin Umar	31,77	50,01	63,52%	30,97	56,60	54,71%	24,32	43,73	55,61%
6	RSUD Zainal Abidin Pagaralam Wa	17,44	18,67	93,39%	18,60	27,36	67,98%	19,57	22,77	85,93%
7	RSUD Mayjend Hm Ryacudu	31,37	16,76	187,14%	22,98	22,77	100,93%	8,93	8,81	101,31%
8	Puskesmas Kedaton	3,59	3,58	100,44%	3,83	3,87	99,01%	4,76	3,95	120,45%
9	Puskesmas Panjang	2,87	3,23	89,01%	3,10	3,43	90,42%	4,43	3,33	132,97%
10	Puskesmas Satellit	3,18	3,20	99,40%	3,31	3,28	100,76%	4,29	3,38	126,99%

Sumber: Pemda se-Provinsi Lampung (diolah)

3.2.5.3. Perkembangan Aset BLUD

Berdasarkan 146 sampel dari 337 BLUD di regional Lampung yang berhasil dihimpun Kanwil DJPb Provinsi Lampung (data sampel tersedia dalam Lampiran BAB III), 132 BLUD menunjukkan peningkatan total aset (yoy), sedangkan 14 lainnya menunjukkan justru mengalami penurunan nilai aset dibandingkan tahun 2022. Berikut adalah tabel 10 BLUD dengan nilai aset terbesar pada sampel.





Tabel 3.17. Perkembangan Aset 10 BLUD di Lampung Tahun 2021-2023

No	NAMA BLUD	Total Aset			Growth 2022-2023
		2021	2022	2023	
1	RSUD Dr.H. Bob Bazar, Skm	160.643.872.787,01	191.149.504.250,01	189.213.661.561,01	-1,01%
2	RSUD Pringsewu	116.651.649.030,31	182.804.488.345,31	189.055.107.223,66	3,42%
3	RSUD A. Yani	236.075.998.540,29	180.759.668.489,40	177.882.455.217,29	-1,59%
4	RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo	122.608.844.245,85	114.716.797.456,17	151.981.470.662,42	32,48%
5	RSUD Zainal Abidin Pagaram Way Kanan	123.610.688.232,41	113.514.705.731,16	113.599.134.033,92	0,07%
6	RSUD Sukadana	73.999.531.115,90	78.749.835.929,33	62.343.361.203,77	-20,83%
7	RSUD Alimuddin Umar	60.789.387.494,86	48.360.215.030,75	44.851.473.941,95	-7,26%
8	Puskesmas Liwa	-	21.930.973.639,84	22.173.721.838,84	1,11%
9	Puskesmas Pagar Dewa	-	19.166.807.736,42	19.223.509.186,42	0,30%
10	RSUD Sumbersari Bantul	16.105.262.980,84	17.388.985.256,48	19.123.328.550,12	9,97%

Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung, GFS (diolah)

3.2.6. Isu Strategis Pelaksanaan APBD

- Realisasi PAD di regional Lampung tahun 2023, secara agregat mampu tumbuh 0,73 persen dibanding tahun 2022. Hal ini tentu saja merupakan hasil upaya seluruh pemerintah daerah regional Lampung dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya meski di tengah prospek perekonomian ekonomi global yang hingga akhir 2023 masih melemah dan tetap dalam situasi ketidakpastian. Optimalisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi perpajakan yang telah tersedia seperti *e-Salam 1* dan *e-Salam 2*, *e-Samdes*, dan *Signal* menunjukkan keberhasilan pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan PAD dari sisi perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menjadi tumpuan utama PDRD Lampung. Diberlakukannya program relaksasi pajak kendaraan bermotor sesuai Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 tahun 2023 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023 yang diberlakukan mulai 1 April 2023 sampai dengan 30 September 2023 juga turut andil dalam peningkatan perolehan PKB tahun 2023.
- Namun demikian Kontribusi Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap total PAD Lampung masih sangat kecil yaitu hanya sebesar masing-masing 1,84 persen dan 2,33 persen. Oleh karena itu pengelolaan retribusi daerah perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemda dengan melakukan upaya seperti

peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pendapatan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan khususnya Retribusi Daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan seperti penyediaan *platform* pembayaran *digital payment*, *parking meter* dan lainnya dapat menekan biaya pemungutan dan meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi.

- Kemudian, upaya penyehatan BUMD sehingga dapat menghasilkan dividen perlu lebih ditingkatkan salah satunya dengan penambahan penyertaan modal Pemda dari pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya. Selain itu pembinaan terhadap BUMD juga dapat dilakukan seperti penguatan struktur organisasi dan manajemen perusahaan, perluasan usaha di bidang usaha produktif berbasis potensi unggulan daerah, serta peningkatan kompetensi SDM, dan sarana prasarana BUMD.
- Turunnya pendapatan BLUD sebagai kontributor utama dalam sektor Lain-Lain PAD yang sah perlu menjadi perhatian. Peningkatan profesionalisme manajemen dan tata kelola BLUD selain dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat juga dapat mendorong peningkatan PAD.
- Realisasi Belanja tahun 2023 turun-5,12 persen dan menjadi yang terendah dalam periode 3 tahun terakhir dengan hanya mencapai 84,90 persen dari pagu, terutama serapan Belanja Modal yang turun hingga-15,82 persen (*yoy*). Belanja modal perlu diakselerasi untuk memberikan *multiplier effect* terhadap ekonomi.
- Berdasarkan evaluasi 3 tahun terakhir, porsi realisasi belanja operasional masih mendominasi belanja daerah pada kisaran 68,30-70,42 persen, yang terdiri dari 36,66-39,27 persen belanja pegawai dan 24,74-27,02 persen belanja barang jasa dari keseluruhan belanja daerah. Sedangkan Belanja Modal hanya berada pada rentang 13,21-14,89



persen. Sementara itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 besaran belanja pegawai dibatasi sebesar 30 persen dari total APBD.

3.3. ANALISIS KONSOLIDASI APBN DAN APBD

3.3.1. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

Realisasi anggaran konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2023 tingkat wilayah Provinsi Lampung mencatatkan realisasi Pendapatan sebesar Rp16,70 triliun dan realisasi

Belanja sebesar Rp37,65 triliun sehingga menghasilkan defisit anggaran konsolidasian sebesar Rp20,96 triliun. Dari sisi Pembiayaan mencatatkan realisasi sebesar Rp514,35 miliar yang seluruhnya merupakan penerimaan yang bersumber dari dalam negeri, yang kemudian mengurangi angka defisit sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp20,44 triliun. Ringkasan *I-Account* Konsolidasi APBN dan APBD Regional Lampung dapat dilihat pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18. *I-Account* Konsolidasian APBN dan APBD Regional Lampung 2021-2023 (miliar rupiah)

Uraian	2021		2022		2023		Kontribusi	% Growth
	Konsolidasi	Konsolidasi	Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat	Konsolidasi	Kontribusi		
A. Pendapatan Negara dan Hibah	16.134,31	18.427,20	27.852,42	10.176,92	16.697,40	100,00	(0,09)	
I. Penerimaan Perpajakan	12.267,67	13.972,03	3.798,81	8.704,11	13.180,33	78,94	(0,06)	
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.819,30	4.358,25	23.876,19	1.472,81	3.502,51	20,98	(0,20)	
III. Penerimaan Hibah	47,35	96,92	177,42	0,00	14,57	0,09	(0,85)	
B. Belanja Negara	37.870,87	38.042,54	26.293,26	31.706,72	37.654,52	100,00	(0,01)	
I. Belanja Pemerintah Pusat/Daerah	34.264,74	32.973,48	22.883,50	10.236,25	33.119,75	87,96	0,00	
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	3.606,12	5.069,05	3.409,76	21.470,48	4.534,77	12,04	(0,11)	
C. Surplus (Defisit) Anggaran	(21.736,55)	(19.615,34)	1.559,16	(21.529,80)	(20.957,12)	100,00	0,07	
D. Pembiayaan	998,37	1.436,35	514,35	0,00	514,35	100,00	(0,64)	
I. Penerimaan Pembiayaan	1.406,16	1.742,01	820,68	0,00	820,68	159,56	(0,53)	
II. Pengeluaran Pembiayaan	407,78	305,66	306,32	0,00	306,32	59,56	-	
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	(20.738,18)	(18.178,99)	2.073,51	(21.529,80)	(20.442,77)	100,00	0,12	

Sumber: LKPK-TW Semester Triwulan IV Provinsi Lampung, Kanwil DJP Bengkulu Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar (diolah)

3.3.2. Pendapatan Konsolidasian

3.3.2.1. Proporsi dan Perbandingan

Realisasi pendapatan negara konsolidasian tahun 2023, membukukan realisasi sebesar Rp16,70 triliun atau sedikit menurun 0,09 persen (*yoy*) dari pendapatan di tahun 2022 yang dipengaruhi oleh penerimaan pajak yang sedikit terkoreksi yakni 0,06 persen lebih rendah. Komponen utama penyumbang pendapatan konsolidasian bersumber dari penerimaan perpajakan dalam negeri baik di tingkat pusat maupun daerah dengan kontribusi sebesar 78,94 persen dari total pendapatan di Lampung atau secara nominal mencapai Rp13,18 triliun, sedangkan PNBPN menyumbang kontribusi sebesar 20,98 persen atau secara nominal sebesar Rp3,50 triliun yang didominasi oleh PNBPN dari BLU, PNBPN Lainnya, dan Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan.

Selanjutnya, untuk pendapatan yang bersumber dari hibah memiliki kontribusi yang tidak signifikan yakni sebesar Rp14,57 miliar yang seluruhnya merupakan hibah dalam negeri kepada pemerintah daerah.

3.3.3. Belanja Konsolidasian

3.3.3.1. Proporsi dan Perbandingan

Belanja konsolidasian Lampung terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat/Daerah dan Transfer ke Daerah. Proporsi realisasi belanja konsolidasian terbesar tahun 2023 yaitu belanja pemerintah yang mencapai 87,96 persen atau sebesar Rp33,12 triliun, sedangkan proporsi belanja transfer mencapai 12,01 persen atau Rp4,53 triliun. Lebih lanjut, dilihat per jenis belanja, realisasi terbesar belanja konsolidasian adalah belanja pegawai yang mencapai 38,69 persen dari keseluruhan belanja

diikuti belanja barang sebesar 31,93 persen. Sementara itu realisasi belanja modal hanya berkontribusi 13,65 persen terhadap total belanja. Realisasi Belanja Negara Konsolidasian tahun 2023 turun 1,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Penurunan realisasi tersebut disebabkan oleh realisasi belanja Pemerintah Daerah yang lebih rendah atau terkontraksi -5,12 persen (*yoy*) sehingga menghasilkan defisit yang lebih lebar sebesar 0,07 persen (*yoy*).

3.3.3.2. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Tabel 3.19. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Konsolidasian Tahun 2021-2023

Uraian	2021		2022		2023	
	Konsolidasi	Rasio	Konsolidasi	Rasio	Konsolidasi	Rasio
Belanja Operasi (pegawai+barang)	24.743,02	65,34	25.456,18	66,92	26.594,18	70,63
Total Belanja dan Transfer	37.870,87		38.042,54		37.654,52	

Sumber: LKPK Triwulan IV Provinsi Lampung (diolah)

Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai konsolidasian dengan belanja barang konsolidasian. Rasio belanja operasi terhadap total belanja konsolidasian menunjukkan porsi belanja pemerintah untuk mendukung operasional pemerintahan. Rasio belanja operasi terhadap total belanja konsolidasian di Lampung mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hingga triwulan IV 2023 pemerintah masih berfokus pada kegiatan rutin pemerintah.

3.3.3.3. Belanja Perkapita Konsolidasi

Tabel 3.20. Belanja Perkapita Konsolidasian Tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
Total Belanja Konsolidasian APBN APBD	37.870,87	38.042,54	37.654,52
Jumlah Penduduk (jiwa) (T-1)	9.007.848	9.081.792	9.176.546
Belanja Perkapita (Rp)	0,0042	0,0042	0,0041

Sumber: LKPK Triwulan IV Provinsi Lampung, BPS (diolah)

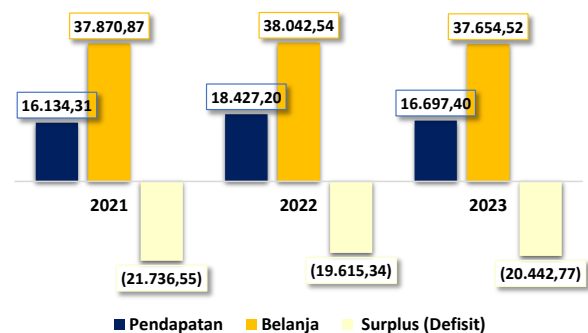
Indikator ini berfungsi untuk mendapatkan proporsi antara kebijakan fiskal yang tercermin dari anggaran dengan indikator demografis (populasi) sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih *riil* besaran anggaran pada suatu wilayah. Berdasarkan perhitungan tercatat bahwa rasio belanja konsolidasian terhadap jumlah penduduk Lampung tahun 2023 sebesar Rp4,1 juta. Artinya belanja pemerintah pusat dan daerah di Provinsi Lampung yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada satu orang penduduk pada tahun 2023 sebesar Rp4,1 juta.

3.3.4. Surplus Defisit Anggaran Konsolidasian

Tahun 2023, keseimbangan umum konsolidasian regional Lampung berada pada posisi defisit Rp20,44 triliun. Angka ini lebih besar 0,12 persen dibanding realisasi pada periode yang sama tahun 2022 yang defisit sebesar Rp19,62 triliun.

Melebarnya defisit anggaran tahun 2023 terutama disebabkan adanya penurunan realisasi pendapatan. Hal ini penurunan realisasi pendapatan yang lebih dalam dibanding penurunan realisasi Belanja konsolidasian.

Grafik 3.68. Surplus Defisit Anggaran Konsolidasian tahun 2021-2023 (miliar rupiah)



Sumber: LKPK Triwulan IV Provinsi Lampung (diolah)

Boks 3.1



Story of Desa Watu Agung



-Pendahuluan-

Dana Desa merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa yang diberikan kepada Desa untuk dikelola secara mandiri oleh seluruh masyarakat dan perangkat Desa untuk kemanfaatan bersama.

Pada tahun 2023, Provinsi Lampung memperoleh alokasi Dana Desa sebesar Rp2,23 Triliun untuk 2.330 Desa. Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi TKD yang dilakukan Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Lampung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), diperoleh informasi bahwa salah satu Desa yang optimal dalam pengelolaan Dana Desa adalah Desa Watu Agung.

Desa Watu Agung berada di Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Desa Watu Agung memiliki kondisi geografis yang didominasi oleh perkebunan singkong yang menjadi salah satu sektor utama dalam perekonomian desa. Desa ini mengandalkan potensi ekonomi utamanya dari sektor pertanian dan produksi pangan. Desa Watu Agung mengelola Dana Desa dengan sangat baik untuk mendukung perekonomian masyarakat desa. Dana Desa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur Desa seperti Jalan Usaha Tani serta digunakan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).



-Pemanfaatan Dana Desa di Desa Watu Agung-

Pada tahun 2021, Desa Watu Agung membuka akses jalan baru sentra pertanian dan perekonomian rakyat yang bernama **Jalan Usaha Tani**. Pembangunan Jalan Usaha Tani ini melalui proyek padat karya. Jalan tersebut akan **mempelancar angkutan hasil pertanian terutama Palawija, Hortikultura, dan Sayuran**. Jalur ini juga menjadi penghubung dengan Kampung Siderejo.

Dengan adanya jalan penghubung ini, masyarakat antusias menyambutnya karena masyarakat sangat terbantu dalam mengeluarkan hasil pertanian. Kepala Desa Watu Agung menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga dan merawat jalan tersebut karena jalan tersebut digunakan untuk akses sentral pertanian dan perekonomian di Desa Watu Agung.

Pada tahun 2023, Dana Desa kembali dimanfaatkan untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani (pembukaan badan jalan) sebesar Rp163,49 juta dengan mekanisme swakelola.

Boks 3.1



-Alokasi Dana Desa untuk Desa Watu Agung-

Pada tahun 2023, penyaluran Dana Desa di Desa Watu Agung sampai dengan 31 Desember 2023 telah tersalur 100 persen dari alokasi sebesar Rp1.044.236.000 dan telah terserap sebesar Rp749.771.200. Dengan adanya dukungan Dana Desa diharapkan dapat memaksimalkan usaha pertanian maupun Pembangunan sektor lainnya di Desa Watu Agung dan menumbuhkan perekonomian daerah setempat.



-Potensi Desa Watu Agung-

- Desa Watu Agung memiliki Desa Mart yang dikelola bersama dengan BUMDes sebagai minimarket desa dengan mengedepankan toko-toko sembako di desa untuk terlibat dalam pemenuhan sembako.
- Potensi desa ini terletak pada peran BUMDes, yang bukan hanya menjadi motor penggerak utama di sektor perekonomian, tetapi juga berhasil diversifikasi pendapatan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah Desa (PAD Des).
- Potensi Desa ini juga perlu dipertimbangkan sebagai produsen keripik singkong yang nantinya dapat diproduksi secara massal dan membuat branding sendiri.
- Kesuksesan desa ini tidak hanya tercermin dalam pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga dalam pemberdayaan pelaku UMKM di desa.



“ Sinergi APBN sebagai instrumen keuangan negara dengan para pelaku usaha dapat mengamplifikasi pemulihan ekonomi Indonesia ”

-Sri Mulyani-
Menteri Keuangan RI

PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

BAB IV



BAB IV PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH: HARMONISASI BELANJA K/L DAN DAK FISIK DI REGIONAL LAMPUNG

4.1. PENDAHULUAN

Pengembangan ekonomi daerah berkaitan dengan proses pemerintah daerah/lembaga dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah perlu diawali dengan mengenali karakter ekonomi, sosial budaya dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain.

Dalam proses perencanaan pembangunan, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik yang sebagian masuk dalam kategori Belanja Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik). DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi, serta mendukung pencapaian prioritas nasional.

Belanja terkait infrastruktur tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah tetapi juga oleh pemerintah pusat. Untuk itu, diperlukan proses sinkronisasi belanja antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan bisa lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Harmonisasi belanja pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan nasional merupakan salah satu pilar yang terkandung dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Bentuk riil harmonisasi belanja tersebut dalam bentuk sinergi kebijakan fiskal antara lain: (1) penyalarsan kebijakan fiskal pusat dan daerah, (2) penetapan batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang APBD, (3) pengendalian dalam kondisi darurat dan (4) sinergi bagan akun standar. Manfaat penyalarsan kebijakan fiskal pusat dan daerah diharapkan dapat semakin mendorong peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi pengelolaan keuangan serta mencegah duplikasi anggaran atau tumpang tindih program/kegiatan yang didanai dari APBN maupun APBD.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) dari sisi perencanaan dan penganggaran terhadap belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Dalam PP Nomor 17 tahun 2023, sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional merupakan suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan. Dalam ketentuan tersebut juga diatur bahwa Kementerian Keuangan dan Bappenas melakukan evaluasi kinerja pembangunan dan kinerja anggaran serta kebijakan tahun berjalan sesuai kewenangan masing-masing.

Pada tahun 2023, Menteri Keuangan telah menetapkan SOP *Link 70* tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi (monev) Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Menteri Keuangan memberikan amanah kepada Ditjen Anggaran (DJA), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) sebagai *Unit in Charge* (UIC) dalam proses monev tersebut. DJA dan DJPK melakukan monev dari sisi perencanaan dan penganggaran, sedangkan DJPb melakukan monev

pada sisi pelaksanaan anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD). Sinergi ketiga unit di Kementerian Keuangan ini menjadi sangat penting dalam mengawal harmonisasi belanja pemerintah pusat dan TKD.

Dengan demikian, bab ini akan menerangkan mengenai pelaksanaan Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik melalui aktivitas sebagai berikut:

1. Reviu kinerja realisasi anggaran dan capaian output harmonis (RO Harmonis).
2. Analisis permasalahan harmonisasi belanja pemerintah pusat yang mendukung DAK Fisik.
3. Identifikasi Upaya Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

4.2. GAMBARAN UMUM HARMONISASI BELANJA K/L DAK FISIK DI TINGKAT WILAYAH

Penguatan tata kelola hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tidak dapat berdiri sendiri. Perlu adanya upaya untuk melakukan sinergi agar instrumen kebijakan fiskal dapat mencapai tujuan bernegara. Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah tercermin salah satunya melalui sinergi Belanja K/L dengan TKD khususnya dalam program DAK Fisik sehingga saling melengkapi dan menghindari duplikasi/tumpang tindih anggaran. Dalam hal ini, Kanwil DJPb akan menganalisis harmonisasi antara Belanja K/L dengan DAK Fisik di regional Lampung, dimana DAK Fisik merupakan belanja pemerintah yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik di daerah. Untuk menganalisis sejauh mana sinkronisasi tersebut, digunakan identifikator berupa “Rincian Output (RO) Harmonis” yang merupakan RO pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) yang saling melengkapi dan/atau mendukung rincian kegiatan pada DAK Fisik.

Tabel 4.1. Perbedaan DAK Fisik dan RO Harmonis K/L DAK Fisik

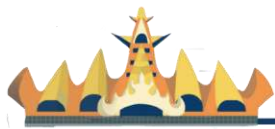
No.	Indikator	DAK Fisik	RO Harmonis K/L DAK Fisik
1.	Jenis Belanja	Dana Transfer	Belanja Pemerintah Pusat
2.	Pelaksana Kegiatan	OPD Pemerintah Daerah	Satker Kementerian/Lembaga
3.	Jumlah Bidang	10	5
4.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mempercepat pembangunan infrastruktur pelayanan dasar ✓ Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat & pemerataan ekonomi ✓ Mendukung pencapaian prioritas nasional 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ✓ Mendukung pelaksanaan DAK Fisik

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Mengingat perbedaan jumlah bidang antara DAK Fisik dan RO Harmonis, maka pendekatan yang dilakukan adalah dengan menganalisis jumlah bidang yang lebih sedikit sebagai klaster basis analisis. Monev sinkronisasi Belanja Pemerintah Pusat dan DAK Fisik dilakukan terhadap 5 (lima) bidang, yaitu:

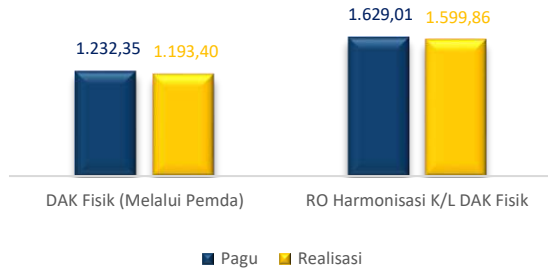
1. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana (Kementerian Kesehatan dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional);
2. Bidang Pertanian (Kementerian Pertanian);
3. Bidang Pendidikan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Perpustakaan Nasional);
4. Bidang Jalan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
5. Bidang Transportasi Pedesaan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Desa Tertinggal dan Transmigrasi).

Per 31 Desember 2023, total pagu anggaran DAK Fisik yang telah dialokasikan di seluruh pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada regional Lampung sebesar Rp1.232,35 miliar dengan realisasi



mencapai Rp1.193,40 miliar atau 96,84 persen. sebagaimana dapat dilihat pada grafik 4.1.

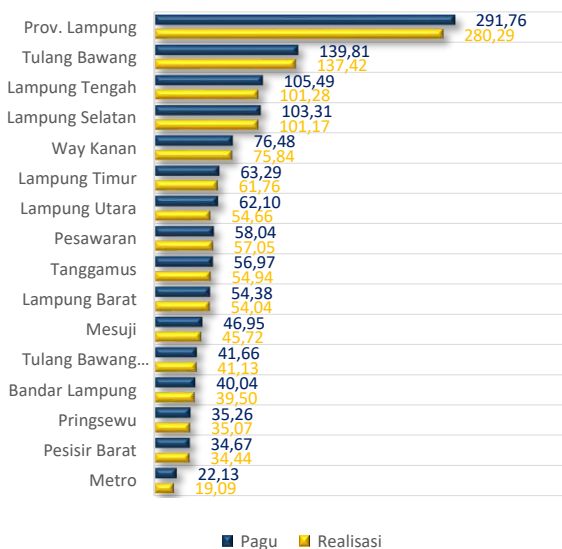
Grafik 4.1. Perbandingan Belanja Kementerian/Lembaga RO Harmonis dengan DAK Fisik di Regional Lampung Tahun 2023 (dalam miliar rupiah)



Sumber: OM SPAN (diolah)

Di sisi lain, Belanja Kementerian/Lembaga yang berkolaborasi untuk mendukung area yang menjadi fokus penyaluran DAK Fisik di regional Lampung (RO Harmonis K/L DAK Fisik) memiliki total pagu anggaran sebesar Rp1.629,01 miliar dengan capaian realisasi Rp1.559,86 miliar atau 98,21 persen. Dari sisi anggaran, alokasi RO Harmonis K/L DAK Fisik pada tahun 2023 lebih besar Rp396,65 miliar dibandingkan DAK Fisik melalui Pemda.

Grafik 4.2. Pagu dan Realisasi DAK Fisik Pemda Lampung Tahun 2023 (dalam miliar rupiah)

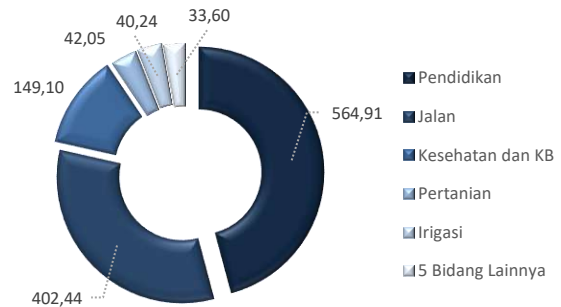


Sumber: OM SPAN (diolah)

Dari sisi anggaran, Pemerintah Daerah yang memperoleh alokasi DAK Fisik terbesar pada tahun 2023 adalah Provinsi Lampung dengan total pagu Rp0,29 Triliun. Sedangkan Kota Metro memperoleh

pagu DAK Fisik terkecil dengan alokasi Rp0,02 Triliun. Dari sisi realisasi, Kabupaten Pringsewu menyalurkan DAK Fisik tertinggi dibandingkan Pemda lainnya dengan tingkat penyerapan mencapai 99,45 persen. Sedangkan penyaluran terendah diraih Kota Metro dengan tingkat penyaluran 86,28 persen.

Grafik 4.3. Porsi Pagu DAK Fisik Per Bidang Tahun 2023 (dalam miliar rupiah)



Sumber: OM SPAN (diolah)

Jika dilihat per jenis bidang, Belanja DAK Fisik Bidang Pendidikan mendapatkan porsi alokasi tertinggi yaitu sebesar Rp564,91 Miliar. Kemudian bidang Jalan sebesar Rp402,44 Miliar, bidang Kesehatan dan KB Rp149,10 Miliar, bidang Pertanian Rp42,05 Miliar, bidang irigasi Rp40,24 Miliar, dan 5 bidang lainnya sebesar Rp33,60 Miliar. Dari sisi penyaluran, realisasi bidang jalan mendapatkan peringkat pertama dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 98,13 persen. Sedangkan penyaluran terendah adalah bidang irigasi yang hanya terserap sebesar 87,40 persen. Selanjutnya, akan diuraikan mengenai kinerja terkait Harmonisasi Belanja K/L DAK Fisik di Tingkat Wilayah Provinsi Lampung.

4.2.1. Alokasi Anggaran K/L Secara Umum

Jumlah pagu yang masuk dalam RO Harmonisasi Belanja K/L DAK Fisik pada Satuan Kerja di Kementerian Lembaga mencapai Rp1.629,01 miliar dengan realisasi sebesar Rp1.599,85 miliar atau 98,21 persen. Alokasi tersebut tersebar pada 7 Kementerian Lembaga dan 124 Satuan Kerja. Kementerian PUPR memperoleh alokasi tertinggi sebesar Rp1.456,68 miliar atau 89,42 persen dari total pagu Harmonisasi Belanja K/L DAK Fisik.



Sedangkan Lembaga Perpusnas RI mendapatkan alokasi paling kecil yaitu Rp351 juta atau 0,02 persen. Dari sisi tingkat penyerapan, hanya

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang memiliki penyerapan hingga 100 persen.

Tabel 4.2. Alokasi Anggaran K/L Secara Umum

BA	Nama K/L	Pagu Yang Mendukung DAKF (Miliar)	Total Pagu	Porsi Pagu	Jum Satker	Jum RO
A	B	C	D	E=D/C	F	G
033	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	1.456,68	4.834.31	30.13%	4	42
023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	55,60	1.194.51	4.65%	3	7
018	Kementerian Pertanian	76,47	207.42	36.87%	7	43
024	Kementerian Kesehatan	4,56	148.46	3.07%	1	14
068	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	34,09	123.53	27.60%	1	16
067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	1,25	2.17	57.60%	1	1
057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	0,35	0.35	100.00%	1	1
TOTAL		1.629,01	6.511,23	25.02%	18	124

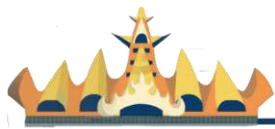
Sumber: Sintesa (diolah)

Dari sisi Satuan Kerja, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Lampung mengelola alokasi terbesar yaitu Rp0,78 Triliun sedangkan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Lampung mengelola pagu terkecil sebesar Rp351 juta. Alokasi Belanja K/L yang mendukung pelaksanaan DAK Fisik memiliki porsi sebesar 25,02 persen dari total pagu anggaran dengan 124 RO Harmonis.

4.2.2. Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik

Pelaksanaan kegiatan Harmonisasi Belanja K/L DAK Fisik dapat diuraikan dalam beberapa sub Bidang per Kementerian Lembaga yaitu sebagaimana detail tabel 4.3. belanja RO Harmonis DAK Fisik Bidang Jalan memiliki alokasi tertinggi yaitu sebesar Rp1.456,32. Hal ini karena jalan merupakan infrastruktur dasar yang harus dipenuhi. Dengan adanya jalan, masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses sumber ekonomi, pendidikan, dan kesehatan semakin mudah dicapai. Pembangunan jalan selaras dengan program nasional yang ingin meningkatkan konektivitas daerah. Pada tahun 2022, Indeks Konektivitas Jalan pada Provinsi Lampung mencapai angka 0,68 dan ditargetkan meraih indeks 0,76 pada akhir tahun ini (RKPD 2023, Bappeda Lampung).

Dari tingkat penyerapan, Bidang Transportasi Pedesaan meraih realisasi tertinggi yaitu 100%. Sedangkan Bidang Kesehatan memiliki realisasi terendah yaitu 97,52%. Penyerapan yang rendah disebabkan adanya sub bidang Penguatan Sistem Kesehatan yang hanya terealisasi sebesar 87,11%. Secara lebih detail, dapat diuraikan pula bahwa alokasi Bidang Jalan masuk pada anggaran Kementerian PUPR memiliki satu jenis Sub Bidang. Kegiatan untuk Bidang Jalan dilaksanakan oleh 3 Satker dengan 22 RO. Alokasi Bidang Kesehatan dan KB masuk pada anggaran Kementerian Kesehatan dan BKKBN memiliki 4 jenis Sub Bidang. Kegiatan untuk Bidang Kesehatan dan KB dilaksanakan oleh 4 Satker dengan 30 RO. Alokasi Bidang Pendidikan masuk pada anggaran Kementerian Pendidikan, Perpusnas RI, dan Kementerian PUPR memiliki 4 jenis Sub Bidang. Kegiatan untuk Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh 6 Satker dengan 9 RO. Alokasi Bidang Pertanian masuk pada anggaran Kementerian Pertanian dengan satu jenis Sub Bidang. Kegiatan untuk Bidang Pertanian dilaksanakan oleh 7 Satker dengan 42 RO. Alokasi Bidang Transportasi Perdesaan masuk pada anggaran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal memiliki jenis satu jenis Sub Bidang. Kegiatan untuk Bidang Transportasi Perdesaan dilaksanakan oleh 1 Satker dengan 1 RO.



Tabel 4.3. Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik

Bidang DAK Fisik	Sub Bidang DAK Fisik	Nama K/L	Pagu (Miliar)	Realisasi (Miliar)	%Realisasi	Jumlah Satker	Jumlah RO
A	B	C	D	E	F=E/D	G	H
Jalan	Jalan	Kementerian PUPR	1.456,32	1.428,79	98,11%	3	22
	Keluarga Berencana	BKKBN	34,09	33,47	98,17%	1	16
	Pengendalian Penyakit	Kementerian Kesehatan	1,20	1,18	98,69%	1	3
Kesehatan dan KB	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu Bayi dan Intervensi Stunting	Kementerian Kesehatan	1,45	1,38	95,11%	1	5
	Penguatan Sistem Kesehatan	Kementerian Kesehatan	1,91	1,67	87,11%	1	6
Pendidikan	PAUD	Kementerian Pendidikan	1,50	1,50	100,00%	1	1
	Perpustakaan	Perpusnas RI	0,35	0,35	99,54%	1	1
	SD dan SMP	Kementerian PUPR	0,36	0,36	99,98%	1	1
	SD SMP SMA SMK	Kementerian Pendidikan	54,10	53,95	99,72%	3	6
Pertanian	Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian Perikanan dan Hewani)	Kementerian Pertanian	76,47	75,96	99,33%	7	42
Transportasi Perdesaan	Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	1,25	1,25	100,00%	1	1
Total			1.629,01	1.599,86	98,21%	21	104

Sumber: Sintesa (diolah)

4.2.3. Alokasi Anggaran K/L per Bidang

4.2.3.1. Bidang Jalan

Bidang Jalan memiliki alokasi sebesar Rp1.456,32 miliar dengan realisasi mencapai Rp1.428,79 miliar atau 98,11% dari alokasi. Terdapat 22 RO yang masuk dalam Bidang Jalan dengan kriteria RO biasa, Pro PN, dan Padat Karya. RO Pro PN artinya adalah kegiatan tersebut merupakan Program Prioritas Nasional dimana menjadi fokus kerja pemerintah yang harus dilaksanakan dengan segera. Sedangkan RO Padat Karya artinya adalah pekerjaan yang terkait pelaksanaan kegiatan membutuhkan banyak orang sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Secara garis besar, kegiatan yang ada di Bidang Jalan dapat dilaksanakan dengan baik terlihat di mana tingkat realisasi dan capaian output yang mencapai 100%. Bahkan lebih dari setengahnya melebihi target capaian output. Dari sisi realisasi, hanya RO Dukungan Penanganan Jalan Daerah dan RO Penanganan *Drainase Trotoar* dan Fasilitas Keselamatan Jalan yang belum maksimal dengan tingkat penyerapan masing-masing sebesar 97% dan 99%. Untuk anggaran RO Pelebaran Jalan Menambah Jalur direlokasikan seluruhnya oleh

Kantor Pusat sehingga kegiatannya tidak dapat dilaksanakan.

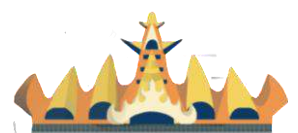
Tabel 4.4. Alokasi Anggaran K/L Bidang Jalan (5 Tertinggi)

No.	Nama RO	Satuan	Pagu (Miliar)	Realisasi (Miliar)	% Realisasi	Volume RO	Realisasi RO	% Capaian RO
A	B	C	D	E	F=E/D	G	H	I
1	Dukungan Penanganan Jalan Daerah	km	794,47	767,26	96,57%	102	103	100,56%
2	Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	km	149,02	148,78	99,84%	15	19	123,87%
3	Penggantian Jembatan	m	84,81	84,81	100,00%	248	248	99,84%
4	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	km	74,04	74,04	99,99%	965	1136	117,74%
5	Jalan Strategis (ProPN)	km	72,10	72,10	100,00%	2588	2589	100,02%
Total			1.174,44	1.146,98	97,66%	3918	4094	104,48%

Sumber: Sintesa (diolah)

Secara spasial, Belanja K/L melalui RO Harmonis yang bersinergi dengan DAK Fisik pada bidang Jalan dapat dilihat dari lokus pelaksanaan kegiatan yaitu:

- 1) RO Dukungan Penanganan Jalan Daerah dengan pagu sebesar Rp794,47 miliar dilaksanakan di kabupaten Pringsewu, Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Selatan.



- 2) RO Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) dengan pagu sebesar Rp 154,3 miliar dilaksanakan pada kabupaten Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Utara, Pesawaran, Bandar Lampung, Metro, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat.
- 3) RO Penggantian Jembatan dengan pagu sebesar Rp84,81 miliar dilaksanakan di Kab. Lampung Timur dan Tulang Bawang.
- 4) RO Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan dengan pagu sebesar Rp 64,6 miliar dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Tengah.
- 5) RO Jalan Strategis (ProPN) dengan pagu sebesar Rp72,09 miliar dilaksanakan pada Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran.

Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan pada lokasi tersebut melengkapi kebermanfaatan atas upaya pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui DAK Fisik antara lain:

- 1) Akses Jalan Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas total pagu sebesar Rp 26,20 miliar, dengan nilai sebesar Rp15,33 miliar dilaksanakan oleh Pemprov Lampung, dan Rp10,86 miliar di Kabupaten Lampung Barat.
- 2) Akses Jalan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) total alokasi sebesar Rp 1110,35 miliar, dengan alokasi anggaran masing-masing sebesar Rp18,42 miliar di Lampung Selatan, Rp21,71 miliar di Lampung Timur, Rp33,09 miliar di Tulang Bawang, dan Rp37,12 miliar di Kota Bandar Lampung.
- 3) Perbaikan dan Pembangunan Jalan Kabupaten/Kota dengan total Rp 265,9 miliar, dengan rincian Rp16,64 miliar di Lampung Tengah, Rp18,52 miliar di Lampung Utara, Rp23,34 miliar di Mesuji, Rp21,90 miliar di Pesawaran, Rp22,33 miliar di Pesisir Barat, Rp23,08 miliar di Pringsewu, Rp22,98 miliar di Tulang Bawang, Rp25,80 miliar di Tulang Bawang Barat, Rp37,37 miliar di Kabupaten Way Kanan,

Rp7,44 miliar di Kota Metro, dan Rp20,07 miliar di Lampung Barat.

4.2.3.2. Bidang Kesehatan dan KB

Bidang Kesehatan dan KB memiliki alokasi sebesar Rp38,66 Miliar dengan realisasi mencapai Rp37,70 Miliar atau 97,52 persen. Terdapat 30 RO yang masuk dalam Bidang Kesehatan dan KB dengan capaian output mencapai 100 persen.

RO Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) mendapatkan alokasi anggaran terbesar pada Bidang Kesehatan yaitu Rp11,74 Miliar dengan tingkat realisasi dan capaian output 100 persen. Program ini ditujukan kepada masyarakat melalui fasilitas kesehatan di seluruh daerah agar laju pertumbuhan penduduk dapat dijaga dengan baik.

Tabel 4.5. Alokasi Anggaran K/L Bidang Kesehatan dan KB (5 Tertinggi)

No.	Nama RO	Satuan	Pagu (Miliar)	Realisasi (Miliar)	% Realisasi	Volume RO	Realisasi RO	% Capaian RO
A	B	C	D	E	F=E/D	G	H	I
1	Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	Lembaga	11,74	11,74	99,97%	482	482	100,00%
2	Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota	layanan	7,33	6,91	94,40%	3	3	100,00%
3	Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	Orang	6,40	6,39	99,88%	18.324	18.324	100,00%
4	Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	kegiatan	2,34	2,32	98,98%	16	16	100,00%
5	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	Kelompok Masyarakat	1,24	1,11	89,52%	1.170	1.170	100,00%
Total			29,05	28,47	98,02%	19.995	19.995	100,00%

Sumber: Sintesa (diolah)

Secara spasial, Belanja K/L melalui RO Harmonis yang bersinergi dengan DAK Fisik pada bidang Kesehatan dapat dilihat dari lokus pelaksanaan kegiatan yaitu:

- 1) Belanja untuk fasilitas kesehatan yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) dengan pagu sebesar Rp11,74 Miliar untuk

regional Lampung, termasuk di dalamnya pengadaan dan movev Alokasi.

- 2) Belanja untuk Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota sebagai intervensi untuk mencapai target prevalensi stunting sebesar 14% di tahun 2024 dengan pagu sebesar Rp7,33 miliar dilaksanakan di lokasi seluruh regional Lampung.
- 3) Belanja Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting untuk peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan dengan pagu sebesar Rp6,40 miliar dilaksanakan dengan target peserta dari seluruh regional Lampung.
- 4) Belanja kegiatan PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu dengan pagu sebesar Rp1,24 miliar yang dilaksanakan pada Kota Bandar Lampung.
- 5) Belanja untuk Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK dengan pagu sebesar Rp1,05 miliar yang dilaksanakan di semua regional Lampung.

Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan pada lokasi tersebut melengkapi kebermanfaatannya atas upaya pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui DAK Fisik antara lain:

- 1) Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting dengan total pagu sebesar Rp48,23 miliar. DAK Fisik tersebut dilaksanakan pada Lampung Selatan sebesar Rp10,43 miliar, Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara masing-masing Rp7,35 miliar dan Rp5,14 miliar, Pesawaran dan Pesisir Barat mendapatkan alokasi masing-masing sebesar Rp2,51 miliar dan Rp2,63 miliar. Tulang Bawang dengan Rp10,20 miliar, Metro sebesar Rp9,03 miliar, dan Way Kanan sebesar Rp905,84 juta.
- 2) Penguatan Sistem Kesehatan di Provinsi Lampung dengan total pagu Rp94,82 miliar, yang secara khusus dialokasikan ke berbagai daerah antara lain Lampung Selatan sebesar Rp4,81 miliar, Lampung Utara dan Mesuji masing-

masing sejumlah Rp16,49 miliar dan Rp2,97 miliar. Pringsewu sebesar Rp3,67 miliar, sementara Tanggamus dan Kabupaten Tulang Bawang sejumlah Rp16,53 miliar dan Rp4,84 miliar. Tulang Bawang Barat dan Way Kanan sebesar Rp3,01 miliar dan Rp7,98 miliar. Kota Bandar Lampung dan Kota Metro masing-masing sebesar Rp32,97 miliar dan Rp1,51 miliar

4.2.3.3. Bidang Pendidikan

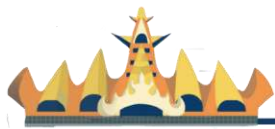
Bidang Pendidikan memiliki alokasi sebesar Rp55,59 Miliar dengan realisasi mencapai Rp55,44 Miliar atau 99,73 persen. Terdapat 9 RO yang masuk dalam Bidang Pendidikan dengan capaian output mencapai target bahkan beberapa di atas 100 persen sebagaimana tampak pada tabel 4.6.

Tabel 4.6. Alokasi Anggaran K/L Bidang Pendidikan (5 Tertinggi)

No.	Nama RO	Satuan	Pagu (Miliar)	Realisasi (Miliar)	% Realisasi	Volume RO	Realisasi RO	% Capaian RO
A	B	C	D	E	F=E/D	G	H	I
1	Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	Orang	26,80	26,77	99,87%	1.570	2.865	182,48%
2	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	13,31	13,26	99,59%	6.729	6.764	100,52%
3	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	Orang	12,75	12,71	99,69%	1.833	2.483	135,46%
4	Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	1,50	1,50	100,00%	5.869	5.869	100,00%
5	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	Orang	0,69	0,67	97,23%	340	428	125,88%
Total			55,06	54,91	99,73%	16.341	18.409	112,66%

Sumber: Sintesa (diolah)

Kegiatan dengan alokasi terbesar pada Bidang Pendidikan adalah RO Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru yaitu sebesar Rp26,80 Miliar dengan tingkat realisasi 100 persen. RO ini merupakan turunan dari program Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan. Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru ditujukan bagi seluruh Kepala Sekolah dalam rangka mendukung peningkatan



mutu. Sebagai pemimpin sekolah, kepala sekolah harus mampu kreatif dalam membuat program dan memimpin guru dan perangkat lainnya yang selaras dengan Program Merdeka Belajar. Kepemimpinan sekolah yang baik akan berdampak terhadap efektivitas sekolah dan kualitas belajar siswa. Kegiatan ini berhasil diikuti oleh 2.873 orang dari target 1.570 orang sehingga capaian output sebesar 182 persen.

Secara spasial, Belanja K/L melalui RO Harmonis yang bersinergi dengan DAK Fisik pada bidang Pendidikan dapat dilihat dari lokus pelaksanaan kegiatan yaitu:

- 1) Belanja untuk Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan melalui dekonsentrasi dengan pagu sebesar Rp351,97 juta akan dilaksanakan pada perpustakaan di regional Lampung.
- 2) Belanja untuk Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi dengan pagu sebesar Rp26,8 miliar yang dilaksanakan di Bandar Lampung.
- 3) Belanja untuk Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya dengan pagu sebesar Rp1,50 miliar yang dilaksanakan di Bandar Lampung.
- 4) Belanja Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah dengan pagu sebesar Rp358,78 juta yang dilaksanakan di Tanggamus, Pringsewu, Lampung Utara, dan Pesisir Barat.
- 5) Belanja untuk Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran dengan pagu sebesar Rp12,75 miliar yang dilaksanakan di Bandar Lampung.

Belanja-belanja yang dilaksanakan pada lokasi tersebut melengkapi kebermanfaatannya atas upaya pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui DAK Fisik untuk:

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mendapatkan dengan alokasi pagu sebesar Rp11,12 miliar, yang terdiri dari Lampung Barat sebesar Rp1,06 miliar, Lampung Selatan sebesar

Rp547,66 juta, Lampung Tengah dan Lampung Timur masing-masing Rp783,75 juta dan Rp924,69 juta, sedangkan Lampung Utara sebesar Rp1,62 miliar. Mesuji, Pesawaran, dan Pesisir Barat masing-masing sebesar Rp566,62 miliar, Rp554,58 miliar, dan Rp602,42 miliar. Sementara itu, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, dan Metro masing-masing sebesar Rp547,36 juta, Rp719,12 juta, Rp448,19 juta, Rp495,00 juta, Rp950,60 juta, dan Rp1.292,13 juta.

- 2) Pengembangan perpustakaan di berbagai daerah. Mesuji dengan pagu sebesar Rp937,56 juta, Pesawaran dengan total Rp10,99 miliar. Tulang Bawang Barat sebesar Rp941,39 juta, dan Way Kanan sebesar Rp500 juta.

4.2.3.4. Bidang Pertanian

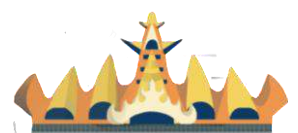
Bidang Pertanian memiliki alokasi sebesar Rp76,47 Miliar dengan realisasi mencapai Rp75,96 Miliar atau 99,33 persen. Terdapat 42 RO yang masuk dalam Bidang Pertanian dimana 22 kegiatan memiliki tingkat penyerapan sebesar 100 persen. Realisasi terendah terdapat pada RO Benih sumber aneka kacang yang dihasilkan yang hanya terserap sebesar 27 persen karena terjadinya fenomena El Nino sehingga program penanaman kacang tidak dapat berjalan secara optimal.

Tabel 4.7. Alokasi Anggaran K/L Bidang Pertanian (5 Tertinggi)

No.	Nama RO	Satuan	Pagu (Miliar)	Realisasi (Miliar)	% Realisasi	Volume RO	Realisasi RO	% Capaian RO
A	B	C	D	E	F=E/D	G	H	I
1	Pelayanan Kesehatan Hewan	layanan	33,41	33,30	99,69%	1.247	1.247	100,00%
2	Ternak Ruminansia Potong	Ekor	10,72	10,71	99,92%	600	600	100,00%
3	Area penyaluran benih padi	Hektar	9,78	9,70	99,11%	35.000	35.000	100,00%
4	Area penyaluran benih jagung	Hektar	4,73	4,72	100,00%	7.500	7.500	100,00%
5	Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura	unit	2,63	2,62	99,79%	70	70	100,00%
Total			61,26	61,06	99,67%	44.417	44.417	100,00%

Sumber: Sintesa (diolah)

Kegiatan dengan alokasi terbesar pada Bidang Pertanian adalah RO Pelayanan Kesehatan Hewan yaitu sebesar Rp26,80 Miliar dengan tingkat





realisasi dan capaian output 100 persen. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan merupakan salah satu program menuju masyarakat sehat dalam naungan *One Health*. Konsep *One Health* sendiri dapat didefinisikan sebagai pendekatan terpadu di bidang kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk menyeimbangkan dan mengoptimalkan kesehatan manusia, hewan, maupun ekosistem/lingkungan secara berkelanjutan.

Secara spasial, Belanja K/L melalui RO Harmonis yang bersinergi dengan DAK Fisik pada bidang Pertanian dapat dilihat dari lokus pelaksanaan kegiatan yaitu:

- 1) Belanja untuk peningkatan area penyaluran benih padi dengan pagu sebesar Rp9,78 miliar dilaksanakan di Bandar Lampung.
- 2) Belanja untuk area penyaluran benih jagung dengan pagu sebesar Rp4,73 miliar dilaksanakan di seluruh regional Lampung penghasil Jagung.
- 3) Belanja untuk Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur dengan pagu sebesar Rp2,27 miliar dilaksanakan di seluruh Lampung Selatan.
- 4) Belanja untuk pembelian Prasarana Pascapanen Hortikultura dengan pagu sebesar Rp0,96 miliar dilaksanakan di seluruh Bandar Lampung.
- 5) Belanja kegiatan Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan dengan pagu sebesar Rp1,90 miliar dilaksanakan di seluruh regional Lampung.

Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan pada lokasi tersebut melengkapi kebermanfaatan atas upaya pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui DAK Fisik antara lain:

- 1) Irigasi dan Pertanian di Provinsi Lampung dengan total pagu sebesar Rp40,24 miliar dan Rp42,05 miliar, masing-masing. Dalam sektor irigasi, dana ini secara tematik difokuskan pada penguatan kawasan sentra produksi pangan, termasuk pertanian, perikanan, dan peternakan, yaitu:
- 2) Irigasi Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan, Lampung Selatan sebesar Rp4,94 miliar, Lampung Tengah sebesar Rp4,46 miliar, Lampung Timur sebesar Rp530,34 juta,

Tulang Bawang sebesar Rp11,69 juta, dan alokasi besar diberikan untuk tingkat provinsi, yaitu Rp18,61 miliar.

- 3) Dukungan Pertanian Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan, alokasi anggaran terfokus pada pengembangan kawasan sentra produksi pangan di berbagai kabupaten. Lampung Selatan sebesar Rp6,79 miliar, Lampung Tengah sebesar Rp3,23 miliar, Lampung Timur sebesar Rp8,2 miliar, Lampung Utara sebesar Rp7,18 miliar, Tulang Bawang sebesar Rp2,76 miliar, dan tingkat provinsi yaitu Rp13,85 miliar.

4.2.3.5. Bidang Transportasi Pedesaan

Bidang Transportasi Pedesaan memiliki alokasi sebesar Rp1,24 Miliar dengan realisasi mencapai Rp1,24 Miliar atau 100 persen. Berbeda dengan bidang lainnya yang terdapat beragam kegiatan, hanya terdapat satu RO pada Bidang Pertanian yaitu Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi. RO ini memiliki tingkat penyerapan sebesar 100 persen dan capaian output 120 persen.

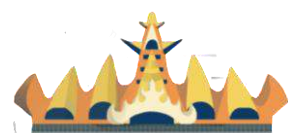
Tabel 4.8. Alokasi Anggaran K/L Bidang Transportasi Pedesaan

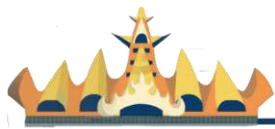
No.	Nama RO	Satuan	Pagu (Miliar)	Realisasi (Miliar)	% Realisasi	Volume RO	Realisasi RO	% Capaian RO
A	B	C	D	E	F=E/D	G	H	I
1	Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	km	1,25	1,25	100,00%	1	1,2	120,00%
Total			1,25	1,25	100,00%	1	1,2	120,00%

Sumber: Sintesa (diolah)

Secara spasial, Belanja K/L melalui RO Harmonis yang bersinergi dengan DAK Fisik pada bidang Transportasi Pedesaan dapat dilihat dari lokus pelaksanaan kegiatan yaitu pagu sebesar Rp1,25 miliar dilaksanakan di Mesuji.

Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan pada lokasi tersebut melengkapi kebermanfaatan atas upaya pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui DAK Fisik untuk pengembangan/rehabilitasi jalan pada Kawasan Transmigrasi sebesar Rp23,34 miliar di Mesuji.





4.3. KENDALA DAN TANTANGAN

Meskipun secara umum tingkat realisasi dan capaian output dapat tercapai bahkan beberapa di atas dari target, kegiatan yang berasal dari Belanja RO Harmonis DAK Fisik tidak luput dari berbagai permasalahan pelaksanaan anggaran. Kendala dan tantangan yang dialami oleh Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

1) Penganggaran, antara lain meliputi:

a. Revisi Anggaran

Perubahan pagu anggaran terjadi karena berbagai alasan seperti adanya perubahan prioritas belanja sehingga alokasi dikurangi dan terdapat sisa pagu kontraktual sehingga dioptimalkan pada kegiatan baru, yang dialami oleh Satker pada Kementerian PUPR. Proses revisi anggaran membutuhkan waktu yang cukup lama karena perlu dilakukan validasi dan verifikasi di tingkat Kementerian dan DJA. Hal ini menyebabkan pelaksanaan anggaran terganggu.

b. Halaman III DIPA

Revisi anggaran yang tidak segera selesai membuat pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda. Hal ini menyebabkan rencana penarikan dana (Halaman III DIPA) yang telah disusun oleh Satuan Kerja sebelumnya tidak optimal. Selain itu, tingginya deviasi pada Halaman III DIPA disebabkan oleh adanya juknis yang terlambat terbit sehingga kegiatan di lapangan tidak dapat segera dieksekusi. Permasalahan ini terjadi pada Satker lingkup Kementerian Kesehatan dimana juknis dari kantor pusat baru diterbitkan pada akhir bulan Maret 2023. Sehingga, jadwal pelaksanaan program terpaksa mundur dari target karena menyesuaikan dengan aturan yang berlaku.

c. Blokir Anggaran

Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Lampung mengalami

adanya blokir anggaran di awal tahun. Pengajuan buka blokir membutuhkan waktu yang cukup lama, yang menyebabkan Satuan Kerja harus menunggu hingga revisi anggaran selesai baru dapat melaksanakan program.

d. *Automatic Adjustment (AA)*.

Ketidakpastian waktu penyelesaian AA yang tidak dapat diprediksi dan akhirnya baru dibuka pada akhir triwulan III dan IV berpotensi menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan, khususnya kontrak yang membutuhkan proses panjang namun waktu yang tersedia tidak banyak. Blokir dan pembukaan blokir AA yang dilakukan pada triwulan berjalan dan melewati batas akhir pengajuan RPD Halaman III DIPA berpotensi mengakibatkan deviasi halaman III DIPA apabila kegiatan tersebut harus dilaksanakan pada triwulan berkenaan namun belum termasuk dalam rencana kegiatan yang telah disusun dan diajukan satker pada RPD Halaman III DIPA.

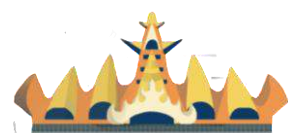
e. Sumber Dana SBSN

Adanya belanja dengan sumber dana SBSN yang terkonsentrasi di akhir tahun diantaranya karena terdapat paket yang putus kontrak pada semester I sehingga harus dikontrakan kembali. Namun demikian, sampai akhir tahun 2023 anggaran belanja tersebut dapat terserap secara optimal.

2) Sumber Daya Manusia, antara lain meliputi:

a. Kurangnya SDM

- Keterbatasan jumlah pegawai yang bersertifikasi pejabat perbendaharaan sehingga satker akan mengalami kesulitan dalam proses penyelesaian belanja apabila pejabat perbendaharaan berhalangan maupun mutasi.
- Arus mutasi pegawai yang dinamis pada satker mengakibatkan sering terjadinya perubahan pejabat dan staf pengelola keuangan yang belum mempunyai kompetensi maupun pengalaman di





bidang perbendaharaan dan teknis pengoperasian aplikasi perbendaharaan seperti SAKTI.

- Tidak banyak pegawai pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang masuk dalam tim pengelola keuangan. Sehingga, terdapat rangkap jabatan oleh para pegawai. Hal ini menyebabkan manajemen internal tidak dapat berjalan secara maksimal akibat keterbatasan personil.

b. Pergantian Pejabat Perbendaharaan

Kegiatan yang masuk dalam kategori Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan memiliki masalah dalam administrasi. Penyebabnya adalah SK pergantian KPA tidak segera diterbitkan oleh Gubernur sebagai pemegang dana Dekon-TP di daerah. Hal ini berakibat pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perpustakaan Provinsi Lampung menjadi tertunda.

c. Pemahaman terhadap Aplikasi

Kurangnya kompetensi dan pemahaman SDM pengelola keuangan pada beberapa satker terhadap regulasi pengelolaan keuangan maupun pengoperasian aplikasi perbendaharaan. Selain itu, koordinasi internal satker yang belum optimal baik antar pengelola keuangan (operator keuangan dan operator perencanaan) maupun antara pengelola keuangan dengan tim teknis pada satuan kerja sehingga rencana dan realisasi menjadi tidak sejalan serta mengakibatkan adanya kegiatan dalam DIPA yang tidak terlaksana.

3) Eksekusi Kegiatan, antara lain meliputi:

a. Faktor Luar

Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, kondisi lapangan tidak selalu dapat diprediksi. Misalnya cuaca yang terlalu ekstrem atau material yang tidak tersedia. Hal ini menjadi hambatan bagi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dimana

eksekusi kegiatan terhambat karena kemarau yang panjang. Selain itu, proses pemeliharaan tidak dapat langsung dilaksanakan karena perlu menunggu juknis lanjutan yang diterbitkan oleh Kementerian.

b. Kesiapan Pedoman Umum, Petunjuk Teknis, Dokumen Pelaksanaan Lain

Satker Balai Penyidikan Dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung memperoleh tambahan dana sebesar Rp2,18 Miliar pada pertengahan tahun. Namun, kegiatan tersebut tidak dapat langsung dilaksanakan karena Kementerian Pertanian belum menerbitkan petunjuk teknis kegiatan. Sehingga program baru dapat terealisasi pada akhir tahun.

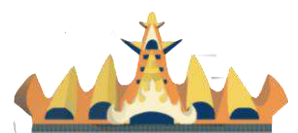
c. Kekurangan Prasyarat

Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sudah menggunakan teknologi terbaru. Pelayanan Kesehatan hewan harus terintegrasi dengan BAST Online sehingga verifikasi pelayanan lebih akuntabel. Namun demikian, terdapat kendala jaringan di lapangan sehingga beberapa BAST *Online* tidak masuk langsung ke dalam sistem. Hal ini mengakibatkan proses penyerapan anggaran menjadi terlambat dari target yang telah ditetapkan.

d. Proses Penetapan Bantuan

Penerima bantuan yang belum ditetapkan membuat kegiatan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian Perikanan dan Hewani) pada Satker Balai Penyidikan Dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung menjadi terhambat. Program pemberian berupa Ternak Ruminansia Potong tertunda karena nama kelompok penerima aspirasi dari DPR belum keluar seluruhnya. Sehingga, pemberian bantuan baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun.

e. Proses pembagian bantuan





Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung mengalami kendala dalam melaksanakan program Pelayanan Kesehatan Hewan. Penyebabnya, Para Penyuluh kesehatan dengan vaksinnnya dan pengobatannya terkendala posisi pembagian bantuan ke masyarakat karena posisi hewan di luar desa/ rumah warga pemilik hewan. Sehingga pelaksanaan vaksinasi untuk hewan menjadi kurang efektif.

4) Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain meliputi:

a. Proses Lelang

Beberapa K/L memiliki sistem lelang secara terpusat seperti pada Kementerian Pendidikan (unit eselon I), Kementerian Agama (ULP Kanwil Kementerian Agama Provinsi), dan Kementerian Kesehatan (unit eselon I). Kontrol satker atas pelaksanaan lelang secara terpusat sangat rendah sehingga satker hanya mengikuti petunjuk dari kantor pusat maupun kanwil. Hal ini mengakibatkan waktu yang diperlukan untuk proses lelang menjadi lebih lama, dan mundurnya pelaksanaan pekerjaan.

b. Keterbatasan Penyedia Barang/Jasa

Beberapa Satker pada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan memiliki kendala dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa yakni beberapa barang yang telah diidentifikasi/direncanakan pengadaannya tidak memenuhi unsur TKDN sehingga beberapa tidak dapat dieksekusi. Selain itu, penyedia TKDN yang telah tersertifikasi di Provinsi Lampung juga terbatas. Jika dilihat dari aplikasi yang disediakan Kemenperindag (tkdn.kemenperin.go.id), hanya terdapat 31 penyedia TKDN yang telah bersertifikat pada provinsi Lampung.

c. TKDN

Satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung mengalami kendala teknis terkait TKDN. Izin dispensasi terkait

TKDN tidak segera terbit dari Kementerian, sehingga eksekusi pengadaan baru dapat dilaksanakan pada triwulan IV. Dispensasi tersebut diperlukan karena hampir seluruh peralatan/ mesin laboratorium yang akan dibeli merupakan produk impor. Kebanyakan vendor belum memenuhi persyaratan TKDN serta kesulitan untuk memenuhi persyaratan TKDN sehingga harus mendapatkan izin TKDN terlebih dahulu sebelum memutuskan pemenang lelang.

d. e-Katalog

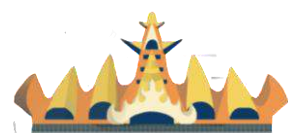
Adanya keterbatasan penyedia dan spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan satker pada pengadaan dengan mekanisme e-Katalog.

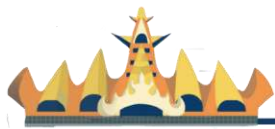
e. Lelang Dini

Terdapat risiko kontrak atas alokasi anggaran yang diblokir atau bahkan berkurang atau ditolak dari usulan awal, sehingga PBJ atas kegiatan tersebut berisiko mengalami kemunduran waktu atau bahkan kegagalan kontrak. Permasalahan ini terjadi pada Kementerian Agama (IAIN Metro), di mana sudah melakukan kontrak pra DIPA namun s.d akhir Semester I belum terdapat progres fisik akibat blokir. Selain itu, masih kurangnya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan Kontrak Pra DIPA, sebagian besar pimpinan satker masih menganggap pelaksanaan anggaran baru dapat dimulai pada Januari.

f. Kegagalan Lelang

Terdapat program yang dilaksanakan oleh Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Lampung mengalami putus kontrak. Padahal, kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebagian tetapi di tengah jalan dihentikan secara sepihak oleh pihak ketiga. Kejadian ini menyebabkan kesulitan dalam penagihan kepada kontraktor. Selain itu, Satker terkait harus melakukan lelang kembali sehingga target penyelesaian pekerjaan menjadi mundur.





5) Regulasi Pelaksanaan Anggaran, antara lain meliputi:

a. Regulasi K/L

Keterlambatan penentuan nomenklatur Satker sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan anggaran.

b. Regulasi Pemerintah Pusat

Kebijakan pemerintah pusat yang berubah dapat menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi terhambat. Hal ini dialami oleh Satker Pelaksanaan anggaran BPMP Provinsi Lampung. Terdapat kegiatan oleh Kementerian Pendidikan mengenai program Merdeka Belajar yang belum dialokasikan pada proses perencanaan. Karena kegiatan ini bersifat *mandatory*, Satker BPMP Provinsi Lampung harus melakukan revisi terlebih dahulu dan menyebabkan deviasi pada perencanaan belanjanya di Halaman III DIPA.

c. Regulasi Pemda

Satker BKKBN Lampung memiliki permasalahan ketika akan melakukan kegiatan Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kendala tersebut adalah lambatnya pemberian kepastian jadwal dengan mitra Kerja Sama dalam hal ini adalah pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang harus menunggu kepastian jadwal dari seluruh pihak sehingga penyelesaian kegiatan tidak sesuai jadwal.

4.4. UPAYA SINKRONISASI DI DAERAH OLEH SATKER DAN PEMDA

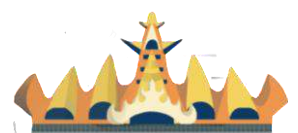
Untuk memastikan keberlangsungan kegiatan RO Harmonis DAK Fisik yang efektif dan efisien, Pemerintah Daerah dan Satker Kementerian Lembaga melakukan berbagai upaya. Pertama, sinkronisasi perencanaan anggaran menjadi

langkah kunci. Ini melibatkan analisis pada tahap penyusunan anggaran untuk menghindari tumpang tindih antara APBD dan APBN, terutama yang terkait dengan DAK Fisik. Proses ini dipimpin oleh Satker di Kementerian Kesehatan dengan koordinasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Setelah tahap regional, hasil analisis diverifikasi secara pusat untuk meningkatkan efisiensi penganggaran.

Kedua, evaluasi rutin menjadi penting dalam memantau pelaksanaan anggaran. Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung mengadakan rapat koordinasi bulanan dengan pemerintah daerah, seringkali melalui platform daring. Mekanisme ini memungkinkan pemantauan progres pelaksanaan program secara berkala, memastikan ketercapaian target yang ditetapkan.

Ketiga, koordinasi dengan KPPN dan Kanwil DJPb menjadi strategis dalam mengatasi hambatan pelaksanaan anggaran. Tujuannya adalah mencari solusi atas permasalahan yang mungkin timbul sehingga pelaksanaan anggaran tidak terhambat oleh kendala administratif atau teknis.

Ke depan, harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi prioritas. Hal ini sejalan dengan kerangka Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN) yang diatur dalam PP 1/2024. Proses ini melibatkan penyesuaian antara Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Pemerintah Pusat dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Pemerintah Daerah. Selain itu, harmonisasi Belanja DAK Fisik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan RO Harmonis DAK Fisik melalui Kementerian Lembaga juga akan dimasukkan dalam kerangka ini. Langkah ini diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, pertumbuhan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

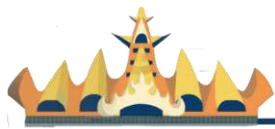


“ Jangan pernah lelah mencintai Indonesia dengan mengelola APBN secara baik dan bertanggung jawab ”
-Sri Mulyani-
Menteri Keuangan RI

ANALISIS TEMATIK

BAB V





BAB V ANALISIS TEMATIK: SINERGI PUSAT-DAERAH DALAM UPAYA PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA YANG BERDAYA SAING

5.1. PENDAHULUAN

Kajian Fiskal Regional (KFR) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung tahun 2023 akan memperdalam analisis mengenai keterkaitan antara variabel kualitas SDM (tenaga kerja), tingkat investasi, dan tingkat pengangguran di regional Lampung. Keberhasilan pembangunan daerah dapat diukur melalui beberapa indikator, salah satunya adalah tingkat pengangguran di regional Lampung. Pembangunan ekonomi terkait erat dengan peran Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai input utama dalam pembangunan, baik sebagai tenaga kerja maupun konsumen hasil pembangunan. Meskipun jumlah penduduk dan pasokan tenaga kerja meningkat, ketersediaan lapangan kerja yang belum memadai dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di regional dan nasional.

Tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi, dengan pemerintah memiliki target menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 3,6 – 4,3 persen pada tahun 2024. Di regional Lampung, target TPT ditetapkan turun menjadi 4,00 – 4,30 persen pada akhir tahun 2023 dan 3,80 – 4,00 untuk tahun 2024. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses pendidikan, keahlian, dan keterampilan tenaga kerja mempengaruhi tingkat pengangguran. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dalam sektor pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta mengurangi tingkat pengangguran. Dukungan anggaran dari APBN dan APBD, terutama dalam program pendidikan dan pelatihan, menjadi langkah penting. Investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, juga dianggap sebagai upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong pertumbuhan

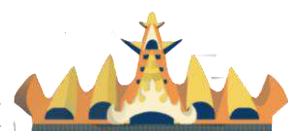
ekonomi, dengan kemudahan berinvestasi, izin usaha, dan iklim investasi menjadi faktor kunci dalam menarik investor ke suatu daerah. Analisis lebih lanjut dalam bab ini meliputi upaya pengurangan pengangguran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing, serta keterkaitan antara kualitas SDM (tenaga kerja) dan tingkat investasi dengan tingkat pengangguran di regional Lampung.

5.2. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN TENAGA KERJA DI REGIONAL LAMPUNG

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan tenaga kerja di regional Lampung dan Nasional, pemerintah melakukan intervensi yang lebih serius dalam sektor pendidikan dan pelatihan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk memperbaiki produktivitas dan kualitas tenaga kerja.

Salah satu langkah yang diambil adalah alokasi 20 persen anggaran untuk pendidikan, peningkatan kualitas guru, manajemen sekolah, dan proses belajar mengajar. Selain itu, kebijakan *Active Labour Market Policy* (AMLMP) juga diterapkan dengan harapan dapat menurunkan tingkat pengangguran dan menciptakan pasar tenaga kerja yang inklusif. Salah satu aspek penting dari AMLP adalah Reformasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, yang mengedepankan kualitas pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Revitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan, memperluas akses ke lapangan kerja, serta meningkatkan kesesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Langkah-langkah konkrit





termasuk implementasi pendidikan vokasi di Kemendikbudristek, pelatihan vokasi di BLK dan BLKK, program pemagangan, peningkatan produktivitas, dan transformasi program BLK.

5.2.1. Peran Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Pada Sektor Pendidikan & Pelatihan, Serta Peningkatan Kompetensi SDM Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas SDM Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pemerintah Pusat dan Daerah, menggunakan APBN dan APBD secara sinergis di regional Lampung untuk terus berupaya optimal agar pengeluaran negara bekerja efektif dalam meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka menurunkan pengangguran.

Dari sisi APBN, uang negara yang telah dikeluarkan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja di regional Lampung disalurkan melalui:

1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) melalui 15 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 105 satuan kerja pemerintah pusat (satker); serta
2. Transfer ke Daerah (TKD) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik yang disalurkan ke masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda).

Dari sisi BPP, seluruh K/L melaksanakan dukungan terhadap peningkatan SDM dan peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui berbagai output yaitu: fasilitasi dan pembinaan masyarakat dalam hal UMKM, industri, pertanian, perikanan, pariwisata, dan keolahragaan; dukungan proyek-proyek padat karya yang menyerap tenaga kerja; dukungan dan fasilitasi pelatihan tenaga kerja sektor strategis; peningkatan kualitas pendidikan umum; serta peningkatan kualitas pendidikan vokasi.

Sedangkan, dari sisi Transfer ke Daerah, DAK Fisik dan DAK Non Fisik telah disalurkan ke Pemda, yang kemudian direalisasikan ke dalam output-output DAK Fisik seperti dukungan peningkatan kualitas PAUD, sekolah reguler (SD s.d. SMA/K), SLB, SKB,

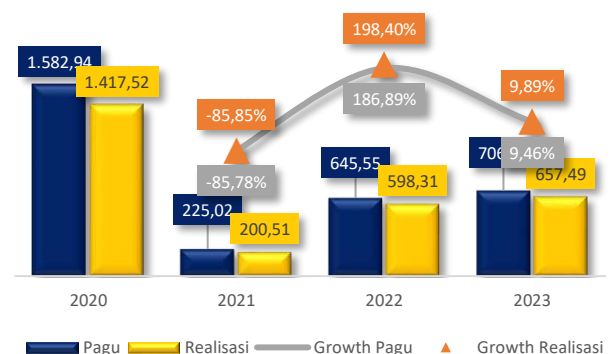
dan perpustakaan daerah; serta output-output DAK Non Fisik seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada PAUD, Pendidikan Kesetaraan, Sekolah Afirmasi, Sekolah Kinerja, dan Sekolah Reguler (SD s.d. SMA/K).

5.2.1.1. Dukungan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Meningkatkan Kualitas SDM, Ketenagakerjaan, dan Penurunan Pengangguran di Regional Lampung

Belanja K/L terkait peningkatan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka penurunan pengangguran dari tahun 2020 s.d. 2023 menunjukkan tren fluktuatif, dan cenderung lebih rendah dibandingkan sebelum terjadinya pandemi COVID-19 dan *downside risk* terhadap perekonomian dari risiko ketidakpastian global sebagaimana tampak pada grafik 5.1.

Alokasi dana di tahun 2021 turun signifikan sebesar 85,78 persen (*yoy*), Sejalan dengan alokasi dana yang menurun, realisasi di tahun 2021 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 85,85 persen (*yoy*). Kemudian, alokasi dan realisasi belanja K/L terkait pengurangan pengangguran kembali mengalami peningkatan di tahun berikutnya meskipun tidak sebesar tahun 2020 atau masa-masa sebelum pandemi COVID-19.

Grafik 5.1. Belanja Pemerintah Pusat Terkait Peningkatan Kualitas SDM dan Penurunan Pengangguran (dalam miliar Rp dan persentase)



Sumber: DJPb, 2023 (diolah)

Analisis lebih detail dapat dilihat dalam Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang ditampilkan pada grafik 5.2. sebagai berikut.



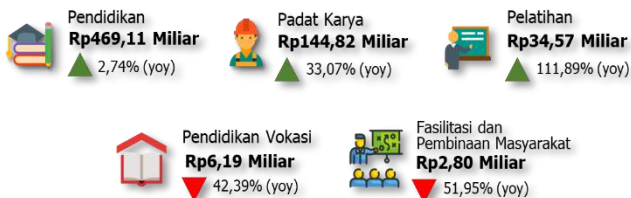
Grafik 5.2. Realisasi Belanja K/L Per Jenis KRO (Miliar Rupiah)



Sumber: DJPb, 2023 (diolah)

Secara keseluruhan, dalam 4 tahun terakhir (era *pandemic* dan *post-pandemic*), realisasi belanja K/L per jenis KRO di regional Lampung menunjukkan tren positif meskipun terdapat beberapa kategori yang mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah pusat dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja.

Gambar 5.1. Realisasi dan Growth (yoy) Belanja K/L per Jenis KRO Tahun 2023



Sumber: DJPb, 2023 (diolah)

Namun demikian, apabila dilihat lebih detail per jenis KRO pada tahun 2023 sebagaimana tampak pada Gambar 5.1, terdapat beberapa temuan menarik sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023, realisasi Belanja K/L melalui KRO Pendidikan merupakan yang paling besar yaitu sebesar Rp469,11 miliar atau tumbuh 2,74 persen (*yoy*) dari periode yang sama tahun lalu. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah melalui alokasi anggaran untuk pendidikan di regional Lampung. Output-output pada kategori ini berhubungan dengan peningkatan

akses, kualitas, dan kesetaraan pendidikan reguler PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan sekolah afirmasi.

2. Realisasi Belanja K/L melalui KRO Padat Karya menjadi porsi terbesar kedua dengan nilai Rp144,82 miliar atau mengalami pertumbuhan positif sebesar 33,07 persen pada tahun 2023, yang menandakan adanya peningkatan investasi dan *concern* pada proyek-proyek berbasis padat karya dimana menyerap tenaga kerja secara langsung dan meningkatkan perekonomian Lampung.
3. Realisasi Belanja K/L melalui KRO Pelatihan juga mengalami lonjakan sebesar 111,89 persen pada tahun 2023, dengan total nilai sebesar Rp34,57 miliar. Hal ini dikarenakan terdapat inisiatif baru atau peningkatan kebutuhan akan pelatihan di sektor pertanian yang menjadi sektor basis di Lampung.
4. Realisasi Belanja K/L melalui KRO Pendidikan Vokasi adalah sebesar Rp6,19 miliar atau mengalami penurunan sebesar 42,39 persen pada tahun 2023. Pendidikan vokasi sendiri sangat penting di regional Lampung karena cukup berhubungan langsung dengan peningkatan keterampilan SDM siap kerja pada *entry level*, kewirausahaan, dan keterserapan lulusan pendidikan vokasi baik di sektor usaha formal maupun informal.
5. Realisasi Belanja K/L melalui KRO Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat mengalami penurunan signifikan sebesar 51,95 persen pada tahun 2023, yang menunjukkan adanya efisiensi alokasi anggaran pada sektor tersebut.

5.2.1.2. Dukungan Transfer Ke Daerah (TKD) dalam Meningkatkan Kualitas SDM, Ketenagakerjaan, dan Penurunan Pengangguran di Regional Lampung

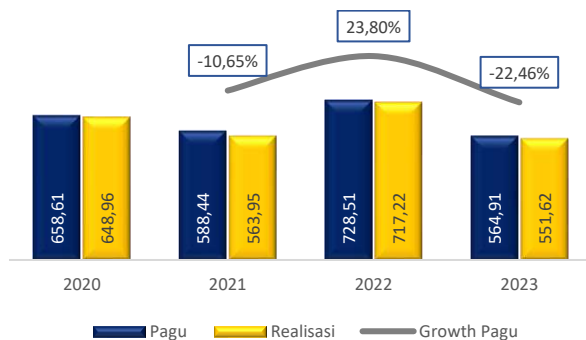
Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik di Bidang Pendidikan di Wilayah Lampung dari Tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan pola yang mengalami fluktuasi sebagaimana tampak pada

grafik 5.3. Penurunan terjadi pada alokasi DAK Fisik dan Non Fisik pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2022. Fluktuasi ini dapat dijelaskan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi kebijakan alokasi pendanaan pendidikan di Lampung.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi fluktuasi alokasi DAK bidang pendidikan di Lampung adalah kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan prioritas nasional serta kriteria alokasi DAK Fisik. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Lampung yang membutuhkan perbaikan atau peningkatan sesuai dengan standar pelayanan minimal juga turut mempengaruhi alokasi dana.

Kemudian, kinerja dan kemampuan daerah dalam mengusulkan, menyalurkan, melaporkan, dan memanfaatkan DAK Fisik dan Non Fisik secara efektif dan efisien menjadi faktor penting lainnya. Tingkat efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan alokasi dana memainkan peran krusial dalam menentukan jumlah alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat pada wilayah Lampung.

Grafik 5.3. Perkembangan DAK Fisik Bidang Pendidikan di Regional Lampung pada 2020 s.d. 2023 (dalam miliar Rp dan persentase)



Sumber: OMSPAN (diolah)

Pada tahun 2021, alokasi DAK Bidang Pendidikan (Fisik dan Non Fisik) mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun 2020, kemudian jika dicermati dari nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), nilai TPT Lampung tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen dari tahun 2020 sehingga tercatat sebesar 4,69 persen.

Alokasi DAK bidang pendidikan mengalami penurunan pada tahun 2021 karena adanya dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi perekonomian nasional dan daerah, serta kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan prioritas nasional dan kriteria alokasi DAK Fisik dan Non Fisik yang lebih responsif setiap tahun.

Nilai TPT Lampung meningkat pada tahun 2021 dimana dapat disebabkan oleh adanya pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19, serta perubahan komposisi 'pemberi kerja-tenaga kerja' yang memperparah *mismatch* antara kualitas SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian, alokasi dan realisasi DAK bidang Pendidikan meningkat di tahun 2022 dan tahun 2023 walaupun pagu turun sedikit. Namun, penurunan DAK tersebut tidak membuat angka TPT naik pada 2023 dimana menunjukkan perbaikan keseimbangan antara SDM dan pasar tenaga kerja.

Pada tahun 2022, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan di Lampung mencapai puncaknya dalam empat tahun terakhir. Penyebab peningkatan alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan di Lampung pada tahun 2022 dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang *prominent*, yaitu:

1. Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah Lampung berhasil menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam pemenuhan dan penyampaian syarat-syarat yang diperlukan untuk penyaluran DAK Fisik, terutama dalam sektor pendidikan dan infrastruktur yang memiliki pagu alokasi yang besar. Keberhasilan ini mungkin tercermin dalam peningkatan efisiensi administrasi, peningkatan transparansi, dan perbaikan dalam pengelolaan proyek-proyek pendidikan.
2. Peningkatan Kebijakan Pemerintah Pusat Yang Strategis. Kebijakan pemerintah pusat yang mengarahkan alokasi DAK fisik untuk mendukung sasaran outcome Angka Partisipasi Kasar (APK) dalam Rencana Strategis Kemdikbudristek turut berkontribusi pada

peningkatan alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan di Lampung. Fokus pada aspek afirmasi akses dan pemenuhan pelayanan minimal dalam pendidikan menjadi faktor penting dalam penentuan alokasi dana oleh pemerintah pusat.

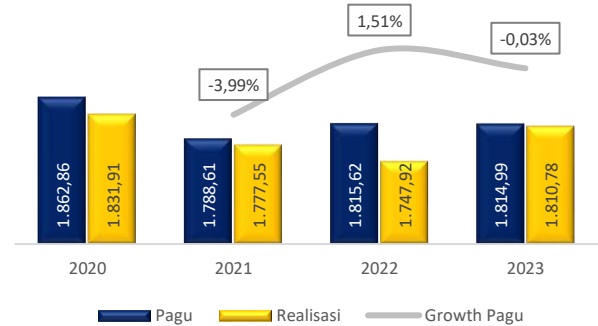
Namun demikian, pada tahun 2023, DAK Fisik di regional Lampung menunjukkan pagu dan realisasi yang menurun daripada tahun 2022 dan sedikit lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Adanya penyesuaian kriteria dan syarat penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun 2023 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang meliputi menu kegiatan, kriteria lokasi prioritas, tata cara pelaksanaan kegiatan, mekanisme pengadaan barang jasa, spesifikasi dan/atau standar teknis target keluaran, pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan capaian hasil jangka pendek. Penyesuaian ini sedikit banyak menyebabkan daerah yang sebelumnya mendapatkan alokasi DAK Fisik tidak memenuhi kriteria atau syarat baru, atau mendapatkan alokasi yang lebih rendah.
2. Selain itu, terdapat kondisi keterbatasan anggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun 2023 yang harus dibagi dengan daerah-daerah lain yang juga membutuhkan perbaikan atau penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Hal ini menyebabkan daerah yang sebelumnya mendapatkan alokasi DAK Fisik lebih tinggi mengalami penyesuaian alokasi.

Dalam hal DAK Non Fisik, dalam 4 tahun terakhir menunjukkan tren yang lebih baik daripada DAK Fisik, dengan nilai realisasi pada 2023 sebesar Rp1.810,78 Miliar, lebih tinggi daripada realisasi pada 2022 sebesar Rp1.747,92 Miliar sebagaimana tampak pada grafik 5.4. Beberapa hal yang dapat menjelaskan peningkatan tersebut, antara lain karena adanya peningkatan kualitas layanan publik bidang pendidikan di Lampung, yang didukung oleh

peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mengusulkan, menyalurkan, melaporkan, dan memanfaatkan DAK Non Fisik secara efektif dan akuntabel.

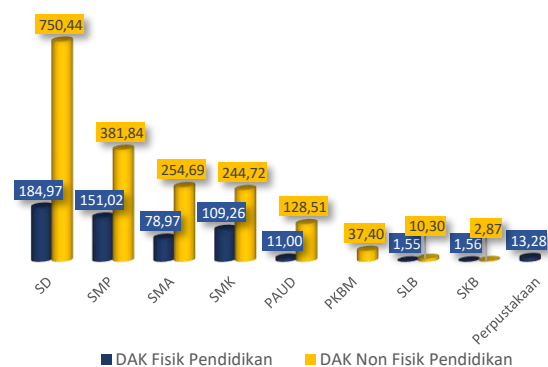
Grafik 5.4. Perkembangan DAK Non Fisik Bidang Pendidikan di Regional Lampung pada 2020 s.d. 2023 (dalam miliar Rp dan persentase)



Sumber: OMSPAN, SIMTRADA (diolah)

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun non-fisik, hingga Desember 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar dialokasikan pada tingkat pendidikan dasar (SD) sebagaimana tampak pada grafik 5.5. Komposisi realisasi DAK Fisik mencapai 33,53 persen, sementara DAK Non Fisik mencapai 41,44 persen dari total realisasi, yang menegaskan fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan mutu pendidikan pada jenjang awal yang fondasional.

Grafik 5.5. Realisasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2023 per tingkat pendidikan (dalam miliar Rp)



Sumber: OMSPAN, SIMTRADA (diolah)

Pada tingkat pendidikan menengah pertama (SMP), DAK Fisik dan DAK Non Fisik masing-masing menyumbang 27,38 persen dan 21,09 persen dari total realisasi. Kondisi ini menunjukkan upaya untuk memberikan dukungan yang seimbang pada jenjang

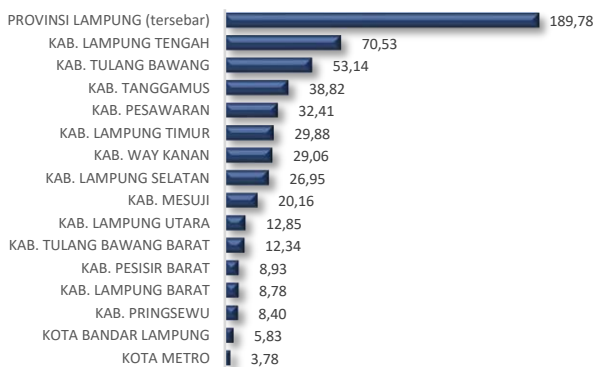
SMP dalam hal Infrastruktur dan program-program pendidikan Non Infrastruktur terkait kegiatan belajar mengajar.

Namun demikian, tantangan nyata terletak pada tingkat pendidikan menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK), di mana tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai puncaknya pada Agustus 2023. TPT untuk kelompok SMA mencapai 7,71 persen, sementara untuk SMK mencapai 7,52 persen, menyoroti perlunya peningkatan akses dan kualitas pendidikan pada jenjang ini.

Realisasi DAK untuk tingkat pendidikan SMA menunjukkan komposisi sebesar 14,32 persen untuk DAK fisik dan 14,07 persen untuk DAK non-fisik, sementara di tingkat SMK, komposisi adalah 19,81 persen untuk DAK Fisik dan 13,51 persen untuk DAK Non Fisik. Hal ini menunjukkan perhatian yang meningkat terhadap peningkatan infrastruktur dan pengembangan kurikulum serta program-program pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Dengan alokasi DAK yang strategis untuk bidang Pendidikan, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam mutu pendidikan dan kemampuan siswa/siswi di setiap jenjang pendidikan. Upaya ini sejalan dengan tujuan pembangunan pendidikan nasional untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing di tingkat global.

Grafik 5.6. Realisasi DAK Fisik Bidang Pendidikan berdasarkan lokasi di regional Lampung (dalam miliar Rp)



Sumber: OMSPAN, SIMTRADA (diolah)

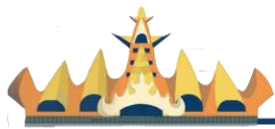
Terdapat variasi yang cukup besar dalam realisasi DAK Fisik antara berbagai daerah di Lampung sebagaimana tampak pada grafik 5.6. Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Tanggamus adalah yang paling memiliki realisasi besar dengan masing-masing Rp70,53 miliar, Rp53,14 miliar, dan Rp38,82 miliar. Sementara itu, Kota Metro memiliki realisasi terendah dengan hanya Rp3,78 miliar.

Dari data yang ada, secara umum alokasi DAK Fisik cenderung berkorelasi dengan ukuran populasi dan kebutuhan infrastruktur pendidikan di suatu daerah. Kabupaten dengan populasi yang lebih besar atau kebutuhan pendidikan yang lebih mendesak cenderung menerima alokasi yang lebih besar. Hal ini juga tercermin dalam alokasi dan realisasi DAK Fisik Bidang Pendidikan di regional Lampung.

5.2.2. Dukungan Belanja APBD dalam Meningkatkan Kualitas SDM, Ketenagakerjaan, dan Penurunan Pengangguran di Regional Lampung

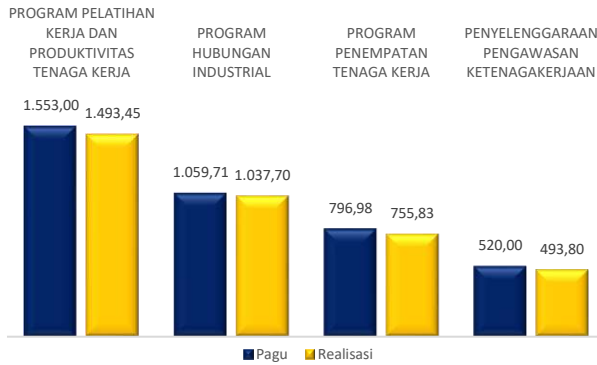
Alokasi dana APBD terkait penanggulangan pengangguran daerah Lampung dibagi dalam 4 program, yaitu: (1) pengawasan ketenagakerjaan, (2) pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, (3) penempatan tenaga kerja, dan (4) hubungan industrial, sebagaimana tampak pada grafik 5.7. dan tabel 5.1.

Alokasi dana APBD pada tahun terakhir didominasi oleh program pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Kegiatan ini memiliki alokasi tertinggi, terutama dalam pelaksanaan latihan kerja berdasarkan kluster kompetensi dengan pagu mencapai Rp1.200 juta. Hingga bulan Desember 2023, realisasi dana untuk kegiatan ini telah mencapai Rp1.194,84 juta atau 99,57 persen dari pagu yang tersedia. Sebanyak 320 pencari kerja telah mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Kluster Kompetensi. Selain itu,



program ini juga melibatkan survei dan penilaian akreditasi terhadap lembaga pelatihan kerja, dengan 20 LPK telah dinilai, serta memberikan konsultasi produktivitas kepada 30 perusahaan menengah.

Grafik 5.7. Program Penanggulangan Pengangguran Daerah Provinsi Lampung 2023 melalui APBD (Rp Juta)



Sumber: OMSPAN, SIMTRADA (diolah)

Tabel 5.1. Program dan Kegiatan Penanggulangan Pengangguran Daerah Provinsi Lampung 2023 melalui APBD (Rp Juta)

PROGRAM – KEGIATAN MELALUI APBD	PAGU	REALISASI	% REAL
A	B	C	D=C/B
1. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.553,00	1.493,45	96,17
Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Menengah	175,00	127,68	72,96
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	78,00	74,06	94,95
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	1.200,00	1.194,84	99,57
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	100,00	96,86	96,86
2. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.059,71	1.037,70	97,92
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	138,79	134,04	96,58
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK)	203,85	198,72	97,48
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih Dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	717,07	704,94	98,31
3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	796,98	755,83	94,84
Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	207,15	201,59	97,31
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100,00	90,25	90,25
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	489,83	464,00	94,73
4. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	520,00	493,80	94,96
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	520,00	493,80	94,96

Sumber: Pemprov Lampung (diolah)

Pagu dan realisasi terbesar kedua terdapat pada program Hubungan Industrial, dengan realisasi sebesar Rp1.037,70 juta atau 97,92 persen dari pagu yang dialokasikan. Kegiatan dalam program ini mencakup pendataan dan informasi tentang sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan pembuatan 50 laporan. Selain itu, program ini juga mencakup pencegahan perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berdampak pada kepentingan di satu daerah provinsi, dengan capaian penanganan sebanyak 20 perkara. Verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan organisasi penguasa, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/buruh serta non-afiliasi juga termasuk dalam kegiatan ini, dimana melibatkan 45 perusahaan. Program ini juga bertanggung jawab atas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Program penempatan tenaga kerja mendapatkan alokasi dana APBD sebesar Rp796,98 juta, dengan realisasi mencapai Rp755,83 juta atau 94,84 persen. Terdapat tiga kegiatan dalam program ini. Pertama, pengelolaan informasi pasar melalui penyediaan informasi pasar kerja secara *online*. Kedua, perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik pra maupun purna penempatan di daerah provinsi, meliputi penyediaan layanan terpadu kepada 500 PMI dan pemberdayaan PMI purna penempatan sebanyak 200 orang. Ketiga, pelayanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota, termasuk penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja sebanyak 120 orang, serta pembinaan operasionalisasi pelayanan penempatan tenaga kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja lokal (AKL) bagi 150 orang.

Untuk program dan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan, realisasi dana mencapai Rp493,80 juta atau 94,96 persen dari alokasi yang disediakan. Dana ini digunakan untuk pelaksanaan pengawasan terhadap norma kerja di perusahaan (50 perusahaan), penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan (20 kasus), serta





pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan (25 perusahaan).

5.2.3. Perkembangan Kualitas SDM Regional Lampung

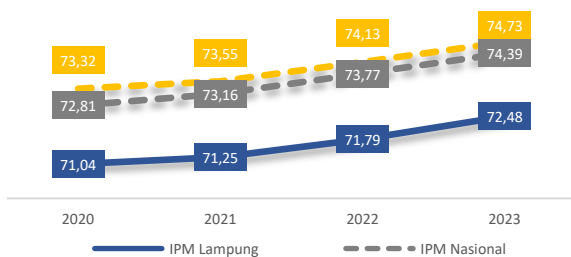
5.2.3.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Regional Lampung

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia berdasarkan tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM dapat menunjukkan tingkat kemajuan suatu wilayah atau negara dalam mencapai pembangunan manusia yang baik (BPS, 2023).

Pada Bab II tentang Analisis Ekonomi Regional telah dijelaskan mengenai IPM. Namun, bagian ini akan mengupas IPM lebih lanjut dalam konteks spasial di regional Lampung, sehingga dapat memberikan konteks atas perkembangan investasi dan penurunan tingkat pengangguran.

IPM Lampung menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2020 s.d. 2023 sebagaimana tampak pada grafik 5.8. IPM Lampung pada tahun 2020 adalah sebesar 71,04, kemudian meningkat menjadi 72,48 pada tahun 2023 atau mengalami peningkatan sebesar 1,44 basis poin dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Peningkatan IPM Lampung tersebut didorong oleh peningkatan pada semua komponen penyusunnya, yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita.

Grafik 5.8. Perkembangan IPM Lampung 2020 s.d. 2023 (Perbandingan Regional dan Nasional)

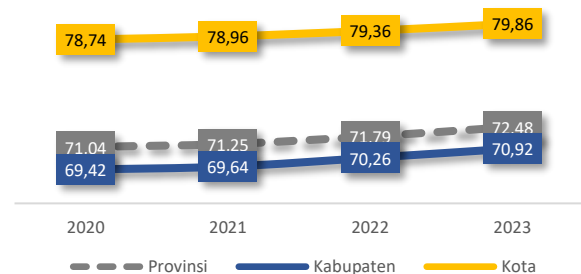


Sumber: BPS Lampung (diolah)

Meskipun mengalami peningkatan, IPM provinsi Lampung mencatatkan angka yang lebih rendah jika dibandingkan level regional Sumatera dan nasional. Pada tahun 2020 IPM nasional dan IPM regional Sumatera adalah masing-masing sebesar 73,32 dan 72,81. Sedangkan, pada tahun 2023 IPM nasional dan IPM regional Sumatera adalah masing-masing sebesar 74,39 dan 74,37. Selain itu, Lampung juga merupakan provinsi dengan IPM terendah di regional Sumatera selama tahun 2020 s.d. 2023.

Walaupun *rate* perbaikan Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Lampung tidak secepat perbaikan IPM di level nasional, namun cukup cepat mengikuti perkembangan IPM di level regional. Hal ini mengindikasikan bahwa Lampung masih memiliki tantangan cukup berarti dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, terutama dalam hal mencapai level pendidikan dan standar hidup yang dimiliki oleh daerah-daerah dengan investasi dan *spill-over* ekonomi yang lebih baik.

Grafik 5.9. Perkembangan IPM Lampung 2020 s.d. 2023 (Per Klaster Pemerintah Daerah)



Sumber: BPS Lampung (diolah)

Perkembangan IPM Lampung tahun 2020 hingga 2023 dapat dilihat pada grafik 5.9. IPM Provinsi Lampung lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata IPM klaster kota di regional Lampung. IPM provinsi Lampung pada tahun 2023 adalah sebesar 72,48, sedangkan IPM dua kota di regional Lampung yaitu Kota Bandar Lampung adalah sebesar 79,86 dan IPM Kota Metro adalah sebesar 79,85. Hal ini menunjukkan masih adanya ketimpangan kualitas SDM, dimana kota-kota di regional Lampung



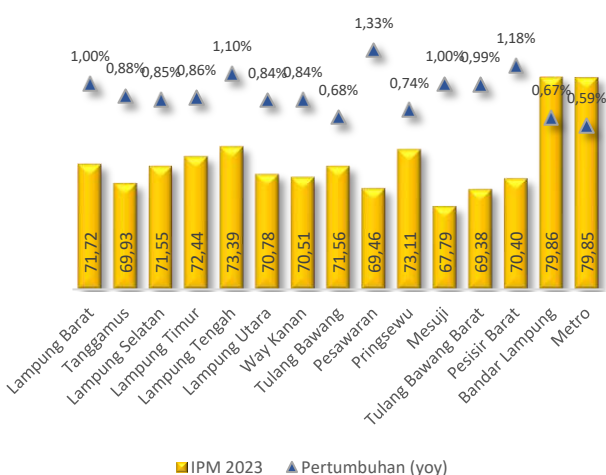


memiliki kualitas hidup manusia dan yang lebih baik daripada provinsi dan kabupaten secara keseluruhan.

Sedangkan, rata-rata IPM klaster Kabupaten di regional Lampung memiliki rata-rata yang lebih rendah dari kedua klaster, baik jika dibandingkan dengan provinsi maupun kota. IPM kabupaten di Lampung pada tahun 2023 berkisar antara 67,79 hingga 73,39, dimana kabupaten yang memiliki IPM tertinggi dicapai oleh Lampung Tengah, sedangkan kabupaten dengan IPM terendah adalah Mesuji sebagaimana tampak pada grafik 5.10.

Pada tahun 2023, rata-rata pertumbuhan IPM kabupaten/kota adalah sebesar 0,90 persen (*yoy*) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kecepatan pertumbuhan tertinggi IPM pada klaster kabupaten terlihat pada kabupaten Pesawaran dengan kenaikan IPM sebesar 1,33 persen (*yoy*). Sementara itu, kecepatan kenaikan IPM terendah terdapat pada kota Metro sebesar 0,59 persen (*yoy*) dan kabupaten Tulang Bawang sebesar 0,68 persen (*yoy*). Seluruh 13 Kabupaten di Lampung memiliki IPM di bawah rata-rata nasional. Meskipun demikian, IPM tahun 2023 setiap kabupaten/kota menunjukkan pertumbuhan (*yoy*) yang positif dan diharapkan ke depan terus meningkat.

Grafik 5.10. IPM Lampung per Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: BPS Lampung (diolah)

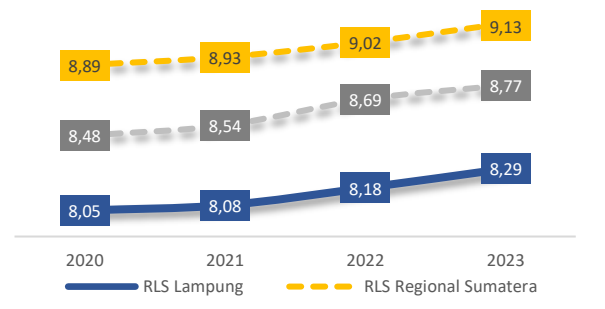
Selanjutnya, dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama

Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun di regional Lampung, dan merupakan indikator penting dalam melakukan *assessment* terhadap suatu kualitas SDM di regional.

5.2.3.2. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Regional Lampung

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan ukuran statistik yang menunjukkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah atau akan diselesaikan oleh penduduk usia 7 tahun ke atas. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. RLS menjadi ukuran pembentuk IPM dalam hal dimensi pengetahuan (BPS, 2023).

Grafik 5.11. Perkembangan RLS Lampung 2020 s.d. 2023 (Perbandingan Regional dan Nasional)



Sumber: BPS Lampung (diolah)

Tren Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Lampung menunjukkan peningkatan selama periode empat tahun terakhir (2020 s.d. 2023) sebagaimana tampak pada grafik 5.11. RLS Lampung pada tahun 2023 mencapai 8,29 tahun, naik 0,24 tahun dari 4 tahun sebelumnya yang sebesar 8,05 tahun pada 2020. Namun demikian, RLS Lampung masih lebih rendah dari level regional Sumatera dan nasional. RLS Sumatera pada tahun 2023 adalah 9,13 tahun, sedangkan RLS nasional adalah 8,77 tahun. Artinya, RLS Lampung masih tertinggal sekitar hampir 1



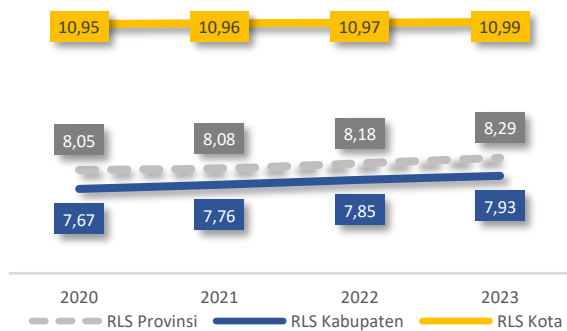


tahun dari rata-rata Sumatera dan tertinggal hampir setengah tahun dari rata-rata nasional.

Hal ini dapat mengindikasikan bahwa walaupun terdapat peningkatan yang menunjukkan adanya peningkatan partisipasi pendidikan yang lebih merata di regional Lampung, masih terjadi ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan antara kabupaten dan kota di Lampung maupun ketimpangan dengan daerah lain di Indonesia.

Lampung merupakan provinsi dengan RLS kedua terbawah di regional Sumatera, setelah Bangka Belitung. Dari 10 provinsi di Sumatera, hanya Bangka Belitung yang memiliki RLS lebih rendah dari Lampung, yaitu 8,25 tahun pada tahun 2023. Sementara itu, provinsi dengan RLS tertinggi di Sumatera adalah Kepulauan Riau, dengan 10,41 tahun pada tahun 2023. Perbedaan RLS antara provinsi-provinsi di Sumatera ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti anggaran, kualitas pendidikan, infrastruktur pendidikan, ketersediaan guru, dan budaya masyarakat.

Grafik 5.12. Perkembangan RLS Lampung 2020 s.d. 2023 (Per Klaster Pemerintah Daerah)



Sumber: BPS Lampung (diolah)

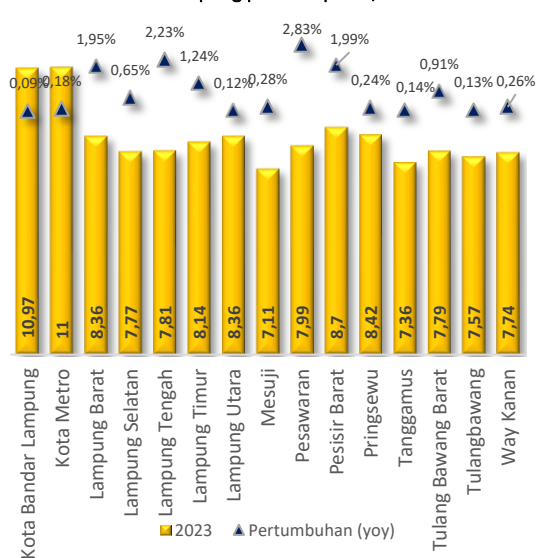
Jika membandingkan RLS kabupaten dan kota, RLS kota jauh lebih tinggi dibandingkan dengan RLS kabupaten dan nasional sebagaimana tampak pada grafik 5.12. Hal ini ditunjukkan dengan data pada tahun 2023, RLS kota rata-rata adalah 10,99 tahun, sedangkan RLS kabupaten rata-rata adalah 7,93 tahun. Artinya, ada perbedaan sekitar 3 tahun antara rata-rata lama sekolah di perkotaan dan kabupaten di Lampung. Hal ini mengkonfirmasi adanya kesenjangan dalam kesejahteraan,

kesempatan, dan kualitas pendidikan antara perkotaan dan kabupaten di regional Lampung.

RLS Lampung per Kabupaten/Kota Lampung tahun 2023 dapat dilihat pada grafik 5.13. Pada tahun 2023, Kota Metro (11) dan Kota Bandar Lampung (10,97) memiliki RLS paling tinggi di Lampung. Kedua kota ini merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan di Lampung, sehingga memiliki fasilitas dan sumber daya yang lebih baik daripada daerah lain. Selain itu, kedua kota ini juga memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dan lebih beragam, sehingga memiliki motivasi dan persaingan yang lebih tinggi dalam menempuh pendidikan.

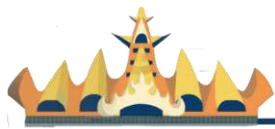
Mesuji memiliki RLS paling rendah sebesar 7,11 tahun pada tahun 2023. Mesuji merupakan salah satu kabupaten termuda di Lampung, yang baru dimekarkan dari Lampung Utara pada tahun 2010. Mesuji memiliki luas wilayah yang cukup besar, tetapi memiliki jumlah penduduk usia produktif yang relatif lebih sedikit. Sebagian besar penduduk Mesuji juga bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan buruh sektor informal, dengan komoditas unggulan salah satunya adalah kelapa sawit. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dan motivasi pendidikan di Mesuji.

Grafik 5.13. RLS Lampung per Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: BPS Lampung (diolah)





Seluruh 13 kabupaten di Lampung memiliki RLS di bawah rata-rata nasional. Meskipun demikian, RLS tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan yang positif (yoy) dan diharapkan ke depan terus meningkat. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung, yang salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan.

5.2.3.3. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Regional Lampung

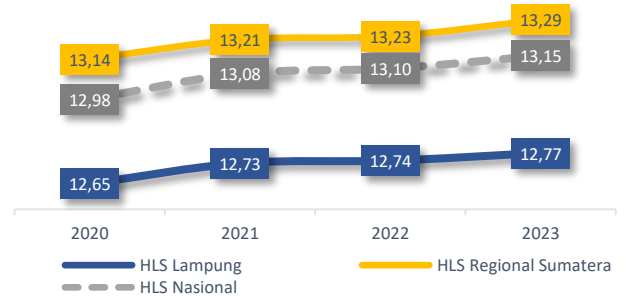
Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan harapan pendidikan yang diinginkan oleh penduduk. Indeks tersebut mengukur berapa tahun pendidikan yang diharapkan akan ditempuh oleh anak-anak saat lahir hingga mencapai usia tertentu (misalnya, HLS pada usia 7 tahun). HLS juga termasuk dalam dimensi pengetahuan yang membentuk nilai keseluruhan dalam IPM (BPS, 2023).

HLS Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari 12,65 tahun pada tahun 2020 menjadi 12,77 tahun pada tahun 2023, atau meningkat sebesar 0,17 basis poin sebagaimana tampak pada grafik 5.14. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan akses dan kualitas pendidikan di Lampung selama periode empat tahun terakhir. Namun demikian, HLS Lampung masih berada di bawah rata-rata nasional, yang mencapai 13,15 tahun pada tahun 2023. HLS Lampung juga masih lebih rendah dari rata-rata regional Sumatera, yang mencapai 13,29 tahun pada tahun 2023.

Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di regional Sumatera, Lampung menempati posisi ketiga terbawah dalam hal HLS, setelah Bangka Belitung (12,31 tahun) dan Sumatera Selatan (12,63 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa Lampung masih memiliki tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya melalui pendidikan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi HLS antara lain adalah angka partisipasi sekolah, angka putus sekolah, angka lulusan, angka buta huruf,

ketersediaan fasilitas pendidikan, kualitas guru, dan alokasi anggaran pendidikan.

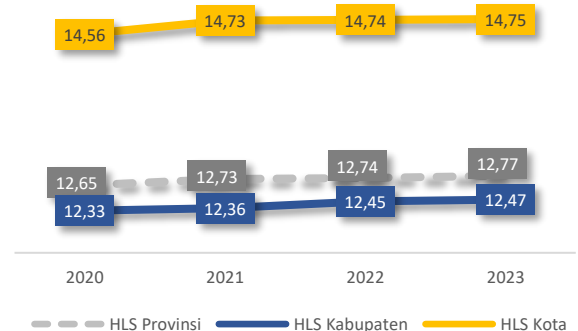
Grafik 5.14. Perkembangan HLS Lampung 2020 s.d. 2023 (Perbandingan Regional dan Nasional)



Sumber: BPS Lampung (diolah)

Jika dilihat berdasarkan kabupaten dan kota, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara HLS kota dan HLS kabupaten di Lampung sebagaimana tampak pada grafik 5.15. Pada tahun 2023, rata-rata HLS kota di Lampung adalah 14,75 tahun, sedangkan rata-rata HLS kabupaten adalah 12,28 tahun. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemerataan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan di Lampung. Kota-kota di Lampung umumnya memiliki keunggulan dalam hal infrastruktur, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia pendidikan dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten.

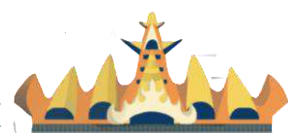
Grafik 5.15. Perkembangan HLS Lampung 2020 s.d. 2023 (Per Klaster Pemda)

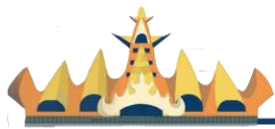


Sumber: BPS Lampung (diolah)

Grafik 5.16. HLS Lampung per Kabupaten/Kota Tahun 2023

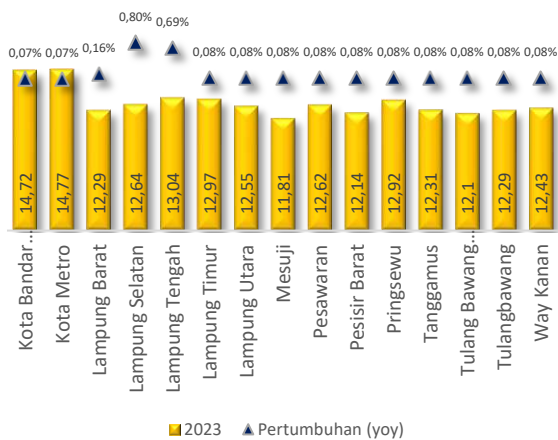
Kota Metro dan Kota Bandar Lampung merupakan dua kota dengan HLS tertinggi di Lampung, yaitu masing-masing 14,77 tahun dan 14,72 tahun pada





tahun 2023. Kedua kota ini memiliki jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat urbanisasi yang tinggi, sehingga memiliki potensi untuk mengembangkan sektor pendidikan lebih baik. Kedua kota ini juga memiliki itu, kedua kota ini memiliki banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang menarik minat penduduk dari kabupaten-kabupaten lainnya untuk melanjutkan pendidikan di kedua kota tersebut.

Di sisi lain, Mesuji merupakan kabupaten dengan HLS terendah di Lampung, yaitu hanya 11,81 tahun pada tahun 2023. Kabupaten ini memiliki jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat urbanisasi yang lebih rendah dibandingkan daerah lainnya di Lampung, sehingga memiliki keterbatasan dalam hal akses dan kualitas pendidikan. Kabupaten ini juga memiliki anggaran APBD fungsi pendidikan sebesar Rp283,99 miliar pada tahun 2023. Selain itu, kabupaten ini memiliki sedikit perguruan tinggi, dengan program studi yang cukup terbatas.



Sumber: BPS Lampung (diolah)

Secara keseluruhan, seluruh 13 kabupaten di Lampung memiliki HLS di bawah rata-rata nasional. Meskipun demikian, keseluruhan HLS tahun 2023 di masing-masing kabupaten/kota menunjukkan pertumbuhan yang positif (yoy) dan diharapkan ke depan terus meningkat. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam meningkatkan akses, kualitas, dan

relevansi pendidikan sesuai dengan pasar tenaga kerja di Lampung. Pendidikan yang berkualitas akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan, produktivitas, dan daya saing penduduk Lampung di era keberlangsungan usaha dan pasar tenaga kerja yang semakin sensitif terhadap risiko ekonomi global baik tensi geopolitik, perubahan iklim, perubahan suku bunga, dan inflasi.

5.3. UPAYA PENINGKATAN INVESTASI DI REGIONAL LAMPUNG

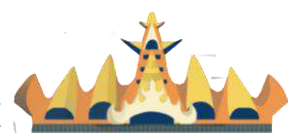
Pembangunan yang sukses tidak hanya tergantung pada campur tangan pemerintah, tetapi juga bergantung pada kontribusi sektor usaha dalam menggerakkan ekonomi. Sektor usaha mencakup swasta, perusahaan milik pemerintah, dan UMKM, dan pengaruhnya tergantung pada iklim investasi di suatu daerah. Iklim investasi mencerminkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan dan insentif bagi investor, seperti stabilitas politik, sosial, dan ekonomi, infrastruktur, pasar tenaga kerja, regulasi, birokrasi, dan tata kelola yang baik.

Dalam konteks ini, Kanwil DJPb Provinsi Lampung akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi iklim investasi dan realisasi investasi di regional Lampung, dengan menggunakan indikator seperti kondisi kemantapan jalan, indeks kemahalan konstruksi (IKK), dan upah minimum regional (UMR), serta data realisasi investasi yang tersedia dari sumber seperti BKPM dan Badan Pusat Statistik.

5.3.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Iklim Investasi Usaha di Regional Lampung

5.3.1.1. Kondisi Kemantapan Jalan di Regional Lampung

Indeks Kondisi Kemantapan Jalan adalah salah satu indikator untuk mengukur kualitas jalan nasional di Indonesia. IKK didasarkan pada nilai IRI (*International Roughness Index*), yang merupakan besaran nilai ketidakrataan permukaan jalan, yang



diperoleh dari panjang kumulatif turun naiknya permukaan per satuan panjang.

Indeks Kondisi Kemantapan Jalan (IKK) mengukur kualitas dan keberlanjutan jalan di Indonesia, yang menggambarkan kondisi jalan nasional di Indonesia, dimana *jalan yang mantap* adalah jalan nasional dalam kondisi baik dan sedang, sedangkan *jalan yang tidak mantap* mengalami kerusakan ringan hingga berat. IKK dinyatakan dalam panjang jalan.

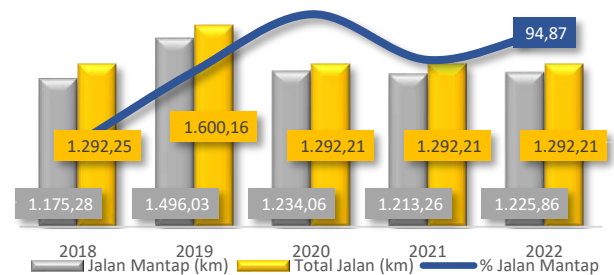
Salah satu faktor yang mempengaruhi iklim usaha di suatu daerah adalah kondisi infrastruktur jalan yang dapat mendukung mobilitas dan distribusi barang dan jasa. Kondisi infrastruktur jalan dapat diukur dengan indikator kemantapan jalan, yaitu persentase panjang jalan yang memiliki kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan. Jalan yang mantap berarti jalan yang tidak memiliki kerusakan berat, seperti lubang, retak, atau bergelombang, yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan menimbulkan biaya perawatan kendaraan yang tinggi.

Berdasarkan data yang paling *update* saat ini di tahun 2022 dari Kementerian PUPR, didapatkan bahwa total panjang jalan nasional di Lampung pada tahun 2022 adalah 1.292,21 km, sedangkan total panjang jalan kabupaten/kota adalah 17.774,16 km sebagaimana tampak pada grafik 5.17 dan grafik 5.18. Kedua jenis jalan ini tidak mengalami perubahan signifikan dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan masih perlu penguatan pada kapasitas pembangunan jalan baru di regional Lampung. Namun demikian, apabila melihat lebih dalam, terdapat perbedaan tren antara kemantapan jalan nasional dan jalan kabupaten/kota.

Kemantapan jalan nasional di Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari 90,95 persen pada tahun 2018 menjadi 94,37 persen pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan provinsi telah memiliki kapasitas dan telah melakukan upaya pemeliharaan dan rehabilitasi jalan nasional secara rutin dan cukup memadai dari

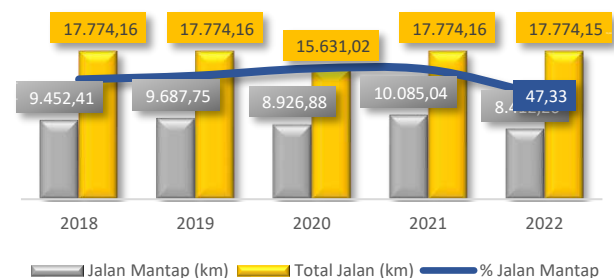
segi kualitas. Salah satu faktor yang mendukung peningkatan kemantapan jalan nasional pada tahun 2023 di provinsi Lampung adalah adanya bantuan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp800 miliar pada tahun 2023. Anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki sejumlah ruas jalan nasional yang menghubungkan antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan dan menghubungkan antara jalan nasional dengan jalan kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Adapun Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung memprediksi tingkat kemantapan jalan nasional di Provinsi Lampung mencapai 95 persen per periode akhir Desember 2023.

Grafik 5.17. Kondisi Kemantapan Jalan Nasional di Regional Lampung 2018 s.d. 2022 (dalam km dan %)



Sumber: Kementerian PUPR (diolah)

Grafik 5.18. Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota di Regional Lampung 2018 s.d. 2022 (dalam km dan %)



Sumber: Kementerian PUPR (diolah)

Sementara itu, kemantapan jalan kabupaten/kota di Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 53,18 persen pada tahun 2018 menjadi 47,33 persen pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota belum cukup memiliki kapasitas optimal dalam mengelola dan memperbaiki jalan yang menjadi kewenangannya. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan

kemantapan jalan kabupaten/kota adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Adapun kondisi kemantapan jalan kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada akhir tahun 2023 diprediksi sebesar 78,68 persen (Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, 2023). Untuk menjadikan persentase kemantapan jalan kabupaten/kota sebesar 90 persen, diprediksi membutuhkan biaya sekitar Rp4 triliun dengan lama pengerjaan dua sampai tiga tahun. Angka ini jauh lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk pengerjaan fisik jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi pada tahun 2024, yaitu sebesar Rp435,9 miliar.

Analisis di atas dapat mengindikasikan bahwa kondisi kemantapan jalan di Provinsi Lampung masih perlu lebih dioptimalkan dan saat ini masih memiliki kondisi bervariasi antara jalan nasional dan jalan kabupaten/kota. Jalan nasional memiliki kemantapan yang tinggi dan meningkat, sedangkan jalan kabupaten/kota memiliki kemantapan yang rendah dan menurun, walaupun diprediksi terdapat lonjakan peningkatan di akhir tahun 2023.

Sesuai dengan teori pertumbuhan endogen (Batiz & Romer, 1991), yang menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh faktor-faktor internal suatu daerah, seperti sumber daya manusia, modal, teknologi, dan infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, karena dapat mempengaruhi biaya produksi, akses pasar, mobilitas, dan kualitas lingkungan. Infrastruktur juga dapat memicu efek *spill over*, yaitu penyebaran manfaat ekonomi dari suatu daerah ke daerah lain yang terhubung oleh infrastruktur tersebut.

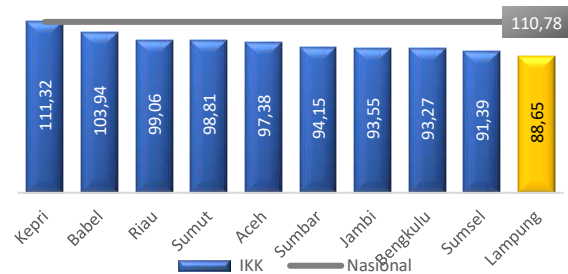
Dalam konteks Provinsi Lampung, kondisi kemantapan jalan yang bervariasi antara jalan nasional dan jalan kabupaten/kota dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Jalan nasional yang mantap dapat meningkatkan konektivitas antar provinsi dan memperluas pasar bagi produk-produk lokal

Lampung. Jalan kabupaten/kota yang tidak mantap dapat menurunkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang lebih jauh dari perkotaan, karena dapat meningkatkan biaya transportasi, mengurangi akses ke fasilitas sosial, dan *barrier* dalam mengkapitalisasi manfaat dari daerah-daerah strategis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kemantapan jalan di seluruh wilayah Provinsi Lampung, agar dapat mendorong iklim investasi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

5.3.1.2. Perkembangan Indeks Kemahalan Konstruksi di Regional Lampung

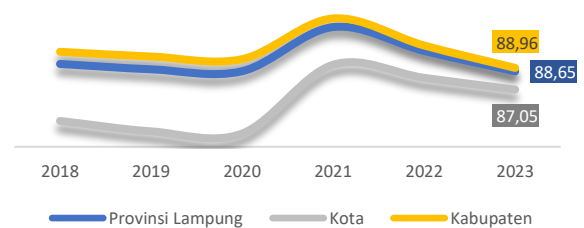
Lampung memiliki Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) terendah di regional Sumatera dan berada di bawah rata-rata nasional, yang menjadikan barang/jasa konstruksi lebih murah sebagaimana tampak pada grafik 5.19. Hal ini mengindikasikan bahwa biaya produksi dan investasi di sektor konstruksi di Lampung relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera.

Grafik 5.19. Perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi Regional Sumatera dan Nasional Tahun 2023



Sumber: BPS, 2023

Grafik 5.20. Indeks Kemahalan Konstruksi Per Klaster Pemda di Regional Lampung Tahun 2023



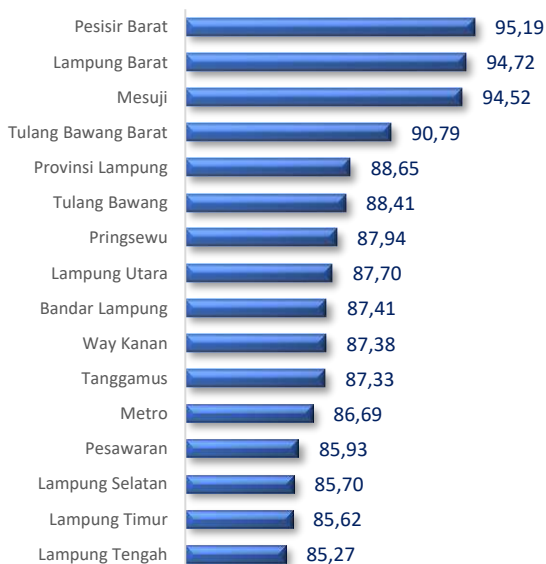
Sumber: BPS, 2023



Semakin rendah IKK suatu daerah, semakin murah barang/jasa konstruksi di daerah tersebut. Biaya produksi dan investasi di sektor konstruksi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan dan kualitas bahan baku, tenaga kerja, peralatan, transportasi, dan perizinan. Artinya, Lampung memiliki beberapa keunggulan yang dapat menekan biaya produksi dan investasi di sektor konstruksi tersebut.

Tren Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Lampung menunjukkan sedikit penurunan dari 89,31 pada 2018 menjadi 88,65 pada 2023. Namun demikian, IKK pada perkotaan cenderung meningkat tajam dibandingkan dengan kabupaten sebagaimana tampak pada grafik 5.20. Grafik menunjukkan pada saat pandemi COVID-19, IKK melonjak tajam. Namun demikian, pasca pandemi, IKK telah kembali turun dengan level yang setara dengan sebelum pandemi. Hal ini mengindikasikan bahwa biaya konstruksi di perkotaan masih lebih mahal daripada di kabupaten, karena adanya faktor-faktor seperti permintaan, ketersediaan bahan, dan infrastruktur.

Grafik 5.21. Indeks Kemahalan Konstruksi Per Pemda di Regional Lampung Tahun 2023



Sumber: BPS, 2023

Pesisir Barat, Lampung Barat, dan Mesuji merupakan Kabupaten dengan IKK tertinggi masing-masing sebesar 95,19; 94,72; dan 94,52 sebagaimana tampak pada grafik 5.12. Hal ini dikarenakan faktor geografis yang lebih sulit (pegunungan, hutan, pantai) bagi akses transportasi dan distribusi barang dan jasa konstruksi. Sedangkan, IKK paling rendah ditunjukkan oleh Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesawaran, Metro, dan Tanggamus, dimana seluruh kabupaten/kota tersebut merupakan kota satelit dari kota Bandar Lampung, yang menikmati konektivitas relatif lebih baik dari kabupaten lainnya. Kota Bandar Lampung sendiri memiliki IKK moderat, yang menunjukkan bahwa biaya konstruksi di ibu kota provinsi ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan kota satelitnya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor permintaan yang lebih tinggi, kualitas produk yang lebih tinggi, dan persaingan pasar yang lebih ketat.

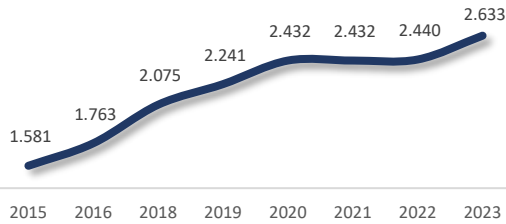
Untuk meningkatkan keseimbangan dan kesejahteraan pembangunan di Lampung, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses transportasi dan distribusi barang dan jasa konstruksi di daerah-daerah yang memiliki IKK tinggi, serta memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia di daerah-daerah yang memiliki IKK rendah. Selain itu, diperlukan juga koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sektor konstruksi.

5.3.1.3. Perkembangan Upah Minimum Regional (UMR) Lampung

Tren kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) di Lampung berkaitan dengan kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi di regional wilayah tersebut. Dari nilai sebesar Rp1,58 juta pada tahun 2015, UMR Lampung telah meningkat menjadi Rp2,63 juta pada tahun 2023 sebagaimana tampak pada grafik 5.22.

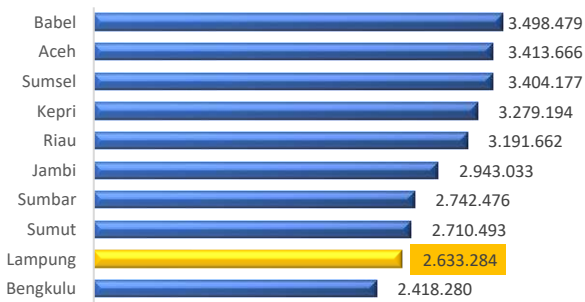


Grafik 5.22. Perkembangan UMR Lampung tahun 2015 s.d. 2023 (dalam Rp juta)



Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Grafik 5.23. Perbandingan UMR Sumatera Tahun 2023 (dalam Rp)



Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Meskipun peningkatan ini menunjukkan langkah positif dalam memberikan perlindungan bagi pekerja, hal ini juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi oleh Lampung dalam mencapai kesejahteraan yang lebih luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Adanya UMR yang relatif rendah di Lampung, menjadikannya sebagai salah satu provinsi dengan UMR terendah di regional Sumatera, hanya di atas Bengkulu sebagaimana tampak pada grafik 5.23. Hal ini dapat menjadi insentif pasar tenaga kerja, dengan UMR yang rendah yang menjadi peluang untuk menarik investasi usaha untuk tumbuh di Lampung. Meskipun terdapat potensi pasar tersebut, namun Lampung perlu melakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan daya saingnya dalam menarik investasi. Strategi tersebut perlu mencakup penyediaan infrastruktur yang memadai, kemudahan berbisnis, serta dukungan kebijakan yang kondusif bagi pelaku usaha.

Dengan demikian, pengembangan iklim usaha yang lebih kompetitif menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi

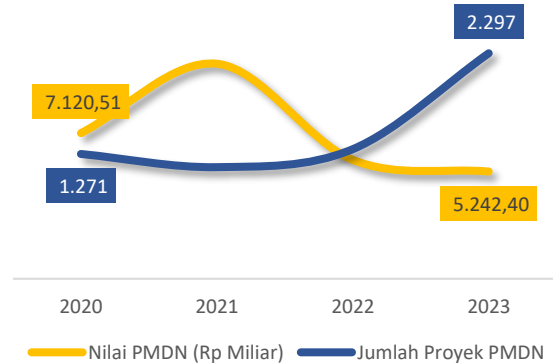
Lampung. Dalam konteks ini, pemerintah daerah, lembaga terkait, dan para pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan usaha. Strategi ini juga harus *hand-in-hand* dengan Investasi dalam pembangunan SDM yang penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi Lampung secara keseluruhan.

5.3.2. Realisasi Investasi di Regional Lampung

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk menarik PMDN. Lampung memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, pariwisata, dan lain-lain. Lampung juga memiliki letak geografis yang strategis, sebagai pintu gerbang Sumatera dan sebagai jalur distribusi barang dan jasa ke berbagai daerah di Indonesia.

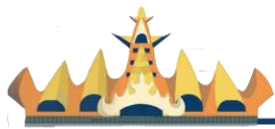
5.3.2.1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Regional Lampung

Grafik 5.24. Perkembangan PMDN di Regional Lampung pada 2020 s.d. 2023 (Rp juta dan jumlah proyek)



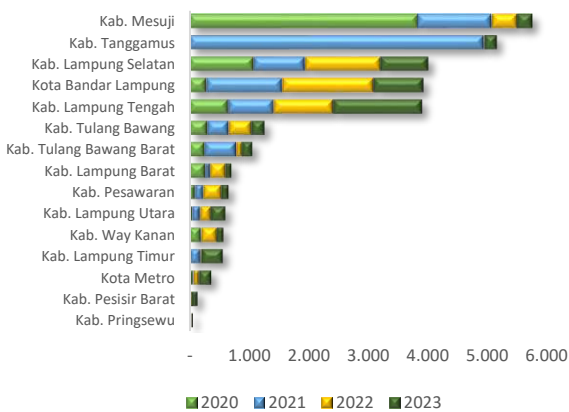
Sumber: BKPM (diolah)

Berdasarkan data yang tersedia, nilai realisasi PMDN di Kabupaten/Kota Lampung dari tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan tren yang berfluktuasi sebagaimana tampak pada grafik 5.24. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi nilai PMDN di Lampung antara lain adalah kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, iklim usaha, persaingan antar daerah, dan dinamika



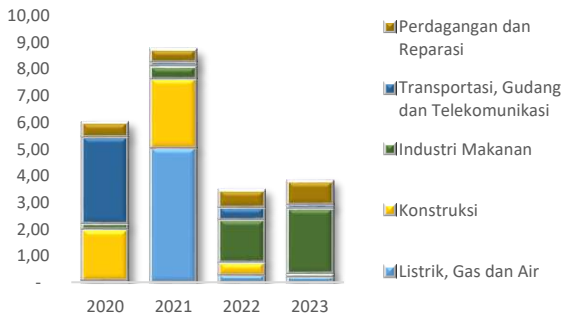
permintaan pasar. Selain itu, pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 juga berdampak negatif terhadap aktivitas investasi, baik dalam negeri maupun asing. Pandemi menyebabkan ketidakpastian, resesi, dan penurunan konsumsi, yang berpengaruh terhadap keputusan dan perilaku investor.

Grafik 5.25. Realisasi PMDN Per Pemda 2020 s.d. 2023
(Dalam Rp Miliar)



Sumber: BPS, BKPM (diolah)

Grafik 5.26. Top 5 Sektor Investasi PMDN terbesar 2020 s.d. 2023
(dalam Rp Triliun)



Sumber: BPS, BKPM (diolah)

Meskipun demikian, Lampung masih memiliki peluang untuk meningkatkan nilai PMDN di masa depan. Hal ini dapat dilihat dari sebaran dan komposisi PMDN di Kabupaten/Kota dan sektor-sektor unggulan Lampung.

Berdasarkan data tahun 2020 sampai dengan 2023 sebagaimana tampak pada grafik 5.25, Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Lampung dengan nilai realisasi investasi PMDN paling besar adalah Kabupaten Mesuji, dengan total PMDN

sebesar Rp5.757,59 Miliar atau setara dengan 20,07 persen dari total investasi PMDN di Lampung. Kabupaten Mesuji berhasil menarik PMDN terutama di sektor listrik, gas, dan air, yang mencapai Rp5.226,00 Miliar atau 90,76 persen dari total PMDN di kabupaten tersebut.

Jika dicermati berdasarkan tahun 2023 saja, maka Kabupaten/Kota dengan nilai PMDN tertinggi adalah Kabupaten Lampung Tengah dengan nilai realisasi PMDN sebesar Rp1.498.20 Miliar. Kabupaten Lampung Tengah berhasil menarik PMDN terutama di sektor industri makanan, yang mencapai Rp1.198,00 Miliar atau 79,94 persen dari total PMDN di kabupaten tersebut. Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi sumber daya pangan yang berkualitas dan beragam.

Secara umum, lima sektor dengan investasi PMDN terbesar di Lampung (akumulasi tahun 2020 sampai dengan 2023) adalah listrik, gas, dan air; konstruksi; industri makanan; transportasi, gudang, dan telekomunikasi; serta perdagangan dan reparasi sebagaimana tampak pada grafik 5.26. Nilai realisasi investasi PMDN listrik, gas, dan air paling tinggi di tahun 2021, yaitu sebesar Rp4.726,00 Miliar, sementara di tahun 2022 dan 2023 investasi PMDN paling banyak mengarah kepada industri makanan, yaitu sebesar Rp3.530,00 Miliar dan Rp2.500,00 Miliar. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki prospek yang baik dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

5.3.2.2. Penanaman Modal Asing (PMA) di Regional Lampung

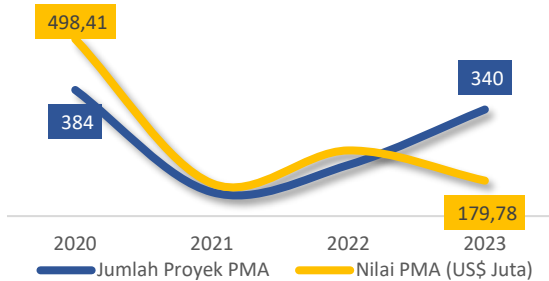
Analisis nilai realisasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten/Kota Lampung selama periode tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan adanya fluktuasi yang menggambarkan tren penurunan secara keseluruhan. Meskipun pada tahun 2020 mencatat nilai investasi tertinggi sebesar US\$498,41 Juta, namun pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan yang signifikan. Meskipun terdapat peningkatan tahun ke tahun





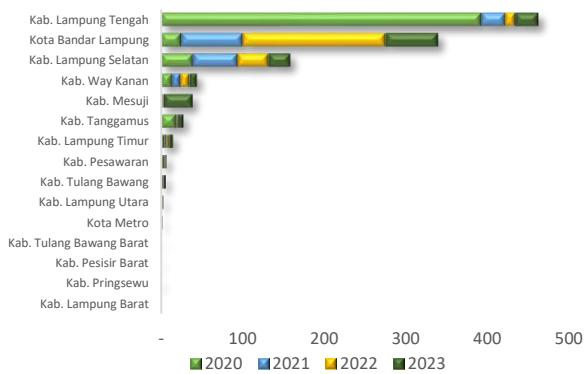
pada tahun 2022, namun hal tersebut tidak mampu bertahan, karena pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan yang mencolok sebagaimana tampak pada grafik 5.27.

Grafik 5.27. Perkembangan PMA di Regional Lampung pada 2020 s.d. 2023 (USD juta dan jumlah proyek)



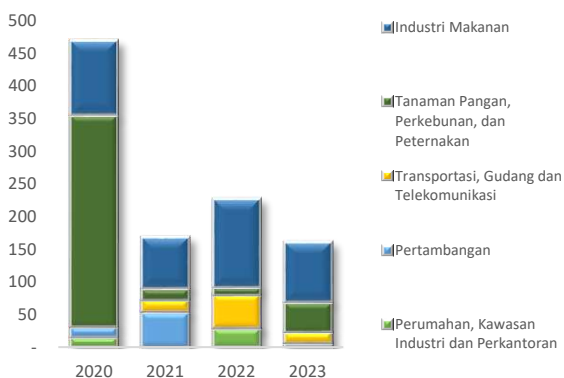
Sumber: BKPM (diolah)

Grafik 5.28. Realisasi PMA Per Pemda 2020 s.d. 2023 (dalam USD Juta)



Sumber: BPS, BKPM (diolah)

Grafik 5.29. Top 5 Sektor Investasi PMA Tahun 2020 s.d. 2023 (dalam USD Juta)



Sumber: BPS, BKPM (diolah)

Penurunan permintaan global terhadap barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor-sektor unggulan di Lampung, seperti pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, mengalami fluktuasi akibat

dampak pandemi COVID-19 dan kondisi volatilitas pasar global pasca pandemi mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal di Lampung, dan menurunkan nilai proyek menjadi investasi dengan skala lebih kecil.

Selain itu, pada 2020 s.d. 2023, permintaan terhadap komoditas ekspor Lampung, seperti kopi, kakao, karet, dan lada, cenderung mengalami penurunan akibat menurunnya permintaan global dan melemahnya nilai tukar rupiah. Hal ini menyebabkan penurunan nilai investasi di Lampung, meskipun jumlah proyek semakin tinggi. Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Lampung dengan nilai realisasi investasi PMA paling besar yaitu Kabupaten Lampung Tengah, dengan total PMA (tahun 2020 s.d. 2023) sebesar US\$462,68 Juta atau setara dengan 42,07 persen dari total investasi PMA (tahun 2020 s.d. 2023). Jika dicermati berdasarkan tahun 2023 saja, maka Kabupaten/Kota dengan nilai PMA tertinggi yaitu Kota Bandar Lampung dengan nilai realisasi PMA sebesar US\$64,56 Juta sebagaimana tampak pada grafik 5.28. Lima sektor dengan investasi PMA terbesar (Akumulasi Tahun 2020 s.d. 2023) yaitu Industri Makanan; Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan; Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi; Pertambangan; dan Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran sebagaimana tampak pada grafik 5.29. Nilai realisasi investasi PMA Industri Makanan paling tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya sejak tahun 2020 s.d. 2023. sementara di tahun 2022 dan 2023 investasi PMA paling banyak mengarah ke industri makanan.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali, dan penurunan tingkat pengangguran memfasilitasi peluang bagi perkembangan ekonomi Lampung. Fenomena tersebut menarik minat investor untuk mengalokasikan modal mereka di wilayah ini, yang tercermin dalam peningkatan jumlah proyek investasi. Meskipun mengalami kontraksi sebesar -1,67% (yoy) pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, pertumbuhan



ekonomi Lampung telah pulih dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,79% (yoy) pada 2021 dan 4,28% (yoy) pada 2022. Di samping itu, meskipun tingkat inflasi sempat mengalami kenaikan dari 1,59% (yoy) pada tahun 2020 menjadi 2,01% (yoy) pada tahun 2021 dan 2,25% (yoy) pada tahun 2022, tetap terjaga dalam batas yang terkendali.

5.4. PENGARUH KUALITAS SDM DAN TINGKAT INVESTASI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI REGIONAL LAMPUNG

5.4.1. Analisis Statistik Inferensial

Bagian ini akan membahas analisis statistik inferensial yang bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan dan dampak kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta tingkat investasi terhadap tingkat pengangguran di wilayah Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel yang memengaruhi tingkat pengangguran dan mengukur kekuatan hubungan antara variabel-variabel tersebut.

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Multiple Linear Regression*. *Multiple Linear Regression* digunakan untuk memperhitungkan pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari analisis statistik ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran di regional Lampung. Secara umum model regresi yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_t X_t + \epsilon$$

Keterangan:

- Y = variabel dependen.
- X_1 = variabel independen pertama.
- X_2 = variabel independen kedua.
- X_t = variabel independen seterusnya.
- β_0 = intercept atau konstanta.
- β_1 = koefisien regresi untuk variabel independen pertama.
- β_2 = koefisien regresi untuk variabel independen kedua.

- β_t = koefisien regresi untuk variabel independen seterusnya.
- ϵ = residual regresi atau kesalahan acak atau *error*.

Analisis pengaruh kualitas SDM dan Investasi terhadap Tingkat Pengangguran dilakukan menggunakan *Multiple Linear Regression* dengan variabel, antara lain: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Penanaman Modal Asing (PMA). Data yang digunakan dan tersedia secara lengkap untuk regional Lampung adalah selama tahun 2010 s.d. 2023. Dilakukan transformasi data menggunakan Logaritma Natural (Ln) untuk memitigasi data *outlier*, guna mencapai *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) pada analisis regresi secara statistik.

Adapun model awal yang digunakan sebagai berikut:

$$TPT = \beta_0 + \beta_1 IPM + \beta_2 NILAI_PMDN + \beta_3 PROYEK_PMDN + \beta_4 NILAI_PMA + \beta_4 PROYEK_PMA + \epsilon$$

Gambar 5.2. Hasil *Correlation Matrix* Pengaruh Belanja Pemerintah, Kualitas SDM, dan Tingkat Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran

Correlation matrix (pearson)						
	Ln(TPT)	Ln(IPM)	Ln(NILAI_PMDN)	Ln(PROYEK_PMDN)	Ln(NILAI_PMA)	Ln(PROYEK_PMA)
Ln(TPT)	1					
Ln(IPM)	-0,27074	1				
Ln(NILAI_PMDN)	-0,21124	0,89803	1			
Ln(PROYEK_PMDN)	-0,22238	0,83479	0,56921	1		
Ln(NILAI_PMA)	0,71938	0,72544	0,58315	0,66273	1	
Ln(PROYEK_PMA)	0,71938	0,72544	0,58315	0,66273	0,73661	1

Sumber: BPS dan BKPM, diolah

Hasil correlation matrix (pearson) pada gambar 5.2. menunjukkan bahwa IPM, PMDN (baik nilai maupun proyek), dan PMA (baik nilai maupun proyek) memiliki arah hubungan yang negatif dengan TPT di regional Lampung. Artinya, semakin tinggi nilai IPM, PMA, dan PMDN maka semakin turun nilai TPT. Sedangkan, IPM juga memiliki hubungan positif terhadap PMDN dan PMA.

Gambar 5.3. Tabel ANOVA

ANOVA table					
Source	DF	Sum of Square	Mean Square	F Statistic	P-value
Regression (between yj and yj')	2	0,188671	0,0943355	20,671277	0,000187912
Residual (between yj and yj')	11	0,080675	0,0073341		
Total (between yj and yj')	13	0,269346	0,020719		



Nilai F sebesar 20.671277 pada gambar 5.3. menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen dan dependen. Sedangkan, nilai p sebesar 0.000187913 menunjukkan bahwa terdapat probabilitas yang sangat kecil (0.0187%) untuk mendapatkan Statistik F yang sama besar atau lebih besar dari yang diamati jika hipotesis nol benar. Artinya hipotesa IPM, PMDN, dan PMA berpengaruh signifikan terhadap penurunan TPT dapat diterima.

Hasil regresi linier berganda menunjukkan terdapat pengaruh signifikan kolektif yang sangat kuat antara IPM, NILAI PMDN, PROYEK PMDN, NILAI PMA, PROYEK PMA, dan TPT, ($F(2, 11) = 20,67$, $p < 0,001$, $R^2 = 0,79$, $R^2 \text{ adj} = 0,75$). Prediktor individu diperiksa lebih lanjut dan menunjukkan bahwa IPM ($t = -5.201$, $p < .001$) dan PROYEK PMDN ($t = 2.26$, $p = .045$) merupakan prediktor paling signifikan dalam model.

Hasil ini menunjukkan bahwa, berdasarkan data periode 2010 s.d. 2023, kualitas sumber daya manusia (SDM), yang direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di regional Lampung. Semakin tinggi nilai IPM, semakin rendah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan sumber daya manusia memfasilitasi penurunan angka pengangguran di regional Lampung pada kurun waktu 14 tahun terakhir.

Selain itu, investasi dalam penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga memainkan peran penting dalam mengurangi tingkat pengangguran. Hasil menunjukkan bahwa baik nilai maupun proyek penanaman modal dalam negeri memiliki dampak yang signifikan dalam menekan TPT. Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) juga berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran di regional Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa adanya investasi asing juga menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran,

meskipun dalam kasus di regional Lampung dampaknya tidak sebesar IPM dan PMDN.

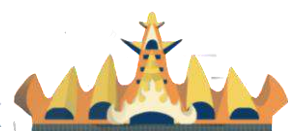
Dengan demikian, untuk mengurangi tingkat pengangguran di regional Lampung, strategi pembangunan manusia yang baik serta peningkatan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

5.4.2. Diskusi dan Pembahasan

5.4.2.1. Keterkaitan Kualitas SDM dan Tingkat Pengangguran di regional Lampung

Hasil analisis pengaruh kualitas SDM, investasi, dan tingkat pengangguran selama 14 tahun terakhir di Lampung yang telah dilakukan mengkonfirmasi penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa investasi modal manusia dapat memiliki dampak signifikan pada tingkat pengangguran, melalui lapangan kerja. Nistor (2009) menemukan bahwa investasi modal manusia tingkat negara bagian di AS dapat mengurangi pengangguran, dengan investasi USD 100 per kapita diharapkan dapat mengurangi tingkat tersebut sebesar 0,63 persen. Hal ini lebih lanjut didukung oleh Mimi, et al. (2022), yang menemukan bahwa pengeluaran kesehatan pemerintah untuk modal manusia di Bangladesh memiliki efek signifikan jangka panjang terhadap pengangguran. Namun, dampak jangka pendek investasi modal manusia terhadap pengangguran kurang jelas, seperti yang ditunjukkan oleh studi Mimi. Keberadaan efek investasi dan kekayaan pada keputusan pendaftaran sekolah dalam kehadiran pengangguran juga disorot oleh Fernández (2001). Terakhir, Sigurdsson (2013) menunjukkan hubungan negatif jangka panjang antara investasi modal dan pengangguran, menyarankan bahwa investasi dalam produksi modal dapat mengurangi pengangguran.

Sejumlah penelitian lain juga telah menyelidiki dampak angkatan kerja terampil terhadap



pengangguran. Singh, et al. (2020) menemukan bahwa program pengembangan keterampilan dapat secara efektif mengurangi pengangguran, terutama ketika individu yang memiliki keterampilan tinggi menciptakan peluang kerja baru. Esteban-Pretel (2005) menyoroti peran hilangnya keterampilan dalam meningkatkan persistensi pengangguran, sementara Granato, et al. (2015) menunjukkan bahwa migrasi pekerja berketerampilan rendah dan menengah dapat mengurangi kesenjangan pengangguran regional, namun migrasi pekerja berketerampilan tinggi dapat mengurangi kesenjangan pengangguran regional dapat memperburuk kesenjangan ini. Grossmann (2000) lebih jauh menekankan potensi realokasi tenaga kerja berketerampilan akan menekan permintaan akan tenaga kerja berketerampilan rendah, sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran tidak terampil.

5.4.2.2. Keterkaitan Kualitas Tenaga Kerja dan Investasi di regional Lampung

Hasil analisis pengaruh kualitas SDM, investasi, dan tingkat pengangguran selama 14 tahun terakhir di Lampung yang telah dilakukan juga menguatkan penelitian lainnya. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perjanjian yang tidak bersaing, dapat berdampak signifikan terhadap keputusan investasi perusahaan (Jeffers, 2019). Hal ini terutama berlaku bagi perusahaan-perusahaan di industri padat karya dan keterampilan, yang cenderung meningkatkan investasi selama ekspansi ekonomi. Hubungan antara tenaga kerja dan investasi semakin dipertegas dengan adanya dampak positif jumlah tenaga kerja terhadap realisasi investasi, khususnya dalam konteks proyek penanaman modal asing dan dalam negeri (Nuradi, 2015). Selain itu, investasi ekuitas swasta terbukti meningkatkan hasil pasar tenaga kerja pekerja, dengan fokus pada investasi teknologi (Agrawal, 2013). Studi-studi ini secara kolektif menyoroti

hubungan yang kompleks dan beragam antara tenaga kerja dan investasi.

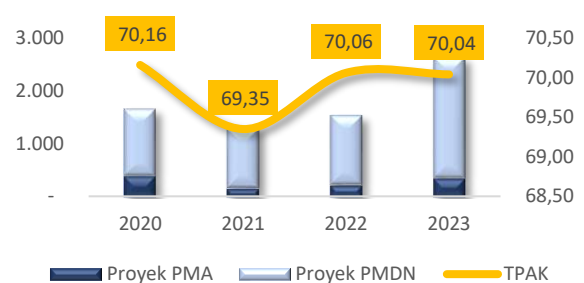
Secara tren, bila dibandingkan antara Proyek PMDN dan PMA terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Persentase Penduduk Bekerja Berpendidikan minimal Diploma di Regional Lampung, terlihat hubungan yang positif sebagaimana tampak pada grafik 5.32, grafik 5.33, dan grafik 5.34.

Grafik 5.30. Perbandingan Nilai antara Proyek PMA dan Proyek PMDN dengan TPT



Sumber: BKPM dan BPS, diolah

Grafik 5.31. Perbandingan Nilai antara Proyek PMA dan Proyek PMDN dengan TPAK



Sumber: BKPM dan BPS, diolah

Grafik 5.32. Perbandingan Nilai antara Proyek PMA dan Proyek PMDN dengan TPAK

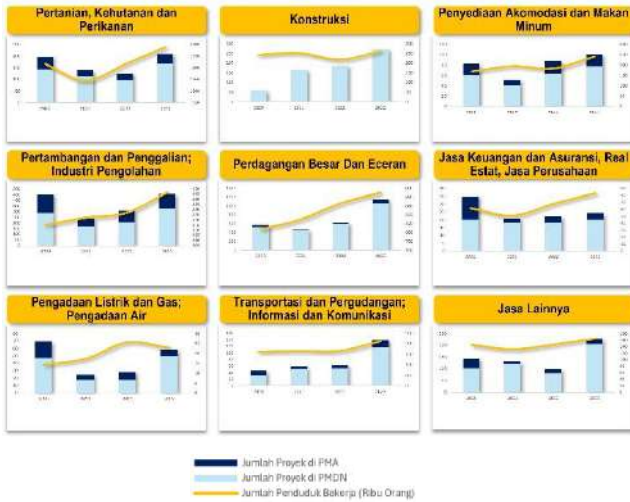


Sumber: BKPM dan BPS, diolah

Peningkatan rata-rata jumlah proyek investasi (PMA plus PMDN) sebesar 982 basis poin disertai oleh:

1. Penurunan TPT sebesar 0,44 basis poin selama periode 2020-2023;
2. Kenaikan pada TPAK sebesar 0,12 basis poin selama periode 2020-2023; serta

Grafik 5.33. Pengaruh realisasi investasi per sektor (KBLI) dengan serapan tenaga kerja per sektor 2020 s.d. 2023



Sumber: BKPM dan BPS, diolah

Kenaikan pada persentase penduduk kerja berpendidikan tinggi sebesar 0,33 basis poin.

Hal ini dapat diartikan bahwa investasi di Regional Lampung, khususnya Proyek PMDN dan PMA, cukup

memberikan peran dalam mengimbangi penurunan tingkat pengangguran, peningkatan partisipasi angkatan kerja, dan peningkatan persentase penduduk yang bekerja berpendidikan tinggi.

Secara umum, peningkatan tren jumlah proyek PMA dan PMDN di Lampung diimbangi dengan peningkatan tren Jumlah Penduduk yang Bekerja di Lampung. Hal ini menunjukkan sentimen positif terhadap ketenagakerjaan di tengah nilai realisasi PMDN dan PMA yang cenderung turun akibat *scarring effect* pandemi COVID-19 dan ketidakpastian global.

Secara sektoral, pada 2023, meningkatnya jumlah proyek PMA dan PMDN diimbangi dengan peningkatan jumlah pekerja di setiap sektor, kecuali pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang merupakan sektor basis Lampung menyerap tenaga kerja sekitar 40% dari total share. Adapun hubungan proyek PMDN dan Pekerja relatif positif, sedangkan hubungan proyek PMA dan Pekerja relatif negatif. Hal ini dapat mengindikasikan adanya volatilitas hubungan antara kenaikan/penurunan investasi dengan jumlah pekerja di sektor pertanian, yang merupakan sektor dengan tren pertumbuhan semakin menurun.

Boks 5.1



Potensi Investasi Lampung



- Gambaran Umum Kawasan Industri Pesawaran -

Kawasan Industri Pesawaran (KIP) merupakan salah satu proyek strategis yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan perkebunan di wilayah Lampung. KIP diharapkan dapat menjadi pusat industri hilirisasi yang mampu mengolah bahan baku pertanian dan perkebunan menjadi produk bernilai tinggi, seperti minyak sawit, karet, kakao, kopi, dan lain-lain. Dengan demikian, KIP dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian regional maupun nasional. KIP terletak di Kecamatan Tegineneng, dengan luas mencapai sekitar 885 hektar. KIP mencakup bagian dari lima desa, yaitu Desa Kota Agung, Desa Bumi Agung, Desa Rejo Agung, Desa Batang Hari Ogan, dan Desa Gunung Sugih Baru. Kawasan Industri Pesawaran memiliki beberapa kelebihan yang menjadikannya sebagai lokasi cukup aman untuk pengembangan industri, antara lain status kawasan industri yang bukan kawasan lindung, terbebas dari masalah penguasaan adat, dan Kawasan Industri Pesawaran terletak di daerah yang relatif aman dari potensi bencana alam, seperti banjir dan gempa bumi.



- Potensi Kawasan Industri Pesawaran -

- Potensi di sektor pertanian/perkebunan yang sangat berpotensi adalah pertanian jagung (jagung kering) untuk kebutuhan pakan dan kebutuhan lainnya. Pabrik pengolahan jagung ini ada di sekitar Kecamatan Tegineneng. Ini akan memberikan manfaat yang cukup besar bagi petani jagung, khususnya dalam hal persaingan harga serta kontinuitas penerimaan hasil produksi bagi petani.
- Kawasan Industri Pesawaran yang berfokus pada industri hasil perkebunan dan hortikultura menggambarkan peluang industri yang dapat dibangun untuk pengolahan bahan baku hasil perkebunan dan hortikultura hingga turunannya, sehingga pengiriman produk memiliki nilai tambah (*Added Value*) yang lebih tinggi.
- Kabupaten Pesawaran akan diarahkan untuk Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Tegineneng dan Kecamatan Padang Cermin (RPIP Provinsi Lampung 2016–2035). Potensi industri di Kabupaten Pesawaran meliputi Industri Kecil dan Menengah (IKM).
- Potensi agrowisata juga dapat dikembangkan sebagai daya tarik tambahan bagi investor dan pengembangan wilayah. Dampak positif juga diharapkan dapat dirasakan oleh UMKM setempat yang dapat berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan di kawasan industri untuk memperoleh manfaat seperti pasokan bahan baku, kerjasama dalam catering, dan pemasaran produk UMKM.

Boks 5.1



- Analisis Kelayakan Keuangan -

- Proyek pengembangan Kawasan Industri Pesawaran memiliki potensi pendapatan dari penjualan lahan, penyewaan tanah, penjualan, dan sewa properti komersial serta pertokoan. Diperkirakan annual revenue mencapai Rp137.34 Miliar.
- Biaya modal atau *Capital Expenditure* (CAPEX) untuk proyek ini mencakup biaya pra konstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi, dengan total biaya sebesar Rp541.40 Miliar. Pengeluaran rutin (OPEX) untuk tahun pertama adalah sekitar Rp36.47 Miliar.
- *Weighted Average Cost of Capital* (WACC) yang digunakan dalam analisis selama proyeksi adalah sekitar 9.05%, yang mempertimbangkan tingkat suku bunga, risiko pasar, dan biaya modal.
- Perhitungan *Net Present Value* (NPV) proyek ini adalah sekitar Rp281.17 Miliar, yang menunjukkan proyek ini layak secara keuangan karena NPV lebih besar dari nol.
- Perhitungan *Internal Rate of Return* (IRR) menunjukkan tingkat pengembalian IRR proyek ini adalah sekitar 17.20%, lebih besar dari tingkat diskonto yang diharapkan (12%), sehingga proyek ini juga layak dari segi IRR.
- Perhitungan *Payback Period: Payback period* (PP) proyek ini adalah sekitar 7 tahun 3 bulan, yang lebih cepat dari umur ekonomis proyek, menunjukkan kelayakan investasi.



“ Jangan pernah lelah mencintai Indonesia dengan mengelola APBN secara baik dan bertanggung jawab ”
-Sri Mulyani-
Menteri Keuangan RI

ANALISIS TEMATIK

BAB V



BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. KESIMPULAN

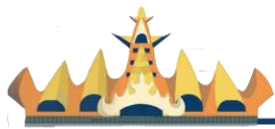
Dari penulisan Kajian Fiskal Regional Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung tahun 2023, dapat disampaikan kesimpulan dan *highlights* sebagai berikut:

6.1.1. Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah

1. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal memiliki peran krusial sebagai alat pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Lampung. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab dalam memastikan efektivitas kebijakan fiskal sebagai instrumen alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang efektif. Kebijakan fiskal yang tepat diharapkan dapat meningkatkan indikator ekonomi makro dan kesejahteraan di Lampung serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan, dengan memungkinkan pengendalian pelaksanaan rencana untuk penyesuaian yang diperlukan guna mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.
2. Selaras dengan RPJMD 2019-2024, rencana pembangunan Provinsi Lampung tahun 2023 yang bertema “Penguatan Ekonomi yang Inklusif Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”. Dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah, pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan arah sasaran makro tahun 2023 yang tercantum pada target RKPD 2023, antara lain: (1) Menciptakan kesempatan kerja yang tinggi untuk mengurangi kemiskinan; (2) Meningkatkan kapasitas perekonomian daerah; (3) Meningkatkan pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat; (4) Menciptakan kondisi

perekonomian daerah yang stabil; dan (5) Pemerataan distribusi pendapatan.

3. Untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam Nawacita. Dan sebagai penjabaran, pemerintah telah mencanangkan tema RKP per tahunnya. Selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah RPJMN dan RPJMD yang telah ditetapkan, dan mengacu pada RKPD Provinsi Lampung dengan 6 (enam) prioritas pembangunan daerah, penyusunan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 telah pula mengintegrasikan 33 Agenda Kerja Gubernur/Wakil Gubernur ke dalam rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
4. Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat yang ditandai dengan indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang kian membaik. Namun demikian, masih terdapat permasalahan dan tantangan di daerah yang perlu ditangani secara komprehensif, antara lain:
 - a. Tantangan Ekonomi
Pengelolaan sumber daya alam sebagai komoditas ekspor yang masih berupa *raw material* dan bergantung pada harga pasar dan permintaan global; belum meratanya investasi dan keterbatasan koneksi yang menjadi kendala dalam menarik investor; kapasitas infrastruktur dan prasarana terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara yang belum cukup memadai untuk kegiatan ekonomi dalam skala lebih besar; pengembangan penerapan teknologi pertanian yang masih perlu perhatian; dan



rendahnya literasi digital dan keuangan masyarakat sebagai katalis perluasan pangsa pasar lokal maupun internasional dalam rangka implementasi teknologi dalam aktivitas perekonomian.

b. Tantangan Sosial Kependudukan

Persebaran penduduk yang belum merata dan cenderung tinggi di Kawasan sentra industri yang memiliki akses lebih baik; belum maksimalnya peningkatan kualitas SDM yang tercermin dalam IPM Lampung yang cenderung rendah juga persentase penduduk miskin yang lebih tinggi di regional Sumatera dan Nasional; kesenjangan kualitas dan kuantitas terhadap akses dan mutu layanan pendidikan juga kesehatan dasar; angka partisipasi angkatan kerja perempuan yang terus menurun; tingginya persentase penduduk yang bekerja pada kegiatan informal; dan tenaga kerja yang masih didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan rendah.

c. Tantangan Lainnya

Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional belum memiliki kapasitas infrastruktur pertanian yang memadai sehingga berdampak pada produktivitas dan penanganan inflasi; selain itu Lampung belum maksimal dalam mempertahankan produktivitas produk holtikultura yang berpotensi sebagai alternatif dalam menghadapi masa El Nino.

6.1.2. Outlook Makroekonomi Regional Lampung

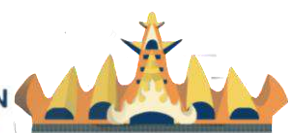
1. Kinerja ekonomi Lampung tahun 2023 tumbuh sebesar 4,55 persen (*ctc*), menguat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 4,28 persen (*ctc*). Namun, capaian kinerja ekonomi Lampung masih lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang tercatat sebesar 5,05 persen (*ctc*). Pertumbuhan positif kinerja ekonomi Lampung didorong oleh

seluruh lapangan usaha dan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan positif didorong oleh sebagian besar komponen terutama komponen PK-LNPRT yang didorong oleh kegiatan persiapan pemilihan umum.

2. Berdasarkan Lapangan Usaha, struktur PDRB Lampung masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan distribusi sebesar 27,29 persen dari total PDRB ADHB. Struktur PDRB Lampung berdasarkan pengeluaran masih didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yakni sebesar 62,34 persen dari total PDRB ADHB.

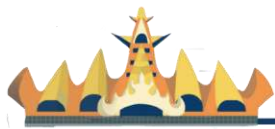
3. Pada tahun 2023, capaian inflasi Lampung tetap terjaga pada level sasaran $3,0 \pm 1$ persen (*yoy*) yakni sebesar 3,47 persen (*yoy*). Namun, capaian ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,61 persen (*yoy*). Tantangan inflasi pada tahun 2023 yaitu berasal dari komoditas Beras. Inflasi komoditas beras tidak terlepas dari dampak cuaca panas El Nino, kondisi ini mengakibatkan menurunnya produktivitas dan membuat harga gabah meningkat tajam. Sementara itu, secara bulanan, rata-rata inflasi pada tahun 2023 secara bulanan tercatat sebesar 0,29 persen (*mtm*), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi tahun 2022 yang sebesar 0,45 persen (*mtm*). Secara garis besar, peningkatan tekanan inflasi pada tahun 2023 dibandingkan periode sebelumnya didorong oleh meningkatnya inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

4. Suku bunga acuan terjaga pada level 5,75 persen pada triwulan I hingga triwulan III 2023 untuk memastikan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap berada pada level sasaran $3,0 \pm 1$ persen sampai dengan akhir tahun 2023. Sementara itu, suku bunga acuan triwulan IV 2023 sebesar 6,00 persen untuk memastikan inflasi terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1$ persen pada 2024 mendatang.





5. Pada tahun 2023, nilai tukar terdepresiasi terhadap USD yang berimplikasi pada peningkatan harga barang impor. Menariknya, meskipun terjadi depresiasi nilai tukar Rupiah, impor bahan baku dan penolong, serta barang-barang modal di regional Lampung tetap mengalami peningkatan dan yang menurun hanya impor barang konsumsi. Hal ini bisa diinterpretasikan sebagai indikasi positif terkait dengan investasi di sektor manufaktur Lampung, untuk bahan baku diproduksi menjadi barang lainnya. Kondisi ini dapat menjadi cerminan bahwa meskipun nilai tukar mata uang nasional mengalami fluktuasi, tetapi kepercayaan pelaku industri terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan infrastruktur di Lampung tetap tinggi.
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung selama kurun waktu 2020 hingga 2023 terus mengalami kemajuan. IPM Lampung pada tahun 2023 mencapai 74,39, tumbuh 0,96 persen dan meningkat 0,69 basis poin dibandingkan capaian tahun 2022. Provinsi Lampung telah masuk ke dalam kategori IPM "tinggi". Peningkatan ini didorong oleh semua dimensi IPM, termasuk kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Namun, IPM Lampung masih di bawah capaian IPM pada level nasional dan regional Sumatera.
7. Jumlah penduduk miskin, pada Maret 2023, mencapai 970,67 ribu orang (11,11 persen), menurun sebesar 24,92 ribu orang dibandingkan September 2022. Namun, capaian tingkat kemiskinan Lampung Maret 2023 masih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang tercatat sebesar 9,36 persen. Kemiskinan lebih tinggi berada di pedesaan (12,65 persen) dibandingkan perkotaan (8,02 persen). Indeks Kedalaman Kemiskinan menurun simultan di perkotaan dan pedesaan, namun Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat di pedesaan. Lampung memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi daripada rata-rata nasional dan regional Sumatera.
8. Pada Maret 2023, indeks *Gini Ratio* di Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,324, meningkat sebesar 3,51 persen dari September 2022. *Gini Ratio* di daerah perkotaan adalah 0,359, meningkat 0,007 poin dari September 2022, sementara di pedesaan adalah 0,287, meningkat 0,012 poin dari September 2022. Capaian *Gini Ratio* Lampung berada di bawah angka nasional dan urutan kelima terendah di Sumatera, dimana penyebab ketimpangan *persisten* di Lampung berasal dari ketimpangan sumber daya alam, demografi, mobilitas barang dan jasa, serta konsentrasi ekonomi di kota besar seperti Bandar Lampung.
9. Pada Agustus 2023, pertumbuhan jumlah Bukan Angkatan Kerja yang lebih tinggi dari jumlah Angkatan Kerja menyebabkan penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dibanding tahun sebelumnya. TPAK Lampung (70,04 persen) lebih tinggi dari rata-rata nasional, meskipun dengan tren fluktuatif. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi lapangan pekerjaan, dengan mayoritas tenaga kerja masih berpendidikan rendah. Komposisi tenaga kerja di Lampung didominasi oleh lulusan SD ke bawah. Struktur pekerja di Lampung didominasi oleh pekerja informal. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 turun menjadi 4,23 persen dibandingkan Agustus 2022 yang tercatat sebesar 4,52, menunjukkan pemulihan dari pandemi. Capaian TPT Lampung lebih baik dibandingkan dengan TPT nasional dan rata-rata TPT di regional Sumatera.
10. NTP Lampung menunjukkan tren yang positif meningkat. Rerata NTP Lampung pada tahun 2023 tercatat sebesar 109,32, meningkat dibandingkan dengan rerata NTP tahun 2022 yang sebesar 104,34. Namun capaian NTP Lampung masih berada di bawah rata-rata NTP Nasional dan Regional Sumatera. Meski



demikian, NTP Lampung konsisten mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan NTP Lampung tahun 2023 didorong oleh peningkatan harga komoditas pada beberapa subsektor tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, dan perikanan tangkap. Adapun upaya besar Pemerintah Provinsi Lampung telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk subsidi benih, akses permodalan KUR bidang pertanian, Asuransi Usaha Tani Padi, Kartu Petani Berjaya, dan berbagai dukungan lainnya.

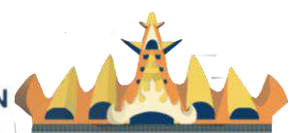
11. Pada tahun 2023, Nilai Tukar Nelayan (NTN) atau NTP subsektor perikanan tangkap Lampung tercatat sebesar 110,61, berada di atas rerata NTN regional Sumatera dan Nasional, menempati posisi keempat tertinggi dari 10 Provinsi di Regional Sumatera.
12. Berdasarkan hasil rewiu capaian Kinerja Makro dan Kesejahteraan Regional Lampung, Rasio Gini melebihi target maksimal pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sementara itu, indikator lainnya telah mencapai target. *Overall*, capaian makro ekonomi dan kesejahteraan Provinsi Lampung menggambarkan pembangunan Lampung yang masih *on the track* dan dapat dimaknai sebagai pembangunan yang berkelanjutan.

6.1.3. Kinerja Fiskal Regional Lampung

6.1.3.1. Kinerja APBN

1. Sampai dengan akhir Desember 2023, Sampai dengan akhir Tahun 2023, Pendapatan Negara menunjukkan capaian yang positif dengan nilai realisasi mencapai Rp10,8 triliun atau setara dengan 105,65 persen dari target pada akhir tahun yakni Rp10,2 triliun. Secara kumulatif, pendapatan negara terkontraksi 0,95 persen (yoy) utamanya disebabkan oleh penerimaan yang bersumber dari Bea Keluar yang menurun tajam akibat moderasi harga komoditas di pasar global. Namun, kinerja Perpajakan Dalam Negeri melanjutkan tren peningkatan.

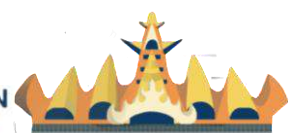
2. Capaian Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri berdasarkan target awal APBN 2023 adalah sebesar 109,69 persen. Capaian Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri sebesar 107,35 persen dari target, sementara untuk Capaian Penerimaan Perpajakan Perdagangan Internasional adalah 133,50 persen dari target. Selanjutnya, apabila melihat ketercapaian target berdasarkan Perpres 75 Tahun 2023, Capaian Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri sebesar 103,28 persen dari target, sementara untuk Capaian Penerimaan Perpajakan Perdagangan Internasional adalah 83,82 persen dari target.
3. Realisasi Penerimaan Perpajakan pemerintah pusat di regional Lampung secara agregat tumbuh negatif sebesar -3,90 persen (yoy) atau secara nominal mencapai sebesar Rp9,33 triliun. Penerimaan Perpajakan di Lampung didominasi oleh penerimaan Pajak Dalam Negeri yang tumbuh hingga 15,72 persen. Sementara, dari sisi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional terkontraksi cukup dalam sebesar -59,75 persen (yoy.)
4. Kontributor utama Penerimaan Pajak Dalam Negeri bersumber dari PPN sebesar Rp 4,29 triliun memiliki proporsi hingga 51,61 persen dari total Penerimaan Pajak Dalam Negeri. PPN tumbuh 16,46 persen (yoy) disumbang oleh peningkatan jenis PPN Dalam Negeri seiring kebijakan kenaikan tarif PPN dan kenaikan IHK di Lampung serta daya beli masyarakat yang masih terjaga. PPh sebagai kontributor terbesar kedua Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Lampung sebesar Rp Rp3,70 triliun, tumbuh 14,89 persen (yoy) diantaranya dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan pajak dari sektor Administrasi Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu, PBB dan Pajak Lainnya juga mencatatkan pertumbuhan.
5. Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional terkontraksi sebesar 59,75 persen (yoy). Penerimaan Bea Masuk berhasil tumbuh 43,98 persen (yoy) dengan adanya kenaikan importasi

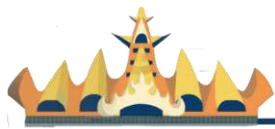




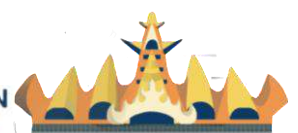
beras. Sementara itu, penurunan tajam terjadi pada penerimaan Bea Keluar sebesar -76,45 persen (yoy), utamanya disebabkan oleh moderasi harga referensi CPO beserta turunannya di pasar global, khususnya minyak kelapa sawit yang menduduki peringkat pertama komoditas terbesar ekspor dari Lampung.

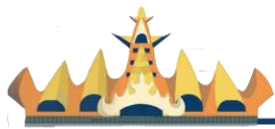
6. Dari sisi penerimaan negara berupa Cukai, secara yoy melanjutkan tumbuh 3,95 persen atau secara nominal mencapai Rp3,55 triliun yang diantaranya berasal oleh penerimaan atas denda administrasi cukai dengan berlakunya peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai.
7. Ditinjau berdasarkan sektor, Industri Pengolahan masih menjadi sektor utama dalam menyumbang penerimaan Pajak Dalam Negeri di Lampung dengan kontribusi 28,37 persen dan berhasil kembali tumbuh sebesar 40,32 persen, dipicu oleh kenaikan setoran pajak pada industri gula pasir, industri pati ubi kayu dan industri minyak mentah kelapa sawit (CPO). Secara keseluruhan, kelima sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pajak Dalam Negeri di Lampung menunjukkan tren pertumbuhan dari tahun sebelumnya.
8. Capaian penerimaan negara yang bersumber dari PNBPN melebihi target hingga 153,02 persen pada akhir tahun. Secara nominal, realisasi PNBPN di Lampung pada Tahun 2023 mencapai angka Rp1,47 triliun. Capaian ini didominasi oleh penerimaan PNBPN Lainnya yang mampu tumbuh 41,8 persen (yoy). Komponen PNBPN Lainnya menyumbang realisasi 56 persen dari total PNBPN, atau secara nominal sebesar Rp820,69 miliar setara dengan 171,94 persen dari target, utamanya bersumber dari penerimaan Pendapatan Biaya Pendidikan pada Perguruan Tinggi. PNBPN yang disumbang dari pendapatan Satker BLU terealisasi sebesar Rp625,11 miliar atau 134,42 persen dari target APBN yang tumbuh 5,40 persen (yoy). Capaian ini sebagian besar didukung oleh Pendapatan jasa layanan Pendidikan yang diberikan oleh Satker BLU.
9. Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp31,7 triliun atau tumbuh 5,84 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan persentase penyerapan mencapai 98,53. Realisasi BPP sampai dengan akhir Desember 2023 mencapai Rp10,23 triliun dengan tingkat penyerapan sebesar 96,67 persen dari alokasi pagu, tumbuh 16 persen (yoy) dari tahun lalu.
10. Belanja Pegawai sebesar Rp3,78 triliun tumbuh 0,76 persen (yoy) yang dimanfaatkan di antaranya untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN. Belanja Barang memiliki pertumbuhan yang paling tinggi mencapai 50,14 persen (yoy) atau secara nominal sebesar Rp4,9 triliun dengan kontribusi 47,9 persen dari total BPP seiring dengan peningkatan belanja khususnya dalam rangka mendukung persiapan pemilu 2024. Sementara Belanja Modal sebesar Rp1,5 triliun atau terkontraksi 14,67 persen, karena terdapat persyaratan yang belum terpenuhi atas Belanja Modal yang didanai oleh Pinjaman LN. Kinerja Belanja Bantuan Sosial tumbuh 18,87 persen atau secara nominal sebesar Rp38,18 miliar dengan tingkat penyerapan 91,07 persen dari alokasi pagu yang dimanfaatkan untuk pemberian bantuan kepada peserta didik melalui Satker Kementerian Agama.
11. Pelaksanaan BPP per Kementerian Negara/Lembaga, sampai dengan akhir tahun 2023 Satker Kementerian PUPR yang memiliki alokasi anggaran terbesar di Lampung mencatatkan kinerja penyerapan sebesar 95,01% atau senilai Rp2,29 triliun yang didominasi oleh Belanja Modal. Sedangkan K/L dengan pertumbuhan realisasi tertinggi adalah Satker Komisi Pemilihan Umum sebesar 470,31 persen (yoy) yang utamanya dipengaruhi oleh





- penyerapan Belanja Barang dalam rangka Pemilihan Umum 2024.
12. Pada klasifikasi BPP menurut fungsi, alokasi terbesar terdapat pada fungsi Ekonomi. Dengan realisasi senilai Rp 2,6 triliun atau persentase penyerapan 95,13 persen dari total pagunya, BPP fungsi Ekonomi diserap melalui beberapa program yang mencakup antara lain: infrastruktur konektivitas; ketahanan sumber daya air; ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas; pengelolaan perikanan dan kelautan; nilai tambah dan daya saing industri; serta 12 program lainnya yang secara spesifik diarahkan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Lampung.
 13. Pada akhir Desember 2023, BPP Per Kapita di Lampung sebesar Rp1.115.237, meningkat 14,80 persen (*yoy*) dari tahun sebelumnya. Sementara itu, Realisasi BPP Provinsi Lampung sampai dengan Desember 2023 memberikan kontribusi terhadap PDRB 2023 sebesar 2,28 persen atau naik 0,15 persen (*yoy*). Tren positif kontribusi BPP tentunya sangat dipengaruhi oleh perkembangan realisasi belanja setiap tahunnya.
 14. Kinerja Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan Desember 2023 tumbuh secara positif 1,59 persen (*yoy*) dibandingkan tahun lalu dan telah tersalurkan 99,45 persen dari anggaran atau secara nominal sebesar Rp21,47 triliun. Tumbuhnya penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) terutama didorong oleh pertumbuhan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang mendominasi komponen TKD.
 15. Penyaluran DAU sebesar Rp12,7 triliun atau 100 persen dari alokasi pagu. Sementara penyaluran DBH sebesar Rp946,62 miliar atau 99,79 persen dari pagu mengalami kontraksi 14 persen. DBH CHT menjadi jenis DBH dengan realisasi terendah dengan tingkat penyaluran 71,72 persen dari total alokasi akibat adanya kekurangan persyaratan salur oleh Pemda.
 16. Selanjutnya, kinerja penyaluran Dana Transfer Khusus melalui DAK Fisik terkontraksi sebesar 32,87 persen (*yoy*) seiring dengan pagu yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Namun, dicermati dari tingkat serapan terdapat peningkatan dengan kinerja realisasi sebesar 96,84 persen, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar 92,58 persen. Sedangkan untuk komponen DAK Non Fisik tumbuh sebesar 7,36 persen (*yoy*) dipengaruhi oleh peningkatan kepatuhan pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan puskesmas dalam melengkapi syarat salur.
 17. Kinerja penyaluran Dana Desa mengalami sedikit penurunan sebesar 1,05 persen (*yoy*) akibat dari alokasi pagu yang juga sedikit menurun. Dalam penyalurannya, sepanjang tahun 2023 terdapat beberapa desa tidak salur. Hal ini dikarenakan terdapat permasalahan internal desa dan permasalahan hukum perangkat desa. Di sisi lain, Dana Insentif Fiskal Provinsi Lampung pada tahun 2023 mencatat pertumbuhan signifikan hingga 124,44 persen (*yoy*) dengan persentase penyaluran mencapai 98,86 persen atau senilai Rp253 miliar. Hal ini utamanya disebabkan oleh penambahan alokasi Insentif Fiskal atas Kinerja Tahun Anggaran Berjalan dalam kategori Kinerja Kesejahteraan Masyarakat untuk 14 Pemda di Provinsi Lampung.
 18. Di wilayah Provinsi Lampung, terdapat lima BLU yang terdiri dari 1 BLU Bidang Usaha Jasa Lainnya, 2 BLU Bidang Kesehatan, dan 2 BLU Bidang Pendidikan, yakni diantaranya BSPJI Lampung, Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, Rumkit Bhayangkara Bandar Lampung, UIN Raden Intan Bandar Lampung, dan Universitas Lampung. Total aset tetap yang dikelola BLU di Wilayah Provinsi Lampung per 31 Desember 2023 sebesar Rp8,29 triliun.
 19. Total alokasi Belanja Negara dalam APBN yang dikelola oleh kelima BLU di wilayah Lampung berjumlah Rp1,27 triliun, dan sampai dengan





Desember 2023 telah terealisasi Rp1,19 triliun. Sementara itu, target PNBPN atas Pendapatan BLU yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp485,14 miliar, sampai dengan Desember 2023 telah terealisasi Rp652,11 miliar jauh melampaui target hingga 134,42 persen.

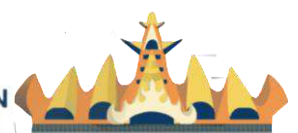
20. BLU Universitas Lampung memiliki nilai *Maturity Rating* tahun 2022 tertinggi jika dibandingkan dengan BLU lainnya di wilayah Provinsi Lampung yaitu sebesar 3,57. Sedangkan nilai *Maturity Rating* terendah di Tahun 2022, terdapat pada BLU UIN Raden Intan. Secara keseluruhan, kelima Satker BLU di Wilayah Lampung menunjukkan kenaikan *Maturity Rating* dari tahun sebelumnya. Satker-satker pengguna PNBPN di bidang pendidikan yang berpotensi menjadi BLU, yaitu Politeknik Negeri Lampung dan Institut Teknologi Sumatera.
21. Jumlah penerusan pinjaman (*Subsidiary Loan Agreement*)/ SLA yang ditatausahakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung per 31 Desember sebesar Rp41,99 miliar dengan total lima debitur yang terdiri dari: 3 debitur pemerintah daerah, 2 debitur BUMD, dan 1 debitur koperasi.
22. Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Lampung sampai dengan 31 Desember 2023 telah mencapai Rp8,303 triliun kepada 171,667 debitur atau 99,996 persen dari alokasi kuota KUR di Provinsi Lampung Tahun 2023 per Oktober sebesar Rp8,304 triliun. Penurunan nilai penyaluran KUR sebesar -26,32 persen (*yoy*) dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan kebijakan terbaru KUR Tahun 2023 mulai berlaku secara efektif sejak Bulan Februari.
23. Penyaluran KUR terbesar pada Skema Mikro yakni tersalur Rp 6,16 triliun kepada 152.569 debitur. Dari perspektif sektor, penyaluran KUR terbesar di Lampung terdapat pada Sektor Pertanian dan Perdagangan. Penyaluran KUR di

Provinsi Lampung Sebagian besar disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), diikuti oleh Bank Mandiri dan BPD Lampung. Penyaluran KUR terkonsentrasi di Kabupaten Lampung Tengah yang mencapai Rp 1,54 triliun kepada sebanyak 34.355 debitur dan penyaluran paling rendah pada Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp45,94 miliar kepada sebanyak 1.066 debitur.

24. Realisasi penyaluran pembiayaan UMi di Lampung tahun 2023 mencapai Rp409,49 miliar kepada 86.107 debitur yang sebagian besar disalurkan melalui PT Penanaman Nasional Madani secara *linkage*. Penyaluran UMi di Lampung terkonsentrasi di Kabupaten Lampung Utara mencapai Rp80,53 miliar kepada 17.579 debitur dan terendah Kota Metro sebesar Rp100 juta kepada 6 debitur. Peningkatan penyaluran UMi pada Tahun 2023 sebesar 22,06 persen (*yoy*) menunjukkan bahwa masyarakat pelaku usaha yang memanfaatkan program pemerintah ini terus meningkat setiap tahunnya.
25. Isu strategis pelaksanaan anggaran Tahun 2023 yang diangkat dalam Reviu Pelaksanaan Anggaran diantaranya terkait : Permasalahan terkait Data Capaian Output, Permasalahan terkait Belanja Kontraktual, Permasalahan terkait Transfer ke Daerah, meliputi: Kebijakan baru terkait DAU, terbatasnya SDM di Puskesmas yang kompeten, dan Kendala dalam penyaluran Dana Desa terkait komunikasi dengan pendamping Desa; Tantangan dalam Upaya akselerasi Belanja APBN di Daerah.

6.1.3.2. Kinerja APBD

1. Target Pendapatan APBD Lampung tahun 2023 setelah perubahan direncanakan meningkat sebesar 4,89 persen dibandingkan tahun 2022 menjadi Rp31.702,97 miliar. Kenaikan ini merupakan hasil dari strategi Pemerintah Daerah yang berfokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, serta upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dengan proyeksi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)



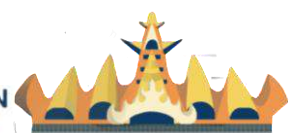


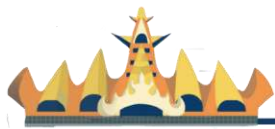
sebesar 21,94 persen. Alokasi total belanja Pemerintah Daerah Regional Lampung dianggarkan meningkat 0,90 persen (*yoy*) menjadi Rp32.358,72 miliar. Peningkatan pagu dialokasikan untuk Belanja Operasi yang naik 3,59 persen (*yoy*) serta Belanja Transfer juga mendapatkan kenaikan alokasi sebesar 5,59 persen (*yoy*). Namun demikian komponen Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dialokasikan turun masing-masing 13,30 persen (*yoy*) dan 50,29 persen (*yoy*).

2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung tahun 2023 PAD Lampung tercatat sebesar Rp6.114,60 miliar atau 72,51 persen dari target, tumbuh 0,73 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan hampir seluruh komponen PAD, yaitu kinerja Pendapatan Pajak Daerah (4,58 persen, *yoy*), Retribusi Daerah (19,56 persen, *yoy*), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (1,96 persen, *yoy*). Sedangkan Lain-Lain PAD yang Sah berkontraksi -10,76 persen, *yoy*). Komponen Pajak daerah sendiri mampu menyumbang 73,21 persen terhadap total PAD. Hampir seluruh komponen pendapatan Pajak Daerah mengalami pertumbuhan kecuali Pajak Sarang Burung Walet (-10,27 persen, *yoy*), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (-4,91 persen, *yoy*), Pajak Rokok (-4,48 persen, *yoy*), serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (-1,52 persen, *yoy*). Meskipun kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) regional Lampung tahun 2023 meningkat, rasionya terhadap PDRB Lampung masih cenderung rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi pajak dan retribusi daerah yang belum dioptimalkan.
3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tumbuh 1,96 persen (*yoy*) utamanya dipengaruhi oleh dividen atas penyertaan modal pada BUMD yang menguat 8,29 persen (*yoy*). Sementara itu, Lain-Lain PAD yang sah terkoreksi -10,76 persen (*yoy*) akibat menurunnya Pendapatan BLUD sebagai

kontributor utama pada Lain-Lain PAD yang Sah. optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan kekayaan daerah dan tata kelola BLUD perlu ditingkatkan guna memperbaiki kinerja keuangan daerah.

4. Pendapatan daerah masih sangat bergantung pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (TKD) yang menyumbang sebesar 73,76 persen dari total Pendapatan Daerah. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi, dan pemda perlu semakin kreatif dalam mencari pembiayaan alternatif serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Kebijakan TKD, meskipun bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal, perlu diimbangi dengan upaya mandiri dalam mengelola pendapatan.
5. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat turun 0,72 persen (*yoy*). Kontraksi ini dipengaruhi oleh turunnya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) terutama DAK Fisik, serta Dana Desa.
6. Dalam hal tingkat kemandirian daerah, rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio Transfer Pemerintah Pusat (TPP) terhadap total pendapatan menunjukkan variasi dalam tingkat kemandirian antara daerah-daerah di Lampung. Provinsi Lampung menunjukkan rasio kemandirian tertinggi dengan 55,68 persen, sementara Kabupaten Tanggamus memiliki kemandirian terendah dengan 2,41 persen. Ketergantungan terhadap TKD dapat mengindikasikan risiko ketidakmandirian keuangan daerah.
7. Dalam periode 3 tahun terakhir, kemandirian daerah regional Lampung secara agregat meningkat seiring dengan peningkatan realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD). Beberapa upaya daerah dalam peningkatan PAD telah dilaksanakan antara lain perluasan aksesibilitas dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dengan





- memanfaatkan teknologi informasi, pemberlakuan program relaksasi pajak kendaraan bermotor, penambahan unit layanan samsat keliling, serta optimalisasi perencanaan dan pengawasan pada tata kelola BUMD.
8. Realisasi Belanja Daerah tahun 2023, mencapai Rp19.344,75 miliar atau sebesar 84,90 persen dari pagu. Terjadi penurunan sebesar 5,12 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, mengindikasikan kinerja yang belum optimal dalam pengelolaan belanja. Belanja operasi masih mendominasi realisasi belanja daerah dengan kontribusi sebesar 70,42 persen dari total realisasi belanja. Belanja operasi ini terutama dipengaruhi oleh Belanja Pegawai yang menyumbang 55,76 persen dari total belanja operasi, dengan pertumbuhan sebesar 1,64 persen secara *yoy*. Namun demikian, pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh Belanja Bantuan Sosial yang mencapai 14,75 persen. Sedangkan kinerja Barang dan Jasa tumbuh negatif 8,99 persen.
 9. Belanja Modal kembali berkontraksi -15,82 persen (*yoy*) di tahun 2023. Realisasi belanja hanya mencapai 41,39 persen dari pagu atau sebesar Rp3.629,45 miliar dengan kontribusi terhadap total belanjanya sebesar 80,70 persen. Penurunan realisasi Belanja Modal juga dipengaruhi turunnya alokasinya anggaran tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Modal tertinggi Belanja Modal Pengadaan Jalan sebesar Rp1.693,71 miliar atau berkontribusi 46,67 persen dari keseluruhan belanja modal. Hal ini seiring dengan upaya perbaikan ekonomi dan kelancaran distribusi atau logistik barang.
 10. Belanja Transfer berkontraksi-7,07 persen (*yoy*) dengan realisasi sebesar Rp4.4863,89 tahun 2023 atau 86,15 persen dari pagu. Realisasi ini didominasi oleh Belanja Bantuan Keuangan, khususnya untuk Desa.
 11. Alokasi belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di regional Lampung telah memenuhi konstitusi terkait *mandatory spending*, terutama dalam alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan serta pemenuhan Alokasi Dana Desa (ADD).
 12. Realisasi belanja daerah dan belanja modal per kapita bervariasi di Kabupaten/Kota di regional Lampung, Kota Metro memiliki rasio belanja dan belanja modal tertinggi. Rasio belanja modal per kapita memiliki implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana alokasi belanja modal yang tepat dapat mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
 13. Empat rasio terhadap surplus/defisit APBD digunakan untuk memberikan gambaran kinerja fiskal di regional Lampung. Rasio surplus terhadap total pendapatan menunjukkan peningkatan pada tahun 2023 (*yoy*), mengindikasikan performa fiskal yang meningkat. Rasio surplus terhadap dana transfer juga meningkat, mengindikasikan bahwa dana transfer dari Pemerintah Pusat masih belum dimanfaatkan dengan optimal sementara di sisi lain APBN terus mengalami defisit. Peningkatan rasio surplus terhadap PDRB yang disebabkan turunnya belanja daerah menunjukkan belanja pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat lebih rendah dibandingkan PAD untuk meningkatkan kesehatan ekonomi regional. Sedangkan, Rasio SiLPA terhadap alokasi belanja yang meningkat menunjukkan penggunaan anggaran relatif kurang efektif dibandingkan periode sebelumnya.
 14. Keseimbangan umum dan primer APBD di regional Lampung pada tahun 2023 menunjukkan angka positif, yang mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah daerah bersifat kontraktif, di mana belanja daerah lebih rendah daripada pendapatannya. Hal ini perlu diperhatikan agar pemerintah daerah lebih mampu meningkatkan belanja yang mendorong daya beli masyarakat, dengan tetap memastikan



kapasitas keuangan daerah dan keberlanjutan fiskal.

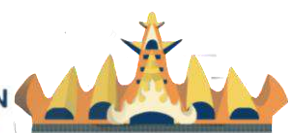
15. Terdapat penurunan signifikan pada pembiayaan netto tahun 2023, yang disebabkan oleh penurunan penerimaan pembiayaan dan peningkatan pengeluaran pembiayaan. Penurunan penerimaan pembiayaan terutama disebabkan oleh turunnya penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya serta berkurangnya penerimaan pinjaman dalam negeri. Sementara itu, pengeluaran Pembiayaan meningkat seiring dengan peningkatan penyertaan modal kepada BUMD dan pembayaran pokok pinjaman daerah kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank.
16. BLUD di regional Lampung pada tahun 2023 berjumlah 337 BLUD di bawah oleh Pemerintah Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota yang mayoritas masuk dalam rumpun kesehatan berupa Puskesmas.
17. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah yang disampaikan ke Kanwil DJPb Provinsi Lampung, pendapatan BLUD tahun 2023 sebesar Rp1.185,14 miliar atau turun 9,30 persen (yoy), begitu pula Belanja BLUD yang mengalami kontraksi-19,45 persen (yoy) dengan realisasi sebesar Rp1.186,06 miliar. Meski turun, besaran realisasi Belanja BLUD lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatannya dengan rasio 99,92 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa BLUD di regional Lampung masih belum mandiri secara *financial* dimana pendapatan BLUD belum mampu memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri. Namun demikian berdasarkan data dari 174 sampel BLUD menunjukkan adanya peningkatan jumlah BLUD di regional Lampung yang masuk dalam kategori mandiri secara *financial* dalam periode 3 tahun terakhir.
18. Lebih lanjut, berdasarkan data dari 146 sampel BLUD di Lampung menunjukkan adanya peningkatan total nilai aset yang dimiliki BLUD

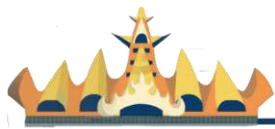
dalam kurun 3 tahun terakhir, meski terdapat 14 BLUD yang justru mengalami penurunan nilai aset.

19. Isu strategis pelaksanaan APBD di regional APBD antara lain:
 - a. Optimalisasi pembayaran pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi
 - b. Retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan perlu diperkuat.
 - c. Turunnya pendapatan BLUD sebagai kontributor utama dalam sektor Lain-Lain PAD yang sah perlu menjadi perhatian.
 - d. Realisasi Belanja tahun 2023 turun -5,12 persen dan menjadi yang terendah dalam periode 3 tahun terakhir dengan hanya mencapai 84,90 persen dari pagu, terutama serapan Belanja Modal yang turun hingga-15,82 persen (yoy).

6.1.3.3. Analisis Konsolidasi APBN dan APBD

1. Pendapatan sebesar Rp16,70 triliun dan realisasi Belanja sebesar Rp37,65 triliun sehingga menghasilkan defisit anggaran konsolidasian sebesar Rp20,96 triliun. Dari sisi Pembiayaan mencatatkan realisasi sebesar Rp514,35 miliar yang seluruhnya merupakan penerimaan yang bersumber dari dalam negeri, yang kemudian mengurangi angka defisit sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp20,44 triliun.
2. Rasio belanja operasi terhadap total belanja konsolidasian menunjukkan porsi belanja pemerintah untuk mendukung operasional pemerintahan. Rasio belanja operasi terhadap total belanja konsolidasian di Lampung mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hingga triwulan IV 2023 pemerintah masih berfokus pada kegiatan rutin pemerintah.





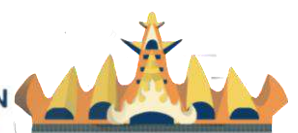
3. Pada tahun 2023, keseimbangan umum konsolidasian regional Lampung berada pada posisi defisit Rp20,44 triliun. Angka ini lebih besar 0,12 persen dibanding realisasi pada periode yang sama tahun 2022 yang defisit sebesar Rp19,62 triliun. Melebarnya defisit anggaran tahun 2023 terutama disebabkan adanya penurunan realisasi pendapatan yang lebih dalam dibanding penurunan realisasi Belanja konsolidasian.

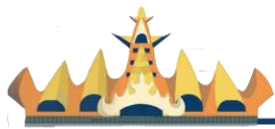
6.1.4. Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik

1. Program belanja Kementerian/Lembaga (K/L) melalui Rincian Output (RO) Harmonis yang bersinergi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menunjukkan upaya pemerintah dalam pengembangan beberapa sektor kritis, seperti bidang jalan, kesehatan dan KB, pendidikan, pertanian, dan transportasi pedesaan di regional Lampung.
2. Per 31 Desember 2023, total pagu anggaran DAK Fisik yang telah dialokasikan di seluruh pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada regional Lampung sebesar Rp1.232,35 miliar dengan realisasi mencapai Rp1.193,40 miliar atau 96,84 persen. Di sisi lain, Belanja Kementerian/Lembaga yang berkolaborasi untuk mendukung area yang menjadi fokus penyaluran DAK Fisik di regional Lampung (RO Harmonis) memiliki total pagu anggaran sebesar Rp1.629,01 miliar dengan capaian realisasi Rp1.559,86 miliar atau 98,21 persen. Dari sisi anggaran, alokasi RO Harmonis (Belanja K/L) pada tahun 2023 lebih besar Rp396,65 miliar dibandingkan DAK Fisik melalui Pemda.
3. Secara keseluruhan, meskipun tingkat realisasi dan pencapaian output dari Belanja RO Harmonis DAK Fisik terbilang cukup baik bahkan melebihi target pada beberapa kasus, tetap terdapat sejumlah permasalahan pelaksanaan anggaran yang harus dihadapi oleh Satuan Kerja terkait. Tantangan yang dihadapi mencakup beragam aspek, mulai dari kendala dalam penganggaran seperti revisi anggaran dan blokir

anggaran, hingga masalah sumber daya manusia seperti kurangnya jumlah pegawai yang bersertifikasi dan seringnya pergantian pejabat perbendaharaan. Selain itu, eksekusi kegiatan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi lapangan yang tidak terduga dan keterlambatan dalam penerbitan pedoman teknis. Permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa juga menjadi bagian dari tantangan tersebut, termasuk proses lelang yang memakan waktu dan keterbatasan penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan TKDN. Regulasi pemerintah pusat dan daerah yang berubah-ubah juga turut menyulitkan pelaksanaan anggaran.

4. Upaya sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Kementerian Lembaga di tingkat daerah, terutama terkait dengan pelaksanaan program RO Harmonis DAK Fisik, telah menghasilkan berbagai langkah strategis. Langkah-langkah tersebut meliputi sinkronisasi perencanaan anggaran untuk mencegah tumpang tindih kegiatan yang didanai oleh APBD dan APBN, rapat evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program sesuai target, koordinasi dengan KPPN dan Kanwil DJPb untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan anggaran, serta pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah dalam kerangka Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Langkah-langkah ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta menjaga stabilitas, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
5. Secara spasial, terkait pembangunan jalan, Belanja K/L Harmonis pada bidang jalan menunjukkan pola distribusi anggaran yang merata di seluruh regional Lampung, dengan fokus pada pemeliharaan, akses transportasi, dan penggantian infrastruktur jalan, dimana terdapat sinergi antara belanja K/L dan DAK Fisik untuk memperkuat aksesibilitas dan





konektivitas jalan di berbagai kabupaten dan kota.

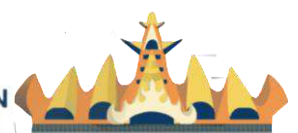
6. Terkait dukungan Kesehatan dan KB, Belanja K/L pada bidang kesehatan dan KB menitikberatkan pada pelatihan tenaga kesehatan dan non-kesehatan, serta pengembangan kapasitas dalam surveilans gizi, dimana DAK Fisik juga mendukung program penurunan angka kematian ibu, bayi, dan stunting, dengan alokasi anggaran yang cukup signifikan di beberapa kabupaten.
7. Terkait dukungan Pendidikan, Belanja K/L pada pendidikan memberikan perhatian khusus pada peningkatan mutu pendidikan melalui pelatihan guru, fasilitasi satuan PAUD dan Dikmas, serta pemberdayaan perpustakaan, dimana DAK Fisik banyak digunakan juga untuk mendukung PAUD dengan alokasi pagu yang signifikan di berbagai daerah.
8. Terkait dukungan Pertanian, Belanja K/L dan DAK Fisik mencakup berbagai kegiatan, seperti pelatihan, penyaluran benih, dan dukungan pasca panen, menunjukkan diversifikasi pendanaan untuk menggerakkan sektor pertanian, irigasi, dan dukungan konektivitas.
9. Terkait dengan Transportasi Pedesaan, belanja K/L dan DAK Fisik menysasar pengembangan infrastruktur transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Mesuji.

6.1.5. Sinergi Pusat-Daerah Dalam Upaya Pengurangan Pengangguran Dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing

1. Pengeluaran pemerintah pusat dan daerah di regional Lampung, melalui APBN dan APBD, secara sinergis meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran. Melalui Belanja Pemerintah Pusat dan TKD (DAK Fisik dan Non Fisik), pemerintah memberikan dukungan kepada berbagai sektor seperti UMKM, industri, pertanian, perikanan, pariwisata, dan olahraga. Sementara BPP menitikberatkan pada

peningkatan kualitas pendidikan umum dan vokasi, TKD fokus pada peningkatan kualitas lembaga pendidikan seperti PAUD, sekolah reguler, dan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan dari APBD, program pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja merupakan fokus utama dalam upaya penanggulangan pengangguran di Provinsi Lampung, diikuti oleh program hubungan industrial dan program penempatan tenaga kerja.

2. Realisasi belanja melalui KRO Pendidikan di regional Lampung pada tahun 2023 mencapai angka tertinggi, mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan sektor pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp469,11 miliar atau tumbuh sebesar 2,74 persen (yoy). Penekanan pada akses, kualitas, dan kesetaraan pendidikan dari PAUD hingga sekolah afirmasi menunjukkan upaya yang signifikan dalam memperkuat fondasi pendidikan. Di samping itu, belanja melalui KRO Padat Karya mengalami pertumbuhan positif sebesar 33,07 persen, menandakan dorongan investasi pada proyek-proyek yang memberdayakan tenaga kerja langsung, memperkuat perekonomian lokal. Lonjakan signifikan juga terjadi pada belanja melalui KRO Pelatihan sebesar 111,89 persen, menunjukkan peningkatan kebutuhan akan pelatihan di sektor pertanian, sebagai sektor utama di Lampung. Namun, belanja pada KRO Pendidikan Vokasi dan KRO Fasilitasi serta Pembinaan Masyarakat mengalami penurunan masing-masing sebesar 42,39 persen dan 51,95 persen, menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas alokasi anggaran pada sektor-sektor tersebut untuk memastikan pemanfaatan optimal sumber daya.
3. Dari sisi TKD, dalam periode 2020 hingga 2023, alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik di bidang pendidikan di wilayah Lampung mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor,



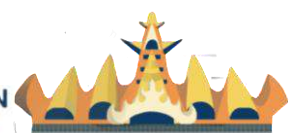


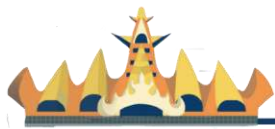
termasuk kebijakan pemerintah pusat, kondisi sarana dan prasarana pendidikan, serta kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan dana. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2021 karena dampak pandemi Covid-19, alokasi DAK meningkat kembali pada tahun 2022, terutama karena peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan syarat penyaluran dana dan kebijakan strategis pemerintah pusat. Meskipun demikian, pada tahun 2023, alokasi DAK kembali mengalami penurunan, yang disebabkan oleh penyesuaian kriteria dan syarat penyaluran dari pemerintah pusat serta keterbatasan anggaran. Namun, peningkatan alokasi DAK Non Fisik menunjukkan adanya upaya dalam meningkatkan kualitas layanan publik di bidang pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Meskipun demikian, tantangan terbesar terletak pada peningkatan pengangguran terbuka di tingkat pendidikan menengah atas dan SMK, menekankan perlunya peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk mengurangi kesenjangan antara kualifikasi SDM dan kebutuhan pasar kerja. Dengan alokasi DAK yang strategis, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam mutu pendidikan dan kemampuan siswa/siswi di setiap jenjang pendidikan, sejalan dengan tujuan pembangunan pendidikan nasional.

4. Dari segi APBD, program pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja mendapat alokasi dana APBD terbesar, dengan pagu mencapai Rp1.553 juta dan realisasi mencapai 96,17 persen, termasuk pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi dan konsultasi produktivitas perusahaan. Sementara itu, program hubungan industrial mendapat alokasi dana terbesar kedua dengan realisasi mencapai 97,92 persen, mencakup kegiatan seperti pencegahan perselisihan hubungan industrial dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Program penempatan tenaga kerja mendapat alokasi

dana sebesar Rp796,98 juta dengan realisasi mencapai 94,84 persen, termasuk pengelolaan informasi pasar kerja dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Di sisi lain, program penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan mendapat alokasi dana sebesar Rp520 juta dengan realisasi mencapai 94,96 persen, termasuk pengawasan terhadap norma kerja di perusahaan dan penegakan hukum ketenagakerjaan.

5. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, terjadi peningkatan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung. Meskipun IPM Lampung meningkat dari 71,04 pada tahun 2020 menjadi 72,48 pada tahun 2023, namun masih tertinggal dibandingkan dengan rata-rata regional Sumatera dan nasional. Hal yang sama terjadi dalam dimensi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Lampung, dimana kedua indikator tersebut masih di bawah rata-rata nasional. Selain itu, terdapat ketimpangan yang signifikan antara kota dan kabupaten di Lampung dalam hal akses dan kualitas pendidikan, dengan kota-kota seperti Kota Bandar Lampung dan Kota Metro memiliki nilai IPM, RLS, dan HLS yang jauh lebih tinggi daripada kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Lampung, perlu dilakukan upaya bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di Lampung.
6. Secara umum, peningkatan tren jumlah proyek PMA dan PMDN di Lampung diimbangi dengan peningkatan tren Jumlah Penduduk yang Bekerja di Lampung. Hal ini menunjukkan sentimen positif terhadap ketenagakerjaan di tengah nilai realisasi PMDN dan PMA yang cenderung turun akibat scarring effect pandemi COVID-19 dan ketidakpastian global.





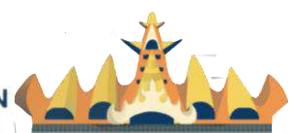
7. Secara sektoral, pada 2023, meningkatnya jumlah proyek PMA dan PMDN diimbangi dengan peningkatan jumlah pekerja di setiap sektor, kecuali pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang merupakan sektor basis Lampung menyerap tenaga kerja sekitar 40% dari total share. Adapun hubungan proyek PMDN dan Pekerja relatif positif, sedangkan hubungan proyek PMA dan Pekerja relatif negatif. Hal ini dapat mengindikasikan adanya volatilitas hubungan antara kenaikan/penurunan investasi dengan jumlah pekerja di sektor pertanian, yang merupakan sektor dengan tren pertumbuhan semakin menurun.
8. Analisis statistik inferensial menunjukkan bahwa kualitas SDM, yang direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta investasi dalam penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), memiliki korelasi negatif dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Hasil ini menegaskan bahwa pembangunan SDM dan peningkatan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri merupakan strategi yang penting untuk mengurangi tingkat pengangguran di regional Lampung.
9. Meskipun alokasi anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan DAK Fisik terkait pendidikan menunjukkan tren penurunan, peningkatan IPM dan persentase penduduk bekerja berpendidikan tinggi menandakan bahwa efisiensi penggunaan dana, kebijakan pendidikan yang inklusif, dan partisipasi aktif masyarakat serta sektor swasta juga memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas SDM dan mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam upaya pembangunan manusia dan peningkatan kualitas tenaga kerja, yang tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran semata, tetapi juga melibatkan faktor-

faktor lain yang mempengaruhi efektivitas kebijakan dan inisiatif pembangunan.

6.2. REKOMENDASI

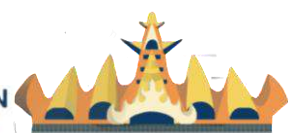
Rekomendasi dari hasil Kajian Fiskal Regional Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung tahunan 2023 mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan fiskal yaitu: perencanaan dan penganggaran, peningkatan pendapatan negara dan daerah, optimalisasi belanja pemerintah, serta strategi pembiayaan daerah. Adapun rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat perlu segera mengimplementasikan PP 1/2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN). HKFN penting sebagai katalis penyelarasan perencanaan anggaran dan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang meliputi penyelenggaraan sinergi kebijakan fiskal nasional, pembiayaan utang daerah, Dana Abadi Daerah, serta Sinergi Pendanaan APBD dan Non APBD.
2. Akselerasi sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu dilaksanakan melalui penyusunan rencana aksi bersama untuk menyinkronkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Kebijakan Ekonomi Makro dan Penetapan Plafon Kebutuhan Fiskal (KEM-PPKF) dalam perencanaan penganggaran terkait sasaran pembangunan daerah dan prioritas program pembangunan daerah. Sinergi ini penting untuk meningkatkan ketepatan program dan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional serta regional di Lampung.
3. Program-program prioritas penting untuk diarahkan kepada pembentukan ekosistem/sentra industri yang terintegrasi (hulu-hilir) dan terjamin keberlanjutannya. Fokus pada investasi industri pengolahan bahan baku pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan





- partisipasi pemegang kewenangan di daerah dan pusat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan PDRB dan menyerap tenaga kerja di Lampung dan sekitarnya.
4. Belanja modal Pemerintah Pusat dan Daerah harus terus disinergikan untuk mendukung konektivitas infrastruktur dan *value chain* di kawasan industri, seperti Kawasan Industri Way Pisang, Tanggamus, Pesawaran, dan Katibung. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produk lokal, menyerap tenaga kerja, dan meratakan pendapatan.
 5. Diperlukan stimulus untuk pertanian dan peningkatan produktivitas tanaman pangan. Alokasi anggaran pendukung pertanian, kehutanan, dan perikanan perlu ditingkatkan, dengan fokus pada subsidi benih, permodalan KUR, program asuransi usaha tani, dan pembiayaan melalui Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) untuk mengatasi dampak inflasi pada komoditas strategis seperti beras.
 6. Pemanfaatan energi terbarukan perlu ditingkatkan untuk mendukung kegiatan pertanian di Lampung. Potensi energi terbarukan seperti geotermal, biomassa, matahari, dan air dapat dimanfaatkan, misalnya, Geothermal Way Ratai, Waste to Energy TPA Bakung, dan Proyek Desa Mandiri Energi di Lampung Tengah. Peluang-peluang investasi ini harus mampu segera direalisasikan melalui kolaborasi lintas sektoral seperti Forum Investasi Lampung (FOILA).
 7. Dukungan belanja pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kapasitas hilirisasi produksi pertanian. Pengolahan produk pertanian menjadi produk siap pakai dengan nilai tambah tinggi dapat memperluas pasar dan peluang ekspor, seperti contoh gula cair, kopi bubuk, jus nanas, tepung udang, dan minyak kelapa sawit.
 8. Pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan dukungan pembiayaan, pelatihan, dan manajemen risiko kepada pelaku pertanian terdampak perubahan iklim dan penurunan permintaan global. Pendekatan berbasis komunitas perlu diterapkan untuk memberikan dukungan integratif bagi UMKM di bidang pengolahan pertanian, pengolahan makanan, dan agroindustri.
 9. Pendekatan simultan pada kebijakan dan koordinasi teknis multi-instansi diperlukan untuk memperkuat pemberdayaan, pendampingan, serta akses keuangan bagi UMKM, dimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat ditingkatkan perannya sebagai pendorong utama peningkatan skala usaha dan produksi unit usaha di pedesaan.
 10. Sebagai penyedia Pekerja Migran Indonesia terbesar kelima, pemerintah dan perbankan perlu segera merealisasikan KUR Penempatan PMI. Khususnya di daerah utama asal Calon PMI seperti: Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tanggamus, dan Pesawaran. Skema ini penting untuk meningkatkan devisa dan melindungi tenaga kerja dari risiko finansial dan eksploitasi.
 11. Melalui kolaborasi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemerintah pusat, daerah, dan OJK, dan perbankan perlu mendorong penyaluran program KUR Khusus berbasis klaster dan Kredit Usaha Alat Mesin Pertanian (Alsintan). Hal ini diperlukan untuk membantu petani menangkal penurunan ekonomi dari perubahan iklim dan menjaga harga pangan. Lampung, sebagai kontributor komoditas ke Jawa, perlu fokus penyaluran pembiayaan tersebut kepada daerah penghasil padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kopi, kakao, dan kelapa sawit.
 12. Pemerintah Daerah perlu merancang insentif pajak dan keringanan birokrasi untuk menarik investor ke sektor pariwisata dan industri kreatif. Fokus prioritas promosi investasi dapat ditujukan kepada daerah-daerah agrowisata di sekitar Tol Trans Sumatera, kawasan industri strategis, dan area perkotaan, dengan tujuan meningkatkan pusat rintisan ekonomi baru,



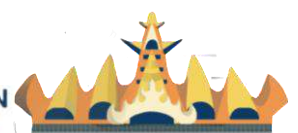


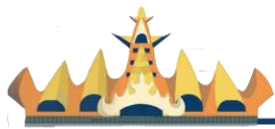
seperti Desa Wisata, Desa Devisa Lada Hitam di Lampung Timur, dan Desa Devisa Cokelat/Kakao di Tanggamus.

13. Melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu memperkuat kolaborasi dengan produsen, distributor, pedagang, pengusaha yang menjadi *agent/champion* pendukung ketersediaan pasokan untuk strategi pengendalian harga, manajemen pasokan, mengatasi peralihan musim, dan memitigasi risiko El-Nino yang diprediksi BMKG akan masih berlanjut di tahun 2024 sehingga dapat mempengaruhi produksi bahan pangan, terutama komoditas yang sering kali memiliki andil inflasi besar misalnya Beras, Cabai Rawit, dan Cabai Merah.
14. Capaian IPM Lampung masih terendah di Regional Sumatera. Apabila dilihat per wilayahnya, Kabupaten Mesuji merupakan Kabupaten dengan capaian IPM terendah di Lampung, utamanya disebabkan dari dimensi pendidikan yang perlu ditingkatkan. Banyaknya masyarakat yang putus sekolah disebabkan karena masyarakat Mesuji memiliki lahan pertanian yang bisa dikembangkan langsung sebagai petani sehingga masuk pada sektor pekerja informal yang tidak memerlukan jenjang pendidikan khusus. Namun, demikian jenjang pendidikan penting untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji perlu *extra effort* untuk mendorong percepatan capaian IPM di wilayahnya, terutama pada dimensi pendidikan. Pemerintah dapat bersinergi melakukan sosialisasi untuk pentingnya melanjutkan pendidikan kepada masyarakat. Selain itu dapat melaksanakan percepatan paket A, B, dan C untuk memperkecil RLS.
15. *Gini Ratio* Lampung tahun 2023 tidak mencapai target RKPD 2023 atau lebih tinggi 0,005 basis poin. Diketahui bahwa melebarnya angka *gini*

ratio gap penghasilan antar penduduk. Pemerintah perlu menurunkan *gap* ketimpangan tersebut dengan menargetkan program pemerintah pada daerah kantong-kantong kemiskinan, melalui pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran kepada masyarakat dengan mendata *by name by address* penerima bansos. Selain itu, mendorong aktivitas hilirisasi pertanian di daerah tersebut, sehingga tercipta iklim investasi dan pembukaan lapangan kerja yang lebih luas sehingga menurunkan angka pengangguran dan tingkat kemiskinan.

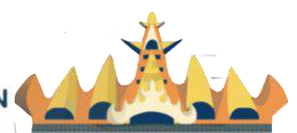
16. Pemerintah Daerah dapat melakukan strategi peningkatan optimalisasi PNBPN melalui pemanfaatan dan optimalisasi BMN, kerjasama investasi dengan sektor swasta, serta pengembangan potensi pariwisata agar membantu mengurangi ketergantungan pada mekanisme perpajakan yang terkadang dapat memberikan tekanan terhadap inflasi pada komoditas tertentu. Hal ini penting dilaksanakan untuk menambah pendapatan pemerintah yang dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi dan sebagai tandem dari program-program pengendalian harga dan stabilisasi pasar.
17. Pemerintah perlu mendorong program dan belanja yang dapat mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan, pelatihan, dan sektor swasta untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dan mobilitas sosial. Kerjasama dengan sektor swasta dan *Non-Government Organization* (NGO) lokal dan internasional dalam menciptakan program pembangunan yang mampu memberikan peluang kerja dan investasi di daerah pedesaan. Hal ini penting dilaksanakan untuk dapat memfasilitasi pengurangan ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dalam hal ini, Pemerintah dapat mendirikan pusat-pusat





pelatihan kerja dan kewirausahaan, serta memberikan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi di daerah-daerah yang mengalami ketimpangan ekonomi terutama di pedesaan.

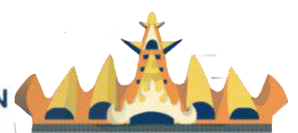
18. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalisasi Joint Program antara Ditjen Pajak, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas SDM di bidang pendapatan, peningkatan pelaksanaan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan khususnya Retribusi Daerah, asistensi perumusan tarif dan basis pajak daerah, serta dukungan asistensi pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menekan biaya administrasi pemungutan seperti penyediaan platform pembayaran digital payment, parking meter, tapping box perekam transaksi perhotelan, dan pemanfaatan NIK sebagai interkoneksi data utama antar aplikasi perpajakan daerah.
19. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu melakukan edukasi dan sosialisasi secara intensif dan merata ke seluruh wilayah dan tingkat Wajib Pajak terkait berbagai aturan baru dalam rangka reformasi perpajakan, termasuk diantaranya integrasi aplikasi dan pepadanan NIK menjadi NPWP. Edukasi dan sosialisasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, serta memudahkan proses administrasi dan pengawasan perpajakan. Selain itu, edukasi dan sosialisasi ini juga dapat memberikan informasi mengenai manfaat dan hak Wajib Pajak, serta sanksi dan hukuman bagi yang melanggar aturan perpajakan. Edukasi dan sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, sosial media, televisi, dan lain-lain.
20. Perlu peningkatan penerapan sistem “Reward and Punishment” kepada wajib pajak/ bayar yang taat dan tidak taat dalam pembayaran/ penyetoran pajaknya, termasuk dalam hal ini adalah pembayaran/ penyetoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sistem ini bertujuan untuk memberikan insentif dan motivasi kepada Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan, serta memberikan disinsentif dan efek jera kepada Wajib Pajak yang menunggak, menghindari, atau mengelak dari kewajiban perpajakannya. Insentif yang dapat diberikan antara lain adalah pengurangan tarif pajak, pengembalian pajak lebih cepat, kemudahan dalam mengurus perizinan usaha, dan penghargaan dari pemerintah. Disinsentif yang dapat diberikan antara lain adalah peningkatan tarif pajak, penundaan pengembalian pajak, pemblokiran rekening bank, penyitaan aset, dan penjatuhan denda atau pidana.
21. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan penajaman *spending review* secara berkala serta memastikan pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan prinsip *money follow function* dan sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien, untuk memastikan anggaran belanja yang telah direalisasikan sesuai dengan target output dan outcome yang dihasilkan lebih optimal, di samping percepatan penyerapan anggaran. *Spending review* membantu pemerintah memahami pola pengeluaran dan kinerja satuan kerja, membandingkan antara unit organisasi yang memiliki karakteristik serupa, dan menghitung deviasi antara realisasi dan kebutuhan riil belanja operasional.
22. Perlu adanya penyehatan BUMD agar dapat menghasilkan kontribusi dividen yang lebih besar dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Salah satu cara untuk melakukan penyehatan BUMD adalah dengan penambahan penyertaan modal Pemda dari pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Penyertaan modal ini dapat digunakan untuk meningkatkan modal kerja, likuiditas, dan solvabilitas BUMD. Selain itu, penambahan penyertaan modal juga perlu





diikuti dengan target kinerja terukur pada penguatan struktur organisasi dan manajemen BUMD. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan restrukturisasi organisasi, peningkatan kompetensi SDM, penerapan *good corporate governance*, dan pengawasan yang ketat dari Pemerintah Daerah. BUMD juga perlu melakukan perluasan usaha di bidang usaha produktif berbasis potensi unggulan daerah, dengan melakukan riset pasar, analisis peluang, dan kajian kelayakan usaha di bidang pertanian dan perkebunan, pariwisata, dan teknologi berupa platform usaha *online*.

23. Terkait pendapatan transfer, sebagai penyumbang utama dalam pendapatan daerah, perlu percepatan realisasi guna mendukung belanja pemda dengan segera melengkapi persyaratan penyaluran seperti dokumen kontrak untuk DAK Fisik, maupun laporan kinerja lainnya untuk DAU *specific grant* dan DAK Non Fisik. Selain itu, pemerintah daerah agar dapat memanfaatkan DAK Fisik sebagai opsi strategis untuk mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik di bidang-bidang tertentu, serta dapat mengoneksikan outputnya dengan output belanja di level regional dan nasional. Seperti halnya yang dilakukan pada pengelolaan sampah, tata ruang, serta peningkatan jaringan saluran air bagi usaha pertanian dan perkebunan atau bidang lain yang sesuai dengan prioritas nasional dan daerah.
24. Optimalisasi program pemberdayaan dan pendidikan. Alokasi anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah perlu ditingkatkan untuk program pemberdayaan masyarakat, dengan fokus pada peningkatan keterampilan dan pendidikan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memberikan pondasi yang kuat bagi penduduk Lampung untuk lebih mudah terserap di sektor-sektor ekonomi yang berkembang dan meningkatkan daya saing mereka di pasar tenaga kerja regional terutama pada daerah-daerah di Lampung yang memiliki tingkat mayoritas pendidikan rendah, seperti Lampung Barat, Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, dan Mesuji.
25. Pemerintah Daerah perlu melakukan percepatan realisasi guna mendukung belanja yang berdampak pada masyarakat, dengan segera melengkapi persyaratan penyaluran seperti dokumen kontrak untuk DAK Fisik, maupun laporan kinerja lainnya untuk DAU *specific grant* dan DAK Non Fisik.
26. Penugasan BLU/D, khususnya BLU Pendidikan, untuk menyisihkan sebagian hasil pendapatannya untuk memanfaatkan lahan kampusnya menjadi percontohan “urban farming” yang modern yang memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kampus, dengan mekanisme pemagangan bagi mahasiswa tidak mampu atau mahasiswa yang orang tuanya adalah petani agar menumbuhkan minat bekerja di sektor pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan. Adapun hasil dari “urban farming” ini dikerjasamakan untuk membantu program pengentasan kemiskinan/stunting.
27. Meningkatkan pengawasan oleh KPPN dalam memonitoring desa yang telah salur dengan berkoordinasi kepada Pemda atas risiko gagal salur yang dapat terjadi. Selain itu, Pembina/Pendamping Desa yang bertanggung jawab agar meningkatkan komunikasi ketika permasalahan dinilai akan muncul. Penguatan komunikasi antara pembina desa dengan pemda juga perlu dilakukan secara intensif dan Pembina Desa harus memiliki integritas dan netralitas yang tinggi untuk mencegah adanya penyimpangan atau benturan kepentingan dalam pengelolaan Dana Desa.
28. Penting bagi Satker Pusat dan OPD untuk secara bersama-sama melakukan mitigasi risiko dalam pelaksanaan Belanja K/L yang harmonis dengan DAK Fisik. Strategi ini mencakup aspek-aspek seperti estimasi biaya yang akurat, jadwal



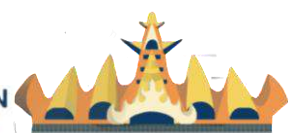


pelaksanaan yang realistis, serta identifikasi dan penanganan potensi risiko beserta rencana aksi. Langkah-langkah ini penting guna mengurangi ketidakpastian, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran, *project delivery*, sinergi antara belanja nasional dan daerah, serta memastikan manfaat cepat dirasakan masyarakat penerima manfaat.

29. Diperlukan peningkatan koordinasi antara Kantor Pusat Kementerian/Lembaga dan Satker vertikal guna memastikan kelancaran pelaksanaan anggaran. Khususnya, pemberian Petunjuk Teknis oleh Kantor Pusat perlu dilakukan secara tepat waktu untuk memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan oleh Satker sesuai dengan *timeline*.
30. Pemda perlu melakukan optimalisasi penggunaan TKD sesuai dengan analisis dan lokasi prioritas daerah. Hal ini dilakukan melalui kajian mendalam terkait kebutuhan dan prioritas pembangunan di setiap kabupaten/kota di regional Lampung. Upaya ini mencakup identifikasi proyek infrastruktur strategis, program pendidikan, dan pelatihan keterampilan yang berpotensi memberikan dampak signifikan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan lapangan pekerjaan formal. Pentingnya mekanisme pemantauan yang ketat juga ditekankan untuk memastikan alokasi TKD difokuskan pada proyek-proyek yang telah ditentukan dan tepat sasaran penerima. Untuk itu, dapat dipertimbangkan pembentukan tim evaluasi independen yang melibatkan perwakilan masyarakat setempat dalam proses pemantauan tersebut.
31. Penguatan kapasitas administratif daerah guna peningkatan efektivitas dan *coverage* Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK). Pemerintah Pusat dan Daerah secara kolaboratif mengembangkan program pelatihan khusus untuk kota/kabupaten yang memiliki kapasitas

administratif terbatas, baik di Lampung maupun Nasional. Program tersebut perlu secara integratif mencakup manajemen keuangan, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan proyek infrastruktur untuk memastikan efisiensi dalam mengelola TKD. Selain itu, perlu fasilitasi forum pertukaran pengalaman antar pemerintah daerah (*community of practice*), yang menjadi wadah untuk berbagi praktik terbaik dalam peningkatan kualitas tenaga kerja.

32. Untuk meningkatkan redistribusi pendapatan antar daerah, perlu di-*exercise* inisiatif Insentif Fiskal untuk Peningkatan Investasi Lokal, yang bertujuan mendorong investasi di sektor-sektor yang memiliki potensi menciptakan lapangan kerja lokal di daerah-daerah Lampung dengan tingkat pembangunan rendah. Selain itu, diperlukan penajaman program perlindungan sosial yang bersifat *targeted*, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang tinggi, yang mana program tersebut dapat mencakup bantuan langsung, subsidi, atau program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan akses pekerjaan bagi masyarakat rentan.
33. Pemerintah Daerah perlu melakukan peningkatan efisiensi dan kualitas belanja melalui evaluasi intervensif dalam setiap tahap pelaksanaan anggaran, khususnya terhadap proyek-proyek padat karya. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) dan akademisi, dimana dengan kolaborasi tersebut Pemerintah Daerah dapat mendapatkan *insights* untuk *spending better* dan mengoptimalkan dampak positif dari setiap rupiah belanja pemerintah, agar dapat lebih mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah juga perlu mengadopsi *tools* indeks kinerja terkait dengan ketepatan pelaksanaan anggaran.



DAFTAR PUSTAKA

- Aplikasi OMSPAN, <https://spanint.kemenkeu.go.id/>
- Aplikasi MEBE, <https://ditpa.kemenkeu.go.id/>
- Aplikasi MONSAKTI, <https://monsakti.kemenkeu.go.id/>
- Aplikasi SIMTRADA, <https://djpk.kemenkeu.go.id/simtrada>
- Aplikasi SINTESA, <http://sintesa.kemenkeu.go.id/>
- Aplikasi SATUDJA, <https://satudja.kemenkeu.go.id/>
- Aplikasi SLIM, <https://slim-smi.kemenkeu.go.id/slim/app/login.php>
- Agrawal, A. &. (2013). Private Equity, Technological Investment, and Labor Outcomes. In ICIS.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2024). Retrieved from <https://www.bkpm.go.id/>
- Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2024). Retrieved from <https://www.bmkg.go.id/>
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. (2022). *Profil Pembangunan Provinsi Lampung 2022*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Lampung dalam Angka 2023*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Berita Resmi Statistik*. Retrieved from <https://lampung.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Berita Resmi Statistik*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/>
- Bank Indonesia. (2023). Laporan Perekonomian Bank Indonesia.
- Esteban-Pretel, J. (2005). The effects of the loss of skill on unemployment fluctuations. CIRJE Working Paper F-371.
- Fernandez, R. &. (2000). Human capital investment in the presence of unemployment: application to university enrolment in Spain.
- Granato, N. H. (2015). The impact of skill-specific migration on regional unemployment disparities in Germany. *Journal of Regional Science*, 55(4), 513-539.
- Grossmann, V. (2000). Skilled labor reallocation, wage inequality, and unskilled unemployment. *Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)/Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, 473-500.
- Jeffers, J. S. (2024). The impact of restricting labor mobility on corporate investment and entrepreneurship. *The Review of Financial Studies*, 37(1), 1-44.
- Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat. (2024). *Data dan Realisasi Penerimaan Bea Cukai di Provinsi Lampung Sampai Dengan Tahun 2023*. Bandar Lampung: Kementerian Keuangan.
- Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. (2024). *Data dan Realisasi Penerimaan PNBK Kekayaan Negara di Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2023*. Bandar Lampung: Kementerian Keuangan.
- Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. (2024). *Data dan Realisasi Perpajakan di Provinsi Lampung s.d. Tahun 2023*. Bandar Lampung: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2024). Retrieved from Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Kementerian Keuangan. (2024). *APBN Kita*. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>



- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Retrieved from <https://pu.go.id/>
- Mimi, M. B. (2022). (2022). Does human capital investment influence unemployment rate in Bangladesh: A fresh analysis. *National Accounting Review*, 4(July), 273-286.
- Nistor, A. (2009). *Assessing the Effectiveness of Human Capital Investments on the Regional Unemployment Rate in the United States: 1990 and 2000*. . *International Regional Science Review*, 32(1), 65-91.
- Nuradi, T. E. (2015). An approach on workforce number, investment, and project number on investment realization as indicators of development progress. *Investment management and financial innovations*.
- Pemerintah Lampung. (2024). *Laporan Realisasi Anggaran lingkup Lampung sampai dengan Tahun 2023*.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2022). Rancangan Akhir RKPDP Provinsi Lampung Tahun 2023.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2023). *Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023*.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2023). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024*. Provinsi Lampung.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2023). Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- Pemerintah Republik Indonesia . (2023). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 20/KM.7/2023 Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Atas Pemerintah Daerah Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2023 tentang Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum Bagi Pemerintah Daerah Yang Tidak Memenuhi Pengalokasian Belanja Wajib Tahun Anggaran 2023*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Presiden 75 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rincian APBN Tahun 2023.
- Rivera Batiz, L. A. (1991). Economic Integration and Endogeneous Growth”, *Quartely Journal of Economics* Vol.CVI, May:530555.
- Sigurdsson, J. (. (2013). Capital Investment and Equilibrium Unemployment (No. wp61). Department of Economics, Central bank of Iceland.
- Singh, A. K. (2020). Combating unemployment through skill development. *Nonlinear Analysis: Modelling and Control*, 25(6), 919-937.



LAMPIRAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

Perkembangan BI 7-Day Repo Rate Tahun 2019 – 2023

Periode	BI-7Day-RR (Suku Bunga Acuan)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jan	6,00	5,00	3,75	3,50	5,75
Feb	6,00	4,75	3,50	3,50	5,75
Mar	6,00	4,50	3,50	3,50	5,75
Apr	6,00	4,50	3,50	3,50	5,75
May	6,00	4,50	3,50	3,50	5,75
Jun	6,00	4,25	3,50	3,50	5,75
Jul	5,75	4,00	3,50	3,50	5,75
Aug	5,50	4,00	3,50	3,75	5,75
Sep	5,25	4,00	3,50	4,25	5,75
Oct	5,00	4,00	3,50	3,75	6,00
Nov	5,00	3,75	3,50	5,25	6,00
Dec	5,00	3,75	3,50	5,50	6,00

Perkembangan Laju Inflasi Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Tahun 2020 – 2023 (yoy)

WILAYAH	2020	2021	2022	2023
Lampung	2	2,19	5,51	3,47
Jambi	2,32	1,66	6,35	3,22
Sumatera Selatan	1,55	1,82	5,94	3,17
Bengkulu	0,89	2,42	5,92	3,09
Kepulauan Riau	1,18	2,26	5,83	2,76
Kep. Bangka Belitung	1,08	3,75	5,38	2,65
Indonesia	1,68	1,87	5,51	2,61
Riau	2,42	1,54	6,81	2,5
Sumatera Barat	2,11	1,4	7,43	2,47
Sumatera Utara	1,96	1,71	6,12	2,25
Aceh	3,59	2,24	5,89	1,53

Perkembangan Laju Inflasi Bulanan Lampung Tahun 2020 – 2023 (mtm)

Periode		Lampung (mtm)	Nasional (mtm)	Rata-rata
TW I 20	Jan	0,89	0,39	0,32
	Feb	0,41	0,28	
	Mar	-0,35	0,1	
TW II 20	Apr	-0,17	0,08	-0,14
	Mei	-0,29	0,07	
	Jun	0,05	0,18	
TW III 20	Jul	0,31	-0,1	0,15
	Agus	0,37	-0,05	
	Sep	-0,22	-0,05	
TW IV 20	Okt	0,21	0,07	0,33
	Nov	0,12	0,28	
	Des	0,66	0,45	
TW I 21	Jan	0,76	0,26	0,23
	Feb	0,14	0,1	
	Mar	-0,2	0,08	
TW II 21	Apr	-0,17	0,13	0,05
	Mei	0,15	0,32	
	Jun	0,18	-0,16	
TW III 21	Jul	0,15	0,08	0,05
	Agus	-0,05	0,03	
	Sep	0,05	-0,04	
TW IV 21	Okt	0,1	0,12	0,54
	Nov	0,53	0,37	
	Des	0,99	0,57	
TW I 22	Jan	0,4	0,56	0,31
	Feb	-0,38	-0,02	
	Mar	0,92	0,66	
TW II 22	Apr	0,86	0,95	0,88
	Mei	0,59	0,4	
	Jun	1,2	0,61	
TW III 22	Jul	0,73	0,64	0,55
	Agus	-0,41	-0,21	
	Sep	1,32	1,17	
TW IV 22	Okt	-0,47	-0,11	0,05
	Nov	0,01	0,09	
	Des	0,62	0,66	
TW I 23	Jan	0,82	0,34	0,34
	Feb	0,16	0,16	
	Mar	0,04	0,18	
TW II 23	Apr	0,3	0,33	0,13
	Mei	-0,07	0,09	
	Juni	0,16	0,14	
TW III 23	Jul	0,05	0,21	0,23
	Agus	0,3	-0,02	
	Sep	0,33	0,19	
TW IV 23	Oct	0,3	0,17	0,44
	Nov	1,02	0,38	
	Dec	0,01	0,41	

Andil Inflasi/Deflasi pada Komoditas di Lampung Tahun 2023

Sumbangan Inflasi Bulanan Tahun 2023	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	rata-rata
Bawang Merah	0,071	0,034	-0,059	0,033	0,062	-0,032	-0,067	-0,049	-0,026	-0,032	0,070	0,064	0,006
Beras	0,089	0,039					0,042	0,255	0,312	0,036			0,129
Telur Ayam ras	-0,049		0,026		0,037	0,022	0,020	-0,026	-0,074	-0,042	0,032		-0,006
Daging Ayam Ras	-0,024		0,029	0,033	-0,038			0,015	0,029		0,040	-0,051	0,004
Cabai Rawit	0,106	-0,049		-0,089	-0,038	0,033	-0,018		-0,016	0,096	0,199	-0,102	0,012
Cabai Merah	0,145	-0,012	-0,105	-0,029	-0,071			0,044		0,083	0,555		0,076
Rokok Kretek Filter	0,174	0,080			0,037	0,019							0,077
Bensin	-0,083		0,038			-0,061			0,064	0,051	-0,024		-0,002
Jeruk					0,022		-0,037			0,030		-0,022	-0,002
Bawang Putih			0,029				0,019		-0,021		-0,011		0,004
Ikan Kembung					-0,041						-0,029	0,043	-0,009
Air Kemasan			0,029							-0,011		-0,038	-0,007
Minyak Goreng						-0,019			-0,020	-0,024		0,042	-0,005
Cumi-cumi		-0,021			0,038			-0,019		-0,012			-0,003
Tomat	-0,016	-0,011										0,030	0,001
Obat dengan Resep				0,036		-0,016							0,010
Angkutan Antar Kota				0,051			-0,022						0,015
Biaya Pulsa Ponsel									0,018				0,018
Rokok Putih		0,021											0,021
Tarif Jalan Tol						0,022							0,022
Kopi Bubuk						0,025							0,025
Gula Pasir												0,027	0,027
Mobil		0,027											0,027
Akademi/Perguruan Tinggi									0,032				0,032
Kendaraan Carter/Rental				0,033									0,033
Taman Kanak-Kanak							0,037						0,037
Sekolah Dasar								0,041					0,041
Sekolah Menengah Atas								0,054					0,054
Tarif Air Minum PAM							0,073						0,073
Angkutan Udara	-0,044		-0,018	-0,018	-0,108		-0,064						-0,050
Susu Cair Kemasan												-0,022	-0,022
Sabun Detergen Bubuk/Cair								-0,014					-0,014
Pokok Bayi Sekali Pakai/Diapers								-0,013					-0,013
Baju Kaos Berkerah Anak			-0,012										-0,012
Bahan Bakar Rumah Tangga		-0,012											-0,012
Udang Basah			-0,010										-0,010
Diapers						-0,008							-0,008
Ikan Simba				-0,006									-0,006
Ketimun											-0,006		-0,006
Pir											-0,006		-0,006
Bayam				-0,004									-0,004

Sumbangan Inflasi Tahunan Tahun 2023	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Rata-rata
Bensin	0,9090	0,9079	0,9371	0,8027	0,7980	0,7260	0,7208	0,7198					0,8152
Beras	0,3131	0,3715	0,3958	0,4757	0,4770	0,4630	0,4910	0,6271	0,9294	0,9594	0,9593	0,8287	0,6076
Rokok Kretek Filter	0,4898	0,5744	0,5913	0,5678	0,5989	0,5654	0,5028	0,5049	0,4081	0,4094	0,3823	0,3746	0,4975
Sekolah Menengah Atas			0,2326	0,2306	0,2293	0,2266	0,2249						0,2288
Daging Ayam Ras											0,1405		0,1405
Bawang Putih							0,1499	0,1452	0,1255	0,1353		0,1355	0,1383
Angkutan Dalam Kota					0,1357	0,1341		0,1337	0,1320				0,1339
Rokok Putih									0,0958	0,0988			0,0973
Tarif Air Minum PAM										0,0931			0,0931
Sabun Mandi											-0,0180		-0,0180
Laptop/Notebook	-0,0187	-0,0167		-0,0218							-0,0176		-0,0187
Angkutan Udara	0,3114	0,3265	0,3046	0,2041		-0,0448	-0,2225	-0,2397	-0,2337	-0,2270	-0,1960	-0,2060	-0,0203
Tomat		-0,0214											-0,0214
Baja Ringan	-0,0176	-0,0171	-0,0241	-0,0258						-0,0244	-0,0233		-0,0220
Petai												-0,0230	-0,0230
Bahan Bakar Rumah Tangga										-0,0218	-0,0219	-0,0267	-0,0235
Popok Bayi Sekali Pakai/ Diapers												-0,0237	-0,0237
Telepon Seluler	-0,0318	-0,0250	-0,0264										-0,0277
Telur Ayam Ras												-0,0311	-0,0311
Kangkung					-0,0358								-0,0358
Sabun Detergen Bubuk/Cair									-0,0361				-0,0361
Udang Basah	-0,0233		-0,0378	-0,0494	-0,0351								-0,0364
Cabai Rawit					-0,0578	-0,2779	-0,3167	-0,1162	-0,1010		0,3517	0,1234	-0,0563
Cabai Merah	0,2626	0,2630	-0,0711	-0,0815	-0,1717	-0,7247	-0,9701	-0,5852	-0,5599	-0,0745	0,6101	0,6096	-0,1244
Bawang Merah						-0,1342	-0,2919	-0,0960	-0,0436	-0,0719			-0,1275
Minyak Goreng	-0,1590	-0,0824	-0,1840	-0,4683	-0,4469	-0,4019	-0,2873	-0,1094					-0,2674

Perkembangan Impor, Ekspor, Neraca Perdagangan Lampung, dan Kurs Tengah BI

Periode	Impor (USD Juta)	Ekspor (USD Juta)	Neraca Perdagangan (USD Juta)	Kurs tengah BI
Jan-22	210,42	302,21	91,80	14.335,24
Feb-22	228,98	308,23	79,25	14.351,06
Mar-22	135,32	558,24	422,91	14.348,64
Apr-22	265,17	344,23	79,06	14.368,74
May-22	237,46	277,09	39,64	14.608,00
Jun-22	113,07	499,01	385,94	14.688,57
Jul-22	589,67	411,66	-178,01	14.984,38
Aug-22	155,28	937,02	781,74	14.850,64
Sep-22	463,56	510,07	46,51	14.971,77
Oct-22	231,73	576,76	345,04	15.417,48
Nov-22	124,69	359,20	234,51	15.658,73
Dec-22	227,48	316,64	89,17	15.615,00
Jan-23	133,59	361,36	227,77	15.300,71
Feb-23	171,52	217,66	46,14	15.126,00
Mar-23	176,14	396,99	220,86	15.295,24
Apr-23	125,02	274,96	149,95	14.866,71
May-23	260,97	238,03	-22,94	14.810,86
Jun-23	163,21	344,65	181,44	14.932,00
Jul-23	470,87	364,49	-106,38	15.039,75
Aug-23	85,47	346,97	261,50	15.245,14
Sep-23	69,30	321,80	252,50	15.354,20
Oct-23	357,75	336,66	-21,08	15.741,23
Nov-23	124,72	313,64	188,92	15.617,41
Dec-23	353,70	306,50	-47,20	15.513,37

Indeks Pembangunan Manusia dan Dimensi Pembentuknya pada wilayah Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Periode 2020 – 2023

Wilayah	2020				2021				2022				2023							
	Umur Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Riil/Kapita (ribu rupiah)	Indeks Pembangunan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Riil/Kapita (ribu rupiah)	Indeks Pembangunan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Riil/Kapita (ribu rupiah)	Indeks Pembangunan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Riil/Kapita (ribu rupiah)	Indeks Pembangunan Masyarakat
Aceh	72,69	14,31	9,33	9492	73,29	72,71	14,36	9,37	9572	73,48	72,92	14,37	9,44	9963	74,11	73,06	14,38	9,55	10334	74,7
Bengkulu	72,59	13,61	8,84	10380	72,93	72,65	13,67	8,87	10487	73,16	72,9	13,68	8,91	10840	73,68	73,11	13,74	9,03	11172	74,3
Jambi	73,33	12,98	8,55	10392	72,29	73,38	13,04	8,6	10588	72,62	73,61	13,05	8,68	10871	73,11	73,84	13,13	8,81	11160	73,73
Kepulauan Bangka Belitung	73,39	12,05	8,06	12794	72,74	73,47	12,17	8,08	12819	72,96	73,68	12,18	8,11	13358	73,5	73,9	12,31	8,25	13589	74,09
Kepulauan Riau	74,25	12,87	10,12	14209	77,69	74,36	12,98	10,18	14122	77,87	74,62	12,99	10,37	14469	78,48	74,9	13,05	10,41	14998	79,08
Lampung	73,66	12,65	8,05	9982	71,04	73,73	12,73	8,08	10038	71,25	73,95	12,74	8,18	10336	71,79	74,17	12,77	8,29	10769	72,48
Nasional	73,37	12,98	8,48	11013	72,81	73,46	13,08	8,54	11156	73,16	73,7	13,1	8,69	11479	73,77	73,93	13,15	8,77	11899	74,39
Riau	73,66	13,2	9,14	10675	73,67	73,72	13,28	9,19	10736	73,89	73,95	13,29	9,22	11158	74,45	74,18	13,3	9,32	11448	74,95
Sumatera Barat	73,5	14,02	8,99	10733	74,29	73,6	14,09	9,07	10790	74,56	73,88	14,1	9,18	11130	75,16	74,14	14,11	9,28	11380	75,64
Sumatera Selatan	73,39	12,45	8,24	10652	71,62	73,47	12,54	8,3	10662	71,83	73,76	12,55	8,37	11109	72,48	74,04	12,63	8,5	11472	73,18
Sumatera Utara	73	13,23	9,54	10420	73,62	73,1	13,27	9,58	10499	73,84	73,39	13,31	9,71	10848	74,51	73,67	13,48	9,82	11049	75,13

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2020 – 2023

Wilayah	IPM 2020	IPM 2021	IPM 2022	IPM 2023	Growth 2021	Growth 2022	Growth 2023	Rata-rata growth
Mesuji	65,83	66,24	67,12	67,79	0,62%	1,33%	1,00%	0,98%
Tulang Bawang Barat	67,51	67,76	68,7	69,38	0,37%	1,39%	0,99%	0,92%
Pesawaran	67,7	68,04	68,55	69,46	0,50%	0,75%	1,33%	0,86%
Tanggamus	68,58	68,79	69,32	69,93	0,31%	0,77%	0,88%	0,65%
Pesisir Barat	68,43	68,79	69,58	70,4	0,53%	1,15%	1,18%	0,95%
Way Kanan	69,33	69,46	69,92	70,51	0,19%	0,66%	0,84%	0,56%
Lampung Utara	69,58	69,78	70,19	70,78	0,29%	0,59%	0,84%	0,57%
Lampung Selatan	70,36	70,48	70,95	71,55	0,17%	0,67%	0,85%	0,56%
Tulang Bawang	70,07	70,28	71,08	71,56	0,30%	1,14%	0,68%	0,70%
Lampung Barat	70,47	70,55	71,01	71,72	0,11%	0,65%	1,00%	0,59%
Lampung Timur	70,62	70,91	71,82	72,44	0,41%	1,28%	0,86%	0,85%
Pringsewu	72,04	72,14	72,57	73,11	0,14%	0,60%	0,74%	0,49%
Lampung Tengah	71,97	72,04	72,59	73,39	0,10%	0,76%	1,10%	0,65%
Metro	78,69	78,99	79,38	79,85	0,38%	0,49%	0,59%	0,49%
Bandar Lampung	78,78	78,93	79,33	79,86	0,19%	0,51%	0,67%	0,46%

Dimensi Pembentuk IPM masing-masing Kabupaten/Kota di Lampung Tahun 2020 – 2023

Wilayah	2020				2021				2022				2023			
	Umur Harapan Hidup	Rata-rata Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Pendapatan/Ka pita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	Umur Harapan Hidup	Rata-rata Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Pendapatan/Ka pita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	Umur Harapan Hidup	Rata-rata Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Pendapatan/Ka pita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	Umur Harapan Hidup	Rata-rata Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Pendapatan/Ka pita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)
Bandar Lampung	74,10	10,93	14,64	12.197,00	74,14	10,95	14,70	12.247,00	74,33	10,96	14,71	12.293,00	74,53	10,97	14,72	13.092,00
Lampung Barat	73,42	8,06	12,25	9.929,00	73,47	8,07	12,26	9.969,00	73,63	8,20	12,27	10.175,00	73,78	8,36	12,29	10.593,00
Lampung Selatan	73,79	7,69	12,50	9.875,00	73,85	7,70	12,52	9.931,00	74,03	7,72	12,54	10.266,00	74,22	7,77	12,64	10.617,00
Lampung Tengah	73,79	7,58	12,92	11.219,00	73,82	7,59	12,93	11.259,00	73,99	7,64	12,95	11.710,00	74,17	7,81	13,04	12.195,00
Lampung Timur	73,52	7,60	12,85	9.983,00	73,56	7,77	12,86	10.026,00	73,75	8,04	12,86	10.403,00	73,95	8,14	12,97	10.812,00
Lampung Utara	73,48	8,21	12,48	8.733,00	73,54	8,34	12,49	8.737,00	73,73	8,35	12,54	8.951,00	73,91	8,36	12,55	9.374,00
Mesuji	73,35	6,88	11,63	7.894,00	73,40	7,08	11,64	7.980,00	73,56	7,09	11,80	8.466,00	73,71	7,11	11,81	8.947,00
Metro	74,70	10,96	14,47	11.906,00	74,73	10,97	14,75	11.916,00	74,92	10,98	14,76	12.233,00	75,14	11,00	14,77	12.618,00
Pesawaran	73,44	7,70	12,36	7.892,00	73,50	7,71	12,59	7.934,00	73,65	7,77	12,61	8.192,00	73,80	7,99	12,62	8.633,00
Pesisir Barat	73,39	8,01	13,99	8.457,00	73,46	8,19	12,00	8.533,00	73,61	8,53	12,13	8.663,00	73,75	8,70	12,14	9.102,00
Pringsewu	73,90	8,38	12,83	10.262,00	73,98	8,39	12,84	10.302,00	74,15	8,40	12,91	10.577,00	74,33	8,42	12,92	11.016,00
Provinsi Lampung	73,66	8,05	12,65	9.982,00	73,73	8,08	12,73	10.038,00	73,95	8,18	12,74	10.336,00	74,17	8,29	12,77	10.769,00
Tanggamus	73,44	7,22	12,18	9.250,00	73,51	7,34	12,19	9.266,00	73,69	7,35	12,30	9.597,00	73,87	7,36	12,31	10.038,00
Tulang Bawang	73,44	7,49	11,89	10.683,00	73,47	7,55	11,95	10.735,00	73,64	7,56	12,28	11.114,00	73,81	7,57	12,29	11.552,00
Tulang Bawang Barat	73,59	7,24	12,05	8.395,00	73,62	7,39	12,06	8.422,00	73,83	7,72	12,09	8.937,00	74,02	7,79	12,10	9.162,00
Way Kanan	73,68	7,70	12,36	9.102,00	73,73	7,71	12,37	9.173,00	73,93	7,72	12,42	9.450,00	74,11	7,74	12,43	9.887,00

Jumlah Penduduk Miskin Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Periode 2020 – 2023

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Perkotaan (%)												Persentase Penduduk Miskin Perdesaan (%)												Persentase Penduduk Miskin Total (%)											
	2020-I	2020-II	2021-I	2021-II	2022-I	2022-II	2023-I	2020-I	2020-II	2021-I	2021-II	2022-I	2022-II	2023-I	2020-I	2020-II	2021-I	2021-II	2022-I	2022-II	2023-I															
Aceh	9,84	10,31	10,46	10,58	10,31	10,35	9,79	17,46	17,96	17,78	18,04	16,87	17,06	16,92	14,99	15,43	15,33	15,53	14,64	14,75	14,45															
Bengkulu	14,77	15,06	15,1	14,73	14,88	14,53	14,21	15,16	15,42	15,28	14,28	14,49	14,24	13,96	15,03	15,3	15,22	14,43	14,62	14,34	14,04															
Indonesia	7,38	7,88	7,89	7,6	7,5	7,53	7,29	12,82	13,2	13,1	12,53	12,29	12,36	12,22	9,78	10,19	10,14	9,71	9,54	9,57	9,36															
Jambi	10,41	11,22	11,52	10,5	10,51	10,48	10,19	6,23	6,4	6,42	6,28	6,19	6,32	6,28	7,58	7,97	8,09	7,67	7,62	7,7	7,58															
Kep. Bangka Belitung	3,06	3,43	3,57	3,22	3,09	3,48	3,54	6,33	6,75	6,63	6,57	6,26	6,13	5,85	4,53	4,89	4,9	4,67	4,45	4,61	4,52															
Kepulauan Riau	5,42	5,69	5,72	5,37	5,68	5,46	5,05	10,43	11,25	11,1	10,45	10,68	10,63	10,69	5,92	6,13	6,12	5,75	6,24	6,03	5,69															
Lampung	9,02	9,59	9,29	8,5	8,31	8,34	8,02	13,83	14,22	14,18	13,14	12,96	12,65	12,34	12,76	12,62	11,67	11,57	11,44	11,11																
Riau	6,12	6,39	6,52	6,72	6,34	6,49	6,73	7,29	7,47	7,51	7,19	7,08	7,07	6,65	6,82	7,04	7,12	7	6,78	6,84	6,68															
Sumatera Barat	4,97	5,22	5,3	4,83	4,95	4,9	4,67	7,43	7,83	7,91	7,23	6,86	7,2	7,23	6,28	6,56	6,63	6,04	5,92	6,04	5,95															
Sumatera Selatan	12,16	12,52	12,36	11,99	11,23	11,37	11,07	12,96	13,25	13,12	13,28	12,31	12,3	12,21	12,66	12,98	12,84	12,79	11,9	11,95	11,78															
Sumatera Utara	8,73	9,25	9,15	8,68	8,76	8,63	8,23	8,77	9,02	8,84	8,26	7,98	7,96	8,03	8,75	9,14	9,01	8,49	8,42	8,33	8,15															

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Lampung Periode 2020 – 2023

Wilayah	2020-I		2021-I		2022-I		2023-I	
	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
	(Ribuan Jiwa)	(%)	(Ribuan Jiwa)	(%)	(Ribuan Jiwa)	(%)	(Ribuan Jiwa)	(%)
Bandar Lampung	93,74	8,81	98,76	9,11	90,51	8,21	87,08	7,77
Lampung Barat	38,12	12,52	39,36	12,82	36,2	11,71	34,73	11,17
Lampung Selatan	143,33	14,08	145,85	14,19	136,21	13,14	133,67	12,79
Lampung Tengah	152,28	11,82	155,77	11,99	143,34	10,96	140,29	10,65
Lampung Timur	153,57	14,62	159,79	15,08	149,12	13,98	148,26	13,8
Lampung Utara	119,35	19,3	121,91	19,63	114,67	18,41	107,21	17,17
Mesuji	14,72	7,33	15,24	7,54	13,88	6,84	13,71	6,73
Metro	14,31	8,47	15,32	8,93	13,68	7,87	12,8	7,28
Pesawaran	66,04	14,76	68,31	15,11	63,17	13,85	59,29	12,89
Pesisir Barat	22,24	14,29	23,23	14,81	21,85	13,84	21,45	13,49
Pringsewu	40,12	9,97	41,04	10,11	38,18	9,34	37,6	9,14
Provinsi Lampung	1049,32	12,34	1083,93	12,62	1002,41	11,57	970,67	11,11
Tanggamus	70,37	11,68	71,89	11,81	67,43	10,98	65,18	10,52
Tulang Bawang	42,43	9,33	44,53	9,67	39,19	8,42	37,83	8,04
Tulang Bawang Barat	20,29	7,39	23,03	8,32	20,72	7,44	20,32	7,25
Way Kanan	58,41	12,9	59,89	13,09	54,28	11,76	51,26	11,02

Gini Ratio Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional Periode 2020 – 2023

Wilayah	2020-I			2020-II			2021-I			2021-II			2022-I			2022-II			2023-I		
	Gini Ratio Desa	Gini Ratio Kota	Gini Ratio Desa+Kota	Gini Ratio Desa	Gini Ratio Kota	Gini Ratio Desa+Kota	Gini Ratio Desa	Gini Ratio Kota	Gini Ratio Desa+Kota	Gini Ratio Desa	Gini Ratio Kota	Gini Ratio Desa+Kota	Gini Ratio Desa	Gini Ratio Kota	Gini Ratio Desa+Kota	Gini Ratio Desa	Gini Ratio Kota	Gini Ratio Desa+Kota	Gini Ratio Desa	Gini Ratio Kota	Gini Ratio Desa+Kota
	Aceh	0,281	0,36	0,323	0,283	0,355	0,319	0,275	0,362	0,324	0,282	0,357	0,323	0,272	0,348	0,311	0,252	0,327	0,291	0,265	0,318
Bengkulu	0,275	0,378	0,334	0,274	0,381	0,323	0,264	0,384	0,326	0,258	0,381	0,321	0,262	0,37	0,315	0,264	0,371	0,315	0,283	0,386	0,333
Indonesia	0,317	0,393	0,381	0,319	0,399	0,385	0,315	0,401	0,384	0,314	0,398	0,381	0,314	0,403	0,384	0,313	0,402	0,381	0,313	0,409	0,388
Jambi	0,287	0,351	0,32	0,289	0,346	0,316	0,288	0,354	0,321	0,284	0,347	0,315	0,292	0,351	0,32	0,302	0,376	0,335	0,32	0,365	0,343
Kep. Bangka Belitung	0,22	0,276	0,262	0,229	0,271	0,257	0,221	0,265	0,256	0,215	0,259	0,247	0,206	0,248	0,236	0,222	0,263	0,255	0,202	0,265	0,245
Kepulauan Riau	0,26	0,337	0,339	0,26	0,335	0,334	0,256	0,341	0,343	0,253	0,337	0,339	0,247	0,342	0,342	0,264	0,328	0,325	0,248	0,339	0,34
Lampung	0,298	0,345	0,327	0,295	0,342	0,32	0,288	0,346	0,323	0,288	0,342	0,314	0,284	0,341	0,314	0,275	0,352	0,313	0,287	0,359	0,324
Riau	0,273	0,363	0,329	0,274	0,359	0,321	0,279	0,367	0,326	0,276	0,369	0,327	0,282	0,363	0,326	0,293	0,35	0,323	0,274	0,369	0,324
Sumatera Barat	0,257	0,323	0,305	0,256	0,32	0,301	0,254	0,329	0,306	0,252	0,327	0,3	0,247	0,329	0,3	0,243	0,316	0,292	0,232	0,305	0,28
Sumatera Selatan	0,308	0,358	0,339	0,31	0,352	0,338	0,315	0,36	0,341	0,314	0,363	0,34	0,311	0,358	0,339	0,311	0,348	0,33	0,305	0,36	0,338
Sumatera Utara	0,255	0,338	0,316	0,258	0,336	0,314	0,25	0,344	0,314	0,257	0,339	0,313	0,249	0,343	0,312	0,259	0,358	0,326	0,242	0,34	0,309

Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Regional Sumatera

Wilayah	2020		2021		2022		2023	
	(TPT)	(TPAK)	(TPT)	(TPAK)	(TPT)	(TPAK)	(TPT)	(TPAK)
Aceh	6,59	65,1	6,3	63,78	6,17	63,5	6,03	64,77
Bengkulu	4,07	71,73	3,65	69,75	3,59	69,81	3,42	70,91
Indonesia	7,07	67,77	6,49	67,8	5,86	68,63	5,32	69,48
Jambi	5,13	67,79	5,09	67,17	4,59	67,84	4,53	68,75
Kepulauan Bangka Belitung	5,25	66,89	5,03	65,88	4,77	67,38	4,56	68,34
Kepulauan Riau	10,34	66,28	9,91	68,27	8,23	68,94	6,8	68,68
Lampung	4,67	70,16	4,69	69,35	4,52	70,06	4,23	70,04
Riau	6,32	65,24	4,42	65,03	4,37	63,86	4,23	64,45
Sumatera Barat	6,88	69,01	6,52	67,72	6,28	69,3	5,94	69,61
Sumatera Selatan	5,51	68,65	4,98	68,77	4,63	69,31	4,11	70,72
Sumatera Utara	6,91	68,67	6,33	69,1	6,16	69,53	5,89	71,06

Kondisi ketenagakerjaan Lampung berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Tahun 2020 – 2023

Karakteristik berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan	2020			2021			2022			2023		
	Tingkat Pengangguran Terbuka	persentase Penduduk yang bekerja (%)	Penduduk yang Bekerja (Ribu orang)	Tingkat Pengangguran Terbuka	persentase Penduduk yang bekerja (%)	Penduduk yang Bekerja (Ribu orang)	Tingkat Pengangguran Terbuka	persentase Penduduk yang bekerja (%)	Penduduk yang Bekerja (Ribu orang)	Tingkat Pengangguran Terbuka	persentase Penduduk yang bekerja (%)	Penduduk yang Bekerja (Ribu orang)
Diploma I/II/III	5,29	2,17	92,9	5,15	1,78	76,22	2,77	1,74	76,38	4,22	1,72	80,84
SD Ite Bawah	2,64	39,96	1710,4	2,53	39,06	1673,39	2,74	40,36	1771,1	2,35	37,35	1754,59
Sekolah Menengah Atas	6,97	18,11	775,1	6,64	18,03	772,4	7,93	17,44	765,37	7,71	19,91	935,19
Sekolah Menengah Kejuruan	9,21	9,66	413,3	8,53	11,27	482,82	7,13	10,26	450,13	7,52	10,45	490,93
Sekolah Menengah Pertama	3,96	23,47	1004,6	4,63	22,61	968,71	3,47	23,47	1029,87	2,69	23,16	1087,99
Universitas	5,51	6,63	283,7	4,93	7,25	310,79	5,88	6,73	295,12	3,74	7,41	348,11

Kondisi ketenagakerjaan Lampung berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2023

Karakteristik berdasarkan Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023	
	Penduduk yang Bekerja (Ribu Orang)	Persentase yang Penduduk bekerja (%)	Penduduk yang Bekerja (Ribu Orang)	Persentase yang Penduduk bekerja (%)	Penduduk yang Bekerja (Ribu Orang)	Persentase yang Penduduk bekerja (%)	Penduduk yang Bekerja (Ribu Orang)	Persentase yang Penduduk bekerja (%)
Administrasi Pemerintahan	123,4	2,88	132,28	3,09	120,49	2,75	144,67	3,08
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	45,5	1,06	61,47	1,43	63,33	1,44	48,98	1,04
Jasa Keuangan dan Asuransi;Real Estat; Jasa F	61,5	1,44	50,5	1,18	67,75	1,54	83,07	1,77
Jasa Lainnya	145,1	3,39	131,27	3,06	145,98	3,33	164,58	3,5
Jasa Pendidikan	180,6	4,22	185,32	4,33	191,65	4,37	195,71	4,17
Konstruksi	241	5,63	251,01	5,86	216,67	4,94	261,03	5,56
Pengadaan Listrik dan Gas;Pengadaan Air	14,2	0,33	17,25	0,4	25,45	0,58	22,78	0,48
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	168,8	3,94	194,82	4,55	183,53	4,18	240,01	5,11
Perdagangan Besar Dan Eceran	807,3	18,86	829,33	19,36	865,97	19,74	890,46	18,96
Pertambangan dan Pengalihan;Industri Pengo	415	9,7	422,01	9,85	426,76	9,73	446,68	9,51
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1915,8	44,76	1843,51	43,03	1914,13	43,62	1987,97	42,32
Transportasi dan Pergudangan;Informasi dan	161,8	3,78	165,55	3,86	166,28	3,79	211,73	4,51

Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020-2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020			2021			2022			2023		
	Formal	Informal	Jumlah	Formal	Informal	Jumlah	Formal	Informal	Jumlah	Formal	Informal	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Kabupaten/Regency												
Lampung Barat	22 349	164 230	186 579	21 798	165 316	187 114	24 309	165 661	189 970	21 081	164 188	185 269
Tanggamus	31 981	229 165	261 146	49 432	255 274	304 706	58 552	248 272	306 824	72 329	266 653	338 982
Lampung Selatan	137 579	353 060	490 639	123 867	354 383	478 250	150 253	331 806	482 059	147 275	369 490	516 765
Lampung Timur	123 605	439 460	563 065	120 794	417 714	538 508	103 751	442 293	546 044	114 268	466 824	581 092
Lampung Tengah	168 803	517 023	685 826	178 606	506 237	684 843	187 324	553 598	741 282	198 966	621 741	820 770
Lampung Utara	70 966	223 730	294 696	70 174	217 973	288 147	76 194	201 927	278 121	80 250	217 909	298 159
Way Kanan	56 767	188 121	244 888	63 591	183 532	247 123	53 673	186 868	240 541	61 718	194 252	255 970
Tulang Bawang	71 151	150 079	221 230	75 333	145 974	221 307	66 147	151 513	217 660	69 554	157 643	227 197
Pesawaran	51 241	170 451	221 692	49 727	163 634	213 361	57 026	175 316	232 342	66 305	180 053	246 358
Pringsewu	65 381	131 813	197 194	70 811	125 659	196 470	67 154	149 879	217 033	78 211	142 870	221 081
Mesuji	24 451	77 216	101 667	25 086	75 787	100 873	23 217	80 760	103 977	33 238	87 221	120 459
Tulang Bawang Barat	28 047	115 698	143 745	29 023	117 454	146 477	19 112	123 410	142 522	31 172	119 293	150 465
Pesisir Barat	13 655	62 874	76 529	15 972	66 100	82 072	12 718	66 068	78 786	14 991	69 497	84 488
Kota/Municipality												
Bandar Lampung	281 282	224 201	505 483	294 737	215 774	510 511	306 011	216 155	522 166	343 778	219 259	563 037
Metro	40 038	45 892	85 730	40 173	44 385	84 558	44 520	44 119	88 639	44 883	42 746	87 629
Jumlah/Total	1 187 296	3 092 813	4 280 109	1 229 124	3 055 196	4 284 320	1 249 961	3 138 005	4 387 966	1 378 019	3 319 639	4 697 658

Nilai Tukar Petani per subsektor di Lampung Tahun 2020 – 2023

Bulan	2023						2022						2021						2020					
	NTP Menurut Subsektor		NTP Menurut Subsektor		NTP Menurut Subsektor		NTP Menurut Subsektor		NTP Menurut Subsektor		NTP Menurut Subsektor		NTP Menurut Subsektor		NTP Menurut Subsektor		NTP Menurut Subsektor		NTP Menurut Subsektor		NTP Menurut Subsektor		NTP Menurut Subsektor	
	Perikanan Budidaya	Perikanan Tangkap	Peternakan	Perkebunan Rakyat	Hortikultura	Tanaman Pangan	Perikanan Budidaya	Perikanan Tangkap	Peternakan	Perkebunan Rakyat	Hortikultura	Tanaman Pangan	Perikanan Budidaya	Perikanan Tangkap	Peternakan	Perkebunan Rakyat	Hortikultura	Tanaman Pangan	Perikanan Budidaya	Perikanan Tangkap	Peternakan	Perkebunan Rakyat	Hortikultura	Tanaman Pangan
Januari	96,39	107,28	98,86	111	107,67	97,33	100,41	108,94	104,71	122,21	95,89	95,67	100,56	103,28	99,62	100,4	100,95	91,62	101,17	101,71	100,14	95,74	98,99	98,9
Februari	96,22	108,54	97,97	111,55	105,38	98,12	100,91	109,86	104,05	123,18	98,66	97,31	100,54	102,93	98,54	103,56	99,77	91,47	101,28	101,6	99,58	94,55	97,2	97,82
Maret	98,01	108,93	98,51	113,41	103,99	97,98	101,61	108,9	104,36	123,96	99,33	97,4	100,62	104,51	98,88	106,61	99,03	89,61	99,19	101,01	99,02	93,25	96,51	93,93
April	96,73	110,57	98,71	115,07	102,93	96,7	100,96	109,69	104,61	123,46	98,82	95,97	101,51	104,58	100,96	109,49	97,12	88,71	98,05	99,99	96,67	89,58	94,91	94,48
Mai	96,54	111,23	99,73	116,97	104,23	98,47	99,72	110,6	104,07	117,37	101,93	94,2	102,07	105,5	102,51	110,07	94,79	90,83	100,26	99,99	98,29	86,47	94,14	93,37
Juni	98,24	110,74	101,74	121,72	110,44	99,81	99,39	109,83	105,07	116,18	116,25	92,75	101,46	104,78	102,84	111,06	94,45	92,08	100,89	100,32	99,19	87,04	96,26	93,06
Juli	98	110,7	101,25	124,15	110,5	100,07	98,82	108,97	103,53	110,07	125,79	92,33	100,99	105,24	104,55	111,6	96,67	93,09	99,82	101,67	101,8	96,18	96,18	93,28
Agustus	99,27	111,43	100,51	123,62	112,66	102,78	99,12	110,05	102,83	112,63	116,06	93,39	101,53	106,96	103,82	114,62	98,7	93,25	99,31	101,49	100,59	92,1	93,19	94,12
September	99,3	112,71	99,3	124,87	114,79	107,42	99	105,76	101,48	108,47	115,17	93,79	101,68	106,47	104,99	115,87	93,05	93,65	101,15	101,34	100,12	96,42	94,82	94,3
Oktober	99,54	112,53	98,95	125,37	117,19	109,08	99,68	107,2	101,07	109,05	108,72	94,31	101,4	107,28	104,21	118,19	94,36	94,19	100,21	102,33	99,88	96,62	96,3	91,64
November	98,95	111,51	98,36	126,63	128,65	108,86	100,73	105,88	100,3	109,35	104,06	94,19	101,27	107,59	103,9	119,16	95,57	94,89	101,01	102,33	99,88	98,93	96,99	91,69
Desember	99,77	111,17	98,27	129,44	134,62	109,60	98,33	105,77	100,08	110,27	108,7	94,92	101,18	109,56	104,6	121,76	100,17	94,23	101,44	102,96	100,3	99,79	99,6	92,55

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian per subsektor di Lampung Tahun 2020 – 2023

Bulan	2023						2022						2021						2020									
	NTPU Menurut Subsektor		NTPU Menurut Subsektor		NTPU Menurut Subsektor		NTPU Menurut Subsektor		NTPU Menurut Subsektor		NTPU Menurut Subsektor		NTPU Menurut Subsektor		NTPU Menurut Subsektor		NTPU Menurut Subsektor		NTPU Menurut Subsektor		NTPU Menurut Subsektor		NTPU Menurut Subsektor					
	Tanaman Pangan	Hortikultura	Tanaman Perikanan Budidaya	Peternakan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya	Tanaman Pangan	Hortikultura	Tanaman Perikanan Budidaya	Peternakan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya	Tanaman Pangan	Hortikultura	Tanaman Perikanan Budidaya	Peternakan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya	Tanaman Pangan	Hortikultura	Tanaman Perikanan Budidaya	Peternakan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya	NTPU			
Januari	98,42	110,93	99,58	99,01	107,97	98,88	103,42	96,94	98,50	122,27	105,04	110,23	103,14	107,72	93,24	103,84	100,75	104,47	102,69	98,06	99,70	101,69	99,88	100,88	103,75	102,66	98,54	
Februari	99,07	108,98	100,38	99,97	108,77	98,85	103,62	98,30	101,70	124,44	104,85	110,44	104,62	102,29	93,30	101,77	107,61	99,77	105,75	99,48	97,24	98,83	93,45	100,42	101,14	101,41	98,52	
Maret	99,24	110,84	101,84	101,84	109,84	99,84	104,84	98,84	101,84	123,84	105,84	111,84	106,84	103,84	93,84	102,84	109,84	100,84	107,84	99,84	97,84	98,84	93,84	100,84	101,84	102,84	98,84	
April	99,97	107,97	118,10	105,24	113,66	99,31	100,60	95,65	109,49	118,13	105,88	112,87	103,84	107,07	93,63	97,61	110,86	103,72	108,93	104,97	102,77	94,31	98,87	86,85	98,88	99,87	101,88	92,31
Mai	100,45	114,75	113,20	102,87	111,37	99,35	101,47																					

Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Lampung, Regional Sumatera, dan Indonesia Tahun 2020 – 2023

Periode	Ach		Bangku		Indonesia		Lambi		Kep. Bangka		Kepulauan Riau		Lampung		Raw		Sumatera		Sumatera		Sumatera		
	Nilai Tukar	Nilai Tukar	Nilai Tukar	Nilai Tukar	Nilai Tukar	Nilai Tukar	Nilai Tukar	Nilai Tukar	Nilai Tukar	Nilai Tukar	Nilai Tukar	Nilai Tukar	Nilai Tukar	Nilai Tukar	Nilai Tukar	Nilai Tukar	Nilai Tukar	Nilai Tukar	Nilai Tukar	Nilai Tukar	Nilai Tukar	Nilai Tukar	
2020	97,48	98,74	94,29	114,08	101,56	107,31	107,60	103,94	103,56	99,19	108,77	99,49	101,35	94,73	99,49	118,77	98,10	118,77	100,36	95,37	99,52	105,82	
Q1	96,55	99,69	91,25	113,72	101,69	103,20	106,91	107,46	106,82	104,92	103,06	101,08	101,45	96,72	98,73	118,53	97,12	118,53	101,07	97,21	99,35	111,60	
Feb	95,28	101,09	91,89	116,71	102,11	104,16	107,25	110,47	108,19	105,92	103,59	101,38	101,71	97,92	99,85	123,03	96,79	123,03	101,02	100,64	100,90	111,69	
Mar	94,42	99,02	90,23	113,76	101,60	103,35	106,71	107,07	106,43	106,79	102,39	102,27	101,60	96,63	98,52	117,90	96,79	117,90	99,95	98,89	98,80	111,71	
Apr	97,74	98,78	91,63	110,68	101,37	102,09	106,74	104,85	105,67	103,05	103,21	100,59	101,05	95,40	97,81	113,76	97,61	113,76	101,35	94,13	98,26	109,41	
Mei	95,19	98,28	93,10	108,18	100,28	99,89	105,67	100,62	101,41	97,75	99,97	97,98	97,99	92,11	99,25	112,35	96,10	112,35	99,16	89,92	97,03	105,35	
Jun	95,77	98,32	93,67	109,97	99,96	101,34	105,73	102,16	102,23	100,23	100,59	99,28	99,99	93,00	98,75	115,64	96,28	115,64	99,60	91,21	96,34	106,41	
Jul	94,90	97,24	91,78	106,72	100,15	99,47	105,66	98,55	102,93	96,92	99,25	97,60	99,75	91,51	99,75	111,74	95,06	111,74	98,83	88,56	96,47	104,50	
Ag	94,91	99,07	92,85	107,84	100,72	99,60	105,61	101,15	104,21	96,11	100,10	97,05	100,32	91,83	99,25	109,66	96,95	109,66	99,04	89,99	99,28	105,13	
Sep	97,92	98,44	94,61	114,39	101,62	100,80	107,25	106,91	106,54	102,31	103,76	97,72	101,50	94,29	99,67	117,13	98,58	117,13	100,38	94,13	100,59	108,60	
Ok	96,23	97,85	93,10	110,94	101,40	100,09	106,49	103,57	106,84	102,03	96,86	101,67	98,43	115,57	98,70	113,57	100,60	113,57	100,60	91,72	99,99	106,84	
Nov	97,36	98,60	94,71	114,57	101,58	100,69	107,83	106,89	106,99	102,53	103,87	97,94	101,49	94,26	99,48	116,88	97,88	116,88	99,72	94,17	100,60	108,33	
Dek	99,35	98,88	90,21	115,65	101,58	101,66	107,68	110,28	106,66	106,46	105,28	98,25	101,24	95,63	100,09	120,94	99,15	120,94	100,83	95,49	101,19	120,44	
2021	100,26	98,55	98,21	120,03	102,66	102,79	109,40	115,42	105,49	110,79	107,45	100,00	102,63	95,78	100,31	127,09	100,59	127,09	100,81	100,21	101,09	113,74	
Q1	99,89	98,52	96,96	118,11	101,97	102,25	108,75	112,68	104,75	108,08	105,57	98,89	100,61	94,74	100,35	127,09	100,17	127,09	99,71	98,40	100,86	112,01	
Feb	99,85	99,12	96,07	119,86	102,28	102,86	109,53	115,75	104,57	110,84	107,72	99,86	100,23	95,80	100,27	127,52	100,83	127,52	100,19	100,41	100,89	114,00	
Mar	101,25	98,01	99,99	121,21	103,62	103,25	110,11	117,83	107,16	114,46	109,07	101,35	102,86	96,75	100,21	130,34	100,78	130,34	100,33	101,83	101,61	115,21	
Apr	105,27	101,19	100,89	132,56	106,56	104,63	113,65	126,88	111,24	125,65	109,51	104,37	105,72	101,22	103,90	138,68	100,90	138,68	100,67	107,78	106,18	119,05	
Mei	101,75	99,09	100,90	126,13	104,72	103,22	111,80	119,93	109,04	118,46	109,29	102,60	103,57	97,05	101,23	134,53	101,07	134,53	100,44	103,74	102,34	103,98	
Jun	103,34	99,03	100,69	124,91	104,62	103,26	111,87	119,23	109,28	116,21	111,60	102,77	103,28	96,56	100,60	132,52	102,59	132,52	102,87	103,41	102,28	114,96	
Jul	102,89	98,76	100,86	124,71	104,95	103,10	111,53	118,38	108,56	117,28	108,77	102,23	103,53	96,75	101,17	133,04	101,16	133,04	100,89	102,03	104,92	114,69	
Ag	102,02	99,47	100,15	128,78	104,99	101,29	112,01	122,17	109,87	121,89	108,10	100,79	104,51	97,85	102,11	137,64	99,67	137,64	100,80	100,99	104,24	117,05	
Sep	103,74	99,76	99,42	129,29	106,30	103,30	114,20	123,49	110,36	123,18	107,88	103,67	104,95	99,79	103,46	134,98	99,65	134,98	100,63	104,85	105,91	105,78	
Ok	104,89	99,25	100,26	129,42	105,63	102,93	113,02	122,30	108,25	124,50	107,67	103,33	104,58	98,68	102,83	134,54	99,90	134,54	100,67	105,36	107,53	117,53	
Nov	104,89	99,25	100,26	129,42	105,63	102,93	113,02	122,30	108,25	124,50	107,67	103,33	104,58	98,68	102,83	134,54	99,90	134,54	100,67	105,36	107,53	117,53	
Dek	105,04	102,19	99,91	130,63	106,81	103,39	114,66	124,10	110,43	123,80	107,87	103,57	105,20	99,88	103,74	135,13	99,24	135,13	100,58	105,50	106,03	118,18	
2022	105,04	102,19	99,91	130,63	106,81	103,39	114,66	124,10	110,43	123,80	107,87	103,57	105,20	99,88	103,74	135,13	99,24	135,13	100,58	105,50	106,03	118,18	
Q1	105,04	102,19	99,91	130,63	106,81	103,39	114,66	124,10	110,43	123,80	107,87	103,57	105,20	99,88	103,74	135,13	99,24	135,13	100,58	105,50	106,03	118,18	
Feb	105,04	102,19	99,91	130,63	106,81	103,39	114,66	124,10	110,43	123,80	107,87	103,57	105,20	99,88	103,74	135,13	99,24	135,13	100,58	105,50	106,03	118,18	
Mar	105,04	102,19	99,91	130,63	106,81	103,39	114,66	124,10	110,43	123,80	107,87	103,57	105,20	99,88	103,74	135,13	99,24	135,13	100,58	105,50	106,03	118,18	
Apr	105,04	102,19	99,91	130,63	106,81	103,39	114,66	124,10	110,43	123,80	107,87	103,57	105,20	99,88	103,74	135,13	99,24	135,13	100,58	105,50	106,03	118,18	
Mei	105,04	102,19	99,91	130,63	106,81	103,39	114,66	124,10	110,43	123,80	107,87	103,57	105,20	99,88	103,74	135,13	99,24	135,13	100,58	105,50	106,03	118,18	
Jun	105,04	102,19	99,91	130,63	106,81	103,39	114,66	124,10	110,43	123,80	107,87	103,57	105,20	99,88	103,74	135,13	99,24	135,13	100,58	105,50	106,03	118,18	
Jul	105,04	102,19	99,91	130,63	106,81	103,39	114,66	124,10	110,43	123,80	107,87	103,57	105,20	99,88	103,74	135,13	99,24	135,13	100,58	105,50	106,03	118,18	
Ag	105,04	102,19	99,91	130,63	106,81	103,39	114,66	124,10	110,43	123,80	107,87	103,57	105,20	99,88	103,74	135,13	99,24	135,13	100,58	105,50	106,03	118,18	
Sep	105,04	102,19	99,91	130,63	106,81	103,39	114,66	124,10	110,43	123,80	107,87	103,57	105,20	99,88	103,74	135,13	99,24	135,13	100,58	105,50	106,03	118,18	
Ok	105,04	102,19	99,91	130,63	106,81	103,39	114,66	124,10	110,43	123,80	107,87	103,57	105,20	99,88	103,74	135,13	99,24	135,13	100,58	105,50	106,03	118,18	
Nov	105,04	102,19	99,91	130,63	106,81	103,39	114,66	124,10	110,43	123,80	107,87	103,57	105,20	99,88	103,74	135,13	99,24	135,13	100,58	105,50	106,03	118,18	
Dek	105,04	102,19	99,91	130,63	106,81	103,39	114,66	124,10	110,43	123,80	107,87	103,57	105,20	99,88	103,74	135,13	99,24	135,13	100,58	105,50	106,03	118,18	
2023	111,46	107,45	106,00	134,14	106,47	107,34	112,26	135,14	112,36	126,09	111,55	106,81	107,77	104,34	104,53	144,28	100,10	144,28	100,10	109,89	107,80	109,15	121,78
Q1	111,46	107,45	106,00	134,14	106,47	107,34	112,26	135,14	112,36	126,09	111,55	106,81	107,77	104,34	104,53	144,28	100,10	144,28	100,10	109,89	107,80	109,15	121,78
Feb	111,46	107,45	106,00	134,14	106,47	107,34	112,26	135,14	112,36	126,09	111,55	106,81	107,77	104,34	104,53	144,28	100,10	144,28	100,10	109,89	107,80	109,15	121,78
Mar	111,46	107,45	106,00	134,14	106,47	107,34	112,26	135,14	112,36	126,09	111,55	106,81	107,77	104,34	104,53	144,28	100,10	144,28	100,10	109,89	107,80	109,15</	

LAMPIRAN ANALISIS FISKAL REGIONAL

Kontribusi Penerimaan Pajak Dalam Negeri per Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Tahun 2023

Pemda	Kontribusi 23	Kontribusi 22	Growth (yoy)
Kota Bandar Lampung	48,69%	50,44%	11,72%
Kab. Lampung Selatan	17,19%	15,84%	25,60%
Kab. Lampung Tengah	7,27%	7,05%	19,45%
Kota Metro	4,33%	4,37%	14,47%
Kab. Tulang Bawang	4,30%	4,56%	9,29%
Kab. Way Kanan	3,12%	2,42%	49,49%
Kab. Lampung Utara	2,78%	3,18%	1,35%
Kab. Tanggamus	2,65%	2,72%	12,55%
Kab. Lampung Timur	1,98%	2,00%	14,66%
Kab. Tulang Bawang Barat	1,86%	1,78%	21,42%
Kab. Lampung Barat	1,58%	1,63%	12,11%
Kab. Pringsewu	1,29%	1,21%	22,74%
Kab. Mesuji	1,27%	1,19%	22,80%
Kab. Pesawaran	1,15%	1,08%	22,32%
Kab. Pesisir Barat	0,53%	0,53%	16,05%

Tren Pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) per Jenis Belanja

Periode	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial
2021	3.742,08	3.150,10	3.259,54	26,27
2022	3.754,41	3.264,86	1.771,01	32,11
2023	3.782,84	4.901,78	1.511,22	38,18
growth 2022	0,33%	3,64%	-45,67%	22,24%
growth 2023	0,76%	50,14%	-14,67%	18,87%

Perkembangan BPP Per Kapita s.d. Desember 2023 (rupiah)

Keterangan	2020	2021	2022	2023
BPP s.d. Desember	9.110,53	10.177,99	8.822,40	10.234,02
BPP Per Kapita	1.078.458	1.129.903	971.438	1.115.237
Jumlah Penduduk (T-1)	844.774	900.785	908.179	917.655

Perkembangan Kontribusi BPP Terhadap PDRB 2021-2023 (miliar rupiah)

Keterangan	2021	2022	2023
Belanja Pegawai	3742,08	3754,41	3782,84
Belanja Barang	3150,10	3264,86	4901,78
Belanja Modal	3259,54	1771,01	1511,22
Belanja Bansos	26,27	32,11	38,18
Total BPP	10.177,99	8.822,40	10.234,02
PDRB	371.199	414.131	448.880
Kontribusi BPP	2,74%	2,13%	2,28%

Pagu Realisasi dan Pertumbuhan Realisasi Penyaluran TKD per Kabupaten/Kota Lampung Tahun 2023

Wilayah	Pagu	Realisasi	%
Lampung	3.233,82	3.203,07	99,05%
Kab. Lampung Tengah	2.283,49	2.269,11	99,37%
Kab. Lampung Timur	1.876,78	1.866,66	99,46%
Kab. Lampung Selatan	1.801,63	1.791,72	99,45%
Kota Bandar Lampung	1.503,47	1.497,74	99,62%
Kab. Lampung Utara	1.456,85	1.440,44	98,87%
Kab. Tanggamus	1.442,20	1.434,25	99,45%
Kab. Way Kanan	1.192,53	1.190,63	99,84%
Kab. Tulang Bawang	1.095,49	1.091,69	99,65%
Kab. Pesawaran	1.066,15	1.062,66	99,67%
Kab. Pringsewu	985,07	983,67	99,86%
Kab. Lampung Barat	861,91	860,62	99,85%
Kab. Tulang Bawang Barat	758,85	753,72	99,32%
Kab. Mesuji	716,44	713,84	99,64%
Kab. Pesisir Barat	684,75	684,12	99,91%
Kota Metro	630,00	626,52	99,45%

Perkembangan Data Keuangan BLUD Lingkup Provinsi Lampung

No	NAMA BLUD	Data Keuangan (Miliar Rupiah)								
		2021			2022			2023		
		Pendapatan BLUD (PNBP)	Belanja	Rasio Kemandirian	Pendapatan BLUD (PNBP)	Belanja	Rasio Kemandirian	Pendapatan BLUD (PNBP)	Belanja	Rasio Kemandirian
1	RSUD A. Yani	211,27	165,24	127,85%	173,63	200,41	86,64%	210,99	206,25	102,30%
2	RSUD Dr H. Bob Bazar, Skm	83,13	65,72	126,49%	81,60	100,03	81,58%	92,71	83,40	111,16%
3	RSUD Sukadana	32,85	30,37	108,16%	64,26	65,22	98,53%	30,19	54,93	54,96%
4	RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo	29,33	60,08	48,82%	38,05	64,40	59,08%	26,38	87,04	30,31%
5	RSUD Alimuddin Umar	31,77	50,01	63,52%	30,97	56,60	54,71%	24,32	43,73	55,61%
6	RSUD Zainal Abidin Pagaralam Way Kanan	17,44	18,67	93,39%	18,60	27,36	67,98%	19,57	22,77	85,93%
7	RSUD Mayjend Hm Ryacudu	31,37	16,76	187,14%	22,98	22,77	100,93%	8,93	8,81	101,31%
8	Puskesmas Kedaton	3,59	3,58	100,44%	3,83	3,87	99,01%	4,76	3,95	120,45%
9	Puskesmas Panjang	2,87	3,23	89,01%	3,10	3,43	90,42%	4,43	3,33	132,97%
10	Puskesmas Satelit	3,18	3,20	99,40%	3,31	3,28	100,76%	4,29	3,38	126,99%
11	Puskesmas Sukaraja	3,51	3,51	100,03%	3,25	3,20	101,27%	3,90	3,47	112,50%
12	Puskesmas Sidomulyo	3,39	3,52	96,41%	3,00	3,00	100,03%	3,83	3,79	101,18%
13	Puskesmas Kemiling	3,11	3,25	95,94%	3,17	3,42	92,66%	3,77	3,45	109,16%
14	Puskesmas Karang Anyar	3,37	3,44	98,11%	3,38	3,42	99,00%	3,67	3,66	100,47%
15	Puskesmas Way Kandis	2,77	2,77	100,07%	2,87	2,80	102,62%	3,29	3,07	107,13%
16	Puskesmas Rajabasa Indah	2,29	2,41	94,85%	2,40	2,35	102,49%	3,24	2,63	123,22%
17	Puskesmas Tanjung Bintang	3,10	3,25	95,13%	3,11	3,20	97,28%	3,23	3,23	99,99%
18	Puskesmas Gedong Air	2,44	2,65	92,04%	2,56	2,67	96,05%	3,20	2,74	116,75%
19	Puskesmas Negara Ratu	1,53	1,53	99,93%	1,86	1,31	142,28%	2,92	2,18	133,97%
20	Puskesmas Kota Karang	2,37	2,37	100,12%	2,39	2,38	100,53%	2,90	2,47	117,04%
21	Puskesmas Candipuro	2,19	2,13	103,15%	2,28	2,17	104,83%	2,89	2,89	100,16%
22	Puskesmas Sukabumi	2,21	2,33	94,73%	2,15	2,18	98,33%	2,76	2,27	121,72%
23	Puskesmas Kota Bumi II	1,59	2,05	77,53%	2,00	2,00	100,04%	2,72	2,67	101,85%
24	Puskesmas Kota Bumi I	1,08	1,18	91,20%	2,11	1,14	184,35%	2,70	1,73	156,43%
25	Puskesmas Ketapang	2,04	2,04	99,96%	2,19	2,18	100,40%	2,63	2,60	101,14%
26	Puskesmas Kalianda	2,10	2,10	99,94%	2,18	2,17	100,33%	2,59	2,53	102,57%
27	Puskesmas Liwa				1,31	1,31	100,00%	2,57	2,52	101,89%
28	Puskesmas Way Urang	2,27	2,26	100,29%	2,19	2,19	99,71%	2,56	2,53	101,12%
29	Puskesmas Sukamaju	1,83	1,83	99,86%	1,89	1,91	98,96%	2,55	2,25	113,00%
30	Puskesmas Way Halim	2,20	2,29	96,01%	2,24	2,23	100,56%	2,55	2,25	113,38%
31	Puskesmas Fajar Bulan				0,84	0,84	100,01%	2,52	2,37	106,11%

Data Keuangan (Miliar Rupiah)										
No	NAMA BLUD	2021			2022			2023		
		Pendapatan BLUD (PNBP)	Belanja	Rasio Kemandirian	Pendapatan BLUD (PNBP)	Belanja	Rasio Kemandirian	Pendapatan BLUD (PNBP)	Belanja	Rasio Kemandirian
32	Puskesmas Natar	2,44	2,92	83,64%	2,32	2,34	99,13%	2,49	2,46	101,12%
33	Puskesmas Tanjung Sari Natar	1,56	1,56	99,94%	1,75	1,75	100,07%	2,45	2,24	109,53%
34	Puskesmas Buay Nyerupa				0,98	0,96	101,12%	2,43	2,15	113,11%
35	Puskesmas Simpur	2,04	2,09	97,42%	1,99	2,01	99,25%	2,43	2,22	109,13%
36	Puskesmas Penengahan	1,90	1,91	99,82%	1,95	1,95	99,99%	2,40	2,34	102,51%
37	Puskesmas Banjit	1,98	2,10	94,31%	1,81	1,85	97,91%	2,40	2,41	99,56%
38	Puskesmas Way Jepara	2,09	1,81	115,12%	1,92	1,71	112,24%	2,39	2,37	100,71%
39	Puskesmas Baradatu	2,14	2,34	91,29%	1,90	1,90	100,11%	2,39	2,39	99,99%
40	Puskesmas Sumberjaya				0,76	0,76	100,26%	2,36	2,31	101,96%
41	Puskesmas Pasar Ambon	1,96	2,08	94,49%	1,91	1,88	101,65%	2,33	1,94	120,05%
42	Puskesmas Katibung	1,96	2,08	94,29%	1,88	1,90	99,00%	2,32	2,21	105,00%
43	Puskesmas Kebun Tebu				0,79	0,79	100,48%	2,30	2,27	101,02%
44	Puskesmas Sekincau				0,77	0,76	101,28%	2,29	2,18	104,87%
45	Puskesmas Gading Rejo							2,28	2,27	100,45%
46	Puskesmas Kampung Sawah	1,90	2,04	93,12%	1,78	1,78	99,89%	2,25	1,97	114,51%
47	Puskesmas Sukadana	1,98	2,15	91,99%	1,82	2,01	90,94%	2,24	2,25	99,73%
48	Puskesmas Pringsewu	1,78	1,86	95,55%	1,89	1,88	100,55%	2,21	2,01	109,94%
49	Puskesmas Tanjung Raja	1,36	1,48	92,13%	1,56	1,28	121,32%	2,19	1,91	114,60%
50	Puskesmas Pasir Sakti	1,74	1,89	91,91%	1,68	1,84	91,08%	2,18	2,20	98,97%
51	Puskesmas Sragi	1,60	1,66	96,45%	1,62	1,64	99,03%	2,15	2,10	102,29%
52	Puskesmas Bakung	1,85	2,05	90,22%	1,86	1,85	100,22%	2,13	1,87	114,33%
53	Puskesmas Bandar Negeri Suoh				0,90	0,90	100,29%	2,12	2,12	100,01%
54	Puskesmas Purbolinggo	1,61	1,61	100,06%	1,70	1,89	89,96%	2,11	2,11	99,95%
55	Puskesmas Sukarame	1,75	1,82	96,23%	1,65	1,69	97,63%	2,10	1,79	116,92%
56	Puskesmas Srimulyo				0,76	0,79	96,55%	2,08	2,08	100,12%
57	Puskesmas Kupang Kota	1,92	1,95	98,45%	1,75	1,77	98,97%	2,05	1,83	112,01%
58	Puskesmas Sumur Batu	1,89	1,98	95,60%	1,73	1,70	102,15%	2,05	1,77	115,66%
59	Puskesmas Palas	1,83	1,83	99,61%	1,67	1,70	98,08%	2,04	2,00	102,42%
60	Puskesmas Semuli Raya	0,94	0,99	95,31%	1,03	0,86	119,62%	2,04	1,78	114,70%
61	Puskesmas Kenali				0,77	0,77	100,01%	2,03	2,03	100,12%
62	Puskesmas Gedung Surian				0,58	0,58	99,77%	2,01	2,00	100,82%
63	Puskesmas Sumber Rejo	1,79	1,90	94,51%	1,65	1,86	88,72%	2,00	2,15	93,14%
64	Puskesmas Batu Brak				0,73	0,78	92,82%	1,99	1,97	101,12%
65	Puskesmas Sukoharjo							1,98	1,83	107,73%

Data Keuangan (Miliar Rupiah)										
No	NAMA BLUD	2021			2022			2023		
		Pendapatan BLUD (PNBP)	Belanja	Rasio Kemandirian	Pendapatan BLUD (PNBP)	Belanja	Rasio Kemandirian	Pendapatan BLUD (PNBP)	Belanja	Rasio Kemandirian
66	Puskesmas Segala Mider	1,67	1,89	88,17%	1,57	1,54	101,35%	1,97	1,63	120,89%
67	Puskesmas Pugung Raharjo	1,27	1,67	75,64%	1,28	1,49	85,60%	1,95	1,83	106,32%
68	Puskesmas Labuhan Ratu	1,48	1,54	96,16%	1,54	1,60	96,25%	1,94	1,69	114,21%
69	Puskesmas Madukoro	1,02	1,02	99,68%	1,31	1,18	110,63%	1,93	1,79	108,07%
70	Puskesmas Bukit Kemuning	1,26	1,51	83,38%	1,20	1,11	108,03%	1,92	1,83	105,00%
71	Puskesmas Pagar Dewa				0,50	0,50	99,99%	1,91	1,91	100,08%
72	Puskesmas Kalibalangan	1,03	1,26	81,25%	1,45	1,14	126,63%	1,89	1,49	127,35%
73	Puskesmas Batu Ketulis				0,57	0,57	100,04%	1,84	1,84	100,03%
74	Puskesmas Tanjung Sari	1,35	1,40	96,11%	1,33	1,31	101,39%	1,76	1,65	106,89%
75	Puskesmas Sekampung	1,32	1,51	87,40%	1,15	1,19	97,00%	1,76	1,61	109,35%
76	Puskesmas Sukadamai	1,48	1,44	102,54%	1,46	1,47	99,12%	1,74	1,74	99,94%
77	Puskesmas Pekalongan	1,52	1,64	92,97%	1,40	1,63	85,45%	1,73	1,70	101,96%
78	Puskesmas Kasui	1,62	1,83	88,57%	1,38	1,37	100,63%	1,72	1,70	101,38%
79	Puskesmas Air Hitam				0,29	0,29	98,48%	1,72	1,71	100,33%
80	Puskesmas Batanghari	1,33	1,52	86,99%	1,41	1,44	97,72%	1,66	1,67	99,41%
81	Puskesmas Merbau Mataram	1,48	1,59	92,89%	1,53	1,53	100,11%	1,66	1,65	101,10%
82	Puskesmas Rajabasa Lama	1,20	1,40	86,04%	1,12	1,24	90,10%	1,66	1,67	99,60%
83	Puskesmas Permata Sukarame	1,12	1,14	98,14%	1,27	1,26	101,07%	1,64	1,35	121,34%
84	Puskesmas Ambarawa							1,61	1,60	100,91%
85	Puskesmas Pardasuka							1,59	1,49	107,22%
86	Puskesmas Tulang Bawang Baru				0,88	0,79	112,39%	1,59	1,32	120,81%
87	Puskesmas Branti Raya	1,47	1,47	99,97%	1,49	1,49	100,03%	1,57	1,57	100,06%
88	Puskesmas Gunung Labuhan	1,69	1,57	107,90%	1,47	1,61	91,50%	1,56	1,93	80,80%
89	Puskesmas Lombok Seminung				0,34	0,34	98,66%	1,55	1,54	100,96%
90	Puskesmas Pagelaran	1,22	1,21	101,24%	1,26	1,28	98,52%	1,53	1,46	104,69%
91	Puskesmas Yosomulyo	1,09	1,14	95,26%	1,24	1,22	101,33%	1,52	1,54	98,88%
92	Puskesmas Bumidaya	1,16	1,11	104,91%	1,10	1,17	93,42%	1,51	1,52	99,12%
93	Puskesmas Bakauheni	1,20	1,15	104,84%	1,29	1,35	95,50%	1,50	1,40	107,31%
94	Puskesmas Banjar Agung	1,21	1,21	100,06%	1,32	1,29	102,04%	1,50	1,50	99,63%
95	Puskesmas Sukaraja Nuban	1,35	1,39	97,10%	1,29	1,37	94,30%	1,47	1,53	96,21%
96	Puskesmas Blambangan Umpu	1,35	1,38	97,92%	1,19	1,19	99,98%	1,47	1,42	103,79%
97	Puskesmas Palapa	1,48	1,67	88,99%	1,31	1,28	102,31%	1,46	1,31	111,57%
98	Puskesmas Ketapang	0,71	0,74	95,54%	0,90	0,82	108,56%	1,45	1,34	107,81%

No	NAMA BLUD	Data Keuangan (Miliar Rupiah)								
		2021			2022			2023		
		Pendapatan BLUD (PNBP)	Belanja	Rasio Kemandirian	Pendapatan BLUD (PNBP)	Belanja	Rasio Kemandirian	Pendapatan BLUD (PNBP)	Belanja	Rasio Kemandirian
99	Puskesmas Wates	1,14	1,22	93,05%	1,30	1,30	100,12%	1,44	1,44	99,80%
100	Puskesmas Talang Jawa	0,97	1,04	92,63%	1,13	1,10	102,95%	1,43	1,37	104,63%
101	Puskesmas Kebon Jahe	1,50	1,48	101,54%	1,37	1,39	98,70%	1,42	1,37	104,14%
102	Puskesmas Bumi Agung	1,09	1,17	93,21%	1,06	0,97	108,73%	1,41	1,32	106,52%
103	Puskesmas Metro	0,96	0,91	105,23%	1,13	1,08	104,44%	1,41	1,44	97,84%
104	RSUD Sumbersari Bantul	0,08	0,07	103,13%	1,00	0,72	138,64%	1,40	1,42	98,40%
105	Puskesmas Way Laga	1,04	1,06	98,73%	1,00	1,03	97,00%	1,39	1,17	118,60%
106	Puskesmas Rejosari						1,36	1,31	103,84%	
107	Puskesmas Way Halim li	0,70	0,71	98,71%	0,93	1,04	89,41%	1,35	1,02	132,85%
108	Puskesmas Rajabasa	1,03	1,04	98,93%	1,05	1,06	98,41%	1,34	1,31	102,04%
109	Puskesmas Tata Karya	0,68	0,78	87,10%	0,77	0,68	112,71%	1,34	1,15	116,39%
110	Puskesmas Ogan Lima	0,78	0,82	95,95%	0,95	0,69	137,32%	1,33	0,99	134,93%
111	Puskesmas Tanjung Agung	1,46	1,45	100,24%	1,26	1,27	99,43%	1,32	1,32	100,03%
112	Puskesmas Campang Raya	0,93	0,97	96,57%	1,04	1,01	102,93%	1,32	1,12	118,14%
113	Puskesmas Beringin Raya	1,05	1,09	95,60%	1,00	0,98	102,42%	1,29	1,08	119,00%
114	Puskesmas Hajimena	0,98	1,01	97,23%	0,95	0,95	100,00%	1,28	1,25	102,53%
115	Puskesmas Sidorejo	1,07	1,22	87,27%	1,00	1,15	87,30%	1,28	1,18	108,16%
116	Puskesmas Braja Harjosari	0,93	1,01	91,75%	0,91	0,95	95,94%	1,26	1,22	102,74%
117	Puskesmas Wana	1,30	1,14	114,93%	1,17	1,17	100,22%	1,23	1,23	100,15%
118	Puskesmas Iring Mulyo	0,88	0,85	103,57%	0,99	0,99	99,40%	1,23	1,23	99,74%
119	Puskesmas Way Sulan	1,13	1,13	100,01%	1,09	1,09	100,59%	1,21	1,20	100,98%
120	Puskesmas Rebang Tangkas	0,99	1,05	94,06%	0,98	1,27	77,02%	1,18	1,18	99,87%
121	Puskesmas Batu Nangkop	0,62	0,59	105,37%	0,78	0,48	160,32%	1,17	0,78	150,32%
122	Puskesmas Tambah Subur	0,75	0,76	98,41%	0,79	0,79	99,32%	1,14	1,13	100,80%
123	Puskesmas Banyumas	0,76	0,80	95,66%	0,79	0,80	99,34%	1,13	0,95	118,75%
124	Puskesmas Raman Utara	0,86	0,81	106,21%	0,74	0,79	94,32%	1,13	1,14	99,55%
125	Puskesmas Way Tuba	0,81	0,94	86,24%	0,83	1,00	82,57%	1,11	1,07	104,25%
126	Puskesmas Negeri Baru	0,81	0,83	96,87%	0,89	1,07	83,02%	1,08	1,15	94,20%
127	Puskesmas Susunan Baru	0,92	0,97	94,88%	0,87	0,84	102,54%	1,08	0,93	115,51%
128	Puskesmas Banjarsari	0,73	0,83	87,57%	0,84	0,83	100,96%	1,06	1,01	105,27%
129	Puskesmas Peniangan	0,87	0,96	90,20%	0,88	0,95	91,87%	1,03	1,14	90,30%
130	Puskesmas Korpri	0,94	0,64	146,75%	0,82	1,11	73,97%	1,03	0,93	110,57%
131	Puskesmas Tanjung Harapan	0,77	0,75	101,57%	0,76	0,93	81,39%	1,02	1,03	99,48%
132	Puskesmas Kubu Hitu	0,34	0,39	88,39%	0,79	0,32	250,07%	1,02	0,52	196,41%

No	NAMA BLUD	Data Keuangan (Miliar Rupiah)								
		2021			2022			2023		
		Pendapatan BLUD (PNBP)	Belanja	Rasio Kemandirian	Pendapatan BLUD (PNBP)	Belanja	Rasio Kemandirian	Pendapatan BLUD (PNBP)	Belanja	Rasio Kemandirian
133	Puskesmas Pinang Jaya	0,87	0,92	94,74%	0,85	0,79	107,68%	1,02	0,88	115,77%
134	Puskesmas Adirejo	0,63	0,64	98,12%	0,65	0,63	103,37%	0,94	0,92	102,90%
135	Puskesmas Bumi Ratu	0,78	0,80	97,65%	0,85	0,86	99,31%	0,92	0,87	106,53%
136	Puskesmas Fajar Mulya							0,91	0,90	101,31%
137	Puskesmas Blambangan	0,50	0,54	91,90%	0,66	0,55	120,83%	0,91	0,73	124,21%
138	Puskesmas Adiluwih	0,58	0,59	98,38%	0,60	0,60	99,25%	0,91	0,76	119,31%
139	Puskesmas Sukabumi	0,65	0,62	104,45%	0,54	0,61	87,73%	0,90	0,91	98,58%
140	Puskesmas Ganjar Agung	0,60	0,58	104,31%	0,72	0,72	100,12%	0,89	0,88	100,71%
141	Puskesmas Negeri Agung	0,78	0,85	91,44%	0,71	0,81	87,62%	0,86	0,85	102,08%
142	Puskesmas Serupa Indah	0,66	0,73	90,35%	0,61	0,81	74,89%	0,86	0,86	100,15%
143	Puskesmas Margorejo	0,67	0,68	97,80%	0,79	0,79	99,99%	0,86	0,86	100,00%
144	Puskesmas Ulak Rengas	0,62	0,74	83,45%	0,61	0,58	103,94%	0,85	0,79	107,42%
145	Puskesmas Pakuan Ratu	0,81	0,82	98,63%	0,75	0,75	99,73%	0,84	0,85	99,21%
146	Puskesmas Subik	0,43	0,45	96,49%	0,54	0,42	128,11%	0,84	0,66	127,64%
147	Puskesmas Pisang Baru	0,62	0,66	94,17%	0,58	0,59	98,75%	0,84	0,84	99,26%
148	Puskesmas Purwa Agung	0,83	0,86	96,61%	0,67	0,75	88,94%	0,81	0,91	89,64%
149	Puskesmas Way Panji	0,62	0,63	99,41%	0,61	0,61	100,42%	0,81	0,81	100,39%
150	Puskesmas Ganti Warno	0,58	0,62	92,70%	0,59	0,65	90,18%	0,80	0,76	106,30%
151	Puskesmas Rawat Inap Negeri Besar	0,57	0,57	101,07%	0,54	0,54	99,37%	0,77	0,77	101,16%
152	Puskesmas Kota Bumi Udik	0,65	0,79	82,31%	0,66	0,65	101,27%	0,74	0,74	101,09%
153	Puskesmas Kemalo Abung	0,49	0,57	84,99%	0,52	0,52	100,01%	0,74	0,71	104,98%
154	Puskesmas Cempaka	0,49	0,49	98,83%	0,49	0,47	102,32%	0,74	0,68	108,02%
155	Puskesmas Gedung Negara	0,51	0,57	89,37%	0,49	0,48	101,42%	0,72	0,70	103,16%
156	Puskesmas Pekurun	0,39	0,44	88,59%	0,38	0,33	114,34%	0,71	0,62	115,36%
157	Puskesmas Yosodadi	0,45	0,46	98,41%	0,49	0,51	96,13%	0,69	0,69	100,33%
158	Puskesmas Tejoagung	0,39	0,41	95,69%	0,52	0,52	100,00%	0,69	0,69	100,02%
159	Puskesmas Kaliasin				0,09	0,05	177,62%	0,68	0,67	101,76%
160	Puskesmas Wonogiri	0,57	0,57	99,91%	0,44	0,43	101,36%	0,66	0,65	102,27%
161	Puskesmas Purwosari	0,33	0,33	101,29%	0,46	0,43	105,80%	0,65	0,69	94,68%
162	Puskesmas Gisting Jaya	0,59	0,58	101,37%	0,42	0,56	74,34%	0,65	0,67	97,04%
163	Puskesmas Mulyojati	0,39	0,40	95,97%	0,49	0,49	99,98%	0,64	0,64	100,00%
164	Puskesmas Karang Sari	0,49	0,56	86,22%	0,47	0,46	101,15%	0,62	0,59	105,20%
165	Puskesmas Karangrejo	0,42	0,41	104,01%	0,47	0,51	93,78%	0,60	0,60	99,99%
166	Puskesmas Braja Caka	0,40	0,44	90,51%	0,38	0,48	80,09%	0,58	0,59	98,34%

No	NAMA BLUD	Data Keuangan (Miliar Rupiah)								
		2021			2022			2023		
		Pendapatan BLUD (PNBP)	Belanja	Rasio Kemandirian	Pendapatan BLUD (PNBP)	Belanja	Rasio Kemandirian	Pendapatan BLUD (PNBP)	Belanja	Rasio Kemandirian
167	Puskesmas Mulyo Rejo	0,38	0,44	86,67%	0,41	0,40	100,40%	0,56	0,53	105,37%
168	Puskesmas Mesir Ilir	0,42	0,40	105,25%	0,41	0,42	96,46%	0,54	0,48	112,62%
169	Puskesmas Bumi Agung Runyai	0,40	0,40	100,45%	0,33	0,33	100,88%	0,52	0,53	97,87%
170	Puskesmas Bumi Baru	0,48	0,48	99,92%	0,43	0,51	84,65%	0,49	0,53	92,63%
171	Puskesmas Tanjung Rejo							0,49	0,49	99,19%
172	Puskesmas Bandung Baru							0,46	0,42	109,01%
173	Puskesmas Abung Kunang	0,26	0,28	90,50%	0,28	0,25	112,92%	0,46	0,38	121,24%
174	BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	0,02	0,01	279,20%	0,03	0,03	104,83%	0,01	0,02	65,02%

Perkembangan Data Aset BLUD Regional Lampung Tahun 2021-2023

No	NAMA BLUD	Total Aset (Miliar Rupiah)			Growth 2022-2023
		2021	2022	2023	
1	RSUD Dr H. Bob Bazar, Skm	160,64	191,15	189,21	-1,01%
2	RSUD Pringsewu	116,65	182,80	189,06	3,42%
3	RSUD A. Yani	236,08	180,76	177,88	-1,59%
4	RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo	122,61	114,72	151,98	32,48%
5	RSUD Zainal Abidin Pagaralam Way Kanan	123,61	113,51	113,60	0,07%
6	RSUD Sukadana	74,00	78,75	62,34	-20,83%
7	RSUD Alimuddin Umar	60,79	48,36	44,85	-7,26%
8	Puskesmas Liwa	0,00	21,93	22,17	1,11%
9	Puskesmas Pagar Dewa	0,00	19,17	19,22	0,30%
10	RSUD Sumbersari Bantul	16,11	17,39	19,12	9,97%
11	Puskesmas Srimulyo	0,00	17,85	17,91	0,33%
12	Puskesmas Batu Ketulis	0,00	17,79	17,88	0,50%
13	Puskesmas Fajar Bulan	0,00	17,02	17,16	0,79%
14	Puskesmas Bandar Negeri Suoh	0,00	16,66	16,85	1,16%
15	Puskesmas Sumberjaya	0,00	16,03	16,11	0,52%
16	Puskesmas Buay Nyerupa	0,00	15,21	15,32	0,72%
17	Puskesmas Candipuro	13,69	14,07	14,65	4,08%
18	Puskesmas Kenali	0,00	13,96	14,23	1,95%
19	Puskesmas Kebun Tebu	0,00	13,84	14,01	1,20%
20	Puskesmas Air Hitam	0,00	13,90	13,93	0,28%
21	Puskesmas Rajabasa	12,25	12,69	13,92	9,66%
22	Puskesmas Batu Brak	0,00	13,43	13,67	1,81%

No	NAMA BLUD	Total Aset (Miliar Rupiah)			Growth 2022- 2023
		2021	2022	2023	
23	Puskesmas Sekincau	0,00	12,72	13,41	5,47%
24	Puskesmas Lombok Seminung	0,00	12,78	12,97	1,47%
25	Puskesmas Gedung Surian	0,00	12,76	12,82	0,54%
26	Puskesmas Karang Anyar	10,64	11,59	11,74	1,33%
27	Puskesmas Sukoharjo	7,26	8,05	9,83	22,02%
28	Puskesmas Penengahan	8,08	9,17	9,35	1,99%
29	Puskesmas Way Jepara	6,72	8,11	9,05	11,57%
30	Puskesmas Sumber Rejo	9,10	8,38	9,02	7,68%
31	Puskesmas Wates	8,20	8,70	8,95	2,87%
32	Puskesmas Gading Rejo	7,82	8,98	8,87	-1,28%
33	Puskesmas Tanjung Bintang	6,66	8,37	8,75	4,55%
34	Puskesmas Way Halim li	8,02	7,93	8,39	5,86%
35	Puskesmas Sragi	7,64	8,10	8,35	3,16%
36	Puskesmas Purbolinggo	4,94	5,51	8,08	46,70%
37	Puskesmas Tanjung Sari	7,29	7,39	7,84	6,09%
38	Puskesmas Yosomulyo	6,36	7,63	7,68	0,63%
39	Puskesmas Bakauheni	7,59	8,00	7,68	-4,03%
40	Puskesmas Fajar Mulya	5,00	7,41	7,59	2,37%
41	Puskesmas Bumi Ratu	6,51	7,45	7,55	1,34%
42	Puskesmas Merbau Mataram	6,75	7,20	7,31	1,51%
43	Puskesmas Tanjung Sari Natar	6,75	6,92	7,11	2,66%
44	Puskesmas Pardasuka	6,19	6,88	6,98	1,49%
45	Puskesmas Metro	7,94	7,29	6,90	-5,41%
46	Puskesmas Ambarawa	5,73	6,71	6,86	2,26%
47	Puskesmas Margorejo	5,62	5,83	6,81	16,89%
48	Puskesmas Way Urang	5,73	5,96	6,76	13,34%
49	Puskesmas Banjarsari	7,18	6,43	6,73	4,54%
50	Puskesmas Baradatu	5,58	6,28	6,66	6,00%
51	Puskesmas Satelit	5,49	5,73	6,61	15,31%
52	Puskesmas Kalianda	5,90	6,23	6,46	3,62%
53	Puskesmas Tejoagung	6,43	6,20	6,31	1,85%
54	Puskesmas Rejosari	4,56	6,33	6,27	-0,81%
55	Puskesmas Kampung Sawah	2,00	2,02	6,04	198,61%
56	Puskesmas Sukaraja Nuban	5,23	4,98	6,04	21,11%
57	Puskesmas Bandung Baru	5,13	5,80	5,95	2,54%
58	Puskesmas Pringsewu	5,39	5,85	5,91	1,09%
59	Puskesmas Batanghari	3,21	3,33	5,89	76,59%
60	Puskesmas Pagelaran	4,56	5,67	5,75	1,52%

No	NAMA BLUD	Total Aset (Miliar Rupiah)			Growth 2022- 2023
		2021	2022	2023	
61	Puskesmas Pasir Sakti	2,97	5,26	5,69	8,25%
62	Puskesmas Kemiling	5,23	5,03	5,53	9,79%
63	Puskesmas Talang Jawa	4,70	5,04	5,46	8,36%
64	Puskesmas Panjang	4,45	4,22	5,30	25,60%
65	Puskesmas Purwosari	5,41	6,18	5,28	-14,64%
66	Puskesmas Sekampung	3,74	3,90	5,20	33,61%
67	Puskesmas Bumidaya	4,55	4,99	5,20	4,16%
68	Puskesmas Ganjar Agung	7,20	6,63	5,15	-22,30%
69	Puskesmas Sukaraja	4,75	4,61	5,15	11,67%
70	Puskesmas Way Sulan	4,73	4,82	5,14	6,62%
71	Puskesmas Branti Raya	0,42	5,08	5,13	0,94%
72	Puskesmas Pugung Raharjo	2,98	4,52	5,13	13,34%
73	Puskesmas Ketapang	4,25	4,91	5,12	4,42%
74	Puskesmas Kedaton	4,18	4,21	5,07	20,47%
75	Puskesmas Palas	4,37	4,49	5,03	12,17%
76	Puskesmas Way Kandis	4,83	4,76	4,98	4,61%
77	Puskesmas Rajabasa Indah	4,11	4,25	4,95	16,27%
78	Puskesmas Katibung	4,34	4,78	4,92	2,82%
79	Puskesmas Karangrejo	4,60	4,57	4,90	7,13%
80	Puskesmas Sidomulyo	4,25	4,66	4,89	4,96%
81	Puskesmas Banyumas	3,24	4,79	4,86	1,45%
82	Puskesmas Sidorejo	3,94	3,87	4,61	19,03%
83	Puskesmas Sukadana	3,12	3,30	4,60	39,32%
84	Puskesmas Tanjung Agung	4,11	4,31	4,49	4,32%
85	Puskesmas Adiluwih	4,08	4,52	4,45	-1,55%
86	Puskesmas Natar	4,16	4,42	4,44	0,57%
87	Puskesmas Gedong Air	4,16	4,06	4,38	7,94%
88	Puskesmas Mulyojati	2,43	3,67	4,33	17,93%
89	Puskesmas Sukadamai	3,26	3,67	4,20	14,32%
90	Puskesmas Kaliasin	3,79	3,89	4,08	4,89%
91	Puskesmas Hajimena	3,64	3,88	3,95	1,90%
92	Puskesmas Iring Mulyo	4,25	3,89	3,95	1,48%
93	Puskesmas Rawat Inap Negeri Besar	1,54	3,66	3,91	6,69%
94	Puskesmas Way Halim	3,47	3,49	3,87	10,65%
95	Puskesmas Mesir Ilir	0,80	3,56	3,76	5,52%
96	Puskesmas Purwa Agung	3,66	3,72	3,73	0,16%
97	Puskesmas Sukamaju	3,16	3,10	3,59	15,86%

No	NAMA BLUD	Total Aset (Miliar Rupiah)			Growth 2022- 2023
		2021	2022	2023	
98	Puskesmas Banjit	3,38	3,40	3,48	2,25%
99	Puskesmas Yosodadi	3,57	3,36	3,38	0,59%
100	Puskesmas Rebang Tangkas	3,00	3,10	3,38	8,98%
101	Puskesmas Blambangan Umpu	3,10	3,27	3,35	2,20%
102	Puskesmas Way Laga	2,80	2,77	3,29	18,58%
103	Puskesmas Simpur	3,04	3,00	3,20	6,53%
104	Puskesmas Pekalongan	2,66	2,42	3,13	29,26%
105	Puskesmas Serupa Indah	2,75	2,94	3,11	5,98%
106	Puskesmas Gunung Labuhan	3,44	3,30	3,10	-5,98%
107	Puskesmas Braja Harjosari	2,25	2,31	3,07	32,59%
108	Puskesmas Sukabumi	2,51	2,44	3,06	25,19%
109	Puskesmas Permata Sukarame	2,73	2,69	3,02	11,98%
110	Puskesmas Gisting Jaya	3,07	2,88	3,00	4,00%
111	Puskesmas Segala Mider	2,46	2,46	2,92	19,09%
112	Puskesmas Banjar Agung	2,55	2,73	2,92	6,73%
113	Puskesmas Susunan Baru	2,68	2,67	2,92	9,17%
114	Puskesmas Rajabasa Lama	2,87	2,79	2,91	4,09%
115	Puskesmas Bakung	2,75	2,71	2,89	6,40%
116	Puskesmas Sukabumi	2,52	2,88	2,83	-1,73%
117	Puskesmas Peniangan	3,79	3,52	2,78	-21,15%
118	Puskesmas Raman Utara	2,55	2,40	2,74	13,78%
119	Puskesmas Way Panji	2,33	2,67	2,69	0,79%
120	Puskesmas Kota Karang	2,25	2,25	2,62	16,26%
121	Puskesmas Kupang Kota	2,24	2,30	2,52	9,73%
122	Puskesmas Tambah Subur	1,66	1,44	2,45	69,97%
123	Puskesmas Way Tuba	2,20	2,05	2,43	18,72%
124	Puskesmas Sumur Batu	1,85	1,98	2,39	20,96%
125	Puskesmas Tanjung Harapan	2,07	1,91	2,37	23,90%
126	Puskesmas Adirejo	1,32	1,46	2,26	54,74%
127	Puskesmas Beringin Raya	1,81	1,91	2,25	17,74%
128	Puskesmas Wana	1,95	1,45	2,17	49,89%
129	Puskesmas Korpri	2,07	1,79	2,11	18,41%
130	Puskesmas Kasui	1,32	1,55	2,08	33,80%
131	Puskesmas Labuhan Ratu	1,44	1,56	2,06	31,89%
132	Puskesmas Pasar Ambon	1,49	1,46	1,95	33,28%
133	Puskesmas Negeri Agung	1,55	1,64	1,85	13,04%
134	Puskesmas Pinang Jaya	1,46	1,59	1,80	12,73%

No	NAMA BLUD	Total Aset (Miliar Rupiah)			Growth 2022- 2023
		2021	2022	2023	
135	Puskesmas Tanjung Rejo	1,72	1,68	1,78	6,14%
136	Puskesmas Negeri Baru	1,50	1,54	1,77	14,39%
137	Puskesmas Pisang Baru	0,85	1,63	1,68	2,90%
138	Puskesmas Kebon Jahe	1,44	1,51	1,57	3,68%
139	Puskesmas Pakuan Ratu	1,33	1,45	1,51	3,77%
140	Puskesmas Bumi Agung Runyai	1,20	1,40	1,45	3,87%
141	Puskesmas Sukarame	0,96	0,96	1,39	43,80%
142	Puskesmas Campang Raya	0,91	0,95	1,31	37,81%
143	Puskesmas Ganti Warno	1,12	1,18	1,23	4,33%
144	Puskesmas Palapa	1,03	1,06	1,22	14,37%
145	Puskesmas Bumi Baru	0,45	0,49	0,75	53,24%
146	BLUD Perkuatan Permodalan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	0,43	0,45	0,45	0,75%

LAMPIRAN BAB ANALISIS TEMATIK

Perkembangan PMDN di Regional Lampung pada 2020 s.d. 2023 (Rp juta dan jumlah proyek)

Tahun	Jumlah Proyek PMDN	Nilai PMDN (Rp Miliar)	Total
2020	1.271	7.120,51	8391,5091
2021	1.137	10.513,23	11650,2318
2022	1.320	5.809,23	7129,2308
2023	2.297	5.242,40	7539,3961
Total	6025	28.685,37	34710,3678

Perkembangan PMA di Regional Lampung pada 2020 s.d. 2023 (USD juta dan jumlah proyek)

Tahun	Nilai PMA (US\$ Juta)	Jumlah Proyek PMA	Total
2020	498,41	384,00	882,41
2021	174,80	154,00	327,79
2022	248,83	215,00	462,83
2023	179,78	340,00	519,78
Total	1099	1.093,00	2192,82

Indeks Kemahalan Konstruksi Per Klaster Pemda di Regional Lampung

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi Lampung	89,31	88,84	88,67	92,57	90,46	88,65

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota	84,28	83,36	83,17	89,24	88,09	87,05
Kabupaten	90,38	89,97	89,73	93,33	90,94	88,96

Perkembangan Realisasi PMDN Per Pemda lingkup Provinsi Lampung (Rp Miliar)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
Kab. Pringsewu	5,17	24,69	5,05	22,05
Kab. Pesisir Barat	14,33	0,81	24,11	89,81
Kota Metro	59,95	8,70	86,14	207,71
Kab. Lampung Timur	10,00	174,87	12,93	359,28
Kab. Way Kanan	194,89	7,80	254,93	106,67
Kab. Lampung Utara	49,56	130,06	174,70	246,73
Kab. Pesawaran	100,32	133,25	298,59	119,02
Kab. Lampung Barat	272,81	74,21	257,31	97,01
Kab. Tulang Bawang Barat	260,81	526,36	89,66	173,54
Kab. Tulang Bawang	302,59	353,26	381,84	216,65
Kab. Lampung Tengah	655,11	759,12	992,51	1.498,20
Kota Bandar Lampung	288,11	1.269,85	1.529,34	839,88
Kab. Lampung Selatan	1.078,92	861,37	1.267,54	798,92
Kab. Tanggamus	0,75	4.942,46	9,87	207,64
Kab. Mesuji	3.827,20	1.246,43	424,68	259,29
Total	7.120,51	10.513,23	5.809,23	5.242,40

Top 5 Sektor Investasi PMDN Lampung Tahun 2020 s.d. 2023 (dalam Rp Juta)

Top 5 Sektor Investasi PMDN terbesar Akumulasi Tahun 2020 s.d. 2023	2020		2021		2022		2023		Total Jumlah Proyek	Total Realisasi Investasi (Rp Juta)
	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Rp Juta)	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Rp Juta)	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Rp Juta)	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Rp Juta)		
Listrik, Gas dan Air	47,00	108.471,70	18,00	5.031.466,30	18,00	301.384,00	49,00	250.521,20	132,00	5.691.843,20
Konstruksi	60,00	1.905.907,10	165,00	2.592.952,20	188,00	470.533,70	273,00	99.203,00	686,00	5.068.596,00
Industri Makanan	148,00	204.499,20	83,00	465.626,10	113,00	1.592.406,50	175,00	2.433.064,50	519,00	4.695.596,30
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	31,00	3.238.969,60	51,00	154.140,10	53,00	470.136,20	117,00	164.534,90	252,00	4.027.780,80
Perdagangan dan Reparasi	523,00	534.358,60	444,00	475.346,00	596,00	638.403,30	1.063,00	864.985,00	2.626,00	2.513.092,90

Perkembangan Realisasi PMA Per Pemda lingkup Provinsi Lampung (USD Juta)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
Kab. Lampung Barat	-	-	-	-
Kab. Pringsewu	18,90	1,20	8,10	48,90
Kab. Pesisir Barat	-	16,30	51,30	102,20
Kab. Tulang Bawang Barat	-	-	438,30	352,30
Kota Metro	574,10	50,70	170,10	24,10
Kab. Lampung Utara	49,20	3,90	1.743,50	91,00
Kab. Tulang Bawang	259,30	260,30	1.850,80	3.184,50
Kab. Pesawaran	3.968,90	293,20	1.414,40	631,20
Kab. Lampung Timur	4.094,00	2.756,50	2.828,50	4.407,20
Kab. Tanggamus	18.461,40	91,00	1.901,70	6.528,70
Kab. Mesuji	842,50	602,00	1.562,30	35.664,70
Kab. Way Kanan	13.952,50	9.850,10	10.591,20	9.255,20
Kab. Lampung Selatan	39.243,00	54.780,20	37.620,30	26.725,50
Kota Bandar Lampung	24.566,70	75.696,20	174.944,10	64.560,40
Kab. Lampung Tengah	392.380,50	29.395,40	12.701,50	28.207,70
Total	498.411,00	173.797,00	247.826,10	179.783,60

Top 5 Sektor Investasi PMA Lampung Tahun 2020 s.d. 2023

Top 5 Sektor Investasi PMA terbesar Akumulasi Tahun 2020 s.d. 2023	2020		2021		2022		2023		Total Jumlah Proyek	Total Realisasi Investasi (Rp Juta)
	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Rp Juta)	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Rp Juta)	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Rp Juta)	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Rp Juta)		
Industri Makanan	113,00	114.155,10	47,00	78.492,30	69,00	134.807,30	81,00	91.884,40	310,00	419.339,10
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	43,00	322.484,10	21,00	17.999,60	18,00	11.885,20	31,00	45.541,90	113,00	397.910,80
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	15,00	-	7,00	18.527,30	10,00	50.403,50	22,00	16.644,90	54,00	85.575,70
Pertambangan	8,00	16.175,30	5,00	53.331,90	2,00	958,60	6,00	5.824,00	21,00	76.289,80
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	15,00	15.183,70	3,00	84,90	4,00	28.298,10	4,00	901,70	26,00	44.468,40



Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Jalan Cut Mutia Nomor 23A, Gulak Galik, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Lampung - 35214

Telepon : (0721) 471308 / (0721) 487423

Website : <https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/lampung/id/>

Email : kanwildjpb.lampung@kemenkeu.go.id

